PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2024

H. Rahmad Mas'ud, S.E.,M.E
Wali Kota Balikpapan

Dr. Ir. H.Bagus Susetyo, M.M.,
Wakil Wali Kota Balikpapan

KATA PENGANTAR

بِسْمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ

Alhamdullillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Balikpapan tahun 2024 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 4 (empat) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah, (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (4) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan LPPD Kota Balikpapan Tahun 2024 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2024. Dengan demikian penyajiannya secara maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Balikpapan dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Semoga Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

"Balikpapan Kota Beriman (Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)
Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela (Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Doa)"

Balikpapan, 17 Maret 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN

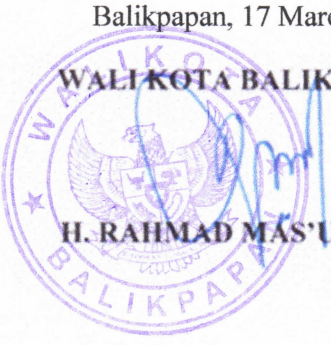

H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E

DAFTAR ISI

JUDUL .....

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.1.1 PENJELASAN UMUM 1

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

B. Data Geografis Wilayah 2

C. Informasi Umum Data Kependudukan 8

D. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan 10

E. Rincian Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Daerah 11

F. Rincian ASN berdasarkan Urusan Pemrintahan, Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah 20

G. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 23

H. Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemrintahan, Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja 36

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 73

A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 74

B. Visi Dan Misi Kepala Daerah 77

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah .....

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 128

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 162

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 163

2.1 Capaian Kinerja Makro 163

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 163

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil 163

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.186
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....188
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....397

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....398
4.1 Urusan Pendidikan.....398
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....398
4.1.2 Target Pencapaian SPM.....398
4.1.3 Realisasi.....399
4.1.4 Alokasi Anggaran.....400
4.1.5 Dukungan Personil.....404
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....405
4.2 Urusan Kesehatan.....406
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....406
4.2.2 Target Pencapaian SPM.....406
4.2.3 Realisasi.....407
4.2.4 Alokasi Anggaran.....419
4.2.5 Dukungan Personil.....420
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....421
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....422
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....422
4.3.2 Target Pencapaian SPM.....422
4.3.3 Realisasi.....422
4.3.4 Alokasi Anggaran.....424
4.3.5 Dukungan Personil.....426
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....427
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....428
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....428
4.4.2 Target Pencapaian SPM.....428
4.4.3 Realisasi.....428
4.4.4 Alokasi Anggaran.....430
4.4.5 Dukungan Personil.....433
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....434
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....435
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....435

4.5.2 Target Pencapaian SPM 435
4.5.3 Realisasi 436
4.5.4 Alokasi Anggaran 439
4.5.5 Dukungan Personil 443
4.5.6 Permasalahan dan Solusi 444
4.6 Urusan Sosial 444
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 445
4.6.2 Target Pencapaian SPM 445
4.6.3 Realisasi 445
4.6.4 Alokasi Anggaran 450
4.6.5 Dukungan Personil 452
4.6.6 Permasalahan dan Solusi 452

BAB V PENUTUP 453

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan 3
Tabel 1.2 Daerah Aliran Sungai (Das) Kota Balikpapan 7
Tabel 1.3 Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian). 8
Tabel 1.4 Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan 8
Tabel 1.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Setiap Kecamatan Tahun 2024 9
Tabel 1.6 Kecamatan Dan Kelurahan 10
Tabel 1.7 Rincian Perangkat Daerah,Unit Kerja Perangkat Daerah serta dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah 11
Tabel 1.8 Rincian ASN Tahun 2024 21
Tabel 1.9 Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2024 24
Tabel 1.10 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 25
Tabel 1.11 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024 27
Tabel 1.12 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 28
Tabel 1.13 Rincian Belanja Daerah Tahun 2024 30
Tabel 1.14 Rincian Belanja Operasi Tahun 2024 32
Tabel 1.15 Rincian Belanja Modal Tahun 2024 33
Tabel 1.16 Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2024 35
Tabel 1.17 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan, Fumgsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja 36
Tabel 1.18 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 88
Tabel 1.19 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 89
Tabel 1.20 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 91
Tabel 1.21 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 92
Tabel 1.22 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 92
Tabel 1.23 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 93
Tabel 1.24 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan

Stakeholders Lain 95
Tabel 1.25 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 96
Tabel 1.26 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 98
Tabel 1.27 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 99
Tabel 1.28 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 100
Tabel 1.29 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 102
Tabel 1.30 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 104
Tabel 1.31 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 104
Tabel 1.32 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 105
Tabel 1.33 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 107
Tabel 1.34 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 107
Tabel 1.35 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 108
Tabel 1.36 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain 109
Tabel 1.37 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 110
Tabel 1.38 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2024 115
Tabel 1.39 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2024 116
Tabel 1.40 Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kota Balikpapan 128
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2024 163
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 163
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 185
Tabel 2.4 Predikat Capaian Kinerja 189
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2024 190
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 191
Tabel 2.7 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP 138
Tabel 2.8 Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan 277
Tabel 2.9 Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya 279
Tabel 2.10 Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2021-2024 305
Tabel 2.11 Target Realisasi Investasi Seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur

Tahun 2024 311
Tabel 2.12 Peringkat Realisasi Investasi Seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Tahun 2024 Berdasarkan Status modal PMA dan PMDN 312
Tabel 2.13 Jumlah Program per IKU Sasaran Strategis Kota Balikpapan Tahun 2024 yang Mendukung 333
Tabel 2.14 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 336
Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024 366
Tabel 2.16 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 367
Tabel 2.17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja 370
Tabel 2.18 Prestasi Dan Dan Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kota Balikpapantahun 2024 374
Tabel 2.1 9 Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan 379
Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan **398**
Tabel 4.2 Realisasi Pelaksanaan SPM urusan Pendidikan Tahun 2024 399
Tabel 4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan **400**
Tabel 4.4 Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan **400**
Tabel 4.5 Personil SPM Urusan Pendidikan **404**
Tabel 4.6 Permasalahand dan Solusi **405**
Tabel 4.7 Target Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan 406
Tabel 4.8 Realisasi SPM Bidang urusan Kesehatan 407
Tabel 4.9 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan 419
Tabel 4.10 Rincian Relasiasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan 419
Tabel 4.11 Dukungan Personil SPM Urusan Kesehatan 421
Tabel 4.12 Permasalahan dan Solusi 421
Tabel 4.13 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum 422
Tabel 4.14 Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum 422
Tabel 4.15 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum 424
Tabel 4.16 Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Pekerjaan Umum 425
Tabel 4.17 Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum 426
Tabel 4.18 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum 427
Tabel 4.19 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat 428
Tabel 4.20 Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat 428
Tabel 4.21 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat 430

Tabel 4.22 Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....430
Tabel 4.23 Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat 433
Tabel 4.24 Permasalahan dan Solusi SPM Perumahan Rakyat 434
Tabel 4.25 Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....435
Tabel 4.26 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan.....436
Tabel 4.27 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....439
Tabel 4.28 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....439
Tabel 4.29 Dukungan Personil Bidang Sub Urusan Trantibum.....443
Tabel 4.30 Dukungan Personil BPBD.....444
Tabel 4.31 Permasalahan dan Solusi.....444
Tabel 4.32 Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....445
Tabel 4.33 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial.....445
Tabel 4.34 Alokasi Anggaran SOM Urusan Sosial 450
Tabel 4.35 Rincian Anggaran dan Rralisasi SPM urusan Sosial 450
Tabel 4.36 Dukungan Personil SPM Urusan Sosial 451
Tabel 4.37 Permasalahan dan Solusi.....452

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis,dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2 Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

b. Data Geografis Wilayah

1. Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5º Bujur Timur dan 117,0º Bujur Timur serta diantara 1,0º Lintang Selatan dan 1,5º Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kota Balikpapan wilayah utara—tenggara memiliki wilayah administratif yang luas di tiap kecamatan atau kelurahannya. Hal ini disebabkan banyak hutan lindung, termasuk hutan lindung Sungai Wain yang berada di kawasan Kota Balikpapan bagian utara. Gambaran jelas Kota Balikpapan dapat dilihat pada Peta di bawah ini:

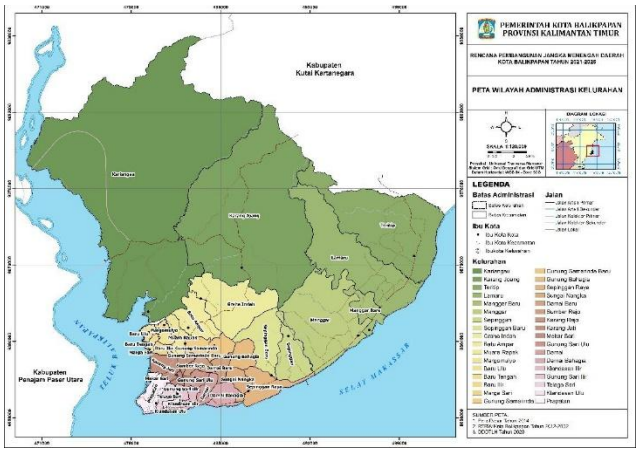

Gambar 1.1 Peta Peta Administrasi Kota Balikpapan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		**51.101,24**

Sumber: Rencana Detail Tata RuangKota Balikpapan Tahun 2021-2041.

2. Iklim

2.1 Curah Hujan Kota Balikpapan

Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah.

Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.

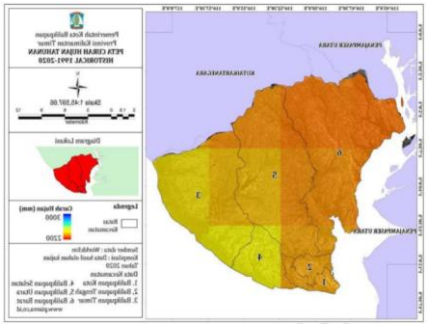

Gambar 1.2 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

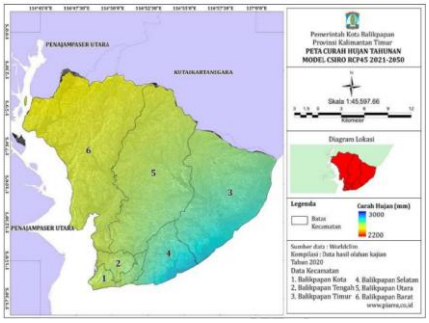

Gambar 1.3 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP452021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

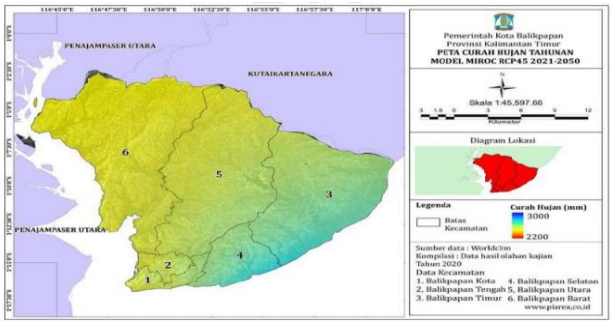

Gambar 1.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750–450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya.

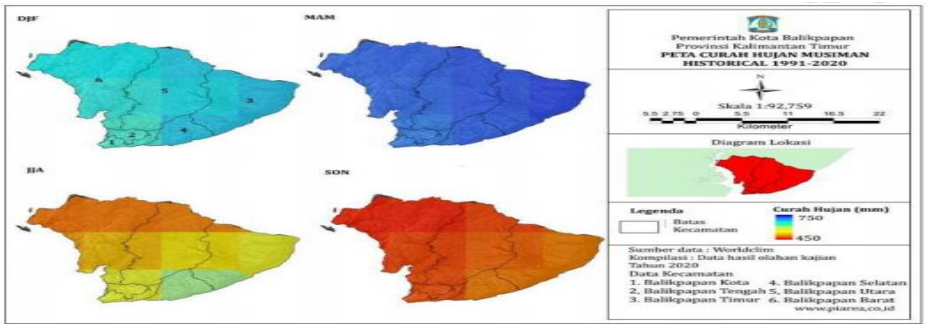

Gambar 1.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

2.2. Suhu Kota Balikpapan

Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah.

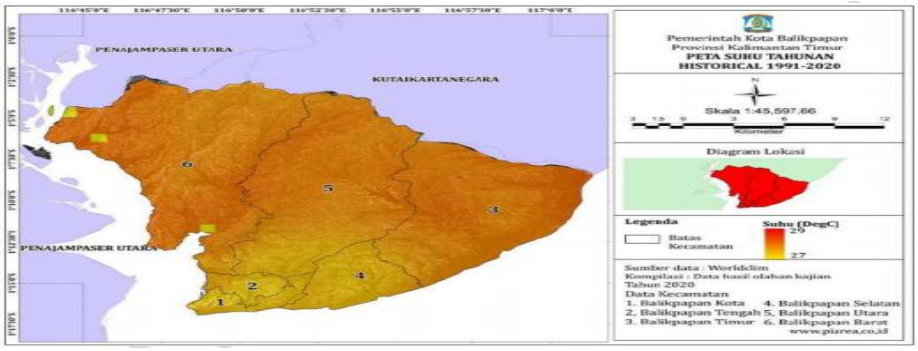

Gambar 1.6 Peta Suhu Kota Balikpapan TahunanHistorikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

3. Hidrologi

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota. Adanya keterbatasan penyediaan air bersih PDAM meyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut dibawah ini DAS di Kota Balikpapan sebagai berikut.

Tabel 1.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Grand Total	No.	Nama DAS	Grand Total
1	Gunungdubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32
12	Keminting	2171.84	28	Sepinggan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Sepinggan Kecil	494.57

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2024

4. Topografi

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Tabel 1.3

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian).

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,66
2.	>10-20	18.030,67	35,28
3.	>20-100	26.090,57	51,06
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2023

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 1.4 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 1.4

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6.51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38
Jumlah		51.101,24	100

Sumber:DPPR Kota Balikpapan, 2024

c. Informasi Umum data Kependudukan

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2024 sebanyak 757.418 jiwa. Dari jumlah tersebut, 387.112 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 370.306 lainnya berjenis kelamin perempuan. Keseluruhan penduduk tersebar tidak merata di enam kecamatan dengan persebaran tertinggi di Balikpapan Utara, yakni mencapai 195.158 jiwa, sebaliknya, Balikpapan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling

sedikit yakni sebanyak 85.946 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. 5
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin pada setiap Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	L	P	
Balikpapan Tengah	54.062	52.220	106.282
Balikpapan Kota	43.756	42.190	85.946
Balikpapan Timur	55.123	51.845	106.968
Balikpapan Utara	99.509	95.649	195.158
Balikpapan Selatan	83.188	80.472	163.660
Balikpapan Barat	51.474	47.930	99.404

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2025, diolah.

Jumlah penduduk Kota Balikpapan meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang sebesar 710.293 jiwa, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 727.665 jiwa, dan pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 738.532 jiwa dan pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 754.418 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebesar 2,45 persen , tahun 2023 sebesar 1,49 persen dan tahun 2024 sebesar 2,56%.dataa numlah pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan sebagi berikut:

Gambar 1.7 Data Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan

d. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan

Secara administrativ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiridari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Pada tahun 2012 terdapat pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah, Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, sehingga kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan berubah menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tigapuluh empat) Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kecamatan Dan Kelurahan kota Balikpapan

NO	KELURAHAN
Kecamatan Balikpapan Selatan	
1	Damai Baru
2	Damai Bahagia
3	Sepinggan Baru
4	Sungai Nangka
5	Sepinggan Raya
6	Gunung Bahagia
7	Sepinggan
Kecamatan Balikpapan Kota	
1	Prapatan
2	Telaga Sari
3	Klandasan Ulu
4	Klandasan Ilir
5	Damai
Kecamatan Balikpapan Timur	
1	Manggar
2	Manggar Baru
3	Lamaru
4	Teritip
Kecamatan Balikpapan Tengah	
1	Gunung Sari Ilir
2	Gunung Sari Ulu
3	Mekar Sari
4	Karang Rejo
5	Sumber Rejo
6	Karang Jati

NO	KELURAHAN
Kecamatan Balikpapan Barat	
1	Baru Ilir
2	Margo Mulyo
3	Marga Sari
4	Baru Tengah
5	Baru Ulu
6	Kariangau
Kecamatan Balikpapan Utara	
1	Gunung Samarinda
2	Muara Rapak
3	Batu Ampar
4	Karang Joang
5	Gunung Samarinda Baru
6	Graha Indah

e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah:

Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri). Berikut jumlah Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024.

Tabel 1.7 Rincian Perangkat Daerah,Unit Kerja Perangkat Daerah serta dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
3	Inspektorat	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Satuan Pendidikan SMP	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
b.	UPTD Satuan Pendidikan SD	
c.	UPTD Satuan Pendidikan TK Pembina	
d.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Selatan	
e.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Wilayah Balikpapan Timur	
f.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Wilayah Balikpapan Tengah	
g.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Wilayah Balikpapan Utara	
h.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Wilayah Balikpapan Baru	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UOBK/ Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan
b.	UOBK Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu
c.	UPTD Puskesmas Gunungsamarinda	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
d.	UPTD Puskesmas Muara Rapak	
e.	UPTD Puskesmas Batu Ampar	
f.	UPTD Puskesmas Graha Indah	
g.	UPTD Puskesmas Karang Rejo	
h.	UPTD Puskesmas Sumber Rejo	
i.	UPTD Puskesmas Karang Jati	
j.	UPTD Puskesmas Gunungsari Ilir	
k.	UPTD Puskesmas Gunungsari Ulu	
l.	UPTD Puskesmas Gunungbahagia	
m.	UPTD Puskesmas Prapatan	
n.	UPTD Puskesmas Telaga Sari	
o.	UPTD Puskesmas Damai	
p.	UPTD Puskesmas Baru Ilir	
q.	UPTD Puskesmas Baru Tengah	
r.	UPTD Puskesmas Marga Sari	
s.	UPTD Puskesmas Margo Mulyo	
t.	UPTD Puskesmas Teritip	
u.	UPTD Puskesmas Lamaru	
v.	UPTD Puskesmas Manggar	
w.	UPTD Puskesmas Karang Joang	
x.	UPTD Puskesmas Mekar Sari	
y.	UPTD Puskesmas Klandasan Ilir	
z.	UPTD Puskesmas Sepinggan	
aa.	UPTD Puskesmas Kariangau	
bb.	UPTD Puskesmas Baru Ulu	
cc.	UPTD Puskesmas Manggar Baru	
dd.	UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
ee.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	
ff.	UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	
6	Dinas Pekerjaan Umum	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Drainase dan Bozeem	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
b.	UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan	
7	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Rumah Potong Hewan	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan
8	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Tempat Pemprosesan Akhir Sampah Manggar	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup
b.	UPTD Kebun Raya Balikpapan	
9		Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
11	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
12	Dinas Perumahan dan Permukiman	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa
13	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
14	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan
b.	UPTD Pengelolaan Parkir	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
16	Dinas Ketenagakerjaan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
17	Dinas Perdagangan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Pasar Wilayah I	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
b.	UPTD Pasar Wilayah II	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan
c.	UPTD Pasar Wilayah III	
d.	UPTD Pasar Wilayah IV	
e.	UPTD Metrologi	
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Sentra Industri Kecil	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil
20	Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
a.	UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah
24	Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a.	UPTD Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Barat	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan
b.	UPTD Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Utara	
c.	UPTD Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Tengah	
d.	UPTD Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Selatan	
e.	UPTD Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Timur	
f.	UPTD Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Kota	
29	Kecamatan Balikpapan Barat	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
30	Kecamatan Balikpapan Tengah	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
31	Kecamatan Balikpapan Kota	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
32	Kecamatan Balikpapan Utara	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
33	Kecamatan Balikpapan Selatan	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
34	Kecamatan Balikpapan Timur	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024.

f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan,Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.

Tabel 1.8 Rincian ASN Tahun 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Sekretariat Daerah		18	35	74	127
2	Inspektorat	Pengawasan, Perencanaan Dan Keunagan,	7	29	9	45
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Data Profil Anggota DPRD	5	3	18	26
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	11	124	22	157
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Urusan Kepegawaian	7	17	21	45
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ikk Komponen Otda	8		11	19
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perencanaan Dan Keuangan, Manajemen Keuangan	17	7	37	61
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	26		131	157
9	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perencanaan Dan Keuangan, Manajemen Keuangan	14	6	51	71
10	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penunjang	8	12	14	34
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	12	14	31
12	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	54	624	99	777
13	Dinas Ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	7	13	9	29
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Komuniaksi Dan Informasi, Statistik, Prsandian, Dan	6	9	7	22

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
		Transparansi Dan Partisipasi Publik				
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian	9	4	13	26
16	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	11	13	35	59
17	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pangan, Pertanian, Dan Kehutanan	10	24	21	55
18	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	13	32	56
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9	7	17	33
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Urusan Pariwisata, Dan Kepemudaan Dan Olahraga	7	6	21	34
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Penanaman Modal	3	13	23	39
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan	5	1500	79	1584
23	Dinas Perdagangan	Urusan Perdagangan	15	18	21	54
24	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	13	6	88	107
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Urusan Perpustakaan Dan Kearsip	5	13	8	26
26	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Urusan Pertanahan	6	9	21	36
27	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	8	6	14	28
28	Dinas Sosial	Urusan Sosial	6	10	9	25

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
29	Kecamatan Balikpapan Barat	Urusan Pemerintahan	35	-	22	57
30	Kecamatan Balikpapan Kota	Urusan Pemerintahan	29	-	20	49
31	Kecamatan Balikpapan Selatan	Urusan Pemerintahan	40	-	30	70
32	Kecamatan Balikpapan Tengah	Urusan Pemerintahan	35	-	21	56
33	Kecamatan Balikpapan Timur	Urusan Pemerintahan	26	-	18	44
34	Kecamatan Balikpapan Utara	Urusan Pemerintahan	34	-	25	59
Total			**510**	**2533**	**1055**	**4098**

g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pemerintah kota Balikpapan dalam melaksanakan penganggaran mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan transfer merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Pada komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Dana hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam APBD sebesar Rp4.009.361.741.261,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.020.535.025.062,62 atau mencapai sebesar 100,28%. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2024

(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE	URAIAN	PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN		
		TARGET	REALISASI	%
	Pendapatan Daerah	**4.009.361.741.261,00**	**4.020.535.025.062,62**	**100,28**
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.196.859.325.739,00	1.066.692.925.336,93	89,12
4.2	Pendapatan Transfer	2.751.412.260.000,00	2.887.703.799.448,00	104,95
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61.090.155.522,00	66.138.300.277,69	108,26

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp1.196.859.325.739,00 Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi jajaran perangkat daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp1.066.692.925.336,93. perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan penurunan yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 89,12% atau menurun dari target sejumlah Rp130.166.400.402,07
b. Target Pendapatan Transfer tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp2.751.412.260.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan dapat merealisasikan Pendapatan Transfer sejumlah Rp2.887.703.799.448,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan capaian kinerja yang

melampaui target sebesar 104,95% atau naik dari target sejumlah Rp136.291.539.448,00; dan

c. Target Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp61.090.155.522,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp66.138.300.277,69. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan capaian kinerja yang melampaui target sebesar 108,26% atau naik dari target sejumlah Rp5.048.144.755,69.

Berdasarkan penjelasan komposisi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024, digambarkan pula sumber pendapatan dari masing-masing komposisi pendapatan sebagai berikut:

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar atau kecil dapat menjadi suatu argumentasi untuk menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.10 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE	URAIAN	PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN		
		TARGET	REALISASI	%
4.1.01	Pajak Daerah	958.000.000.000,00	809.678.302.867,00	84,52
4.1.02	Retribusi Daerah	173.674.623.583,00	164.410.371.962,00	94,67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.970.500.000,00	24.519.393.509,81	98,19
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.214.202.156,00	68.084.856.998,12	169,31
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**1.196.859.325.739,00**	**1.066.692.925.336,93**	**89,12**

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas mengambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Target Pajak Daerah tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp958.000.000.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Pajak Daerah sejumlah Rp809.678.302.867,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan penurunan pendapatan yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 84,52% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp(148.321.697.133,00);
b. Target Retribusi Daerah tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp173.674.623.583,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Retribusi Daerah sejumlah Rp164.410.371.962,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan capaian kinerja sebesar 94,67% atau selisih kurang dari target sejumlah Rp(9.264.251.621,00).
c. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp24.970.500.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp24.519.393.509,81. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan capaian kinerja sebesar 98,19% atau selisih lebih dari target sejumlah Rp451.106.490,19; dan
d. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp40.214.202.156,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp68.084.856.998,12. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan pelampauan pendapatan yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 169,31% atau dengan peningkatan pendapatan dari Target sejumlah Rp27.870.654.842,12.

Sebagaimana penjelasan atas komponen pendapatan diatas tergambar pencapaian 4 (empat) komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024. Dari 4 (empat) Komponen tersebut, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pencapaian yang kurang dari target yang ditetapkan, sedangkan lain-lain PAD yang sah menunjukan kontribusi melampaui dari target yang direncanakan. Tindak lanjut untuk peningkatan PAD sebagai berikut:

a) Pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi.

b) Elektronifikasi serta perluasan kanal-kanal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
c) Peningkatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
d) Peningkatan sosialisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
e) Peningkatan kualitas pelayanan dengan penyediaan pelayanan online pajak daerah dan retribusi daerah.
f) Pengembangan kualitas SDM pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

b). Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Transfer terdiri atas: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Perhitungan pendapatan transfer, baik dalam bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan.

Target rencana penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.740.214.230.298,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.661.556.694.348,00 atau target tercapai sebesar 97,13% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Adapun rincian penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE REK	URAIAN	PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN		
		TARGET	REALISASI	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.107.786.353.000,00	2.312.207.705.739,00	109,70
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	643.625.907.000,00	575.496.093.709,00	89,41
	Jumlah Pendapatan Transfer	**2.751.412.260.000,00**	**2.887.703.799.448,00**	**104,95**

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas mengambarkan kondisi pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp2.107.786.353.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan sejumlah Rp2.312.207.705.739,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan capaian kinerja sebesar 109,70% atau melampaui target sejumlah Rp204.421.352.739,00; dan
b. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp643.625.907.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan sejumlah Rp575.496.093.709,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan capaian kinerja sebesar 89,41% atau selisih kurang dari target sejumlah Rp(68.129.813.291,00).

c). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp6.583.131.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.230.169.005,00 atau 64,26%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE	URAIAN	PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN		
		TARGET	REALISASI	%
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	0,00	0

KODE	URAIAN	PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN		
		TARGET	REALISASI	%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.590.155.522,00	66.138.300.277,69	116,87
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**61.090.155.522,00**	**66.138.300.277,69**	**108,26**

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Target Pendapatan Hibah tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi pendapatan Hibah sejumlah Rp0,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan capaian kinerja sebesar 0% atau selisih kurang dari target sejumlah Rp(4.500.000.000,00); dan
b. Target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 setelah perubahan sejumlah Rp56.590.155.522,00 dengan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah Rp66.138.300.277,69. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan peningkatan pendapatan yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 116,87% atau dengan peningkatan pendapatan dari Target sejumlah Rp9.548.144.755,69.

Pencapaian target pendapatan pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan, secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Belum ada pemetaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum dimanfaatkan
c. Penggunaan kanal pembayaran elektronik oleh masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah masih rendah
d. Keasadaran masyarakat akan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan
e. Database wajib pajak dan wajib retribusi daerah belum lenngkap dan terintegrasi
f. Perubahan struktur pajak daerah dan retribusi daerah serta persiapan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai amanah pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

APBD menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; (2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; dan (3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp4.545.984.209.715,36 dan dapat direalisasikan Rp3.942.164.953.093,84 atau mencapai 86,72% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13 Rincian Belanja Daerah Tahun 2024
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE	URAIAN	PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.1	Belanja Operasi	2.882.993.404.971,99	2.487.779.432.633,22	86,29
5.2	Belanja Modal	1.649.753.118.314,00	1.442.250.144.883,62	87,42

KODE	URAIAN	PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.3	Belanja Tidak Terduga	13.237.686.429,37	12.135.375.577,00	91,67
5.4	Belanja Transfer	0	0	-
	Total Belanja Daerah	**4.545.984.209.715,36**	**3.942.164.953.093,84**	**86,72**

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi belanja daerah Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi Tahun 2024 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp2.882.993.404.971,99 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp2.487.779.432.633,22 atau 86,29%;
b. Belanja Modal Tahun 2024 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp1.649.753.118.314,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp1.442.250.144.883,62 atau 87,42%;
c. Belanja Tak Terduga Tahun 2024 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp13.237.686.429,37 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp12.135.375.577,00 atau 91,67%; dan
d. Belanja Transfer Tahun 2024 setelah perubahan tidak mendapat alokasi anggaran.

dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi setelah perubahan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.882.993.404.971,99 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.487.779.432.633,22 atau 86,29% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 1.14 Rincian Belanja Operasi Tahun 2024
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE REK	URAIAN	PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.126.715.873.894,99	948.731.492.872,02	84,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.121.072.745,00	1.371.045.528.426,11	87,04

KODE REK	URAIAN	PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.04	Belanja Subsidi	210.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	174.575.058.332,00	163.812.269.486,59	93,83
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.371.400.000,00	4.190.141.848,50	65,76
	JumlahBelanja Operasi	**2.882.993.404.971,99**	**2.487.779.432.633,22**	**86,29**

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi belanja operasi Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Pegawai merupakan realisasi belanja gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil, penerimaan Kepala Daerah dan Anggota DPRD serta Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada Tahun 2024 Belanja Pegawai dianggarkan senilai Rp1.126.715.873.894,99 dan direalisasikan sebesar Rp948.731.492.872,02 atau 84,20%.

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.575.121.072.745,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.371.045.528.426,11 atau 87,04%. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD selama tahun berjalan. Belanja Barang dan Jasa terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Barang dan Jasa BOS, serta Belanja Barang dan Jasa BLUD.

c. Belanja Subsidi pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

d. Belanja Hibah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp174.575.058.332,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp163.812.269.486,59 atau 93,83% Belanja ini digunakan untuk memberikan bantuan baik berupa uang ataupun barang kepada Lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Balikpapan, partai politik yang mendapat kursi di DPRD kota, Lembaga keagamaan dan Lembaga Pendidikan.

e. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp6.371.400.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.190.141.848,50 atau

65,76%. Belanja Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial kepada Individu yang merupakan pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin tingkat Sekolah Dasar yang bukan termasuk dalam Program Indonesia Pintar ataupun Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2024 serta Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga yang merupakan pemberian stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

2). Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya Pemerintah Kota Balikpapan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan mesin, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Pada Tahun 2024 belanja modal dianggarkan sebesar Rp1.649.753.118.314,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.442.250.144.883,62 atau 87,42%. Adapun rincian Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15 Rincian Belanja Modal Tahun 2024
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE REK	URAIAN	PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	35.521.764.560,00	28.443.334.370,00	80,07
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.216.333.647,00	243.860.563.977,23	95,55
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	468.423.701.591,00	318.046.523.523,33	67,90
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	872.559.455.616,00	836.422.774.617,61	95,86
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.454.759.900,00	1.412.242.944,00	97,08
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.577.103.000,00	14.064.705.451,45	84,84
	Jumlah Belanja Modal	**1.649.753.118.314,00**	**1.442.250.144.883,62**	**87,42**

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi belanja modal tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp35.521.764.560,00 dan direalisasikan sebesar Rp28.443.334.370,00 atau 80,07%;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp255.216.333.647,00 dan direalisasikan sebesar Rp243.860.563.977,23 atau 95,55%;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp468.423.701.591,00 dan direalisasikan sebesar Rp318.046.523.523,33 atau 67,90%;
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp872.559.455.616,00 dan direalisasikan sebesar Rp836.422.774.617,61 atau 95,86%; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.454.759.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.412.242.944,00 atau 97,08%.
f. Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp16.577.103.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp14.064.705.451,45 atau 84,84%.

3). Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp13.237.686.429,37 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.135.375.577,00. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi Belanja Tidak terduga Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan pada penanganan tanah longsor, kegiatan monitoring, pengawasan dan analisa data serta rekomendasi kegiatan keramaian Satgas Covid-19, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Dinas Kesehatan, Bantuan korban bencana kebakaran dan tanag longsor, serta pengembalian Pendapatan Asli Daerah.

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas pemerintah daerah. Pendayagunaan komponen pembiayaan pada struktur APBD tahun Anggaran 2024 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Balikpapan. Penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka menyeimbangkan antara bidang Penerimaan dan bidang Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sejumlah Rp536.622.468.454,36 dengan realisasi sejumlah Rp536.945.706.266,56. Perbandingan antara realisasi terhadap target menghasilkan capaian kinerja dari komposisi pembiayaan adalah 100,06% artinya kinerja Pembiayaan dinilai Sangat Baik.

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2024 dianggarkan sejumlah Rp536.622.468.454,36 dan terealisasi sejumlah Rp536.945.706.266,56 artinya kinerja penerimaan pembiayaan tercapai 100,06%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun Anggaran 2024 dengan target sejumlah Rp0,00 dan telah terealisasi sejumlah Rp0,00 artinya kinerja penerimaan pembiayaan tercapai 0,00%.

Tabel 1.16 Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2024

(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE	URAIAN	PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	536.622.468.454,36	536.945.706.266,56	100,06
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	536.622.468.454,36	536.945.706.266,56	100,06

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan, Fumgsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja.

Tabel. 17 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan, Fumgsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	545.972.626.153	466.428.948.275	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	220.874.889.610	188.565.048.484	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	235.827.437.243	201.730.808.746	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	44.992.011.500	39.820.812.829	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	44.278.287.800	36.312.278.216	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	200.000.000	175.917.222	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000	175.917.222	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.399.819.400	2.166.190.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.399.819.400	2.166.190.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	487.441.291.891	396.935.323.492	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	246.754.169	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	476.251.346.926	387.162.607.606	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	167.258.800	37.325.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	909.000.000	869.120.539	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.235.624.590	5.412.868.859	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.421.233.575	1.318.872.447	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.056.828.000	1.887.774.872	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.304.100.000	2.241.289.457	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	928.000.000	873.603.922	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.326.100.000	1.319.975.535	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	47.710.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.962.890.000	2.951.417.876	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.962.890.000	2.951.417.876	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	60.000.000	57.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	57.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.145.000.000	1.056.653.905	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	145.000.000	98.074.103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.000.000.000	958.579.802	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	363.877.515.336	229.076.763.643	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	363.877.515.336	229.076.763.643	Dinas Kesehatan
		100	0	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188990728405,00	168,818,705,759	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1,803,409,000	1,296,720,501	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000	828481035,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,512,433,500	1,987,066,441	Dinas Kesehatan
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	280,000,000	169,269,350	Dinas Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	298,847,000	229,784,746	Dinas Kesehatan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,933,586,500	1,588,012,345	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1,541,114,000	1,401,724,562	Dinas Kesehatan
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	450,000,000	357,307,299	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	558,100,000	536,227,839	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	80,000,000	77,720,000	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75,000,000	64,767,000	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	378,014,000	365,702,424	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5,489,716,000	5,093,822,000	Dinas Kesehatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,730,200,000	3,700,000,000	Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750,000,000	641,270,000	Dinas Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,009,516,000	752,552,000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	265,750,000	222,723,669	Dinas Kesehatan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	265,750,000	222,723,669	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	299,241,158,012	253,948,066,604	Dinas Kesehatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000	26,670,000	Dinas Kesehatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	153,085,803,340	129,632,350,229	Dinas Kesehatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,645,000,000	2,496,241,016	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,286,500,000	10,822,492,686	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,128,654,272	1,570,768,289	Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,497,000,000	5,273,985,810	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan BLUD	123,568,200,400	104,125,558,574	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	65.458.972.460	53.404.609.172	Dinas Pekerjaan Umum
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.458.972.460	53.404.609.172	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	221.433.716.379	198.833.763.994	Dinas Pekerjaan Umum
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	221.433.716.379	198.833.763.994	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.614.991.000	8.060.745.831	Dinas Pekerjaan Umum
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.614.991.000	8.060.745.831	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	28.373.964.000	21.746.653.264	Dinas Pekerjaan Umum
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	28.373.964.000	21.746.653.264	Dinas Pekerjaan Umum

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.910.045.000	5.493.993.034	Dinas Pekerjaan Umum
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.910.045.000	5.493.993.034	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	533.629.056.000	470.724.727.045	Dinas Pekerjaan Umum
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	533.629.056.000	470.724.727.045	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	160.268.014.300	137.996.052.796	Dinas Pekerjaan Umum
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	160.268.014.300	137.996.052.796	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.800.000.000	3.288.650.397	Dinas Pekerjaan Umum
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.500.000.000	3.079.566.397	Dinas Pekerjaan Umum
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	209.084.000	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.098.495.573	25.000.101.277	Dinas Pekerjaan Umum
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.556.138.000	10.678.853.440	Dinas Pekerjaan Umum
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	528.165.000	582.838.170	Dinas Pekerjaan Umum
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.558.731.473	2.388.089.587	Dinas Pekerjaan Umum
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.017.010.500	6.427.545.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.302.020.100	3.440.029.959	Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.136.430.500	1.482.745.121	Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.885.468.000	9.569.847.949	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	225.000.000	197.175.476	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	335.000.000	182.032.679	Dinas Perumahan dan Permukiman

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.353.820.000	190.985.821	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	7.940.958.000	6.299.853.277	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2.930.690.000	2.626.509.695	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	100.000.000	73.291.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.612.485.600	10.618.481.956	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.612.485.600	10.618.481.956	Dinas Perumahan dan Permukiman
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.939.918.934	3.858.376.216	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	478.596.634	172.515.522	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	574.200.000	397.883.475	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.887.122.300	3.287.977.219	Dinas Perumahan dan Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.981.200.000	4.891.053.927	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.981.200.000	4.891.053.927	Dinas Perumahan dan Permukiman
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.554.944.916	10.937.412.019	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.590.174.566	6.026.540.176	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.025.892.500	767.821.449	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.008.128.050	859.680.848	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439.523.200	424.825.652	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.365.600	860.853.021	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565.861.000	1.997.690.873	Dinas Perumahan dan Permukiman
Trantibumlinmas	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.915.000.000	1.872.751.138	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	95.422.220	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	650.000.000	629.543.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.000.000	296.914.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	865.000.000	850.870.818	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.825.000.000	9.283.627.292	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.966.130.000	6.541.860.622	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	450.000.000	443.261.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.400.000.000	1.296.482.130	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.008.870.000	1.002.023.040	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	38.173.520.000	35.681.933.224	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.480.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.752.267.440	24.780.996.523	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.636.252.560	2.378.313.787	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.125.225.700	4.075.288.627	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000	519.906.020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.000.000	704.355.615	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.314.774.300	3.213.592.652	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.067.267.700	9.361.286.682	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.929.652.800	8.301.910.558	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.112.037.300	1.033.910.224	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25.577.600	25.465.900	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	39.205.762.472	34.551.436.793	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.370.697.558	26.301.836.031	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	806.916.700	783.950.000	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.464.201.500	1.358.055.868	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.313.200.850	3.172.686.592	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.401.600	818.333.057	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.358.344.264	2.116.575.245	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	505.000.000	482.706.336	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	505.000.000	482.706.336	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.675.856.118	12.965.833.446	Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.981.836.618	8.554.486.593	Dinas Sosial
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	327.365.000	323.132.112	Dinas Sosial
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.699.947.310	1.659.369.419	Dinas Sosial
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	790.632.150	776.103.540	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.866.000	843.080.265	Dinas Sosial

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.209.040	809.661.517	Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.594.499.800	1.538.236.638	Dinas Sosial
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	690.298.238	Dinas Sosial
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	894.499.800	847.938.400	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.342.938.526	2.881.871.231	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.072.168.266	1.676.092.492	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.270.770.260	1.205.778.739	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.363.055.000	3.757.897.738	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.363.055.000	3.757.897.738	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	824.939.344	710.271.837	Dinas Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	442.423.964	405.186.000	Dinas Sosial
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	382.515.380	305.085.837	Dinas Sosial
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	133.186.000	126.575.650	Dinas Sosial
Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	133.186.000	126.575.650	Dinas Ketenaga kerjaan
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	464.437.900	363.250.870	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	247.497.800	209.731.426	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	174.880.100	122.953.603	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	42.060.000	30.565.841	Dinas Ketenaga kerjaan
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	466.476.500	395.260.937	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Dinas Ketenaga kerjaan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	466.476.500	395.260.937	Dinas Ketenaga kerjaan
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.347.567.000	1.276.262.394	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.287.807.000	1.218.658.494	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	Dinas Ketenaga kerjaan
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	59.760.000	57.603.900	Dinas Ketenaga kerjaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.637.618.009	8.538.307.903	Dinas Ketenaga kerjaan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Dinas Ketenaga kerjaan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.175.244.909	6.669.007.425	Dinas Ketenaga kerjaan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	366.743.000	315.931.000	Dinas Ketenaga kerjaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.117.037.400	891.347.649	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.573.400	293.471.312	Dinas Ketenaga kerjaan
				Dinas Ketenaga kerjaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.105.500	148.241.756	Dinas Ketenaga kerjaan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.913.800	220.308.761	Dinas Ketenaga kerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.219.892.599	1.113.601.769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	649.892.599	549.496.686	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	570.000.000	564.105.083	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.205.750.000	1.042.637.628	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	755.470.000	700.519.364	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214.800.000	190.921.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	235.480.000	151.197.064	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.288.700.000	1.181.319.834	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.288.700.000	1.181.319.834	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	348.300.000	325.850.905	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.300.000	325.850.905	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	348.300.000	325.850.905	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.300.000	325.850.905	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.977.686.500	2.834.793.362	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	597.900.000	527.078.421	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.379.786.500	2.307.714.941	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.929.960.000	1.598.588.191	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	760.200.000	716.948.520	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.000.000	626.635.046	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	329.760.000	255.004.625	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	686.990.000	392.039.878	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	686.990.000	392.039.878	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.326.759.730	7.776.375.989	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.326.759.730	7.776.375.989	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.156.900.000	1.086.087.060	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	328.200.000	296.963.944	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	828.700.000	789.123.116	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.831.434.000	2.632.001.841	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	651.100.000	595.393.700	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	471.230.000	450.749.981	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.324.154.000	1.205.205.560	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384.950.000	380.652.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.982.210.000	4.746.087.098	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.709.610.000	3.496.437.098	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.272.600.000	1.249.650.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.507.651.176	10.194.974.643	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.850.187.000	6.996.216.347	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.645.372.626	1.491.709.641	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	784.384.000	722.048.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.291.600	333.703.298	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.415.950	651.297.357	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Pertanahan dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.999.362.000	2.342.884.555	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	450.000.000	340.135.300	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000	1.314.782.214	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	563.352.000	426.459.395	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	386.010.000	261.507.646	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	22.789.237.000	17.946.199.389	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	22.789.237.000	17.946.199.389	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	176.500.000	47.158.011	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	176.500.000	47.158.011	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	385.825.000	303.076.413	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	385.825.000	303.076.413	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.541.143.600	2.811.152.740	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.541.143.600	2.811.152.740	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.226.542.200	9.701.700.925	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.456.461.400	6.669.449.405	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	586.523.000	526.887.100	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.210.650.800	1.040.136.454	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	485.535.000	408.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.372.000	737.525.686	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.000.000	319.702.280	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	229.990.700	224.153.357	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	199.998.000	194.234.357	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	29.992.700	29.919.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	54.469.995.172	48.290.960.967	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	54.469.995.172	48.290.960.967	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	145.073.700	97.700.632	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	145.073.700	97.700.632	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.672.999.475	1.587.133.288	Dinas Lingkungan Hidup
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	399.999.550	375.744.044	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.097.999.925	1.046.457.620	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000	164.931.624	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	300.000.000	289.374.476	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	289.374.476	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	118.113.800	61.921.808	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	55.000.000	28.920.925	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.113.800	33.000.883	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	196.140.000	175.958.592	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	196.140.000	175.958.592	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.250.000.000	1.195.420.522	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000	1.195.420.522	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	106.566.125.048	101.504.357.243	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Sampah	106.566.125.048	101.504.357.243	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.431.456.553	19.087.487.377	Dinas Lingkungan Hidup
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.650.000	47.201.900	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.985.448.000	11.529.351.639	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.550.000.000	1.344.631.008	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.705.000	147.297.151	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.851.929.400	1.823.221.220	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.093.496.587	1.044.946.023	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.817.746.700	1.632.227.287	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.863.480.866	1.518.611.150	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	195.456.500	108.791.200	Dinas Kependudukan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	195.456.500	108.791.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	918.457.500	769.672.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	419.104.000	358.327.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	499.353.500	411.345.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.141.418.350	15.594.164.080	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.003.260.600	7.301.434.344	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.034.012.000	882.732.923	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.929.289.850	5.633.816.350	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.200.000	403.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.027.900	980.224.804	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.628.000	392.355.659	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	46.530.015.644	39.098.482.731	Dinas Perhubungan
	KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.292.258.300	17.401.166.652	Dinas Perhubungan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.312.649.600	2.188.765.622	Dinas Perhubungan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.804.032.014	4.452.203.788	Dinas Perhubungan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.681.768.000	2.596.789.463	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.179.530	5.673.256.962	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.579.128.200	6.786.300.244	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	121.846.782.702	110.826.320.426	Dinas Perhubungan
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	97.197.297.482	90.800.003.225	Dinas Perhubungan
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.599.982.900	1.417.709.435	Dinas Perhubungan
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5.582.500.000	4.870.456.175	Dinas Perhubungan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.749.942.520	5.093.836.201	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.018.948.200	3.890.323.435	Dinas Perhubungan
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3.551.374.900	2.840.964.340	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.026.736.700	1.808.709.229	Dinas Perhubungan
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	63.018.386	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.690.976.000	3.606.410.882	Dinas Perhubungan
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5.690.976.000	3.606.410.882	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	8.638.397.461	8.279.728.912	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.358.755.700	4.185.808.773	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.279.641.761	4.093.920.139	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	315.553.239	269.380.738	Dinas Komunikasi dan Informatika

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	315.553.239	269.380.738	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	27.055.846.400	24.686.771.127	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.055.846.400	24.686.771.127	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	321.000.000	303.359.603	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	321.000.000	303.359.603	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	10.435.534.900	6.789.460.670	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.682.692.000	5.326.393.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.320.000	12.890.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.151.100	871.321.972	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.449.800	314.895.724	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.922.000	263.959.374	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100.000.000	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	400.000.000	383.249.719	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	400.000.000	383.249.719	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000	97.652.748	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	97.652.748	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	250.000.000	242.575.700	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	242.575.700	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.404.400.000	2.109.174.091	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.404.400.000	2.109.174.091	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.918.915.628	4.736.185.161	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.918.915.628	4.736.185.161	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.171.063.131	6.648.825.110	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7.171.063.131	6.648.825.110	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	84.400.000	83.005.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	84.400.000	83.005.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	183.988.000	173.246.001	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	183.988.000	173.246.001	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.235.744.120	9.270.709.381	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.220.221.720	5.652.736.006	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314.981.000	278.480.708	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.383.637.014	1.272.535.712	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	453.370.400	440.702.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.557.400	924.745.934	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.976.586	701.509.021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	918.390.800	812.142.143	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	918.390.800	812.142.143	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	185.250.000	135.385.700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	54.390.700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	85.250.000	80.995.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	693.674.000	662.922.382	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	693.674.000	662.922.382	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.239.202.000	991.091.171	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.202.000	991.091.171	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	462.913.533	426.498.550	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462.913.533	426.498.550	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.920.853.164	12.331.324.098	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.750.157.000	7.718.407.846	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.403.242.588	1.267.489.993	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.616.896.400	2.496.606.390	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.557.176	848.819.869	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.071.088.654	7.590.314.871	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.679.462.154	4.259.431.250	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.391.626.500	3.330.883.621	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.150.000.000	1.150.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.150.000.000	1.150.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25.614.399.200	24.495.985.022	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.894.224.000	4.505.438.601	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	8.794.400.000	8.751.925.976	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.400.000.000	3.356.890.008	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8.525.775.200	7.681.730.814	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.697.708.501	13.248.266.451	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.325.808.376	6.624.866.527	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	39.600.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.077.473.600	2.792.969.609	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.293.925	358.399.600	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.559.635.100	2.352.841.254	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.497.500	1.079.589.461	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.548.924.021	9.056.460.612	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.195.615.546	2.921.999.983	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.178.308.475	5.971.281.993	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	163.178.636	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.177.498.400	6.493.311.035	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7.177.498.400	6.493.311.035	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.832.427.600	1.760.905.120	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	288.422.120	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.532.427.600	1.472.483.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.000.000.000	909.266.807	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.000.000.000	909.266.807	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Perpustakaan dan Arsip	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.500.542.557	2.234.001.253	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.275.589.957	2.071.227.453	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	224.952.600	162.773.800	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	583.344.000	566.027.484	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	331.904.000	321.025.881	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	195.440.000	191.529.103	Dinas Perpustakaan dan Arsip

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	56.000.000	53.472.500	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	62.000.000	54.062.750	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	15.000.000	11.520.500	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	10.000.000	7.767.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	20.000.000	19.540.250	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	17.000.000	15.235.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	12.000.000	11.105.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	12.000.000	11.105.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.015.294.820	9.735.154.379	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.688.213.000	4.949.144.439	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.003.500	35.400.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.271.668.220	1.068.348.807	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.516.000	54.900.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.818.800	2.558.476.050	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.276.075.300	1.068.885.083	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	660.000.000	624.019.619	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	510.000.000	486.574.714	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	150.000.000	137.444.905	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	65.000.000	64.059.300	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	65.000.000	64.059.300	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	220.000.000	209.098.163	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	209.098.163	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	525.000.000	505.481.849	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	288.110.557	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	225.000.000	217.371.292	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.805.000.000	1.625.519.824	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	600.000.000	589.522.995	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.205.000.000	1.035.996.829	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.699.981.600	1.585.118.210	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.599.981.600	1.490.258.410	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	94.859.800	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.329.993.500	2.245.186.965	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pengembangan Prasarana Pertanian	179.993.500	168.028.107	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.150.000.000	2.077.158.858	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	700.000.000	659.278.970	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	378.345.397	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	300.000.000	280.933.573	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	160.000.000	144.612.500	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	160.000.000	144.612.500	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	885.000.000	756.462.162	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	885.000.000	756.462.162	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.517.576.000	17.844.257.173	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.843.576.000	12.911.750.157	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	86.740.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.432.486.500	1.307.411.324	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	584.247.900	544.266.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.999.599.000	1.784.891.188	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.557.666.600	1.209.198.504	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	332.542.000	310.410.009	Dinas Perdagangan
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	332.542.000	310.410.009	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	210.087.000	198.919.673	Dinas Perdagangan
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	210.087.000	198.919.673	Dinas Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	693.404.876	661.262.526	Dinas Perdagangan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	693.404.876	661.262.526	Dinas Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	734.351.500	624.183.296	Dinas Perdagangan
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	203.290.500	190.413.096	Dinas Perdagangan
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	531.061.000	433.770.200	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	39.849.384.700	38.716.661.233	Dinas Perdagangan
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30.823.699.920	30.298.662.248	Dinas Perdagangan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	9.025.684.780	8.417.998.985	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	164.523.500	129.348.033	Dinas Perdagangan
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	9.723.500	7.818.500	Dinas Perdagangan
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	104.800.000	83.306.273	Dinas Perdagangan
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	50.000.000	38.223.260	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	19.531.572.100	17.752.102.049	Dinas Perdagangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.460.285.000	11.160.500.420	Dinas Perdagangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.664.000	182.304.900	Dinas Perdagangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.892.035.600	1.814.586.657	Dinas Perdagangan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.969.500	183.550.000	Dinas Perdagangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.983.796.200	2.718.978.599	Dinas Perdagangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.807.821.800	1.692.181.473	Dinas Perdagangan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	48.387.859.329	42.327.016.086	Sekretariat Daerah
	Administrasi Tata Pemerintahan	16.869.271.190	14.141.118.850	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18.397.161.189	15.863.704.903	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.598.457.300	2.188.226.340	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	10.522.969.650	10.133.965.993	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.000.146.500	3.268.361.649	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	860.000.000	701.289.708	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.714.146.500	1.283.511.125	Sekretariat Daerah
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.426.000.000	1.283.560.816	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.334.741.601	121.647.112.674	Sekretariat Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.600.000	95.942.036	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.426.070.157	1.939.941.940	Sekretariat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.030.000.000	762.400.000	Sekretariat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.889.823.864	48.261.515.558	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.564.420.000	8.342.058.889	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.761.800.030	22.846.598.361	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.902.500.000	8.499.348.821	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.840.000.000	1.606.897.600	Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi	943.865.550	886.390.263	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.095.500.000	1.942.094.000	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.753.162.000	26.463.925.206	Sekretariat Daerah
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.453.411.143	34.078.722.818	Sekretariat DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.571.679.443	8.153.295.783	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.263.863.392	2.092.995.964	Sekretariat DPRD

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.006.759.500	1.078.845.517	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.688.000.000	14.316.195.368	Sekretariat DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.274.991.308	4.377.638.803	Sekretariat DPRD
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	685.288.000	264.109.131	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	707.307.730	238.749.308	Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Tugas DPRD	5.255.521.770	3.556.892.944	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.078.023.582	77.900.083.036	Sekretariat DPRD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Sekretariat DPRD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.579.556.000	4.921.388.711	Sekretariat DPRD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	610.291.500	314.936.551	Sekretariat DPRD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.973.897.183	20.845.191.255	Sekretariat DPRD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.000.000	0	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.380.000.000	3.951.379.870	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.000.000	1.210.317.885	Sekretariat DPRD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40.661.160.599	37.864.487.350	Sekretariat DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	11.013.118.300	8.792.381.414	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.838.000.000	3.281.687.907	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.752.000.000	1.508.850.140	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.021.000.000	984.142.256	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.065.000.000	788.695.511	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.070.000.000	3.801.779.937	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	350.000.000	332.894.626	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.100.000.000	1.048.657.262	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.620.000.000	1.577.216.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.000.000.000	843.011.149	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.531.148.000	10.606.847.767	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.839.274.000	7.230.716.868	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	766.934.100	737.672.919	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.892.325.900	1.764.902.867	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.117.000	435.353.486	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.497.000	438.201.627	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	27.557.681.729	23.706.092.558	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.258.666.500	3.304.767.744	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.868.849.500	2.454.969.722	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.693.106.000	1.982.505.560	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.687.686.429	12.135.375.577	Badan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	4.049.373.300	3.828.473.955	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	71.270.818.477	66.193.331.752	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	71.270.818.477	66.193.331.752	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.496.666.257	19.651.041.432	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.999.600	245.582.271	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.588.986.400	11.406.170.273	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	11.669.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	60.499.600	58.463.250	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	781.920.100	609.890.562	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.141.088.011	4.777.359.569	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525.345.846	475.700.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.168.872.500	590.724.535	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.923.954.200	1.475.481.972	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.223.112.652	8.612.265.159	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	10.223.112.652	8.612.265.159	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.463.927.600	43.513.073.103	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.594.000	71.889.000	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.927.604.790	38.741.945.938	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.584.000	145.483.999	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.593.095.510	2.266.639.879	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	639.152.290	582.084.949	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.189.700	881.079.977	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.707.310	823.949.361	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.348.246.105	5.473.198.399	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.292.932.005	3.016.497.445	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		28,999,200 25	26,016,226	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		0 25	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Mutasi dan Promosi ASN	770.000.000	583.535.854	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		0 100%	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Kompetensi ASN	1.947.115.200	1.591.205.193	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		0 0,21	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Sumber Daya Manusia
				Badan
		0 0,52	0	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Kompetensi ASN	1.947.115.200	1.591.205.193	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	309.199.700	255.943.681	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.518.329.074	4.833.928.069	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.294.618.999	2.002.183.645	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.223.710.075	2.831.744.424	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.247.666.628	11.029.914.256	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.498.344.689	9.589.423.766	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.502.000	8.060.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.231.073.680	1.096.133.937	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

URUSAN	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.350.093	100.864.228	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.396.166	235.432.325	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.007.900.000	1.476.634.662	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.435.000.000	1.101.623.648	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	572.900.000	375.011.014	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.057.100.000	1.735.059.739	Inspektorat
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	168.000.000	113.111.900	Inspektorat
	Pendampingan dan Asistensi	1.889.100.000	1.621.947.839	Inspektorat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.607.936.009	14.426.879.279	Inspektorat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.916.142.009	10.080.272.188	Inspektorat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.055.482.000	1.468.497.281	Inspektorat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.120.740.300	898.623.876	Inspektorat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436.150.800	296.833.998	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.114.300	842.923.452	Inspektorat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.306.600	839.728.484	Inspektorat

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan adalah fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai proses yang sistematis, perencanaan ini bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi dan misi suatu daerah. Dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,

berperan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien.

Proses ini tidak hanya sebatas merumuskan program dan kegiatan, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perencanaan yang baik harus mampu menjawab tantangan pembangunan, seperti kesenjangan sosial, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk mendorong kemajuan daerah. Perencanaan yang matang juga harus disertai dengan strategi implementasi yang fleksibel dan adaptif, agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang terus berkembang.

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, diperlukan perhatian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan yang harus diprioritaskan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan, serta mempertimbangkan program-program pembangunan jangka menengah dan panjang, dan dinamika yang terjadi di tingkat regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Balikpapan dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di tahun 2024. Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 09 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia** masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka merespon tantangan perpindahan IKN, dengan permasalahan yang ditemukan sebagai berikut:
   a) Masih tingginya angka stunting;
   b) Adanya peningkatan penemuan kasus HIV AIDS terutama di kalangan penduduk produktif dan karyawan swasta yang disebabkan oleh masih terjadinya seks bebas, penggunaan narkoba, LGBT dan sebagainya. Selain itu, perpindahkan IKN juga perlu diantisipasi karena mobilisasi masyarakat yang tinggi;
   c) Pembangunan budaya literasi belum optimal;
   d) Masih adanya anak putus sekolah;
   e) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal disebabkan oleh daya saing dan kompetensi tenaga kerja lokal masih rendah, dimana karakteristik lapangan kerja di Kota Balikpapan adalah sektor ekstraktif yang padat modal dan teknologi;
   f) Tingginya tingkat migrasi penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan;
   g) Adanya kebijakan penurunan kemiskinan ekstrim dari pemerintah Pusat menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Balikpapan mengingat saat ini sinkronisasi data kemiskinan belum optimal antara data nasional dengan data daerah.

2. **Pembangunan ekonomi inklusif** perlu ditingkatkan dalam rangka merespon ketimpangan yang terjadi di Kota Balikpapan, dengan permasalahan yang ditemukan sebagai berikut:
   a) Tingginya tingkat inflasi Kota Balikpapan;
   b) Sektor pariwisata belum berperan dalam meningkatkan sektor lain, seperti perdagangan, ekomodasi, perhotelan, serta transportasi disebabkan oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang masih terbatas;
   c) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan Ekraf dalam pendaftaran kekayaan intelektual;
   d) Penerapan kemudahan perizinan dan berusaha belum optimal;
   e) Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas insentif untuk peningkatan iklim investasi daerah;
   f) Dampak beroperasinya kilang minyak RDMP pada tahun 2024 terhadap rencana investasi daerah;
   g) Masih rendahnya koperasi sehat disebabkan oleh SDM pengelola koperasi masih terbatas, belum optimalnya fasilitasi pemenuhan rekomendasi untuk izin usaha koperasi, dan belum optimalnya pengawasan koperasi;
   h) Belum optimalnya fasilitasi usaha mikro menjadi wirausaha baru yang disebabkan oleh pemetaan data potensi dan pengembangan usaha mikro belum optimal, fasilitasi kemudahan berusaha belum optimal, dan pemberdayaan usaha mikro;
   i) Masih perlunya fasilitasi pengembangan UMKM mulai dari produksi hingga pemasaran dan digitalisasi;
   j) Masih perlunya fasilitasi kerjasama UMKM dengan perhotelan dan toko modern untuk pemasaran;
   k) Belum optimalnya pengemasan dan promosi produk UMKM.
3. **Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan** perlu ditingkatkan, dengan permasalahan yang ditemukan adalah:
   a) Belum optimalnya pengelolaan data jalan;
   b) Belum adanya rencana pemeliharaan jalan;
   c) Belum terhubungnya jaringan jalan antara kawasan perkotaan dengan kawasan strategis, seperti kawasan industri kariangau;
   d) Keterbatasan air baku dan air bersih;
   e) Penataan bangunan gedung belum optimal;
   f) Pelayanan jalan lingkungan belum optimal;
   g) Penataan kawasan kumuh belum optimal;
   h) Pengendalian B3 dan Limbah perlu mendapatkan perhatian besar karena pengelolaannya masih terbatas pada pemerintah kota;

i) Kurangnya sumber air;
j) Banjir masih terjadi karena masih adanya pembukaan lahan yang tidak terpantau dan pembangunan drainase belum sesuai kebutuhan dan perencanaan.

4. **Penguatan kinerja pemerintahan daerah yang lincah dan berbasis TIK** perlu ditingkatkan, dengan dengan permasalahan ditemukan adalah sebagai berikut:
   a) Pengelolaan data kinerja pemerintah daerah belum terintegrasi;
   b) Penjabaran kinerja organisasi ke dalam kinerja individu belum selaras sehingga berdampak pada pelaksanaan program kegiatan yang tidak optimal;
   c) Penerapan sistem merit belum optimal karena penempatan ASN yang sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja belum optimal;
   d) Belum optimalnya fasilitasi tugas belajar;
   e) Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi;
   f) Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan terutama untuk penyelenggaran pengawasan tujuan tertentu;
   g) Penerapan sistem kerja baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;
   h) Perlu ditingkatkan penggunaan TIK dalam penyelenggaraan kualitas pelayanan publik.
5. **Kondusifitas daerah perlu ditingkatkan**, dengan permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:
   a) Antisipasi dampak negatif dari perpindahan IKN karena akan tingginya mobilitas masyarakat;
   b) Adanya pemilihan umum serentak tahun 2024 mulai dari Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pilkada;
   c) Masih perlunya peningkatan ketahanan bencana karena masih adanya aktivitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   d) Kebakaran masih terjadi di wilayah kumuh.

Berdasarkan beberapa permasalahan pembangunan daerah di atas, maka isu strategis Kota Balikpapan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan dan daya saing SDM** yang difokuskan pada:
   a) Penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi lintas sektor;
   b) Inklusif ramah anak dan disabilitas;
   c) Penurunan prevalensi stunting dan pencegahan kasus pernikahan dini melalui penguatan ketahanan keluarga dan fasilitasi bina mental;
   d) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seperti HIV AIDS dan sebagainya;

e) Meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan, kompetensi SDM di tengah perkembangan perekonomian dan posisi sebagai mitra IKN.

2. **Pertumbuhan ekonomi yang inklusif** yang difokuskan pada:
   a) Perlindungan dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;
   b) Daya tarik wisata yang perlu ditingkatkan dan pengembangan Kota MICE;
   c) Respon ekonomi migas secara bijak dan penguatan ekonomi non-migas.
3. **Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, pengendali bencana dan penunjang perekonomian** yang difokuskan pada:
   a) Peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah/permukiman layak huni, hingga infrastruktur inklusif;
   b) Infrastruktur pengendali banjir;
   c) Infrastruktur penopang dan penghubung PSN dengan sentra perekonomian wilayah dan ketersediaan air baku.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup** yang difokuskan pada:
   a) Perbaikan tata guna lahan hulu DAS;
   b) Pengendalian pemanfaatan ruang dan kebijakan prioritas lahan kota;
   c) Pengelolaan sampah.
5. **Reformasi birokrasi tematik dan peningkatan merit sistem** yang difokuskan pada:
   a) Akuntabilitas kinerja berorientasi hasil dan kolaboratif;
   b) Penguatan kompetensi dan kinerja ASN;
   c) Pengembangan pola karier ASN.
6. **Penguatan Kondusifitas wilayah** yang difokuskan pada:
   a) Penyelenggaraan pemilu dan pilkada damai;
   b) Penguatan sinergi Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat.
7. **Kesiapan sebagai mitra IKN** yang difokuskan pada:
   a) Kesiapan SDM dan keterlibatan sumber daya lokal;
   b) Kesiapan infrastruktur dan logistik;
   c) Respon kebijakan tata ruang.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan

jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

1. Kota Balikpapan sebagai **Kota Terkemuka** dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Balikpapan diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global dengan ditunjang oleh fasilitas penunjang perkotaan yang memadai. Kondisi kota juga semakin berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Rencana pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan *Coastal Area*, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah, pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, ditunjang dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kota Balikpapan Sebagai **Kota yang Nyaman Dihuni**, Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan agar Kota Balikpapan semakin nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas bagi warganya.
3. Kota Balikpapan sebagai Kota yang **Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman** adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Gambar 1.8 Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

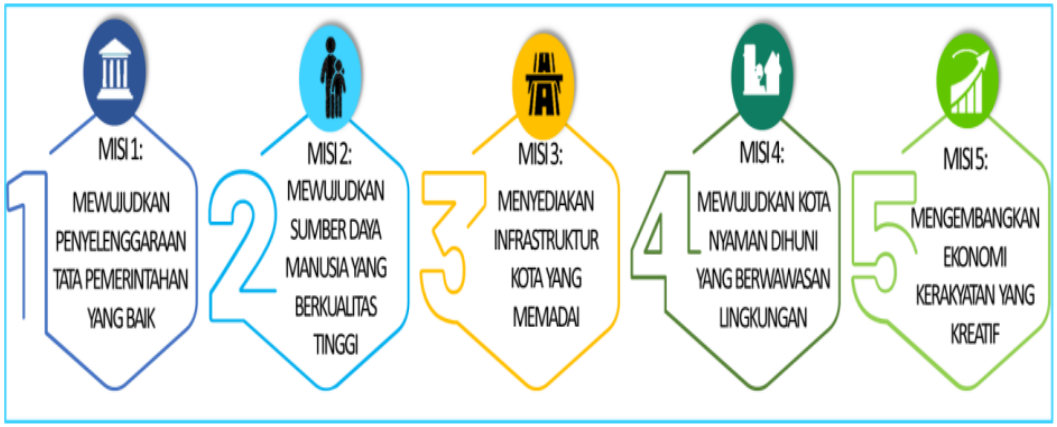

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari:

Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi

Salah satu prasyarat terwujudnya pembangunan daerah yang baik adalah dengan menguatkan tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas dan transparansi. Sebagai respon dari isu strategis tersebut, maka proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan menetapkan tujuan yaitu "Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi". Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.9 Tujuan dan Sasaran Misi 1

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja profesionalitass dan transparansi birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karenanya, untuk merespon dan menindaklanjuti isu tersebut maka pembangunan Kota Balikpapan harus didorong dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing” dalam rentang waktu lima tahun mendatang. Pencapaian tujuan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah Kota Balikpapan mampu memenuhi derajat kualitas “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM, indikator yang digunakan adalah:

a. Dimensi Kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH);
b. Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
c. Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan Pengeluaran per Kapita disesuaikan.

Efektivitas pencapaian tujuan itu akan terjadi jika kinerja lintas OPD pemerintah Kota Balikpapan bisa tersinergikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Untuk mendukung peningkatan IPM ini,

diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.10 Tujuan dan Sasaran Misi 2

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinvetarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah:

a) Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
b) Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
c) Penyediaan infrastruktur air bersih
d) Penyediaan infrastruktur irigasi
e) Penyediaan infrastruktur perumahan

Untuk mendukung peningkatan indeks layanan infrastruktur ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.11 Tujuan dan Sasaran Misi 3

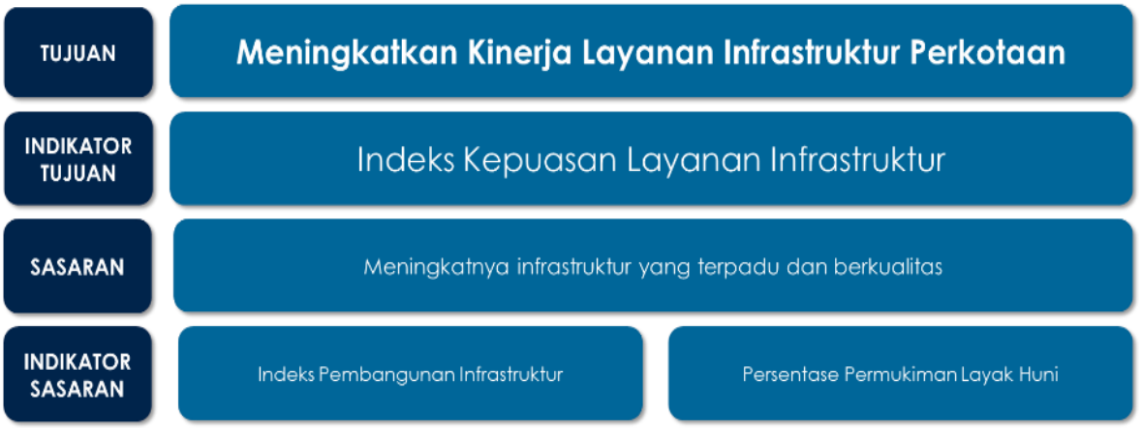

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Proses pembangunan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan dua isu strategis Kota Balikpapan yaitu Penyediaan Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah "Indeks *Liveable City*". Indeks *Liveable City* atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah:

1. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik);
2. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan);
3. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat;
4. Keamanan;
5. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota;
6. Sanitasi.

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.12 Tujuan dan Sasaran Misi 4

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif

Upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif diarahkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik ke depannya. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 1 indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1). Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan.

Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk terus digerakkan demi menopang hajat hidup masyarakat. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini maka digunakan 1 indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi. Adapun upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dapat dilakukan dengan mengintervensi berbagai sektor dan bidang mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan daerah. Upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.13 Tujuan dan Sasaran Misi 5 serta 6

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Selain itu, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan tersebut, maka diperlukan strategi-strategi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil dari tahapan penyusunan Raperda RPJMD Kota Balikpapan yang dimulai dari konsultasi publik hingga Musrenbang RPJMD, maka dirumuskan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni:

Gambar 1. 14 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022-2026

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1. Penguatan Birokrasi Pemerintahan;
   a) Penguatan tekad birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi;

b) Menumbuhkan "*trust*" yang tinggi dari masyarakat melalui:
   1) lnspirasi "*trust*" di lingkungan Pemerintah Kota;
   2) Klarifikasi tentang tujuan organisasi;
   3) Penyelarasan sistem dan prosedur;
   4) Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan:

   Bidang Kesehatan:
   a) Subsidi iuran BPJS bagi peserta PBPU kelas 3;
   b) Pembangunan Rumah Sakit di wilayah yang membutuhkan.

   Bidang Pendidikan:
   a) Bantuan subsidi SPP untuk sekolah swasta SD/Ml dan SMP/MTs;
   b) Peningkatan lnsentif Guru dari PAUD, TK, SD dan SMP;
   c) Pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah nyaman dihuni (baik sarprasnya, kualitas gurunya dan kualitas proses belajar mengajar);
   d) Optimalisasi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).

3. Pengentasan Kemisikinan;
   a) Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). dan;
   b) Bantuan Permodalan untuk UMKM.

4. Penyediaan Air Minum Yang Sehat Dan Merata;
   a) Akselerasi percepatan peningkatan penyediaan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum;
   b) Peningkatan ketersediaan air baku yang saat ini di-supply dari waduk Manggar dan Teritip +/- 1200 liter/detik, sedangkan total kebutuhan adalah 2200 liter/detik. Kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pembangunan embung aji raden dan supply dengan pipanisasi dari waduk Sepaku Semoi sebesar 2000 liter/detik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan hingga beberapa tahun kedepan.

5. Pengendalian Banjir
   a) Percepatan penanganan DAS Sungai Ampal;
   b) Percepatan pembangunan drainase di Balikpapan Timur;
   c) Percepatan revitalisasi drainase di seluruh kota Balikpapan;
   d) Percepatan pembangunan Bendali/ Bozem di lingkungan kawasan perumahan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kondisi Sosial Yang Nyaman
   a) Mewujudkan Kota Layak Anak, Layak Difabel dan Layak Lansia;
   b) Mewujudkan Kota Sehat, bebas Narkoba dan HIV/AIDS.;
   c) Menghidupkan ritual keagamaan di seluruh lapisan masyarakat.

7. Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Mice Dan Wisata
   a) Pembangunan pusat perdagangan dan perekonomian;
   b) Penguatan City Branding Balikpapan;
   c) Pusat Forum Pertemuan Wilayah, Nasional dan lnternasional;
   d) Kerjasama dengan seluruh organisasi profesi dan bisnis untuk penyelenggaraan MICE;
   e) Pengembangan objek wisata;
   f) Pengembangan wisata bahari di sepanjang pantai Balikpapan;
   g) Pembangunan Kampung Budaya;
   h) Penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata, dan;
   i) Peningkatan kualitas hotel dan restoran.
8. Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Kreatif
   a) Penyelenggaraan Pekan Ekonomi Kreatif setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif;
   b) Mendorong pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi yang kreatif;
   c) Membentuk Rumah Kreatif di tiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif dan UMKM;
   d) Mengikuti event-event kreatif di luar daerah dan luar negeri.
9. Revitalisasi Perusda
   Restrukturisasi organisasi dan aktivitas Perusda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Memperhatikan tingkat urgensi/ kepentingannya serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka tema dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kota Balikpapan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.15 6 (enam) Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Berdasarkan tema RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan Prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka fokus pembangunan daerah untuk Tahun 2024 merupakan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Balikpapan Tahun 2024.

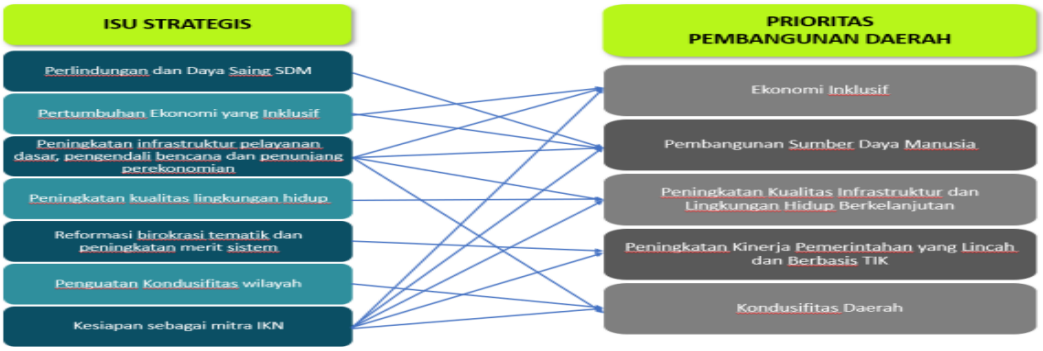

Gambar 1.16 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 secara rinci dijabarkan berdasarkan fokus dan upaya dalam rangka pencapaiannya, yaitu sebagai berikut:

1. **Prioritas Ekonomi Inklusif**, dengan fokus sebagai berikut:
   a) **Pengembangan Kota MICE, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** melalui upaya sebagai berikut:
      1) Peningkatan layanan perhotelan sebagai pendukung MICE Kota Balikpapan;
      2) Fasilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata berbasis masyarakat (di luar PMSS);
      3) Pengembangan ruang kreatif di setiap kecamatan melalui forum ekonomi kreatif Kota Balikpapan;
      4) Penyelenggaraan Balikpapan fest dan event kreatif, Balikpapan Marathon, Popda Kaltim XVII;
      5) Pelatihan stakeholders perhotelan;
      6) Pemeliharaan dan bantuan Sarpras Olah Raga;
      7) Penguatan media promosi dan TIC.

      Fokus pada pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif diintervensi oleh program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.18 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Pengembangan Kota MICE, Pariwisata dan Ekonomi	Peningkatan layanan perhotelan sebagai pendukung MICE Kota Balikpapan;	• Program peningkatan daya tarik destinasi; • Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	• Dinas Koperasi UMKMP; • Kecamatan; • Dunia Usaha; • Forum Ekraf
		Fasilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata berbasis masyarakat (di luar PMSS);			
		Pengembangan ruang kreatif di setiap kecamatan melalui forum ekonomi kreatif Kota Balikpapan;			
		Penyelenggaraan Balikpapan fest dan event kreatif, Balikpapan Marathon, Popda Kaltim XVII;			
		Pelatihan stakeholders perhotelan			
		Penguatan media promosi dan TIC			
		Pemeliharaan dan bantuan Sarpras	Program pengembangan		

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Olah Raga;	kapasitas daya saing keolaragaan		

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

b) **Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas** melalui upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan digitalisasi;
2) Peningkatan branding dan promosi produk UMKM berbasis bahan lokal;
3) Peningkatan kerjasama dengan dunia perhotelan dan bandara SAMS untuk menjadi etalase produk UMKM dan Ekraf;
4) Peningkatan keterlibatan usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal;
5) Fasilitasi Bimtek pemanfaatan bantuan melalui program KUBE.

Fokus pada wirausaha baru dan UMKM berkelas diintervensi oleh program dan Perangkat Daerah pengampu Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.19 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Wirausaha baru dan UMKM berkelasKreatif	Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan digitalisasi;	• Program pemberdayaan UMKM; • Program pengembangan UMKM;	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	• Dinas Perdagangan; • Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan • Dinas Komunikasi dan Infromatika; • Kecamatan; • Perbankan; • Dunia Usaha;

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Peningkatan branding dan promosi produk UMKM berbasis bahan lokal;			• Media; • Dekranasda; • Forum Ekraf; • AP I
		Peningkatan kerjasama dengan dunia perhotelan dan bandara SAMS untuk menjadi etalase produk UMKM dan Ekraf;			
		Peningkatan keterlibatan usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal;			
		Fasilitasi Bimtek pemanfaatan bantuan melalui program KUBE	Program perlindungan dan jaminan sosial		

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

c) **Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi** melalui upaya sebagai berikut:

1) Penguatan MPP digital;
2) Pengembangan instrumen insentif investasi;
3) Promosi investasi;
4) Profiling investasi.

Fokus pada peningkatan iklim dunia usaha dan investasi diintervensi oleh program dan Perangkat Daerah pengampu Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.20 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan iklim dunia usaha dan investasi	Penguatan MPP digital; Pengembangan instrumen insentif investasi Promosi investasi	• Program pengembangan iklim penanaman modal; • Program pengendalian pelaksanaan PM; • Program penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	• Bappeda Litbang; • Dinas Pariwisata, Olaraga, dan Pemuda; • Dinas Koperasi, UMKMP;
		Profiling investasi			• Dinas Perdagangan; • Perbankan; • Dunia Usaha; • Media; • RIRU Kaltim

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

d) **Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting)** melalui upaya sebagai berikut:

1) Pemenuhan kebutuhan Bapokting dalam menghadapi perpindahan IKN;
2) Pengendalian inflasi daerah.

Fokus pada Pengendalian harga dan stok Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) diintervensi oleh program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.21 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Pengendalian harga dan stok Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting)	Pemenuhan kebutuhan Bapokting dalam menghadapi perpindahan IKN;	• Program saranan distribusi perdagangan; • Program stabilitas harga BAPOKTING; • Program P3DN; • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	• Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; • Dinas Perdagangan; • Bagian Perekonomian Sekretariat Kota;	• TPID; • Bank Indonesia; • Perum dan Manuntung Sukses.

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

2. **Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia**, dengan fokus sebagai berikut:
   a) **Penurunan Stunting** dengan upaya sebagai berikut:
      1) Pemenuhan pelayanan kesehatan dan gizi ibu hamil, bayi, dan Batita;
      2) Audit stunting;
      3) Penguatan peran keluarga melalui edukasi dan pendampingan.

   Fokus pada penurunan stunting diintervensi oleh program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.22 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Penurunan Stunting	Pemenuhan pelayanan kesehatan dan gizi ibu hamil, bayi, dan Batita;	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Kota	Dinas Sosial

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Audit stunting	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Kota	
		Penguatan peran keluarga melalui edukasi dan pendampingan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

b) **Penurunan Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrem** melalui upaya sebagai berikut:

1) Pelatihan berbasis kompetensi;
2) Pelaksanaan Job Fair setahun 2 kali;
3) Program pelatihan yang berkerjasama dengan perusahan;
4) Promosi investasi;
5) Peningkatan akurasi intervensi kemiskinan melalui penguatan DTKS dan integrasi program kemiskinan;
6) Peningkatan akses terhadap pasar kerja dan kewirausahaan terutama bagi warga miskin dan rentan;
7) Peningkatan layanan rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS.

Fokus pada penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem diintervensi oleh program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.23 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem	Pelatihan berbasis kompetensi;	• Program penempatan tenaga kerja • Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan	• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; • Dinas Pariwisata, Olaraga, dan Pemuda; • Bappeda Litbang; • Pihak Swasta
		Pelaksanaan Job Fair setahun 2 kali;			
		Program pelatihan yang berkerjasama			
		Promo Investasi	• Program pengembangan iklim PM • Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
		Peningkatan akurasi intervensi kemiskinan melalui penguatan DTKS dan integrasi program kemiskinan;	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	
		Peningkatan akses terhadap pasar kerja dan kewirausahaan terutama bagi warga miskin dan rentan;	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi UMKMP	
			Program penempatan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan	
		Peningkatan layanan rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

c) **Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi** melalui upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan sarana dan prasarana serta daya tampung sekolah;
2) Pencegahan anak putus sekolah;
3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Pendidikan;
4) Pengembangan sekolah inklusif dan ramah anak;
5) Optimalisasi kebijakan daerah tentang jam belajar;
6) Fasilitasi pembentukan taman baca digital;
7) Lomba bedah buku, cerpen, story-telling dan webtoon bagi individu, komunitas, dan sekolah;
8) Penambahan jam layanan perpustakaan.

Fokus peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.24 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi	Peningkatan sarana dan prasarana serta daya tampung sekolah	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	• DP3AKB • Pihak NGO
		Pencegahan anak putus sekolah			
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Pendidikan			
		Pengembangan sekolah inklusif dan ramah anak			

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Optimalisasi kebijakan daerah tentang jam belajar			
		Lomba bedah buku, cerpen, story-telling dan webtoon bagi individu, komunitas, dan sekolah	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Fasilitasi pembentukan taman baca digital			
		Penambahan jam layanan perpustakaan			

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

d) **Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria** melalui upaya sebagai berikut:

1) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita ATM;
2) Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penderita ATM;
3) Peningkatan screening dini terhadap pencegahan penyakit menular;
4) Peningkatan kerjasama dengan stakeholders terkait dalam pencegahan penyakit menular;
5) Peningkatan kesehatan lingkungan berbasis komunitas.

Fokus integrasi penanganan AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.25 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Integrasi penanganan AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria	Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita ATM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Kota	
		Peningkatan screening dini terhadap pencegahan penyakit menular			
		Peningkatan kerjasama dengan stakeholders terkait dalam pencegahan penyakit menular			
		Peningkatan kesehatan lingkungan berbasis komunitas			
		Pemberian akses layanan dasar bagi penderita AT	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Kota	
			Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	
			Program Kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

e) **Penguatan bina mental bagi masyarakat** melalui upaya sebagai berikut:

1) Pembinaan mental kepada anak sekolah;

2) Pembinaan mental kepada pemuda-pemudi;
3) Peningkatan pola pengasuhan anak melalui pelatihan/sekolah parenting kepada orang tua;
4) Peningkatan perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak;
5) Edukasi seks kontekstual melalui kerjasama dengan beberapa stakeholders.

Fokus penguatan bina mental bagi masyarakat diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.26 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Penguatan bina mental bagi masyarakat	Pembinaan mental kepada anak sekolah	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan	• Kodam IV Mulawarman; • Forum Anak
		Pembinaan mental kepada pemuda-pemudi	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Pariwisata, Olaraga, dan Pemuda	
			Program Penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kesbangpol	
		Peningkatan pola pengasuhan anak melalui pelatihan/sekolah parenting kepada orang tua	Program Pemberdayan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
		Peningkatan perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak	Program perlindungan khusus anak		

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Edukasi seks kontekstual melalui kerjasama dengan beberapa stakeholders	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

3. **Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**, dengan fokus sebagai berikut:
   a) **Pengendalian Banjir** melalui upaya sebagai berikut:
      1) Pemulihan fungsi alami wilayah tangkapan air hulu DAS Ampal melalui kebijakan penataan ruang;
      2) Pengadaan lahan Bendali V dan Bendali A sampai Hulu;
      3) Pembangunan pompa banjir;
      4) Pengembangan lanjutan saluran sekunder Balikpapan Baru dan Inhutani;
      5) Pengembangan drainase saluran sekunder strat III hulu dan Depsos bawah.

      Fokus pengendalian Banjir diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.27 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan pengendalian Banjir	Pemulihan fungsi alami wilayah tangkapan air hulu DAS Ampal melalui kebijakan penataan ruang	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pertanaan dan Penataan Ruang	
		Pengadaan lahan Bendali V dan Bendali A sampai Hulu	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Pembangunan pompa banjir			
		Pengembangan lanjutan saluran sekunder Balikpapan Baru dan Inhutani	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pertanaan dan Penataan Ruang	
		Pengembangan drainase saluran sekunder strat III hulu dan Depsos bawah.			

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

b) **Penataan kawasan terintegrasi** melalui upaya sebagai berikut:

1) Perbaikkan RTLH;
2) Penataan pemukiman kumuh sepinggang raya;
3) Pengadaan lahan embung Aji Raden;
4) Perluasan jaringan distribusi mendukung optimalisasi SPAM eksisting;
5) Penyiapan SPAM sepaku Semoi;
6) Pembangunan SPAL komunal;
7) Pembangunan IPLT Manggar;
8) Infrastruktur pengurangan Sampah;
9) Peremajaan angkutan sampah;
10) Pembangunan infrastruktur penghubung kawasan-kawasan strategis.

Fokus penataan kawasan terintegrasi diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.28 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Penataan kawasan terintegrasi	Perbaikkan RTLH	Program Kawasan Permukiman (DAK Integrasi)	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Penataan pemukiman Perhubungan kumuh sepinggan raya			
		Pengadaan lahan embung Aji Raden	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum	
		Perluasan Jaringan distribusi mendukung optimalisasi SPAM eksisting			
		Penyiapan SPAM sepaku Semoi			
		Pembangunan SPAL komunal	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
		Pembangunan IPLT Manggar			
		Infrastruktur pengurangan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan	
		Peremajaan Angkutan Sampah			
		Pembangunan infrastruktur penghubung kawasan-kawasan strategis	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum	

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

c) **Penataan wajah kota** melalui upaya sebagai berikut:

1) Pembangunan taman KOT dan taman 3 generasi;
2) Revitalisasi taman pesut;
3) Pos hutan kota 16 HK;
4) Pembangunan landmark kota: Gerbang Balikpapan Timur dan simpang BSCC Dome;
5) Penataan bangunan lingkungan koridor Sudirman dan Achmad Yani;
6) Revitalisasi JPO simpang BC dan Jembatan dalam kota;
7) Penataan media jalan;
8) Balikpapan Terang;
9) Marka jalan dan Zoss sesuai aspirasi forum anak;
10) Papan nama jalan;
11) Pengembangan fasilitas umum inklusif.

Fokus penataan wajah kota diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.29 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Penataan wajah kota	Pembangunan taman KOT dan taman 3 generasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Forum Anak
		Revitalisasi taman pesut			
		Pos hutan kota 16 HK			
		Pembangunan landmark kota: Gerbang Balikpapan Timur dan simpang BSCC Dome	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Penataan bangunan lingkungan koridor Sudirman dan Achmad Yani			
		Revitalisasi JPO simpang BC dan Jembatan dalam kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum	
		Penataan media jalan			
		Balikpapan Terang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	
		Marka jalan dan Zoss sesuai aspirasi forum anak			
		Papan nama jalan			
		Pengembangan fasilitas umum inklusif	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum	

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

4. **Prioritas penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK** dengan fokus sebagai berikut:
   a) **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel** dengan upaya sebagai berikut:
      1) Evaluasi TLHP BPK;
      2) Probity audit untuk proyek strategis Kota Balikpapan;
      3) Pendampingan SPIP kepada PD pilot;
      4) Pencanangan zona integritas;
      5) Penambahan jumlah APIP.

      Fokus peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.30 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Evaluasi TLHP BPK	• Prog. Penyelenggaraan Pengawasan; • Prog. Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah	• Seluruh PD
		Probity audit untuk proyek strategis Kota Balikpapan			
		Pendampingan SPIP kepada PD pilot			
		Pencanangan zona integritas			
		Penambahan jumlah APIP			

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

b) **Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel** melalui upaya sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pola karier instansi;
2) Pengembangan kompetensi teknis umum;
3) Pemberian beasiswa tugas belanjar;
4) Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang mendukung sistem merit.

Fokus peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.31 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel	Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pola karier instansi	• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	• Seluruh Perangkat Daerah
		Pengembangan kompetensi teknis umum			
		Pemberian beasiswa tugas belanja			
		Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang mendukung sistem merit.			

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

c) **Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik** melalui upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan infrastruktur SPBE;
2) Peningkatan standarisasi keamanan informasi ISO 27001;
3) Peningkatan kapasitas aparatur di bidang IT;
4) Kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
5) Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis;
6) Peningkatan pengawasan kearsipan di PD.

Fokus peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.32 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan infrastruktur SPBE;	• Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; • Program Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Seluruh Perangkat Daerah
		Peningkatan kapasitas aparatur di bidang IT;			
		Peningkatan standarisasi keamanan informasi ISO 27001;			
		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan;	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis;	• Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; • Prog. Pengelolaan Arsip • Prog. Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Peningkatan pengawasan kearsipan di PD			

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

5. **Prioritas Kondusifitas Daerah**, dengan fokus sebagai berikut:
   a) **Antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN** melalui upaya sebagai berikut:
      1) Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra IKN;
      2) Peningkatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang.

      Fokus antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.33 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra IKN		Pemerintah Kota Balikpapan	• Otoritas IKN • Provinsi Kalimantan Timur • Kota Samarinda
		Peningkatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang	Program penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

b) **Peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran** melalui upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2) Peningkatan cakupan wilayah menajemen kebakaran.

Fokus peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.34 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran	Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Kecamatan • Kelurahan • RT • Masyarakat

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
		Peningkatan cakupan wilayah menajemen kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran		

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

c) **Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik** melalui upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan Forkopimda.

Fokus peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.35 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan Forkopimda	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Forkopimda

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

d) **Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada** melalui upaya sebagai berikut:

1) Dukungan penganggaran KPU dan Bawaslu;
2) Desk Pemilu/Pemilukada;
3) Pengamanan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak;
4) Pemenuhan sarpras dan jumlah personel tramtibum sesuai SPM.

Fokus peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada diintervensi melalui program dan Perangkat Daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.36 Pemetaan Fokus, Upaya, Program, Perangkat Daerah Pengampu, dan Dukungan Stakeholders Lain

No	Fokus	Upaya	Program	Perangkat Daerah Pengampu	Dukungan Stakeholders Lain
1.	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada	Dukungan penganggaran KPU dan Bawaslu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• KPU • Bawaslu
		Desk Pemilu/Pemilukada			
		Pengamanan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pemenuhan sarpras dan jumlah personel tramtibum sesuai SPM			

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja yang menentukan program pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.37 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	79	80	81	82	83	83
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	24,21%	36,88%	41,42%	44,17%	44,74%	44,40%	44,40%
			Indeks SPBE	Poin	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0	4.0
			Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,84
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05
MISI 2 : Mewujudkan	Meningkatkan Sumber Daya	Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7487	0,7500	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524	0,7524

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi	Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	Aksesibilitas Pendidikan									
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397	0,8397
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,025
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4920	0,4960	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975	0,4975
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%	60%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77,8	78,2	78,78	79,12	79,55	80,02	80,02
			Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,59%	99,05%	99,32%	99,55%	99,78%	100%	100%
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89%	89,2%	89,4%	89,6%	89,8%	90%	90%
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	108	107	105	103	101	99	99
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,5601	0,8000	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794	0,8794

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3,09%	3,14%	3,17%	3,19%	3,33%	3,45%	3,45%
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	9	8,46	8,22	7,98	7,74	7,74
			Tingkat Kemiskinan	%	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36	2,36
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440	4,440
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	8 7	87	88	89	90	90
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1,08	1,20	1,50	1,90	2,50	3,40	3,40

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%	3,22%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-0,56%	3,50%	3,97%	4,00%	4,25%	5,00%	5,00%

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.38 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70.16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	81.75
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30.46%
		Indeks SPBE	Poin	3.8
		Maturitas SPIP	Level	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.76
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83.81
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7690
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8462
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	14.72
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.082
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4964
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.89
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	79.12
		Persentase Permukiman Layak Huni	**%**	99.55%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.31

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.6%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	103
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8575
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	20.21%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.00%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.23%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	20.08
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2.70
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	35.20%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.8%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Adapun program dan anggaran perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.39 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
I	**PROGRAM PRIORITAS**			
1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	1,145,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pembinaan Sejarah	Rp	60,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp	2,399,819,400.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	545,972,626,153.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	2,304,100,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	2,962,890,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	200,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	5,489,716,000.00	Dinas Kesehatan
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	363,877,515,336.00	Dinas Kesehatan
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2,512,433,500.00	Dinas Kesehatan
11	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	1,806,864,000.00	Dinas Kesehatan
12	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	160,268,014,300.00	Dinas Pekerjaan Umum
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	6,910,045,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	221,433,716,379.00	Dinas Pekerjaan Umum
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8,614,991,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp	65,458,972,460.00	Dinas Pekerjaan Umum
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	3,800,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
18	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	28,373,964,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	533,629,056,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
20	Program Kawasan Permukiman	Rp	4,939,918,934.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
21	Program Pengembangan Perumahan	Rp	12,885,468,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp	11,612,485,600.00	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	3,666,200,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
24	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1,915,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	9,825,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	10,067,267,700.00	Satuan Polisi Pamong Praja
27	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	1,594,499,800.00	Dinas Sosial
28	Program Penanganan Bencana	Rp	824,939,344.00	Dinas Sosial
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	505,000,000.00	Dinas Sosial
30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp	4,363,055,000.00	Dinas Sosial
31	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	3,342,938,526.00	Dinas Sosial
32	Program Hubungan Industrial	Rp	466,476,500.00	Dinas Ketenagakerjaan
33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1,347,567,000.00	Dinas Ketenagakerjaan
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	464,437,900.00	Dinas Ketenagakerjaan
35	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	133,186,000.00	Dinas Ketenagakerjaan
36	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	686,990,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp	4,982,210,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	8,326,759,730.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp	2,831,434,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Anak dan Keluarga Berencana
40	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp 2,977,686,500.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
41	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1,219,892,599.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
42	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 348,300,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
43	Program Pengendalian Penduduk	Rp 1,156,900,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
44	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 1,288,700,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
45	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 1,929,960,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
46	Program Perlindungan Perempuan	Rp 1,205,750,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
47	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 22,789,237,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
48	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp 385,825,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
49	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2,999,362,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
50	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 5,541,143,600.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
51	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 176,500,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
52	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Rp 196,140,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		
53	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 145,073,700.00	Dinas Lingkungan Hidup
54	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 54,469,995,172.00	Dinas Lingkungan Hidup
55	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 106,566,125,048.00	Dinas Lingkungan Hidup
56	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 118,113,800.00	Dinas Lingkungan Hidup
57	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1,672,999,475.00	Dinas Lingkungan Hidup
58	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 300,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 1,250,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
60	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 229,990,700.00	Dinas Lingkungan Hidup
61	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 195,456,500.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 918,457,500.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
63	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 5,690,976,000.00	Dinas Perhubungan
64	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp 121,846,782,702.00	Dinas Perhubungan
65	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 8,638,397,461.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
66	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 27,055,846,400.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
67	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 315,553,239.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
68	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	321,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
69	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	100,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
70	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	250,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp	2,404,400,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
72	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	400,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
73	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	183,988,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
74	Program Pengembangan Umkm	Rp	4,918,915,628.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
75	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	84,400,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
76	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp	100,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
77	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	7,171,063,131.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
78	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	918,390,800.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
79	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	462,913,533.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	185,250,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
81	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	1,239,202,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
82	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	693,674,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
83	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	7,177,498,400.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
84	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	1,832,427,600.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	25,614,399,200.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	8,071,088,654.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1,150,000,000.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
88	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp	1,000,000,000.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
89	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	9,548,924,021.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
90	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	2,500,542,557.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
91	Program Pengelolaan Arsip	Rp	583,344,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
92	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	12,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
93	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp	62,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
94	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	65,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
95	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	220,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
96	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1,805,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
97	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	525,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
98	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	160,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
99	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	700,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
100	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	660,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
101	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	2,329,993,500.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
102	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	1,699,981,600.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
103	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	885,000,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
104	Program Pengembangan Ekspor	Rp	332,542,000.00	Dinas Perdagangan
105	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	210,087,000.00	Dinas Perdagangan
106	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	39,849,384,700.00	Dinas Perdagangan
107	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	164,523,500.00	Dinas Perdagangan
108	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	734,351,500.00	Dinas Perdagangan
109	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	693,404,876.00	Dinas Perdagangan
110	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	48,387,859,329.00	Sekretariat Daerah
111	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	4,000,146,500.00	Sekretariat Daerah
112	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp	44,453,411,143.00	Sekretariat DPRD
113	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
114	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	4,070,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
115	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	3,838,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
116	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	71,270,818,477.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
117	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	27,557,681,729.37	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
118	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	10,223,112,652.00	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
119	Program Kepegawaian Daerah	Rp	6,348,246,105.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
120	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	5,518,329,074.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
121	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	2,007,900,000.00	Inspektorat
122	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	2,057,100,000.00	Inspektorat
123	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	353,514,000.00	Kecamatan Balikpapan Barat
124	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	14,372,905,747.00	Kecamatan Balikpapan Barat
125	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	444,416,300.00	Kecamatan Balikpapan Barat
126	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	840,153,200.00	Kecamatan Balikpapan Tengah
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	17,493,336,030.00	Kecamatan Balikpapan Tengah
128	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	648,181,900.00	Kecamatan Balikpapan Tengah
129	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	575,196,600.00	Kecamatan Balikpapan Kota
130	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	10,325,763,399.00	Kecamatan Balikpapan Kota
131	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	305,889,700.00	Kecamatan Balikpapan Kota
132	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	565,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Utara
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	18,560,908,896.00	Kecamatan Balikpapan Utara

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
134	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	675,700,000.00	Kecamatan Balikpapan Utara
135	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	699,999,500.00	Kecamatan Balikpapan Selatan
136	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	16,381,394,400.00	Kecamatan Balikpapan Selatan
137	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	580,056,600.00	Kecamatan Balikpapan Selatan
138	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	834,968,300.00	Kecamatan Balikpapan Timur
139	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	16,064,006,800.00	Kecamatan Balikpapan Timur
140	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	845,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Timur
141	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	932,294,600.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
142	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	6,651,434,100.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
143	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	6,272,863,900.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
144	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	27,513,465,500.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
145	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	4,855,031,782.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
II	**PROGRAM PENUNJANG**			
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	487,441,291,891.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	299,241,158,012.00	Dinas Kesehatan
148	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	26,098,495,573.00	Dinas Pekerjaan Umum
149	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12,554,944,916.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	38,173,519,999.99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
151	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	39,205,762,472.00	Satuan Polisi Pamong Praja
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10,675,856,118.00	Dinas Sosial
153	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9,637,618,009.00	Dinas Ketenagakerjaan
154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11,507,651,176.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
155	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11,226,542,200.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
156	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	21,431,456,553.00	Dinas Lingkungan Hidup
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	17,141,418,350.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
158	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	46,530,015,644.00	Dinas Perhubungan
159	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10,435,534,900.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
160	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10,235,744,120.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
161	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	13,920,853,164.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15,697,708,501.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
163	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11,015,294,820.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
164	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	19,517,676,000.00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
165	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	19,531,572,100.00	Dinas Perdagangan
166	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	149,334,741,601.00	Sekretariat Daerah
167	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	91,078,023,582.00	Sekretariat DPRD
168	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11,531,148,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
169	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23,496,666,257.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
170	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	53,463,927,600.00	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
171	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12,247,666,628.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
172	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16,607,936,009.00	Inspektorat
173	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	22,209,479,400.00	Kecamatan Balikpapan Barat
174	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23,040,147,724.00	Kecamatan Balikpapan Tengah
175	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	21,560,705,500.00	Kecamatan Balikpapan Kota
176	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	21,568,306,104.00	Kecamatan Balikpapan Utara

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	24,567,377,046.00	Kecamatan Balikpapan Selatan
178	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16,918,871,100.00	Kecamatan Balikpapan Timur
179	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8,965,600,224.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		**Rp**	**4,545,984,209,715.36**	

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2024

4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan dan anggaran pendukung program kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.40 Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kota Balikpapan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400,000,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	476,251,346,926.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	167,258,800.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	909,000,000.00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,235,624,590.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,421,233,575.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,056,828,000.00
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	183,961,523,710.00
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	219,367,260,743.00
10	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	44,692,949,500.00
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33,329,261,800.00
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200,000,000.00
13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,399,819,400.00
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	407,758,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	412,871,500.00
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	492,498,000.00
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	565,400,000.00
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	153,888,500.00
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	275,134,000.00
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	228,441,000.00
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	150,179,000.00
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	493,044,000.00
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	217,291,000.00
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	231,196,000.00
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	158,510,000.00
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	162,938,500.00
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	263,034,000.00
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	275,759,500.00
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	229,050,000.00
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	244,726,000.00
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	286,434,000.00
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	179,179,000.00
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	590,365,200.00
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	258,534,000.00
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	439,526,200.00
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	161,786,000.00
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	239,480,000.00
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	185,910,000.00
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	191,227,500.00
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	405,539,000.00
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	149,529,000.00
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	347,824,000.00
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	461,882,000.00
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	253,341,000.00
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	184,910,000.00
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	433,833,000.00
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	486,560,000.00
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	146,419,500.00
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	397,012,000.00
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	151,148,000.00
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	426,705,000.00
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	139,792,500.00
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	184,810,000.00
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	221,131,500.00
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	132,548,000.00
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	160,188,500.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	230,431,500.00
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	345,767,500.00
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	416,052,500.00
60	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	139,660,000.00
61	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	187,672,000.00
62	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	278,106,000.00
63	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	409,510,500.00
64	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	244,610,000.00
65	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	432,906,500.00
66	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	296,651,500.00
67	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	302,655,500.00
68	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	284,024,500.00
69	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	174,788,500.00
70	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	232,131,500.00
71	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	599,069,000.00
72	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	279,905,500.00
73	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	239,895,000.00
74	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	397,077,000.00
75	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	333,493,000.00
76	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	431,467,500.00
77	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	489,856,000.00
78	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	533,325,000.00
79	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	509,958,500.00
80	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	157,100,500.00
81	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	266,284,000.00
82	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	205,248,000.00
83	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	203,641,000.00
84	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	87,664,500.00
85	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	158,545,000.00
86	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	252,534,000.00
87	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236,484,000.00
88	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	287,150,500.00
89	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	338,970,000.00
90	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	119,848,000.00
91	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	116,917,000.00
92	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	216,989,500.00
93	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	161,919,500.00
94	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	229,738,000.00
95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	184,869,500.00
96	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208,272,000.00
97	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	162,069,500.00
98	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	186,212,500.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
99	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124,517,000.00
100	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	197,772,000.00
101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	232,472,000.00
102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128,448,000.00
103	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	320,977,000.00
104	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	132,538,500.00
105	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	131,538,500.00
106	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	149,367,000.00
107	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	498,776,500.00
108	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	474,122,500.00
109	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	218,339,500.00
110	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	441,082,000.00
111	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	439,825,000.00
112	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	230,990,000.00
113	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	228,734,000.00
114	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	220,412,500.00
115	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	432,598,500.00
116	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	230,884,000.00
117	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	269,305,500.00
118	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	132,788,500.00
119	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	152,906,000.00
120	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	153,010,000.00
121	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	125,548,000.00
122	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	223,189,500.00
123	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	152,838,500.00
124	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	338,958,000.00
125	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	366,058,000.00
126	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	354,775,500.00
127	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	129,048,000.00
128	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	114,048,000.00
129	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	265,029,000.00
130	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	258,972,000.00
131	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	269,684,000.00
132	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141,838,500.00
133	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	620,418,000.00
134	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	390,898,500.00
135	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	156,264,000.00
136	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	111,048,000.00
137	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	156,810,000.00
138	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	220,160,000.00
139	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	376,227,000.00
140	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	607,996,500.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
141	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	295,534,000.00
142	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	148,292,500.00
143	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	252,172,000.00
144	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	192,872,000.00
145	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	264,765,000.00
146	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141,944,000.00
147	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	199,310,000.00
148	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	223,612,500.00
149	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	181,929,000.00
150	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	991,152,000.00
151	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	598,787,000.00
152	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	972,514,000.00
153	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,097,900,000.00
154	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	828,244,500.00
155	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	807,499,000.00
156	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,020,091,000.00
157	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	864,274,000.00
158	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	834,044,500.00
159	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	892,059,000.00
160	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	842,466,000.00
161	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	842,623,000.00
162	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	519,034,500.00
163	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	942,778,000.00
164	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	401,734,000.00
165	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	296,143,500.00
166	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	546,077,500.00
167	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	628,475,000.00
168	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	530,151,000.00
169	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	427,052,000.00
170	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	116,998,000.00
171	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	694,514,000.00
172	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	368,922,000.00
173	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,295,976,000.00
174	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,243,804,000.00
175	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,301,494,000.00
176	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,455,596,000.00
177	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,652,156,000.00
178	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	299,062,000.00
179	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	297,373,000.00
180	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	168,798,000.00
181	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	190,033,000.00
182	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	47,543,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
183	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	37,812,000.00
DINAS KESEHATAN		
184	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00
185	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146,872,579,938.00
186	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,645,000,000.00
187	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,286,500,000.00
188	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,128,654,272.00
189	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,497,000,000.00
190	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	165,578,382,498.00
191	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119,908,832,105.00
192	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1,550,000,000.00
193	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00
194	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	280,000,000.00
195	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	298,847,000.00
196	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,933,586,500.00
197	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	450,000,000.00
198	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	265,750,000.00
199	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	558,100,000.00
200	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	80,000,000.00
201	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75,000,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
202	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	378,014,000.00
203	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,730,200,000.00
204	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750,000,000.00
205	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	367,430,000.00
206	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,240,000,000.00
207	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,399,817,000.00
208	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14,357,253.00
209	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00
210	Peningkatan Pelayanan BLUD	900,000,000.00
211	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,037,662,000.00
212	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	18,456,949.00
213	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11,232,000.00
214	Peningkatan Pelayanan BLUD	900,000,000.00
215	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,121,542,000.00
216	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	33,835.00
217	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,580,000.00
218	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,500,000,000.00
219	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,935,513,000.00
220	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1,133,725.00
221	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,960,000.00
222	Peningkatan Pelayanan BLUD	3,000,000,000.00
223	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,977,716,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
224	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	7,209,244.00
225	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58,100,000.00
226	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,450,000,000.00
227	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,650,619,000.00
228	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	334,235.00
229	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,450,000.00
230	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,070,000,000.00
231	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,853,632,000.00
232	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	27,609,909.00
233	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,140,000.00
234	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,000,000,000.00
235	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,263,071,000.00
236	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	284,204.00
237	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,740,000.00
238	Peningkatan Pelayanan BLUD	705,000,000.00
239	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,052,848,000.00
240	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14,851,242.00
241	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11,500,000.00
242	Peningkatan Pelayanan BLUD	719,700,000.00
243	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,079,962,000.00
244	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	541,073.00
245	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48,900,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
246	Peningkatan Pelayanan BLUD	700,000,000.00
247	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,059,426,000.00
248	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	27,947,584.00
249	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,360,000.00
250	Peningkatan Pelayanan BLUD	465,000,000.00
251	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	993,077,000.00
252	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	18,648,721.00
253	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,570,000.00
254	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,550,000,000.00
255	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,636,348,000.00
256	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	684,907.00
257	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,440,000.00
258	Peningkatan Pelayanan BLUD	449,000,000.00
259	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,199,336,000.00
260	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	159,214.00
261	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,200,000.00
262	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,350,000,000.00
263	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,216,006,000.00
264	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	5,792,407.00
265	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,940,000.00
266	Peningkatan Pelayanan BLUD	805,000,000.00
267	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	934,980,000.00
268	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14,384,100.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
269	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29,500,000.00
270	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,100,000,000.00
271	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,317,272,000.00
272	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	152,519.00
273	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,050,000.00
274	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,018,000,000.00
275	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,590,475,000.00
276	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	129,920.00
277	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,300,000.00
278	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,130,000,000.00
279	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,358,863,000.00
280	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14,747,865.00
281	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900,000.00
282	Peningkatan Pelayanan BLUD	960,000,000.00
283	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,567,690,300.00
284	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	23,199,106.00
285	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,315,000.00
286	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,200,000,000.00
287	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,956,629,000.00
288	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14,653,468.00
289	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,758,000.00
290	Peningkatan Pelayanan BLUD	621,500,400.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
291	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,500,624,000.00
292	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	15,753,379.00
293	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,512,000.00
294	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,035,000,000.00
295	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,267,505,000.00
296	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2,667,900.00
297	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,500,000.00
298	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,000,000,000.00
299	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,166,889,000.00
300	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1,336,990.00
301	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,250,000.00
302	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,500,000,000.00
303	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,202,508,000.00
304	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9,213,109.00
305	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,206,000.00
306	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,200,000,000.00
307	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,771,471,000.00
308	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	4,558,762.00
309	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46,683,000.00
310	Peningkatan Pelayanan BLUD	700,000,000.00
311	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,020,423,000.00
312	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14,567,380.00
313	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,900,000,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
314	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,150,000,000.00
315	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	800,000,000.00
316	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000.00
317	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,304,666,453.00
318	Peningkatan Pelayanan BLUD	78,300,000,000.00
319	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,399,992,000.00
320	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,908,556,949.00
321	Peningkatan Pelayanan BLUD	12,100,000,000.00
322	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6,504,995,433.00
323	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,600,000,000.00
DINAS PEKERJAAN UMUM		
324	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,556,138,000.00
325	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	528,165,000.00
326	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,558,731,473.00
327	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,017,010,500.00
328	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,302,020,100.00
329	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,136,430,500.00
330	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62,095,545,000.00
331	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8,614,991,000.00
332	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	28,373,964,000.00
333	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,910,045,000.00
334	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	204,612,219,779.00
335	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	160,268,014,300.00
336	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	525,329,056,000.00
337	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3,500,000,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
338	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00
339	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,363,427,460.00
340	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	16,821,496,600.00
341	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8,300,000,000.00
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
342	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	22,789,237,000.00
343	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	450,000,000.00
344	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1,600,000,000.00
345	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	563,352,000.00
346	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	386,010,000.00
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
347	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,590,174,566.00
348	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,025,892,500.00
349	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,008,128,050.00
350	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439,523,200.00
351	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925,365,600.00
352	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,565,861,000.00
353	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	225,000,000.00
354	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	335,000,000.00
355	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,353,820,000.00
356	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	7,940,958,000.00
357	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2,930,690,000.00
358	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	100,000,000.00
359	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	478,596,634.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
360	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	574,200,000.00
361	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3,887,122,300.00
362	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3,666,200,000.00
363	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11,612,485,600.00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
364	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00
365	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,752,267,439.99
366	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,636,252,560.00
367	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,125,225,700.00
368	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550,000,000.00
369	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785,000,000.00
370	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,314,774,300.00
371	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000.00
372	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	650,000,000.00
373	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300,000,000.00
374	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	865,000,000.00
375	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,966,130,000.00
376	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	450,000,000.00
377	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1,400,000,000.00
378	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1,008,870,000.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
379	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30,370,697,558.00
380	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	806,916,700.00
381	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,464,201,500.00
382	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,313,200,850.00
383	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892,401,600.00
384	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,358,344,264.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
385	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,929,652,800.00
386	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,112,037,300.00
387	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25,577,600.00
DINAS SOSIAL		
388	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,981,836,618.00
389	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	327,365,000.00
390	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,699,947,310.00
391	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	790,632,150.00
392	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955,866,000.00
393	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920,209,040.00
394	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	700,000,000.00
395	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	894,499,800.00
396	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2,072,168,266.00
397	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,270,770,260.00
398	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4,363,055,000.00
399	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	442,423,964.00
400	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	382,515,380.00
401	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	505,000,000.00
DINAS KETENAGAKERJAAN		
402	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,175,244,909.00
403	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	366,743,000.00
404	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,117,037,400.00
405	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340,573,400.00
406	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,105,500.00
407	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388,913,800.00
408	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	133,186,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
409	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,287,807,000.00
410	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	59,760,000.00
411	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	247,497,800.00
412	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	174,880,100.00
413	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	42,060,000.00
414	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	466,476,500.00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
415	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,850,187,000.00
416	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,645,372,626.00
417	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	784,384,000.00
418	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436,291,600.00
419	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791,415,950.00
420	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	649,892,599.00
421	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	570,000,000.00
422	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	755,470,000.00
423	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	235,480,000.00
424	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214,800,000.00
425	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,288,700,000.00
426	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348,300,000.00
427	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	597,900,000.00
428	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2,379,786,500.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
429	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	760,200,000.00
430	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840,000,000.00
431	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	329,760,000.00
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
432	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,843,676,000.00
433	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	510,000,000.00
434	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	150,000,000.00
435	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	65,000,000.00
436	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	220,000,000.00
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
437	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,456,461,400.00
438	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	586,523,000.00
439	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,210,650,800.00
440	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	485,535,000.00
441	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832,372,000.00
442	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655,000,000.00
443	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	176,500,000.00
444	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,541,143,600.00
445	Penerbitan Izin Membuka Tanah	385,825,000.00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
446	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,650,000.00
447	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,985,448,000.00
448	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,550,000,000.00
449	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214,705,000.00
450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,851,929,400.00
451	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,093,496,587.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
452	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,817,746,700.00
453	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,863,480,866.00
454	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	199,998,000.00
455	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	29,992,700.00
456	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	399,999,550.00
457	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,097,999,925.00
458	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175,000,000.00
459	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	54,469,995,172.00
460	Penyimpanan sementara Limbah B3	55,000,000.00
461	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63,113,800.00
462	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	196,140,000.00
463	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,250,000,000.00
464	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00
465	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	145,073,700.00
466	Pengelolaan Sampah	92,351,701,700.00
467	Pengelolaan Sampah	14,214,423,348.00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
468	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,003,260,600.00
469	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,034,012,000.00
470	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,929,289,850.00
471	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413,200,000.00
472	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,088,027,900.00
473	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673,628,000.00
474	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	195,456,500.00
475	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	419,104,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
476	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	499,353,500.00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
477	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	686,990,000.00
478	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,326,759,730.00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
479	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	328,200,000.00
480	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	828,700,000.00
481	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	651,100,000.00
482	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	471,230,000.00
483	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,324,154,000.00
484	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384,950,000.00
485	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3,709,610,000.00
486	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,272,600,000.00
DINAS PERHUBUNGAN		
487	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,292,258,300.00
488	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,312,649,600.00
489	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,804,032,014.00
490	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,681,768,000.00
491	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,579,128,200.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
492	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,860,179,530.00
493	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	97,197,297,482.00
494	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1,599,982,900.00
495	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5,582,500,000.00
496	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5,749,942,520.00
497	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4,018,948,200.00
498	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3,551,374,900.00
499	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,026,736,700.00
500	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000.00
501	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00
502	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5,690,976,000.00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
503	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,682,692,000.00
504	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,320,000.00
505	Administrasi Umum Perangkat Daerah	926,151,100.00
506	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390,449,800.00
507	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422,922,000.00
508	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27,055,846,400.00
509	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,358,755,700.00
510	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,279,641,761.00
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		
511	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,220,221,720.00
512	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314,981,000.00
513	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,383,637,014.00
514	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	453,370,400.00
515	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,038,557,400.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
516	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824,976,586.00
517	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00
518	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	400,000,000.00
519	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00
520	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000.00
521	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2,404,400,000.00
522	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4,918,915,628.00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
523	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,750,157,000.00
524	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,403,242,588.00
525	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,616,896,400.00
526	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,150,557,176.00
527	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00
528	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	85,250,000.00
529	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	693,674,000.00
530	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	918,390,800.00
531	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,239,202,000.00
532	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462,913,533.00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
533	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,325,808,376.00
534	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000.00
535	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,077,473,600.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
536	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373,293,925.00
537	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,559,635,100.00
538	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,321,497,500.00
539	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4,679,462,154.00
540	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,391,626,500.00
541	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,894,224,000.00
542	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	8,794,400,000.00
543	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3,400,000,000.00
544	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8,525,775,200.00
545	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,150,000,000.00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
546	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	321,000,000.00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
547	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	315,553,239.00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
548	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	928,000,000.00
549	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,326,100,000.00
550	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00
551	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,962,890,000.00
552	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000.00
553	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	145,000,000.00
554	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
555	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,688,213,000.00
556	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,003,500.00
557	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,271,668,220.00
558	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56,516,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
559	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,685,818,800.00
560	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,276,075,300.00
561	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,275,589,957.00
562	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	224,952,600.00
DINAS PERPUSTAKAN DAN ARSIP		
563	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	331,904,000.00
564	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	195,440,000.00
565	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	56,000,000.00
566	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	15,000,000.00
567	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	10,000,000.00
568	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	20,000,000.00
569	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	17,000,000.00
570	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	12,000,000.00
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
571	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00
572	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	225,000,000.00
573	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	600,000,000.00
574	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1,205,000,000.00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
575	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3,195,615,546.00
576	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-
577	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	175,000,000.00
578	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7,177,498,400.00
579	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00
580	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1,532,427,600.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
581	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,000,000,000.00
582	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6,178,308,475.00
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
583	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00
584	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,432,486,500.00
585	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	584,247,900.00
586	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,999,599,000.00
587	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,557,666,600.00
588	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1,599,981,600.00
589	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00
590	Pengembangan Prasarana Pertanian	179,993,500.00
591	Pembangunan Prasarana Pertanian	-
592	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	400,000,000.00
593	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	300,000,000.00
594	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	160,000,000.00
595	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	885,000,000.00
596	Pembangunan Prasarana Pertanian	2,150,000,000.00
DINAS PERDAGANGAN		
597	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,460,285,000.00
598	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190,664,000.00
599	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,892,035,600.00
600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196,969,500.00
601	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,983,796,200.00
602	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,807,821,800.00
603	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	9,723,500.00
604	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	104,800,000.00
605	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	50,000,000.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
606	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30,509,831,120.00
607	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	9,025,684,780.00
608	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	203,290,500.00
609	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	531,061,000.00
610	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	332,542,000.00
611	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	228,840,600.00
612	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	210,087,000.00
613	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	89,992,400.00
614	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	79,971,300.00
615	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84,945,500.00
616	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	58,959,600.00
617	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	464,564,276.00
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		
618	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5,171,063,131.00
619	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	84,400,000.00
620	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	183,988,000.00
621	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2,000,000,000.00
SEKRETARIAT DAERAH		
622	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127,600,000.00
623	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,753,162,000.00
624	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,030,000,000.00
625	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54,889,823,864.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
626	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,564,420,000.00
627	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,761,800,030.00
628	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,902,500,000.00
629	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,426,070,157.00
630	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,840,000,000.00
631	Penataan Organisasi	943,865,550.00
632	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,095,500,000.00
633	Administrasi Tata Pemerintahan	16,869,271,190.00
634	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18,397,161,189.00
635	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2,598,457,300.00
636	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	10,522,969,650.00
637	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	860,000,000.00
638	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,714,146,500.00
639	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,426,000,000.00
SEKRETARIAT DPRD		
640	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,579,556,000.00
641	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	610,291,500.00
642	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24,973,897,183.00
643	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240,000,000.00
644	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,380,000,000.00
645	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,620,000,000.00
646	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40,661,160,599.00
647	Layanan Administrasi DPRD	11,013,118,300.00
648	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9,571,679,443.00
649	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4,263,863,392.00
650	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2,006,759,500.00
651	Peningkatan Kapasitas DPRD	15,688,000,000.00
652	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6,274,991,308.00
653	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	685,288,000.00
654	Pembahasan Kerja Sama Daerah	707,307,730.00
655	Fasilitasi Tugas DPRD	5,255,521,770.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
656	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,839,274,000.00
657	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	766,934,100.00
658	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,892,325,900.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
659	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470,117,000.00
660	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562,497,000.00
661	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,752,000,000.00
662	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,021,000,000.00
663	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,065,000,000.00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
664	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285,999,600.00
665	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,588,986,400.00
666	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,000,000.00
667	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	60,499,600.00
668	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161,920,100.00
669	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,141,088,011.00
670	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525,345,846.00
671	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,168,872,500.00
672	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,923,954,200.00
673	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4,258,666,500.00
674	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2,868,849,500.00
675	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2,693,106,000.00
676	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13,687,686,429.37
677	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	4,049,373,300.00
678	Pengelolaan Barang Milik Daerah	10,038,519,200.00
679	Pengelolaan Barang Milik Daerah	61,232,299,277.00
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
680	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,594,000.00
681	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47,927,604,790.00
682	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150,584,000.00
683	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,593,095,510.00
684	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	639,152,290.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
685	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961,189,700.00
686	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,092,707,310.00
687	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**10,223,112,652.00**
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
688	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,498,344,689.00
689	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,502,000.00
690	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,231,073,680.00
691	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,350,093.00
692	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385,396,166.00
693	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3,321,931,205.00
694	Mutasi dan Promosi ASN	770,000,000.00
695	Pengembangan Kompetensi ASN	1,947,115,200.00
696	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	309,199,700.00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
697	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620,000,000.00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
698	Pengembangan Kompetensi Teknis	2,294,618,999.00
699	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3,223,710,075.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
700	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	350,000,000.00
701	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1,100,000,000.00
702	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,620,000,000.00
703	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1,000,000,000.00
INSPEKTORAT DAERAH		
704	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,916,142,009.00
705	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,055,482,000.00
706	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,120,740,300.00
707	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436,150,800.00
708	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927,114,300.00
709	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,152,306,600.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
710	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,435,000,000.00
711	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	572,900,000.00
712	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	168,000,000.00
713	Pendampingan dan Asistensi	1,889,100,000.00
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT		
714	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,203,700.00
715	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,886,147,000.00
716	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109,232,400.00
717	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,978,112,300.00
718	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	345,436,000.00
719	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,387,754,200.00
720	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,463,593,800.00
721	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	344,999,800.00
722	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29,416,500.00
723	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70,000,000.00
724	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	123,599,800.00
725	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,458,912,900.00
726	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	353,514,000.00
727	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,491,332,179.00
728	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,262,266,900.00
729	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	864,695,300.00
730	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,315,494,500.00
731	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	885,983,102.00
732	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,122,099,600.00
733	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	782,536,823.00
734	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	721,890,200.00
735	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	961,514,900.00
736	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	985,503,007.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
737	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	986,904,536.00
738	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	410,172,000.00
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH		
739	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,251,058,776.00
740	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,616,000.00
741	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,041,406,724.00
742	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	539,178,724.00
743	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,188,085,800.00
744	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,940,801,700.00
745	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	482,886,300.00
746	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80,295,600.00
747	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85,000,000.00
748	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	107,934,200.00
749	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,582,110,800.00
750	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	840,153,200.00
751	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,332,700,552.00
752	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	820,734,948.00
753	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,400,800,900.00
754	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,254,022,000.00
755	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,571,969,850.00
756	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,545,624,300.00
757	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,321,033,600.00
758	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	670,307,700.00
759	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,518,409,380.00
760	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	734,088,300.00
761	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,542,057,500.00
762	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,091,542,000.00
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
763	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,975,400.00
764	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,017,947,000.00
765	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700,000,000.00
766	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,679,907,650.00
767	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	518,455,750.00
768	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,329,595,990.00
769	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,291,823,710.00
770	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	158,810,600.00
771	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57,079,100.00
772	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90,000,000.00
773	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	149,999,600.00
774	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,084,390,800.00
775	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	575,196,600.00
776	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,036,915,000.00
777	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	926,794,000.00
778	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	789,951,600.00
779	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,379,648,000.00
780	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	750,179,900.00
781	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	855,226,000.00
782	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	723,487,500.00
783	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	859,026,000.00
784	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	727,386,199.00
785	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,042,758,800.00
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA		
786	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,500,000.00
787	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,786,639,000.00
788	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59,550,000.00
789	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,407,100,700.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
790	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249,442,000.00
791	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,539,584,300.00
792	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,494,490,104.00
793	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	475,700,000.00
794	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,000,000.00
795	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000.00
796	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153,000,000.00
797	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,291,000,000.00
798	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	565,000,000.00
799	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,484,325,000.00
800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	695,276,000.00
801	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,688,086,000.00
802	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,148,484,000.00
803	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,865,086,000.00
804	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,277,972,000.00
805	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,416,475,000.00
806	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,067,554,000.00
807	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,466,475,000.00
808	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,504,576,000.00
809	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,143,697,896.00
810	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,358,902,000.00
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
811	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,240,000.00
812	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,061,044,000.00
813	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,617,960,500.00
814	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	725,412,000.00
815	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,619,025,800.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
816	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,535,694,746.00
817	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	312,434,600.00
818	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	204,072,000.00
819	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63,550,000.00
820	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	98,547,000.00
821	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,120,201,400.00
822	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	699,999,500.00
823	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	963,000,000.00
824	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	810,432,000.00
825	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,300,460,000.00
826	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	697,872,000.00
827	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	923,726,000.00
828	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	502,161,800.00
829	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,445,189,600.00
830	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,194,352,000.00
831	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,120,706,600.00
832	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,106,698,000.00
833	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,807,573,400.00
834	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,263,516,500.00
835	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,137,126,100.00
836	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	889,832,000.00
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
837	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00
838	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,125,653,000.00
839	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,753,689,940.00
840	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	552,000,000.00
841	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,885,021,800.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
842	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,552,506,360.00
843	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	650,000,000.00
844	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	45,000,000.00
845	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	150,000,000.00
846	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	140,000,000.00
847	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,000,000,000.00
848	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	834,968,300.00
849	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,469,341,000.00
850	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	733,732,800.00
851	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,657,570,100.00
852	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,046,240,100.00
853	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,609,999,600.00
854	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	975,730,300.00
855	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,424,071,000.00
856	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,007,321,900.00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
857	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,059,429,589.00
858	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248,200,000.00
859	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,433,101,200.00
860	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262,451,800.00
861	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836,692,200.00
862	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,125,725,435.00
863	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6,272,863,900.00
864	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4,855,031,782.00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
865	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	932,294,600.00
866	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6,651,434,100.00
867	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	27,513,465,500.00
Jumlah		**4,545,984,209,715.36**

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2024

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termasuk dalam materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LPPD yaitu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Untuk mengetahui apakah Perangkat Daerah/Unit Kerja sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu indikator. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Indikator dan standar pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Negara.

Dalam rangka optimalisasi penerapan SPM di Kota Balikpapan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2027.

El 1.8

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	PERUBAHAN%
1	Indeks Pembangunan Manusia	82.03	82.62	0.72%
2	Angka Kemiskinan	2.31	2.23	-3.46%
3	Angka Pengangguran	6.09	6.22	2.13%
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.49	3.23	-50.23%
5	Pendapatan Perkapita	201.64	214.11	61.18%
6	Ketimpangan Pendapatan	0.323	0.324	0.13%

Sumber data badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kota Balikpapan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = **20518**	75.26%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada menggunakan data kota balikpapan

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = **27263**			
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = **82.193** Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = **82.555**	99.56%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = **41.410** Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = **40.794**	101.51%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = **6403** Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = **7913**	80.92%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	
		Kesehatan			
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = **2096** Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = **757418**	2.77%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = **15** Jumlah RS di kabupaten/kota = **16**	93.75%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = **10900** / Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = **10900**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = **10441** / Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = **10441**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = **10315** / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = **10315**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = **51614** / Jumlah balita di kabupaten/kota = **51614**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = **101088** / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = **101088**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = **313965** / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = **313965**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = **41011**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = **41011**			
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **64605** Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = **64605**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **20253** Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = **20253**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **773** Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = **773**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **18032** Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = **18032**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = **22835** Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = **22835**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang	100%	Dinas Pekerjaan	Kota Balikpapan tidak memiliki

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = **0** Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = **1**		Umum Kota Balikpapan	kewenangan terhadap wilayah Sungai dibuktikand engan surat keterangan sekretaris Daerah
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = **0** Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = **1**	100%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Berdasarkan kriteria dan penetapan wilayah Sungai, Kota Balikpapan tidak memiliki kewenangan terhadap wilayah Sungai dibuktikand engan surat keterangan sekretaris Daerah
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting =**195** luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = **195**	100%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Tidak dilakukan karena tidak terdapat alokasi Anggaran
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = **141521** Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh	98.49%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		kabupaten/kota tersebut. = **143685**			
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = **138505** Jumlah rumah di Kabupaten A = **143685**	96.39%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = **435** Jumlah IMB yang berlaku = **435**	100%	DPMPTSP Kota Balikpapan	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = **401.43** Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota = **467.13**	85.94%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis = **394** Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota = **472**	83.47	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = **32** Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= **32**			
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = **0** Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = **1**	100%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	Tidak terdapat unit rumah dan rencana unit rumah korban bencana yang ditangani tahun 2024 karena tidak terjadi bencana
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = **0** Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = **1**	100%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	Tidak terdapat fsilitasi penyediaan rumah laya huni bagi Masyarakat terdapat relokasi program pemerintah kota
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = **26.11** Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = **29.92**	87.27%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10.ha kelurahan damai kecamatan balikpapan Kota
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = **5846** Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = **215024**	2.72%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = **13.997** Jumlah unit rumah kab/kota = **79.526**	17.60%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yangditangani = **78**	100%	satuan Polisi Pamong Praja	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = **78**		Kota Balikpapan	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = **15** Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi = **15**	100%	satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana **=100500** Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan **=100500**	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana **= 23.500** Jumlah warga negara yang berda di Kawasan rawan bencana **=70.000**	33.57%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = **5416** Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = **5416**	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota			
		= **136**			
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota			
		= **136**			
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	6.46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	6 Menit
- SOSIAL					
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	79.33%	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		=1086			
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			
		=1369			
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	100%	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		=2045			
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
		=2045			
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang	Jumlah kegiatan keseluruhan yang	100%	Dinas Ketenagakerja	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	mengacu ke rencana tenaga kerja	dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = **8** Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota =**8**		an Kota Balikpapan	
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = **9576** Jumlah tenaga kerja keseluruhan = **13323**	71.86%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = **100191,74** Jumlah tenaga kerja = **174474**	57.43%	Bapeddalitbang Kota Balikpapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	PDRB DALAM HARGA MILIAR
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = **103** Jumlah Perusahaan = **187**	55.08%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = **1585** Jumlah pencaker yang terdaftar = **4161**	38.09%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = **1060217287147.00** Jumlah seluruh belanja langsung APBD = **4239994967897.00**	42.94%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan BPKD Kota Balikpapan	
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	0

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= **180** Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) =**180**			
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = **30** Jumlah penduduk perempuan = **328173**	9.14%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
		- Pangan			
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan = **32,63** Jumlah kebutuhan pangan = **22**	148.32%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
		- Pertanahan			
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi = **2488797** seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi = **2488797**	100%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = **0** Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = **1**	0/1	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	surat keterangan bertanda tangan Sekretaris Daerah Nomor 292/0449/DPPR
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi =**897561,6** Luas izin lokasi yang diterbitkan =**2488797**	36.06%	DPMPTSP Kota Balikpapan	
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = **0** Jumlah penerima tanah obyek landreform =**1**	100%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	Tidak terdapat penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = **927,237** Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = **1068,192**	86.80%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = **4** Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = **4**	0/1	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	surat keterangan bertandatangan Sekretaris Daerah Nomor 592.2/0450/DPPR
- Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68,4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = **196376,8** Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota = **197352,8**	99.51%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = **8** usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = **151**	5.30%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = **537571** Jumlah penduduk wajib KTP-el	99.99%	Disdukcapil Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= **530837**			
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = **212576** Jumlah anak usia 0-17 tahun = **219839**	96.70%	Disdukcapil Kota Balikpapan	
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = **229848** Jumlah anak usia 0-18 tahun = **230506**	99.71%	Disdukcapil Kota Balikpapan	
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = **26** Jumlah PD = **33**	78.79%	Disdukcapil Kota Balikpapan	
- Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = **0** Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = **1**	100%	Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan Tidak Memiliki Desa Tertinggal dibuktikan dengan surat keterangan Sekretaris Daerah
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = **0** Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = **1**	100%	Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan Tidak Memiliki Desa Mandiri dibuktikan dengan surat keterangan Sekretaris Daerah
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
				anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = **70875** Jumlas Pasangan Usia Subur = **109973**	64.45%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = **13418** Jumlas Pasangan Usia Subur = **109973**	12.20%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
- Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP	0.63	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu			
		IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)			
		- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil			
		- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu			
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:			
		1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)			
		2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)			
		3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)			
		Bobot Trayek atau Lintas:			
		a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1			
		b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8			
		c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0.55	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	
- Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo =**34**	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		Jumlah PD =**34**			
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90.90%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		= **20**			
		Jumlah Layanan Publik		Bagian Organisasi Kota Balikpapan	
		= **22**			
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	86.06%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		= **453.705**			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah penduduk = **527.221**		Disdukcapil Kota Balikpapan	
- Koperasi, usaha kecil dan menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = **82** Jumlah seluruh koperasi = **128**	64.06%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = **449** Jumlah usaha mikro keseluruhan = **33848**	1.33%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
- Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = **25.681.444.504.125** Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota =**24.125.353.380**	106.45%	DPMPT Kota Balikpapan	
- Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = **413** Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = **189707**	0.22%	DPOP Kota Balikpapan	
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = **17203** jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = **189707**	9.07%	DPOP Kota Balikpapan	
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event	263	DPOP Kota Balikpapan	Nasional 254 Medali dan

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		olahraga nasional dan internasional			Internasional 9 medali
		- Statistik			
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Pembangun dalam Pembangu perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data Pembangun dalam Pembangu perencanaan Pembangunan daerah **= 34** jumlah OPD **= 34**	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = **34** jumlah PD = **34**	100%		
- Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi =**224** Jumlah area penilaian =**645**	34.72%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
- Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = **133** Jumlah cagar budaya yang terdata = **151**	88.08%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	
- Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	81.04	Arperpus Kota Balikpapan	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72.98	Arperpus Kota Balikpapan	
		- Kearsipan			
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip	80.25	Arperpus Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	67.00	Arperpus Kota Balikpapan	Kegiatan belum pernah dilaksanakan
3. Urusan Pilihan					
- Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) =**4.184,699**	88.96%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang di teapkan =**4704**			
		- Pariwisata			
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = **24511** Jumlah wisatawan tahun n-1 = **36450**	48.71%	DPOP Kota Balikpapan	
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = **946657** Jumlah wisatawan tahun n-1 = **591385775**	3.94%	DPOP Kota Balikpapan	
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = **946.657** Jumlah kamar yang tersedia = **591.385.775**	0.16%	DPOP Kota Balikpapan	
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku =**2726,69** Total PDRB harga berlaku =**153567,1**	1.76%	berdasarkan PDRB ADHB (dalam miliyar rupiah) sektor Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	berdasarkan PDRB ADHB (dalam miliyar rupiah) sektor Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realisasi dari sektor pariwisata = **264.089.452.057** Jumlah total PAD = **1.066.692.925.336,9**	24.76%		
		- Pertanian			
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = **21832,3** luas panen = **630,07**	346.51%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-74.02%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		=**--778** Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = **1051**			
- Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = **0** Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = **1**	BUP	Kota Balikpapan belum memiliki potensi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan data umum potensi panas bumi dari badan geologi pusat sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi kementrian energi dan sumber daya mineral	Kota Balikpapan belum memiliki potensi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan data umum potensi panas bumi dari badan geologi pusat sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi kementrian energi dan sumber daya mineral
- Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = **472** Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = **472**	100%	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = **293,15** RDKK =**390**	75.17%	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = **3503** jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = **4490**	78.02%	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	
- PERINDUSTRIAN					

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = **4** Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = **6**	66.67%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	62.69	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = **10** Jumlah izin yang dikeluarkan = **10**	100%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = **0** Jumlah izin yang dikeluarkan = **1**	0/1	DKUMKMP Kota Balikpapan	Sampai dengan tahun 2024 Kota Balikpapan tidak pernah menrbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) sehingga tidak ada izin yang dipantau dan di analisi
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = **0** Jumlah izin yang dikeluarkan = **1**	0/1	DKUMKMP Kota Balikpapan	Pada tahun 2024 tidak ada yang mengajukan permohonan Izin Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang kewenangan lokasinya berada di kota Balikpapan
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	100	DKUMKMP Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/ energy - Informasi tenaga kerja			
- TRANSMIGRASI					
3.h	1. Jumlah Kawasan trasnmigrasi yang difasilitasi penetapannya, 2. jumlah satuan pemukiman trasmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. jumlah satuan pemukiman yang di bina		100	BUP (Bukan kewenangan Kota Balikpapan)	BUP (Bukan kewenangan Kota Balikpapan)

.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Table 2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
- Perencanaan dan Keuangan					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = **398690771139** Jumlah APBD = **3942164953093,84**	10.11%	BPKD Kota Balikpapan	
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD = **1066692925336,93** Jumlah pendapatan padaAPBD = **4020535025062,62**	26.53%	BPKD Kota Balikpapan Bapeddalitbang Kota Balikpapan	
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3)	Level 3	Inspektorat Kota Balikpapan	LEVEL 3

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Inspektorat Kota Balikpapan	LEVEL 3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = **2.319.777.021.298,1** jumlah belanja APBD = **3.942.164.953.093,8**	58.84%	BPKD Kota Balikpapan	
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP 10 tahun berturut-turut	Inspektorat Kota Balikpapan	WTP 10 TAHUN TERAKHIR
- Pengadaan					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = **1** jumlah kontrak keseluruhan tahun n = **1**	100%	Adbang Kota Balikpapan	
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = **6.849** Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = **7.086**	96.66%	Bagian BPJ Kota Balikpapan	
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan = **2.092.148.647.080,4** total belanja langsung = **3.930.029.577.516,8**	53.23%	Bagian BPJ Kota Balikpapan	
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2024-Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm	7.67%	Bagian BPJ Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023 = **57.664.885.789** = **639502430115** Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023 = **751.735.603.234**			
- Kepegawaian					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = **1168** Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah = **2035**	57.40%	BKPSDM Kota Balikpapan	
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = **470** seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = **2035**	23.10%	BKPSDM Kota Balikpapan	
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = **172** Jumlah seluruh pegawai jabatan Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) = **470**	36.60%	BKPSDM Kota Balikpapan	
- Manajemen Keuangan					
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = **3.942.164.953.093,8** total belanja APBD dikurangi satu = **4.545.984.209.715,4**	13.28%	BPKD Kota Balikpapan	
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = **1.066.692.925.336,9**	10.88%	BPKD Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
	terhadap anggaran PAD dalam APBD	dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu			
		= **1.196.859.325.739**			
4.d.3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	BPKD Kota Balikpapan	LEVEL 4
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA		
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	YA		
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA		
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA		BPKD Kota Balikpapan	
		= **615315778235,34**			
		total belanja anggaran tahun sebelumnya			
		= **3.746.603.655.354,6**			
- Transparansi dan Partisipasi Publik					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	80.50%	Diskominfo Kota Balikpapan	
		=**241.978.040.882,93**			
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda			
		= **300.604.281.241**			
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	100%	Diskominfo Kota Balikpapan	
		= **12**			
		total jumlah dokumen yang telah dirinci			
		= **12**			

2.3 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Pada sub bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja sasaran strategis instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan cara

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024.

2.3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 maka dalam memberikan penilaian dilakukan dengan menggunakan predikat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4 Predikat Capaian Kinerja

NO	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT	KETERANGAN
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2024

Adapun capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024, telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tahun berkenaan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2024. Namun

berdasarkan dari capaian kinerja tahun sebelumnya maka terdapat beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan target kinerja. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70.16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	81.75
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30.46%
		Indeks SPBE	Poin	3.8
		Maturitas SPIP	Level	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.76
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83.81
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7690
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8462
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	14.72
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.082
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4964
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.89
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	79.12
		Persentase Permukiman Layak Huni	**%**	99.55%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.31
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.6%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	103
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8575
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah,	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	20.21%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.00%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.23%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	20.08
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2.70
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	35.20%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.8%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2024

b. Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Balikpapan selama lima tahun sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 diukur dengan merujuk pada indikator beserta target kinerja per tahun yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran kinerja daerah tercermin melalui pencapaian 18 sasaran strategis yang melibatkan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun capaian kinerja indikator utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70.16	69.06	98.43%	Tidak Tercapai
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	81.75	82.068	100.39%	Melebihi Target
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30.46%	26.90%	88.31%	Tidak Tercapai
		Indeks SPBE	Poin	3.8	3.96	104.21%	Melebihi Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	Tercapai/ Sesuai Target
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.76	0.68*	89.47%	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83.81	84.93	101.34%	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7690	0.7622	99.12%	Tidak Tercapai
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8462	0.8595	101.57%	Melebihi Target
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	14.72	15.33	104.14%	Melebihi Target
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.082	0.209	254.88%	Melebihi Target
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4964	0.4956	99.84%	Tidak Tercapai
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.89	90.80*	99.90%	Tidak Tercapai
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	79.12	81.62	103.16%	Melebihi Target
		Persentase Permukiman Layak Huni	**%**	99.55%	99.85%	100.30%	Melebihi Target
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.31	68.4	100.13%	Melebihi Target
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang	%	89.6%	96.85%	108.09%	Melebihi Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Sesuai dengan Peruntukkan					
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	103	101.43	101.52%	Melebihi Target
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8575	0.85	99.13%	Tidak Tercapai
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	20.21%	19.23%	95.15%	Tidak Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6%	6.22%	96.33%	Tidak Tercapai
		Tingkat Kemiskinan	%	2.23%	2.23%	100%	Tercapai/ Sesuai Target
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	20.08	25.705	128.01%	Melebihi Target
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89	87.35	98.15%	Tidak Tercapai
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2.70	2.67	98.89%	Tidak Tercapai
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	35.20%	38.57%	109.57%	Melebihi Target
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.8%	9.77%	168.45%	Melebihi Target

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis
Sumber : Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah 2025

Berdasarkan evaluasi capaian indikator kinerja strategis tahun 2024, terdapat 27 indikator kinerja yang diukur. Dari jumlah tersebut, 11 indikator (37,04%) belum mencapai target, 2 indikator (7,41%) mencapai target sesuai yang ditetapkan, dan 14 indikator (55,56%) berhasil melampaui target.

Indikator yang belum mencapai target mencakup berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, akses pendidikan, stabilitas ketertiban kota, serta pertumbuhan ekonomi dan ketahanan

pangan. Beberapa indikator yang termasuk dalam kategori ini antara lain Nilai SAKIP (98,43%), Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (88,31%), Indeks Sistem Merit (89,47%), Indeks Pendidikan (99,12%), Indeks Warisan Budaya (99,84%), Indeks Pembangunan Gender (99,90%), Indeks Ketentraman dan Ketertiban (99,13%), Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah (95,15%), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (96,33%), dan Skor Pola Pangan Harapan (98,15%). Capaian yang belum optimal ini menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sektor ekonomi dan ketahanan sosial.

Adapun indikator yang melampaui target berjumlah 14 indikator, yang mencakup berbagai sektor seperti pengelolaan keuangan daerah, kepuasan masyarakat, literasi, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi. Beberapa indikator yang mengalami pencapaian signifikan di antaranya Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan (254,88%), Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (168,45%), Nilai Realisasi Investasi Daerah (128,01%), Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (109,57%), Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan (108,09%), Indeks SPBE (104,21%), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (104,14%), dan Indeks Pembangunan Infrastruktur (103,16%).

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan mayoritas indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam reformasi birokrasi, peningkatan akses pendidikan, stabilitas sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih optimal dan inovatif guna memastikan bahwa seluruh indikator dapat mencapai target yang ditetapkan atau bahkan melampaui ekspektasi pada tahun-tahun mendatang.

Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024, analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan di bawah ini

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

a) Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Indikator ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)* serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor B/422/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, diketahui bahwa Nilai SAKIP Kota Balikpapan tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 69,06 poin dengan predikat ”B”. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja baik, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah

daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Apabila dibandingkan target yang telah ditetapkan diketahui bahwa capaian Nilai SAKIP Kota Balikpapan belum mencapai target atau hanya mencapai 98,43% dari target 70,16 poin.

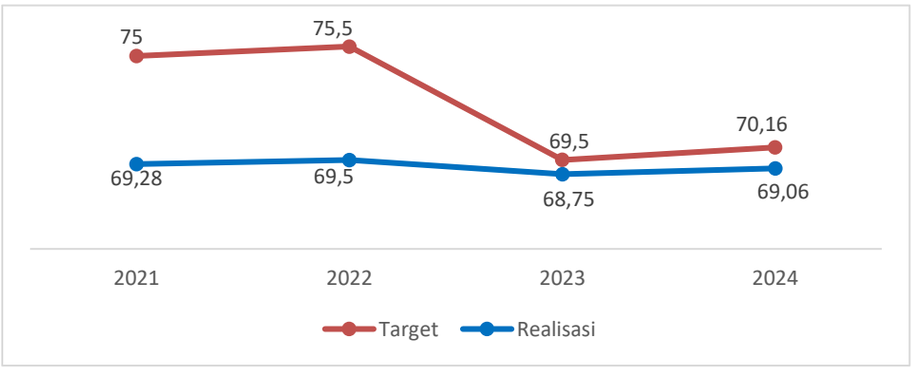

Gambar 2.1
Perkembangan Nilai SAKIP Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: KEMENPAN RB, diolah Bagian Organisasi (2025)

Perkembangan realisasi capaian kinerja nilai SAKIP Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan stagnan. Pada tahun 2021, realisasi capaian mencapai 69,28, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 75. Pada tahun 2022, capaian kinerja mengalami sedikit peningkatan dengan realisasi sebesar 69,5, namun masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 75,5. Pada tahun 2023, target mengalami penurunan menjadi 69,5, dengan realisasi yang juga menurun menjadi 68,75. Pada tahun 2024, capaian kinerja kembali mengalami sedikit peningkatan dengan realisasi sebesar 69,06, mendekati target yang ditetapkan sebesar 70,16. Dari segi tren kinerja realisasi, terdapat peningkatan sebesar 0,32% dari tahun 2021 ke 2022 (69,28 → 69,5). Namun, tren ini tidak berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi mengalami penurunan sebesar 1,08% (69,5 → 68,75). Pada tahun 2024, capaian kinerja kembali meningkat sebesar 0,45% (68,75 → 69,06). Secara keseluruhan, tren capaian realisasi dalam tiga tahun terakhir mengalami stagnasi dengan rata-rata perubahan tahunan sebesar -0,1%.

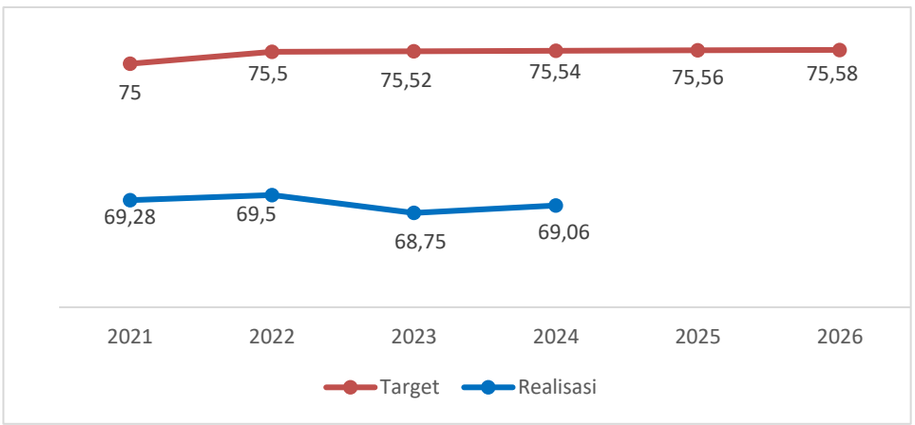

Gambar 2.2
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data di atas, capaian realisasi nilai SAKIP Kota Balikpapan dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menunjukkan tren stagnan dengan kesenjangan yang cukup signifikan antara target dan realisasi. Pada tahun 2021, realisasi capaian mencapai 69,28 atau 92,37% dari target yang ditetapkan sebesar 75. Pada tahun 2022, realisasi sedikit meningkat menjadi 69,5 atau 92,05% dari target 75,5. Namun, pada tahun 2023, capaian mengalami sedikit penurunan menjadi 68,75, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,05% dari target yang ditetapkan sebesar 75,52. Pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 69,06, namun masih jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 75,54, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,45%. Apabila dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya, yaitu 75,56 pada tahun 2025 dan 75,58 pada tahun 2026, tren realisasi menunjukkan bahwa capaian masih berada jauh di bawah target. Dengan rata-rata pencapaian hanya sekitar 91,98% dari target dalam empat tahun terakhir, tren ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan efektivitas implementasi SAKIP masih perlu diperkuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

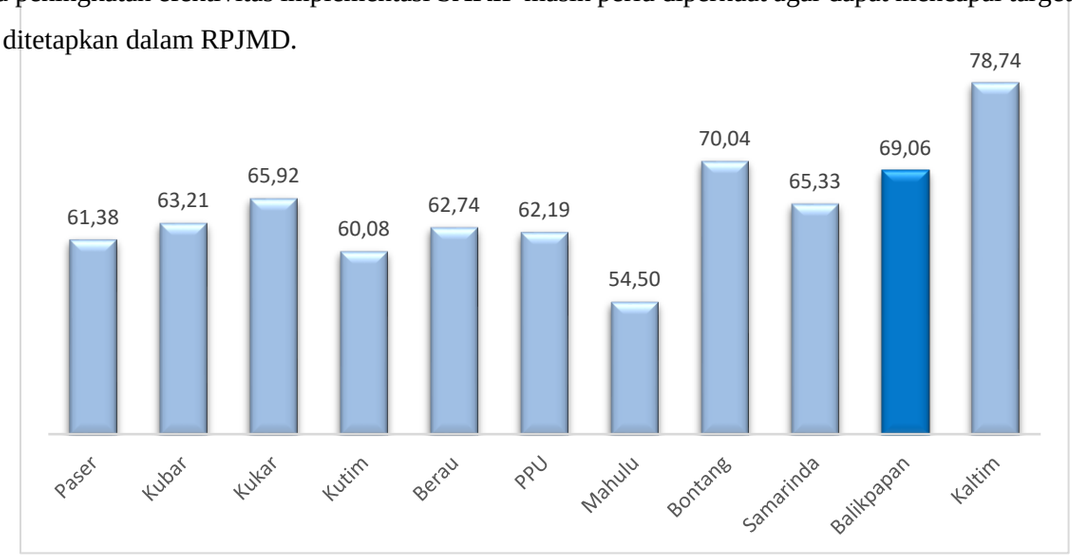

Gambar 2.3
Perbandingan Nilai SAKIP Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
Sumber: KEMENPAN RB, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data realisasi Nilai SAKIP Tahun 2024, Kota Balikpapan mencatat angka 69,06. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, namun masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 78,74. Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menempati peringkat ketiga setelah Kota Bontang yang mencatat angka 70,04 dan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan unggul atas Kota Samarinda (65,33) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (65,92) yang berada di peringkat berikutnya. Beberapa daerah lain mencatat nilai SAKIP yang lebih rendah, seperti Kabupaten Paser (61,38), Kutai Barat (63,21), Kutai Timur (60,08), Berau (62,74), dan Penajam Paser Utara (62,19). Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu mencatat angka terendah dengan 54,50. Dengan posisi ini, Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang baik dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai atau melampaui rata-rata provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Kota Balikpapan mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pencapaian target Nilai SAKIP dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan implementasi rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pencapaian target tersebut meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pemanfaatan teknologi, serta pelaporan kinerja dan mekanisme evaluasi.

Dalam aspek perencanaan, Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya melakukan perbaikan terhadap pohon kinerja. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip penyusunan dan perjenjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selain itu, hasil reviu terhadap dokumen perencanaan menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan antara sasaran strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah.

Dalam aspek pengukuran kinerja, masih terdapat indikator kinerja di beberapa perangkat daerah yang belum memenuhi prinsip SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*) dan kurang mencerminkan kejelasan ukuran capaian. Selain itu, penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya didasarkan pada data yang valid dan andal. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara target kinerja di tingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perencanaan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, meskipun Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan aplikasi REAKSI dalam pengukuran kinerja, pemanfaatannya masih belum terintegrasi secara menyeluruh dari tingkat Pemerintah Daerah hingga individu pegawai. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pengawasan dan evaluasi kinerja secara *real-time*. Selain itu, hasil pengukuran kinerja organisasi juga belum digunakan sebagai dasar dalam mekanisme *reward and punishment*, sehingga kurang mendorong budaya kinerja yang lebih baik.

Dalam aspek pelaporan, laporan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah masih memiliki keterbatasan dalam analisis *benchmark* dengan capaian kinerja di tingkat provinsi maupun nasional. Beberapa laporan Perangkat Daerah juga belum didukung dengan analisis keberhasilan dan kegagalan yang memadai sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja. Selain itu, pemanfaatan laporan kinerja dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya masih belum optimal, yang tercermin dari masih adanya penetapan target perencanaan yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan juga belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja di masing-masing Perangkat Daerah. Meskipun telah terdapat pedoman evaluasi, pelaksanaannya belum dilakukan secara berkelanjutan dalam tahun berjalan. Selain itu, laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual implementasi SAKIP serta belum secara efektif mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja di setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi SAKIP Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu penyempurnaan perencanaan kinerja, penguatan pengukuran kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi, perbaikan pelaporan kinerja, serta penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja.

1. Penyempurnaan Perencanaan Kinerja

   Pemerintah Kota Balikpapan sedang melakukan penyempurnaan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, sehingga dapat memastikan perjenjangan kinerja yang lebih sistematis serta selaras antara sasaran strategis di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu, dilakukan pula reviu dan harmonisasi dokumen perencanaan secara menyeluruh guna menghilangkan ketidaksesuaian antara sasaran strategis yang ditetapkan di berbagai tingkatan pemerintahan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan mendukung pencapaian target yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Balikpapan juga sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dan pohon kinerja, dengan melibatkan Inspektorat dalam proses reviu agar dokumen perencanaan yang disusun lebih akurat, realistis, serta mampu menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja secara lebih optimal.

2. Penguatan Pengukuran Kinerja

   Pemerintah Kota Balikpapan telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis guna meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam penilaian capaian kinerja. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penyempurnaan indikator kinerja perangkat daerah agar sesuai dengan prinsip SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*), sehingga setiap indikator yang digunakan lebih terukur, realistis, dan mencerminkan ukuran capaian yang objektif. Selain itu, dilakukan pula verifikasi dan validasi target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, guna memastikan bahwa target yang ditetapkan berbasis data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota Balikpapan juga menetapkan *baseline* target kinerja berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga perencanaan kinerja dapat berfungsi sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas kinerja sekaligus mencegah penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

   Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan penyempurnaan aplikasi REAKSI, sehingga sistem ini dapat terintegrasi secara menyeluruh dari tingkat Pemerintah Daerah hingga individu pegawai. Dengan adanya integrasi tersebut, pengawasan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara *real-time*, memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala yang dihadapi serta perbaikan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga akan meningkatkan pemanfaatan data hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penerapan mekanisme *reward and punishment.* Perangkat daerah yang menunjukkan capaian kinerja tinggi diberikan apresiasi sebagai bentuk motivasi, sementara perangkat daerah yang masih belum optimal didorong untuk melakukan perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan sedang

menyusun kebijakan *reward and punishment* yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan terkait tambahan penghasilan pegawai berbasis capaian kinerja organisasi.

4. Perbaikan Pelaporan Kinerja

   Pemerintah Kota Balikpapan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelaporan kinerja guna memperkuat akuntabilitas serta efektivitas perencanaan dan evaluasi kinerja di seluruh perangkat daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengarahkan perangkat daerah untuk menyusun laporan kinerja yang mencakup analisis *benchmark* baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan adanya analisis perbandingan ini, setiap perangkat daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga menetapkan sistematika penyusunan laporan kinerja yang lebih seragam bagi seluruh perangkat daerah, sehingga analisis keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja dapat disajikan secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan.

   Langkah strategis lainnya adalah memastikan bahwa laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya, sehingga target yang ditetapkan tetap realistis dan berorientasi pada peningkatan kinerja, serta mencegah penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan desk penyusunan laporan kinerja guna memastikan perangkat daerah menyusun laporan yang lebih sistematis, berbasis data, dan sesuai dengan standar akuntabilitas yang telah ditetapkan. Selain itu, guna meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan laporan kinerja, dilaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi tim penyusun laporan kinerja di setiap perangkat daerah. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyusun laporan kinerja secara lebih akurat, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

5. Penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

   Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan berbagai strategi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah meningkatkan efektivitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan bahwa evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sepanjang tahun berjalan. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pencapaian kinerja serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan secara lebih dini.

   Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan evaluasi *on-going* AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan, yang bertujuan untuk memberikan umpan balik secara lebih cepat kepada perangkat daerah yang mengalami kendala dalam pencapaian target kinerja. Dengan adanya evaluasi ini, perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum akhir periode pelaporan. Sebagai upaya lebih lanjut, Pemerintah Kota Balikpapan juga meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, agar lebih mencerminkan kondisi aktual implementasi SAKIP di setiap perangkat daerah. Laporan ini tidak hanya berisi hasil

capaian kinerja, tetapi juga menyertakan analisis mendalam serta rekomendasi konkret yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan dan pencapaian kinerja di masa mendatang.

Dengan berbagai upaya strategis yang telah dan akan dilaksanakan, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Keberlanjutan dari upaya ini tidak hanya akan memperbaiki capaian nilai SAKIP, tetapi juga mendorong budaya kinerja yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga pelayanan publik dapat semakin berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

b) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, IPKD terdiri atas enam dimensi utama, yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Akumulasi dari keenam dimensi tersebut menghasilkan nilai IPKD, yang menjadi salah satu indikator kinerja yang selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026.

Gambar 2.4
Rumus Hitung Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan penilaian yang dirilis oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) IPKD Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN tanggal 13 Desember 2024 hal Penyampaian SK Mendagri tentang Hasil IPKD Tahun 2023, Tahun ukur 2024, Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh indeks sebesar 82,068 dan memperoleh Nilai A dengan kategori Baik serta menduduki peringkat ketiga Nasional untuk kategori Daerah Kota dengan Kemampuan Keuangan Tinggi. Dengan kata lain, capaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 tercapai sebesar 100,39% dan mendapat predikat “melebihi target”.

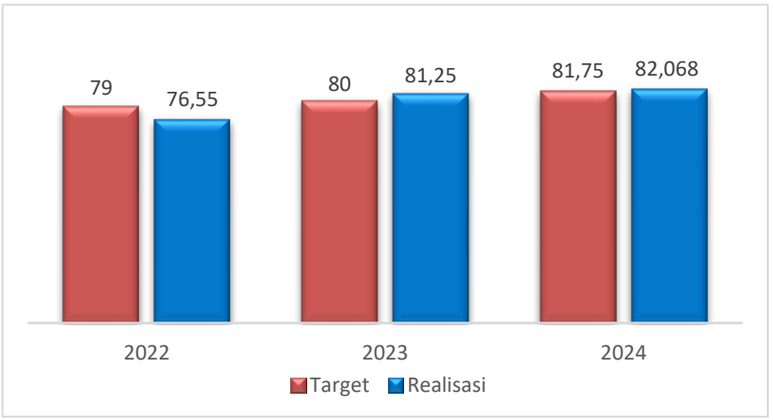

Gambar 3.5
Perkembangan Persentase Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2022, realisasi IPKD mencapai 76,55, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 79. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 81,25, melampaui target sebesar 80. Peningkatan ini setara dengan 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi IPKD kembali meningkat menjadi **82,068**, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar **81,75**. Meskipun peningkatan ini tetap menunjukkan perkembangan positif, laju pertumbuhan realisasi IPKD dibandingkan tahun sebelumnya hanya mencapai **1,01%**, lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2023. Berdasarkan tren pertumbuhan tersebut, rata-rata peningkatan IPKD Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir adalah 3,57% per tahun.

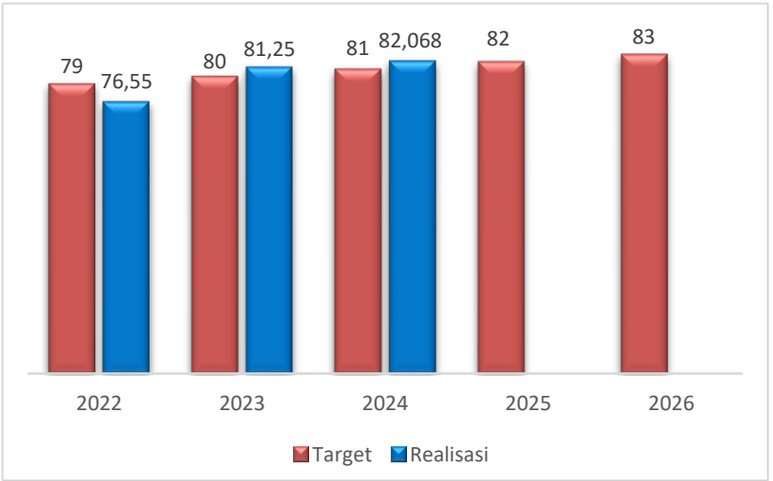

Gambar 2.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data di atas, capaian realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Balikpapan dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menunjukkan tren peningkatan yang positif, bahkan melampaui target yang telah

ditetapkan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi IPKD mencapai **76,55**, atau **96.9%** dari target yang ditetapkan sebesar **79**, menunjukkan bahwa meskipun belum mencapai target, kinerja pengelolaan keuangan daerah tetap dalam kategori baik. Tren positif terlihat pada tahun 2023, di mana realisasi IPKD mencapai **81,25**, melampaui target sebesar **1,25 poin**, dengan tingkat pencapaian **101,56%.** Kinerja ini terus meningkat pada tahun 2024, dengan realisasi **82,068**, melampaui target **81** dengan capaian **101,32%**. Apabila dibandingkan dengan target IPKD untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 82 pada 2025 dan 83 pada 2026, capaian realisasi tahun 2024 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 0,068 poin dan hampir mencapai target tahun 2026. Dengan capaian realisasi 100,08% dari target 2025 dan 98,87% dari target 2026, tren peningkatan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kota Balikpapan telah memberikan hasil yang positif.

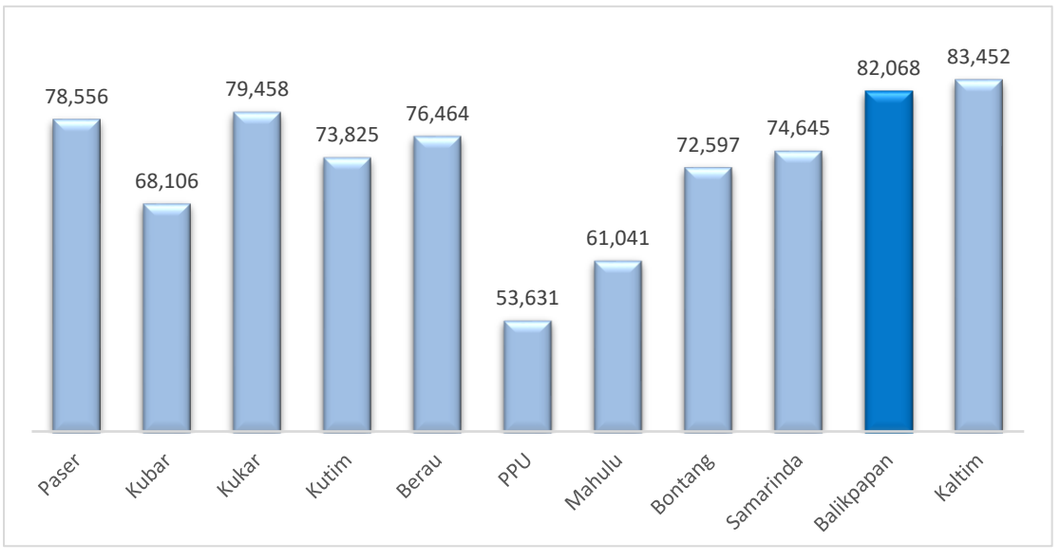

Gambar 2.7
Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024, Kota Balikpapan mencatat angka tertinggi di Kalimantan Timur dengan capaian 82,068. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur dan hanya sedikit di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 83,452. Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menempati peringkat pertama, unggul atas Kutai Kartanegara (79,458) di peringkat kedua, diikuti oleh Kabupaten Paser (78,556) dan Kabupaten Berau (76,464). Kota Samarinda dan Kota Bontang mencatat angka masing-masing 74,645 dan 72,597, sementara Kutai Timur memiliki skor 73,825. Beberapa kabupaten dengan IPKD lebih rendah antara lain Kutai Barat (68,106), Mahakam Ulu (61,041), dan Penajam Paser Utara (53,631).

Keberhasilan Kota Balikpapan dalam mencapai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tertinggi di Kalimantan Timur bahkan menduduki peringkat ketiga Nasional untuk kategori Daerah Kota dengan Kemampuan Keuangan Tinggi pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Salah satu faktor utama adalah perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, di mana setiap program yang dibiayai telah disusun secara sistematis dan

selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga berkomitmen penuh dalam menjalankan amanat undang-undang terkait *mandatory spending* dalam penyusunan anggaran dalam pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga terus diperkuat dengan keterbukaan informasi publik dengan melakukan publikasi dokumen keuangan daerah termasuk keteraksesannya bagi publik. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas dipublikasikannya 29 dokumen yang dipersyaratkan pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu koordinasi yang baik juga harus ditingkatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan selaku perangkat daerah yang berwenang dalam mempublikasikan dokumen.

Pemerintah Kota Balikpapan juga berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal melalui koordinasi yang baik antara Inspektorat Kota Balikpapan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini terbukti efektif dalam mencegah penyimpangan serta memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi penyerapan anggaran juga menjadi faktor penting dalam pencapaian IPKD yang tinggi, di mana Pemerintah Kota memastikan bahwa realisasi belanja daerah dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Kondisi keuangan daerah yang sehat turut berkontribusi pada pencapaian ini, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat, pengelolaan Dana Transfer yang optimal, serta efisiensi dalam pengeluaran telah memperkuat stabilitas fiskal Kota Balikpapan. Semua ini tidak terlepas dari komitmen tinggi dari Wali Kota Balikpapan serta jajaran Pemerintah Kota dalam mengawal reformasi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur juga menjadi perhatian utama, dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah.

Namun, pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Balikpapan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kelemahan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Kota Balikpapan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyajian LKPD. Dengan komitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya menyajikan LKPD yang berkualitas dan tepat waktu. Konsistensi dalam peningkatan performa ini dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih secara berturut-turut. Selain memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan manajemen aset daerah yang andal, BKAD juga menerapkan timeline kerja yang terstruktur agar LKPD dapat tersusun secara tepat waktu dan diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pencapaian IPKD tertinggi di Kalimantan Timur ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Kota Balikpapan. Ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan akan terus mengoptimalkan berbagai strategi yang telah berjalan guna memastikan keberlanjutan pencapaian ini serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

c) Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah sehingga berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Variabel derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini mencerminkan tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

$$ddf = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Gambar 2.8
Rumus Hitung Derajat
Desentralisasi Fiskal Daerah
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan perhitunga sesuai rumus di atas diketahui bahwa realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 belum mampu mencapai target yang ditetapkan 30,46% atau dengan kata lain hanya tercapai 26,90% dengan capaian sebesar 88,31% dengan predikat “tidak tercapai”.

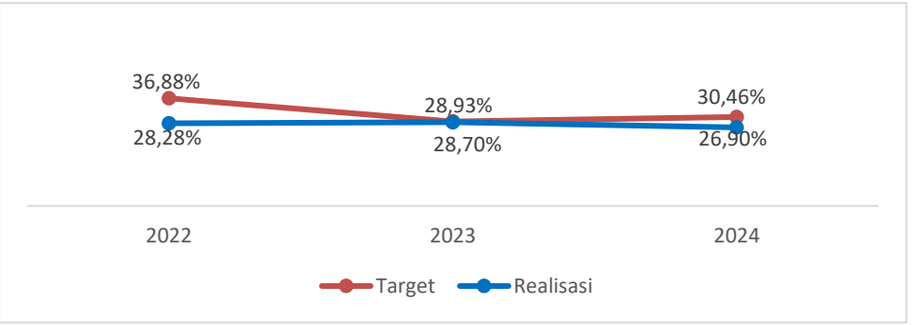

Gambar 2.9
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kota Balikpapan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi antara target dan realisasi capaian. Pada tahun 2022, realisasi capaian mencapai 28,28%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 36,88%. Pada tahun 2023, capaian kinerja menunjukkan sedikit peningkatan dengan realisasi sebesar 28,70%, mendekati target yang ditetapkan sebesar 28,93%. Namun, pada tahun 2024, capaian kinerja kembali mengalami penurunan, dengan realisasi hanya mencapai 26,90%, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 30,46%. Dari segi tren kinerja realisasi, terdapat peningkatan sebesar 0,42% dari tahun 2022 ke 2023 (28,28% → 28,70%). Namun, tren ini tidak berlanjut pada tahun 2024, di mana realisasi mengalami penurunan sebesar 1,80% (28,70% → 26,90%). Secara keseluruhan, tren capaian realisasi mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,69% per tahun dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal di Kota Balikpapan serta strategi optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

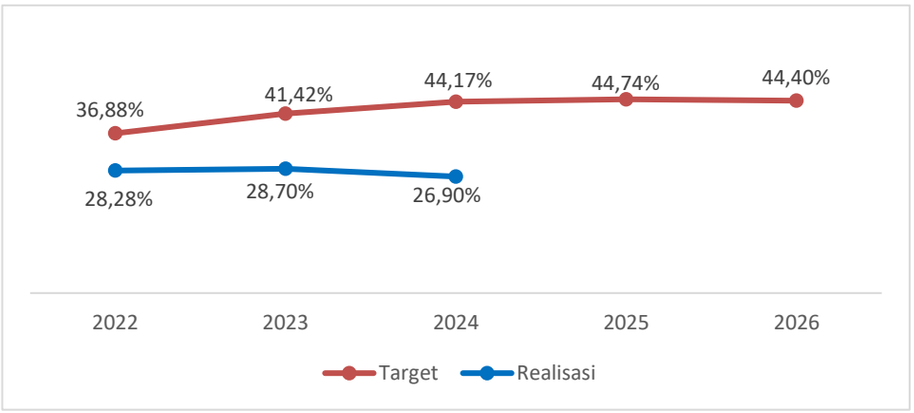

Gambar 2.10
Perbandingan Target dan Realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi derajat desentralisasi fiskal Kota Balikpapan dalam kerangka perencanaan jangka menengah menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi yang masih cukup signifikan. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 36,88%, namun realisasi hanya mencapai 28,28%. Selanjutnya, pada tahun 2023, target mengalami peningkatan menjadi 41,42%, tetapi realisasi hanya mencapai 28,70%, yang masih jauh dari target yang diharapkan. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana target ditingkatkan menjadi 44,17%, namun realisasi justru mengalami penurunan menjadi 26,90%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 sebesar 44,74%, maka capaian realisasi tahun 2024 hanya mencapai 60,15% dari target tersebut. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 sebesar 44,40%, capaian realisasi tahun 2024 hanya mencapai 60,63% dari target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Balikpapan mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pencapaian target derajat desentralisasi fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pertumbuhan PAD yang belum optimal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi, peningkatan penerimaan masih belum mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan belanja daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan sumber pendapatan baru, serta dinamika perekonomian yang berdampak pada daya beli masyarakat dan aktivitas usaha di Kota Balikpapan. Selain itu, ketergantungan terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah. Adanya perubahan kebijakan transfer fiskal nasional serta alokasi anggaran yang bergantung pada kebijakan pusat menyebabkan ruang gerak fiskal daerah menjadi terbatas.

Pemerintah Kota Balikpapan juga mencermati dampak eksternal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta dampak pandemi yang berkepanjangan, yang turut memengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya. Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas, Kota Balikpapan turut merasakan dampak dari volatilitas harga komoditas tersebut, yang berdampak pada penerimaan pajak daerah serta retribusi.

Selain faktor ekonomi, kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor yang perlu diperbaiki. Meskipun berbagai reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan, tantangan dalam perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan masih menjadi kendala dalam pencapaian target derajat desentralisasi fiskal. Kapasitas aparatur dalam mengelola sumber daya fiskal secara lebih inovatif dan produktif perlu terus ditingkatkan agar derajat desentralisasi fiskal dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target derajat desentralisasi fiskal, Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan berbagai upaya strategi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah telah mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi.

Gambar 2.11
Berbagai Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan (2024)

Intensifikasi dilakukan dengan memperkuat sistem pemungutan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi yang masif maupun penegakkan hukum, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah pengembangan sistem pembayaran pajak secara daring serta optimalisasi pemanfaatan data berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Di sisi ekstensifikasi, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya memperluas basis pajak dan menggali potensi sumber pendapatan baru. Beberapa inisiatif yang sedang dikembangkan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan alternatif. Selain itu, peningkatan retribusi dari sektor jasa dan perizinan juga menjadi fokus utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi belanja dan peningkatan efisiensi anggaran. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah reorientasi belanja daerah, di mana belanja pegawai dan operasional dikendalikan agar lebih proporsional dibandingkan dengan belanja modal yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan investasi strategis. Reformasi dalam proses

perencanaan dan penganggaran juga dilakukan dengan menerapkan sistem perencanaan berbasis kinerja, sehingga setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya meningkatkan resiliensi ekonomi daerah dengan mendorong diversifikasi sektor ekonomi. Pengembangan sektor non-migas menjadi prioritas utama, terutama dalam sektor industri kreatif, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi digital. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan akademisi, untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengimplementasikan berbagai reformasi dalam tata kelola keuangan. Digitalisasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan anggaran dilakukan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penguatan kapasitas aparatur juga menjadi perhatian utama dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dalam mengelola sumber daya fiskal secara lebih inovatif dan produktif.

Dengan berbagai upaya strategis yang telah dan sedang dilaksanakan, Pemerintah Kota Balikpapan optimis bahwa derajat desentralisasi fiskal dapat terus meningkat secara bertahap. Keberhasilan dalam pengelolaan fiskal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara menyeluruh.

d) Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengukur sejauh mana pemerintah telah mengimplementasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks ini dihitung dari penjumlahan perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain, yang mencakup aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Hasil penilaian ini berada dalam rentang 0 hingga 5, dengan kategori sangat rendah hingga sangat tinggi, yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas transformasi digital dalam pemerintahan.

$$\textit{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij} \times BA_{ij}$$

dimana:

- ND_j adalah nilai indeks domain ke-j;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.

Gambar 2.12
Rumus Hitung Indeks SPBE
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan hasil *assessment* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diperoleh indeks SPBE Kota Balikpapan Tahun 2024 sebesar 3,96 poin dengan capaian kinerja sebesar 104,21 % atau mendapat predikat "melebihi target".

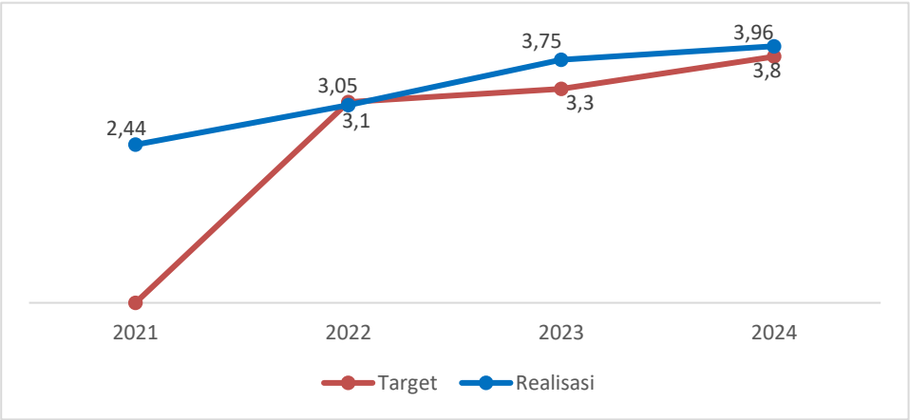

Gambar 2.13
Perkembangan Indeks SPBE Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DISKOMINFO Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Indeks SPBE Kota Balikpapan dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan kinerja yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, realisasi Indeks SPBE mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 2,44 menjadi 3,05. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 22,95%, di mana realisasi mencapai 3,75. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi Indeks SPBE meningkat sebesar 5,6% dibandingkan dengan tahun 2023, mencapai 3,96. Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan Indeks SPBE dalam tiga tahun terakhir mencapai 17,85% per tahun. Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan Kota Balikpapan.

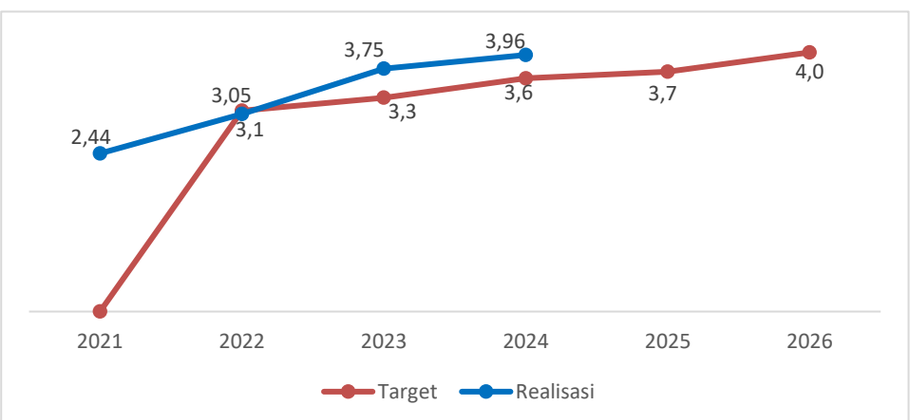

Gambar 2.14

Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi Indeks SPBE Kota Balikpapan dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, target Indeks SPBE ditetapkan sebesar 3,3, namun realisasi yang dicapai lebih tinggi 0,45 poin dari target. Tren ini semakin meningkat pada tahun 2024, di mana realisasi mencapai 3,96, melampaui target sebesar 0,36 poin. Capaian ini bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu 3,7, dengan selisih 0,26 poin. Dengan kata lain, pada tahun 2024, Indeks SPBE Kota Balikpapan sudah melampaui target satu tahun ke depan dan hampir mencapai target tahun 2026, yang ditetapkan sebesar 4,0.

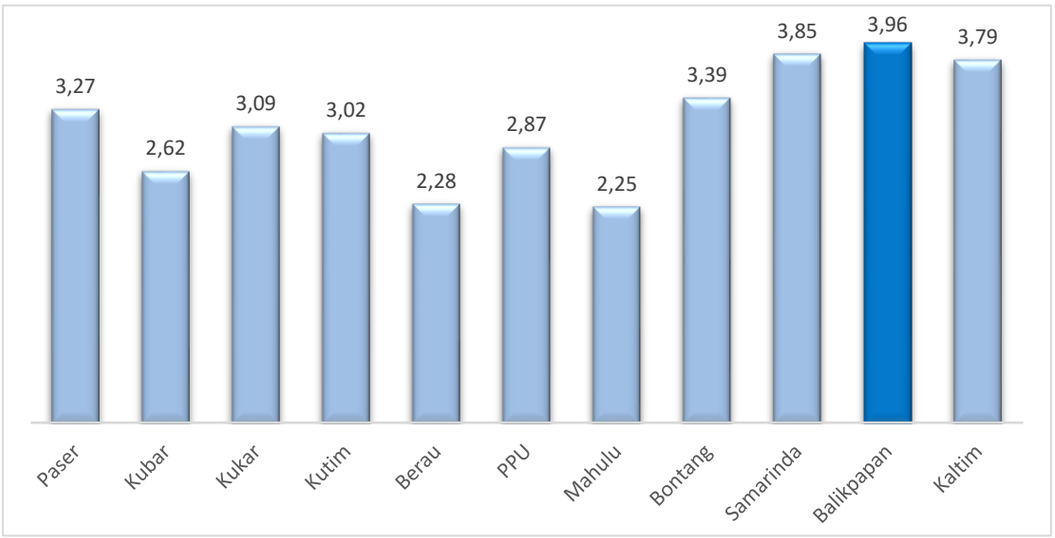

Gambar 2.15
Perbandingan Indeks SPBE Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Merujuk pada capaian Indeks SPBE Tahun 2024, Kota Balikpapan mencatat skor 3,96, yang merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 3,79, serta lebih unggul dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Apabila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah tersebut, Kota Samarinda menempati peringkat kedua dengan realisasi 3,85, diikuti oleh Kota Bontang di posisi ketiga dengan 3,39. Sementara itu, kabupaten dengan Indeks SPBE lebih rendah di antaranya adalah Mahakam Ulu (2,25), Berau (2,28), dan Kutai Barat (2,62).

Capaian kinerja Indeks SPBE Kota Balikpapan pada tahun 2024 memperoleh predikat sangat baik karena didukung oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor utama dalam peningkatan Indeks SPBE adalah kenaikan indeks pada setiap domain dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek tata kelola, layanan, kebijakan, serta infrastruktur digital yang mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan ini tidak terlepas dari pelaksanaan audit internal yang dilakukan pada tahun 2024 yang berkontribusi besar dalam mengidentifikasi **kelemahan serta peluang perbaikan** dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga berbagai kendala teknis maupun non-teknis dapat segera diatasi sehingga kinerja sistem dapat berjalan lebih optimal. Selain itu,

evaluasi rutin terhadap aplikasi pelayanan publik dan layanan administrasi pemerintahan turut mendukung peningkatan Indeks SPBE. Melalui evaluasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan **tetap relevan, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,** serta dapat diperbarui secara berkala agar selalu optimal dalam mendukung pelayanan.

Faktor lain yang turut mendukung pencapaian ini adalah penggunaan serta review secara berkala terhadap Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang mengintegrasikan layanan antara berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan juga turut berperan aktif dalam Tim Asistensi Pemerintah Kota Balikpapan. Keterlibatan ini berkontribusi dalam **penyusunan kebijakan dan strategi digitalisasi yang lebih terarah**, serta memastikan koordinasi yang lebih baik dalam implementasi layanan berbasis elektronik di berbagai sektor pemerintahan.

Keberhasilan Kota Balikpapan dalam meningkatkan Indeks SPBE juga didukung oleh adanya **kerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten/kota lainnya.** Kolaborasi ini menciptakan **pertukaran pengalaman, transfer pengetahuan, serta adopsi praktik terbaik** dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga Kota Balikpapan dapat terus meningkatkan kapabilitas digitalnya secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** guna memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa langkah strategis telah dirancang untuk memastikan peningkatan indeks ini secara berkelanjutan.

Pertama, **penguatan kebijakan dan regulasi SPBE** akan menjadi fokus utama. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan terkait digitalisasi layanan pemerintahan, termasuk penyusunan pedoman teknis serta standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi SPBE berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kedua, **peningkatan kualitas infrastruktur digital** terus dilakukan guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih optimal. Pemerintah akan memperkuat jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), meningkatkan kapasitas pusat data, serta mengembangkan sistem keamanan siber untuk melindungi data dan informasi pemerintahan dari potensi ancaman siber.

Gambar 2.16
Penguatan Infrastruktur Digital: Pemasangan WiFi Gratis untuk Mendukung SPBE di Kota Balikpapan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Ketiga, **optimalisasi layanan digital dan integrasi aplikasi pemerintahan** terus didorong agar berbagai layanan publik dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Evaluasi rutin terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam layanan publik dan administrasi pemerintahan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas penggunaannya. Selain itu, sistem penghubung layanan pemerintah akan terus diperbarui guna memastikan konektivitas antarinstansi semakin baik.

Keempat, **peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam bidang digitalisasi pemerintahan** menjadi langkah krusial dalam peningkatan indeks SPBE. Pemerintah Kota Balikpapan akan mengadakan pelatihan serta bimbingan teknis bagi aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, penguatan peran agen perubahan dalam mendukung transformasi digital di setiap unit kerja juga akan terus dilakukan.

Gambar 2.17
Penguatan SDM Digital: Bimtek Manajemen Data dan Keamanan SPBE serta Lomba IoT untuk Peningkatan Indeks SPBE Kota Balikpapan
Sumber: Diskominfo Kota Balikpapan (2024)

Kelima, **penguatan kerja sama dan kolaborasi** dengan berbagai pihak. Pemerintah Kota Balikpapan akan menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten/kota lainnya dalam penerapan strategi digitalisasi yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi akan dimanfaatkan untuk mendukung inovasi serta pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas layanan berbasis digital.

Gambar 2.18
Sinergi dan Kolaborasi: Rapat Kerja Dewan Smart City Kota Balikpapan 2024
Sumber: Diskominfo Kota Balikpapan (2024)

Dengan strategi-strategi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan optimis dapat terus meningkatkan Indeks SPBE di masa mendatang, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.

e) Maturitas SPIP

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia, yang dianut adalah konsep SPI menurut kerangka COSO (*Comittee of Sponsoring Organization of The Treadway Commision*), yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Setiap pimpinan instansi diwajibkan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BPKP kemudian mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta monitoring pengendalian. Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.

Tabel 2.7 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Sumber: Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Balikpapan berada di level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “tercapai/ sesuai target”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaran SPIP telah memenuhi karakteristik atau dengan kata lain terdefinisi.

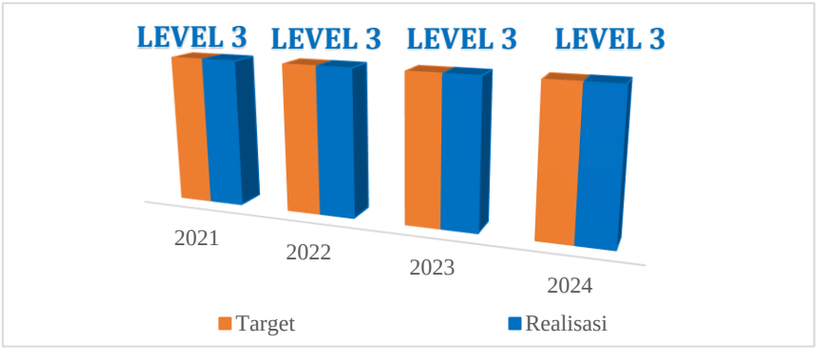

Gambar 2.19
Perkembangan Maturitas SPIP Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Pencapaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Balikpapan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang baik, di mana target dan realisasi selalu berada pada Level 3 atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Konsistensi ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan secara efektif dalam mendukung akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun tidak terdapat peningkatan level dalam kurun waktu empat tahun terakhir, keberhasilan dalam mempertahankan pencapaian ini tetap merupakan indikator positif atas komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga kualitas sistem pengendalian internal. Stabilitas capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan resiko, pengendalian internal, serta tata kelola pemerintahan telah diterapkan dengan baik.

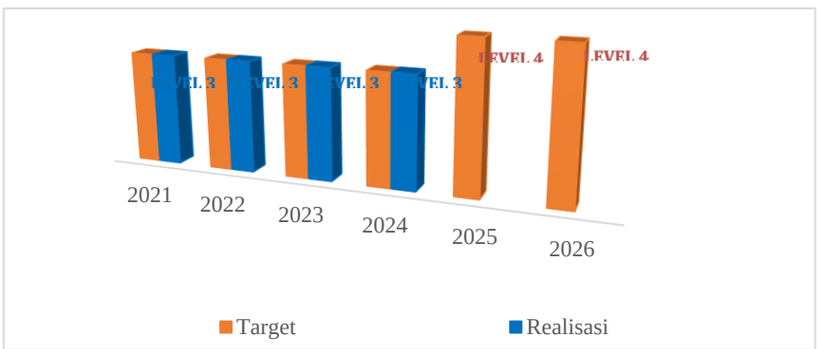

Gambar 2.20
Perbandingan Target dan Realisasi Maturitas SPIP Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, capaian realisasi Maturitas SPIP hingga tahun 2024 menunjukkan konsistensi dengan target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2021 hingga 2024, target maturitas SPIP berada pada Level 3, dan realisasi capaian setiap tahunnya juga berhasil mencapai Level 3, yang mencerminkan stabilitas dalam penerapan sistem pengendalian intern. Namun, apabila capaian realisasi hingga tahun 2024 hanya sebatas mempertahankan Level 3, maka peningkatan ke Level 4 dalam dua tahun ke depan menjadi tantangan tersendiri.

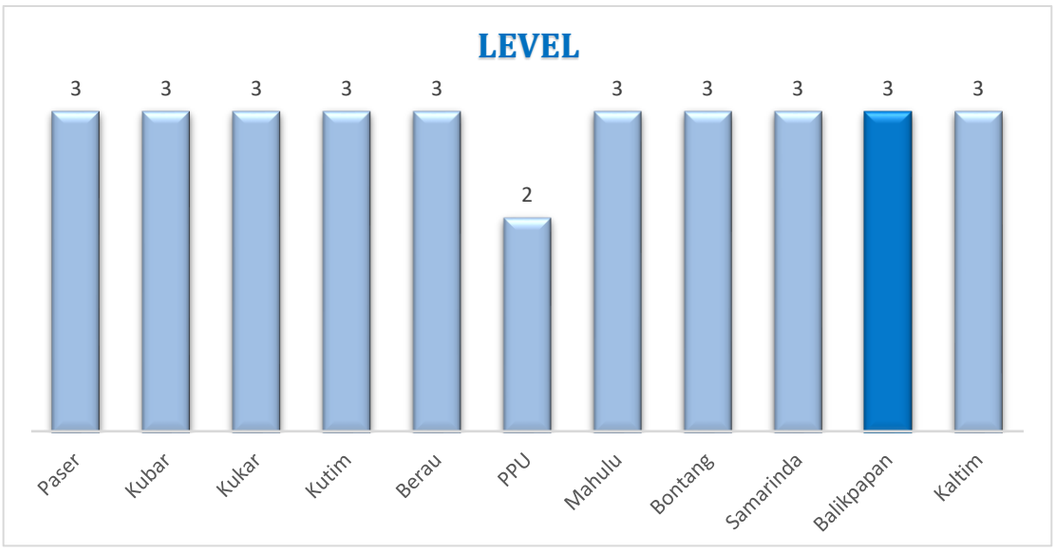

Gambar 2.21
Perbandingan Maturitas SPIP Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Maturitas SPIP tahun 2024, Kota Balikpapan mencapai Level 3, yang setara dengan mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern di Balikpapan telah berjalan stabil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, hampir seluruh daerah juga mencapai Level 3, seperti Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Mahakam Ulu, Bontang, dan Samarinda. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi satu-satunya daerah yang realisasi maturitas SPIP-nya masih berada di Level 2. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Timur juga berada pada Level 3, yang menunjukkan keseragaman dalam pencapaian sistem pengendalian intern di tingkat daerah.

Namun, merujuk pada Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi atas Penilaian mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan nilai yang diperoleh belum maksimal, yaitu:

1. Penurunan skor Kualitas Sasaran Strategis karena:
    - Sasaran Perangkat Daerah yang tidak selaras/ relevan dengan sasaran Pemerintah Daerah;
    - Ketidakcukupan indikator dalam mengukur sasaran;
    - Indikator tidak berorientasi hasil;
    - Indikator tidak *SMART*;
    - Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu.
2. Penurunan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategi karena:
    - Sasaran tidak ditetapkan;
    - Sasaran tidak selaras dengan sasaran di atasnya;
    - Sasaran tidak menggambarkan isu strategis;
    - Indikator tidak spesifik dan relevan;

- Indikator tidak cukup menggambarkan sasaran;
- Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu.

3. Pemerintah Kota Balikpapan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut dari BPK akan tetapi masih terdapat temuan yang berulang;
4. Dalam 5 tahun terakhir masih terdapat temuan pengamanan aset yang berulang terkait penatausahaan aset.;
5. Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK selama 5 tahun terakhir didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

Oleh karena itu, Inspektorat Kota Balikpapan secara berkala melakukan pendampingan dan pengawasan berkala atas implementasi manajemen resiko perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran Program/ Kegiatan Pendampingan dan Asistansi, Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian kinerja dimana pelaksanaan kegiatan tersebut telah mendorong peningkatan capaian Implementasi SPIP Terintegrasi sebagaimana hasil evaluasi BPKP Perwakilan Kaltim yang mengalami peningkatan skor sebanyak 0,262 dari skor 3,03 tahun 2023 menjadi 3,292 pada tahun 2024.

Adapun kegiatan pendampingan dan pengawasan SPIP Terintegrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang dilakukan meliputi:

1. Reviu manajemen resiko;
2. Pendampingan persiapan pengawasan Evran oleh BPKP pada Perangkat Daerah;
3. Pra penyusunan Register Resiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah;
4. Penyusunan Register Resiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah;

Gambar 2.22
Penyusunan RR dan RTP Pemerintah Daerah
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

5. Kolaborasi dan sinergis penguatan SPIP -MR di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melalui pelatihan penyusunan laporan triwulan penerapan manajemen resiko;

Gambar 2.23
Penyusunan Laporan Triwulan Penerapan Manajemen Resiko
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

6. Persiapan pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah;
7. Pendampingan penyusunan RTP level Pemerintah Daerah;

Gambar 2.24
Pendampingan Penyusunan RTP Level Pemerintah Daerah
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

8. Penyusunan Laporan Hasil dan Penjaminan Kualitas (PK) atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Tahun 2024;

Gambar 2.25
Penyusunan Laporan Hasil dan Penjaminan Kualitas (PK) atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Tahun 2024
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

9. *Coaching Clinic* IEPK di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

Gambar 2.26
***Coaching Clinic* IEPK di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan**
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

10. Bimbingan Teknik Penyuluh Anti Korupsi kepada Mitra Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya optimalisasi nilai IEPK;

Gambar 2.27
Bimbingan Teknik Penyuluh Anti Korupsi melalui Optimalisasi Nilai IEPK
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

11. Mitigasi resiko pengelolaan persediaan;

Gambar 2.28
Kegiatan Mitigasi Resiko Pengelolaan Persediaan
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

12. Pendampingan dan identifikasi serta penyusunan register resiko (RR) dan rencana tindak pengendalian (RTP) konteks Pemerintah Daerah.

Gambar 2.29
Pendampingan Identifikasi Resiko dan Penyusunan RTP
Pemerintah Daerah
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2024)

Upaya memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah dilaksanakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPIP serta mendukung pencapaian target maturitas yang lebih tinggi di masa mendatang.

Sasaran Strategis 2 : Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel

Indeks Sistem Merit merupakan standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Pasal 6 dalam peraturan tersebut menetapkan delapan aspek penilaian, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah lima tahun, pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, pengembangan karier, promosi, mutasi, dan rotasi yang objektif serta transparan, manajemen kinerja berbasis target yang terukur, evaluasi kinerja berkala, sistem penggajian dan penghargaan, perlindungan serta pelayanan bagi pegawai, serta ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit.

Penilaian mandiri sistem merit ini bertujuan untuk menjamin penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera, serta berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, penilaian ini juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara diketahui bahwa Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan tahun 2024 meraih skor 280,5 dan indeks 0,68 dengan predikat “Baik”. Capaian ini masih menggunakan nilai capaian indeks sistem merit Kota Balikpapan tahun 2023 karena sejak diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara belum dilakukan penilaian untuk pelaksanaan sistem merit Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2024 oleh BKN. Capaian ini berdasarkan Surat keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor

268/KEP.KASN/C/XI/2023 Tentang Penetapan Kategori Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Dengan demikian tingkat capaian kinerja Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan tahun 2024 adalah 89,47 % atau "tidak tercapai".

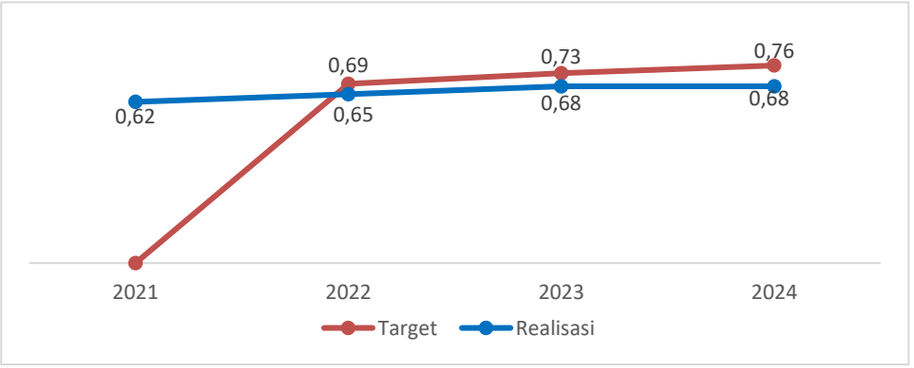

Gambar 2.30
Perkembangan Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan
Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Pada tahun 2024, target Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan ditetapkan sebesar 0,76. Namun, karena penilaian untuk tahun 2024 belum dilakukan, pencapaiannya masih mengacu pada angka tahun 2023, yaitu 0,68. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indeks sistem merit pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 0,65. Tren ini menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, indeks sistem merit mengalami peningkatan yang cukup konsisten, dengan rata-rata kenaikan sekitar 4,73% per tahun.

Meskipun demikian, capaian indeks sistem merit pada tahun 2024 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Selain itu, tren realisasi terhadap target menunjukkan kecenderungan menurun, dari 94,20% pada tahun 2022 menjadi 93,15% pada tahun 2023, dan semakin berkurang menjadi 89,47% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai target yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut agar pencapaian indeks sistem merit dapat lebih optimal dan selaras dengan target yang telah direncanakan.

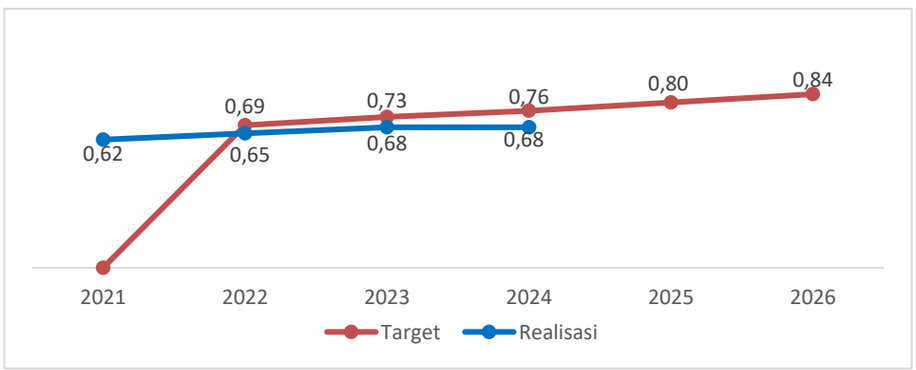

Gambar 2.31
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (2025)

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Balikpapan 2021–2026, Indeks Sistem Merit menunjukkan tren peningkatan meskipun masih menghadapi tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, target indeks sistem merit ditetapkan sebesar 0,76. Namun, karena penilaian tahun ini belum dilakukan, realisasi yang digunakan masih mengacu pada capaian tahun 2023, yaitu 0,68, atau sekitar 89,47% dari target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi indeks sistem merit mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dari 0,65 pada tahun 2022 menjadi 0,68 pada tahun 2023. Meskipun tren peningkatan ini menunjukkan perkembangan yang cukup positif, capaian indeks sistem merit dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah target yang direncanakan. Selain itu, persentase pencapaian terhadap target menunjukkan tren penurunan dari 94,20% pada tahun 2022 menjadi 93,15% pada tahun 2023, dan 89,47% pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun-tahun mendatang, capaian indeks sistem merit tahun 2024 baru mencapai 86,08% dari target tahun 2025 dan 82,93% dari target tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026, diperlukan peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan tren pertumbuhan indeks sistem merit dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa faktor yang menghambat capaian kinerja Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Integrasi Sistem Informasi yang Belum Optimal

   Salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem merit adalah belum terintegrasinya secara penuh database Aplikasi Manajemen Talenta (mata.balikpapan.go.id) dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Ketidakterpaduan ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pemetaan kompetensi, manajemen talenta, serta pengambilan keputusan berbasis data. Akibatnya, efektivitas dalam pengelolaan karier pegawai menjadi kurang optimal, sehingga dapat berdampak pada lambatnya peningkatan indeks sistem merit.
2. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman ASN dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

   Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan instrumen utama dalam sistem merit untuk mengukur kinerja individu berdasarkan capaian kerja yang terstruktur. Namun, kesadaran dan pemahaman ASN dalam menyusun SKP masih perlu ditingkatkan. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami metode penyusunan SKP berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas evaluasi kinerja, sehingga berdampak pada rendahnya objektivitas dalam pemberian penghargaan dan pengembangan karier pegawai.
3. Belum Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Penghargaan bagi ASN

   Sistem merit mengedepankan prinsip penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja ASN sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perwali) yang mengatur mekanisme pemberian penghargaan bagi ASN. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan belum adanya sistem penghargaan yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja masih belum optimal.
4. Belum Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Pola Karier ASN

Pola karier ASN yang terstruktur merupakan bagian integral dari sistem merit, yang bertujuan untuk menciptakan jenjang pengembangan karier yang jelas dan berbasis kompetensi. Namun, sampai saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perwali) yang mengatur pola karier ASN sehingga belum ada standar yang baku dalam perencanaan pengembangan karier pegawai, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam promosi dan mutasi jabatan. Tanpa regulasi ini, sistem merit belum dapat diterapkan secara optimal, karena pengembangan karier masih dilakukan secara *ad-hoc* tanpa dasar hukum yang kuat.

5. Belum Tersedianya *Assessment Center* yang Memenuhi Standar Nasional

   Dalam upaya memastikan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, sistem merit mengharuskan adanya *assessment center* yang sesuai dengan standar nasional. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki *assessment center* yang memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga, pemetaan kompetensi pegawai dan pengisian jabatan masih belum sepenuhnya berbasis meritokrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diemban, sehingga dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan terus melakukan berbagai upaya strategis guna mengatasi kendala yang menghambat implementasi sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi. Beberapa langkah yang telah dilakukan mencakup sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian dan Integrasi Data

   Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan perbaikan sistem informasi kepegawaian dengan memastikan bahwa data pegawai, jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, kompetensi, serta rekam jejak kinerja dan disiplin (hukdis) terdokumentasi secara komprehensif dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Upaya yang telah dilakukan mencakup peremajaan data secara berkala, khususnya saat terjadi perubahan akibat mutasi pegawai, sehingga informasi yang tersedia selalu akurat dan terkini. Selain itu, dilakukan integrasi data kompetensi dengan sistem kepegawaian guna memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki rekam data yang lengkap dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan karier. Pemerintah Kota Balikpapan juga menerapkan prinsip satu data kepegawaian sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan terukur. Dalam aspek kinerja, telah dimanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN untuk mengelola data kinerja ASN, sehingga proses evaluasi dan monitoring dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Selain itu, sebagai upaya mendukung penerapan sistem merit berbasis kompetensi dan kinerja, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan Aplikasi Manajemen Talenta (mata.balikpapan.go.id) guna mengelola talenta ASN secara lebih profesional.
2. Peningkatan Kapasitas ASN melalui Sosialisasi dan Desk Evaluasi

   Pemerintah Kota Balikpapan berfokus pada peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip sistem merit, khususnya dalam aspek penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan pengembangan kompetensi. Upaya yang telah dilakukan mencakup pelaksanaan sosialisasi

kepada ASN di berbagai unit kerja guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sistem merit serta penerapannya dalam manajemen sumber daya manusia pemerintahan. Selain itu, kegiatan desk evaluasi juga dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan bagi pegawai dalam menyusun SKP serta memanfaatkan sistem kepegawaian yang telah tersedia.

3. Pengembangan Kebijakan Penghargaan bagi ASN Berprestasi

   Sebagai bentuk apresiasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjukkan kinerja unggul, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun kebijakan pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi guna mendorong budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada kinerja. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi, yang saat ini dalam tahap finalisasi dan menunggu hasil fasilitasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan motivasi pegawai, sejak tahun 2024, alokasi anggaran untuk pemberian *reward* kepada ASN telah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Balikpapan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem penghargaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dorongan yang lebih kuat bagi ASN untuk terus meningkatkan kinerja serta mendukung implementasi sistem merit yang lebih efektif di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

4. Penguatan Regulasi Pola Karier dan Manajemen Talenta

   Untuk memastikan keberlanjutan penerapan sistem merit, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun kajian terkait pola karier pegawai dan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan sebagai langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi penyusunan Kajian Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Talenta, yang berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan jenjang karier ASN secara terstruktur dan berorientasi pada kompetensi serta kinerja. Selain itu, rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pola Karier telah disusun dan saat ini masih dalam tahap pembahasan serta penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai regulasi resmi.

5. Penguatan Sistem Penilaian Kompetensi dan Pemetaan Talenta

   Untuk mendukung pemetaan kompetensi ASN secara lebih sistematis, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengembangkan sistem informasi e-Kompetensi guna mempermudah pengelolaan data penilaian potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya, sehingga prinsip sistem merit dapat diterapkan secara optimal dalam manajemen sumber daya manusia aparatur. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penguatan sistem ini mencakup pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi secara menyeluruh bagi seluruh PNS, yang mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator (JA), Jabatan Fungsional (JF), serta jabatan pelaksana. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyediakan sarana dan prasarana ruang *assessment* sebagai fasilitas pendukung dalam proses penilaian kompetensi ASN. Namun, fasilitas ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia aparatur. Penerapan sistem merit yang efektif dan mampu mendukung profesionalisme serta kinerja ASN secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN serta memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik meliputi sembilan unsur pelayanan. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei kemudian digunakan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menjadi tolok ukur kinerja unit pelayanan secara berkala. Indeks ini berperan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan hasil yang menunjukkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 tercapai sebesar 84,93 poin. Capaian kinerja tersebut mencapai 101,34% dan memperoleh predikat “melebih target”. Angka ini diperoleh dari 92 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) dengan 103 jenis layanan.

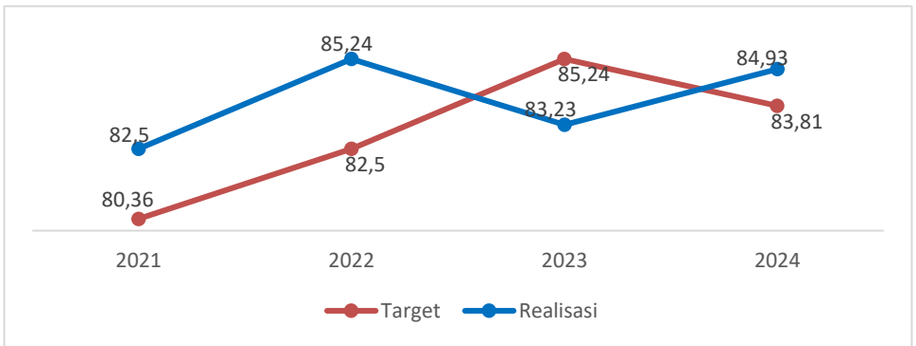

Gambar 2.32
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (2025)

Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Balikpapan dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan meskipun dengan beberapa fluktuasi dalam capaian kinerja. Pada tahun 2021, realisasi IKM mencapai 102,67% dari target yang ditetapkan. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 103,32%, menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang

cukup signifikan. Namun, pada tahun 2023, capaian kinerja mengalami penurunan menjadi 97,64%, karena realisasi IKM tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, capaian kinerja kembali meningkat menjadi 101,34%, dengan realisasi IKM yang mengalami kenaikan sebesar 2,04% dibandingkan tahun 2023. Secara rata-rata, realisasi IKM dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,99% per tahun.

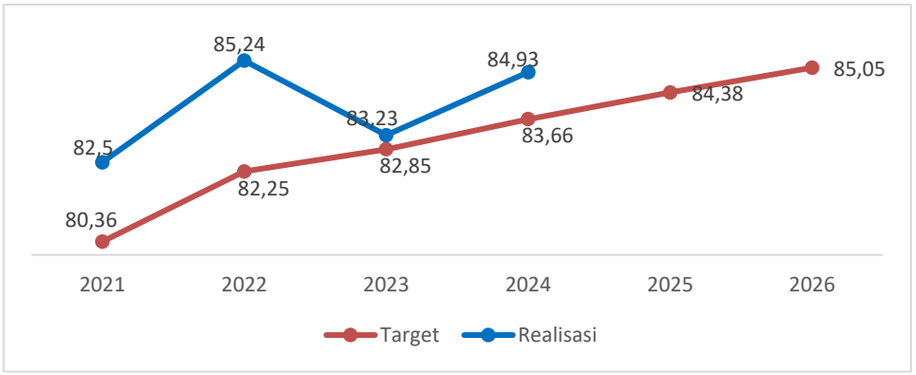

Gambar 2.33
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (2025)

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Balikpapan 2021–2026, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Balikpapan menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2024, target IKM sebesar 83,66 berhasil terlampaui dengan realisasi 84,93, atau 101,52% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi IKM 2024 mengalami peningkatan 2,04% dari 83,23 pada 2023, meskipun masih lebih rendah dibanding capaian tertinggi pada 2022 sebesar 85,24. Selain itu, capaian tahun 2024 juga telah melampaui target yang ditetapkan untuk 2025 (**84,38**) dan hampir mencapai target 2026 (**85,05)**. Tren peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan peningkatan, diperlukan strategi yang lebih optimal agar pencapaian target di tahun-tahun mendatang dapat semakin ditingkatkan.

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan dalam mendorong kualitas pelayanan publik. Salah satu faktor utama adalah komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan penerapan kebijakan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, **pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan** telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara cepat dan efisien, seperti layanan perizinan online dan aplikasi pelayanan berbasis digital.

Lebih lanjut, **peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)** juga menjadi faktor yang mendukung pencapaian IKM. Berbagai program pelatihan telah diberikan kepada ASN untuk meningkatkan profesionalisme dan responsivitas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan ini diperkuat dengan penerapan standar pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait prosedur, waktu, dan biaya layanan dengan lebih jelas.

Faktor lain yang turut mendorong pencapaian IKM adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap layanan publik. Pemerintah Kota Balikpapan secara rutin melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan peningkatan kualitas

layanan. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi tantangan dan segera melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih optimal. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi dalam implementasi etika pelayanan publik. Meskipun ASN telah mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi, masih ditemukan kasus di mana responsivitas dan keramahan dalam pelayanan belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan budaya pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, penanganan pengaduan publik masih memerlukan perbaikan. Digitalisasi layanan telah mempermudah akses masyarakat terhadap pengaduan, tetapi kecepatan dan efektivitas tindak lanjutnya masih menjadi tantangan. Beberapa masyarakat merasa bahwa respons terhadap keluhannya belum selalu cepat dan solutif, sehingga menimbulkan persepsi bahwa mekanisme pengaduan belum sepenuhnya optimal. Tantangan lainnya adalah ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan. Digitalisasi telah mempercepat proses administrasi dalam berbagai sektor, namun pada beberapa layanan tertentu, masih ditemukan keterlambatan akibat beban kerja yang tinggi atau mekanisme birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.

Dari sisi sarana dan prasarana, meskipun infrastruktur layanan telah mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung pelayanan yang nyaman dan efisien. Beberapa unit pelayanan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan ruang tunggu yang memadai, sistem antrean yang perlu dioptimalkan, serta pemanfaatan teknologi yang belum sepenuhnya merata di seluruh sektor layanan publik.

Adapun upaya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Balikpapan antara lain:

1. Pemerintah Kota Balikpapan terus mengembangkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan kompetensi dalam pelayanan publik. Selain itu, penerapan standar pelayanan berbasis nilai BerAKHLAK semakin diperkuat dengan supervisi dan evaluasi berkala;
2. Pemerintah Kota Balikpapan telah menjalankan berbagai kanal pengaduan, seperti LAPOR, media sosial resmi, dan layanan pengaduan lainnya, guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik. Untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut, dilakukan pemantauan berkala terhadap setiap laporan guna memastikan penanganan yang cepat dan tepat. Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah terus diperkuat agar setiap aduan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas ruang pelayanan, perbaikan sarana penunjang seperti ruang tunggu, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Kota Balikpapan juga memastikan ketersediaan peralatan seperti mesin antrean, sistem informasi, dan

tempat pengaduan guna mendukung efisiensi pelayanan. Selain itu, survei berkala mengenai kualitas fasilitas terus dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

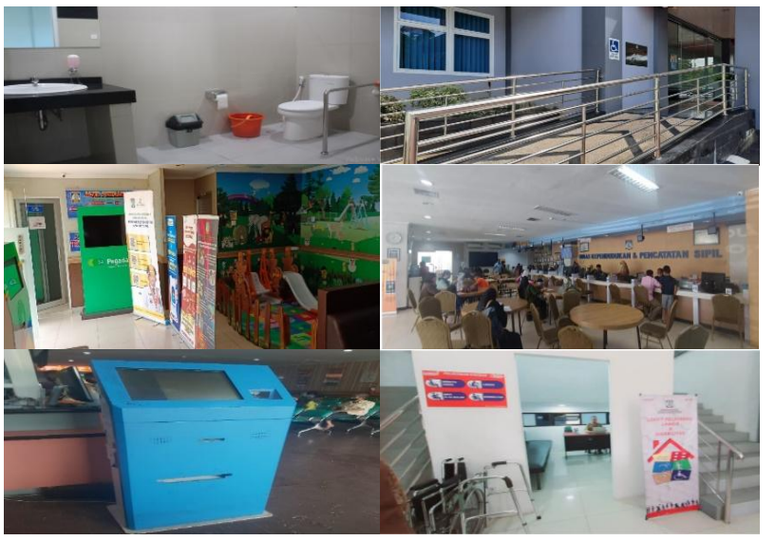

Gambar 2.34
Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (2024)

4. Pemerintah Kota Balikpapan juga terus mengembangkan dan menyempurnakan layanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat, mudah, dan transparan.

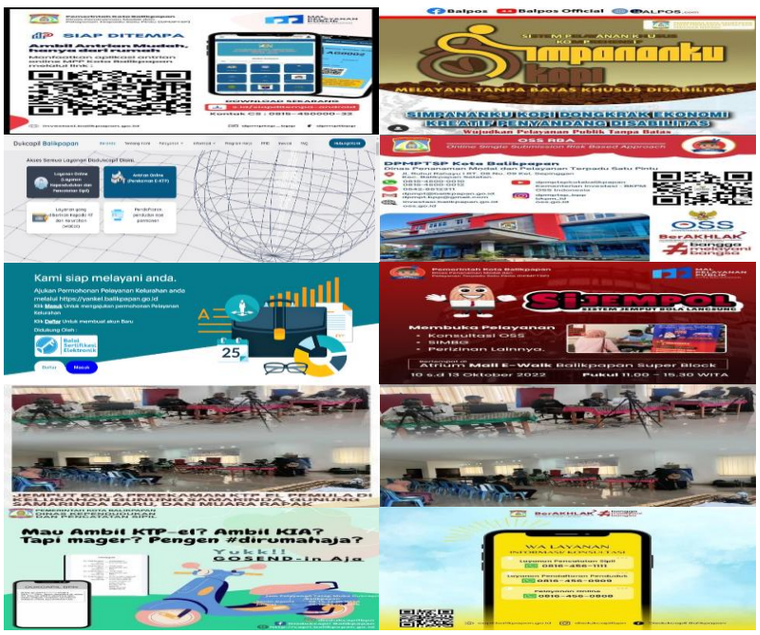

Gambar 2.35
Digitalisasi Pelayanan Publik
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (2024)

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang dapat meningkatkan kualitas seseorang. Selain itu, pendidikan juga menjadi langkah strategis untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sebagai investasi penting, pendidikan berperan dalam meningkatkan daya saing daerah di masa depan. Keberhasilan pembangunan di bidang ini dapat diukur melalui Indeks Pendidikan, yang juga menjadi salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 2.36
Rumus Hitung Indeks Pendidikan
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah Rata-Rata Lama Sekolah/ RLS (*mean years of schooling*), dan Harapan Lama Sekolah/ HLS (*expected years of schooling*). RLS menunjukan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan RLS berdasarkan penduduk yang berumur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Sedangkan HLS mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk usia tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Diketahui bahwa RLS Kota Balikpapan tahun 2024 sebesar 10,99 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Balikpapan usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 10 hingga 11 tahun atau setara dengan kelas 1 sampai 2 SMA. Sementara itu, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun Kota Balikpapan tahun 2024 sebesar 14,25 tahun atau setara dengan tingkat Diploma II. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kota Balikpapan rata-rata meningkat 0,19% per tahun, sementara RLS meningkat 0,72% per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,07%) dibandingkan tahun 2023, lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,24%). Sementara itu, RLS tahun 2024 meningkat 0,06 tahun (0,55%) dibandingkan tahun 2023, lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,78%).

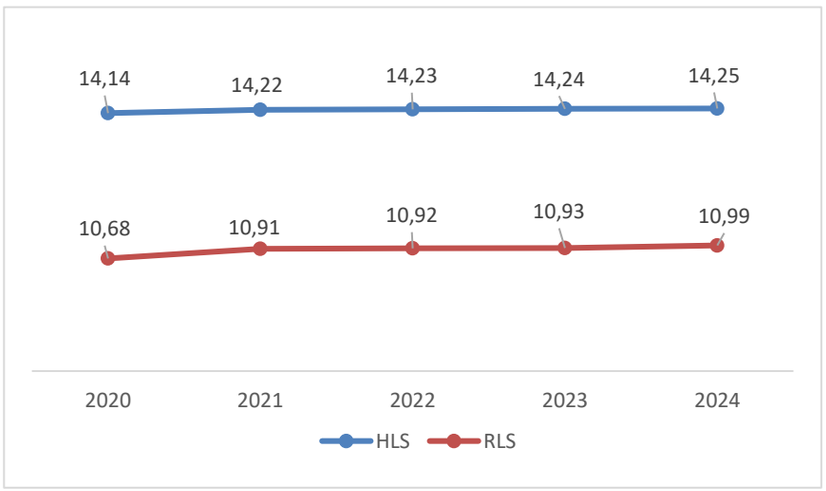

Gambar 2.37
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Berdasarkan RSL dan HLS tersebut maka dapat diketahui bahwa Indeks Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2024 terealisasi sebesar 0,7622 poin dengan capaian kinerja sebesar 99,12% dengan predikat "belum mencapai target". Realisasi indeks pendidikan tahun 2024 tersebut naik 0,0023 poin dari realisasi indeks pendidikan tahun 2023. Namun demikian, realisasi tahun 2024 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,7690 poin.

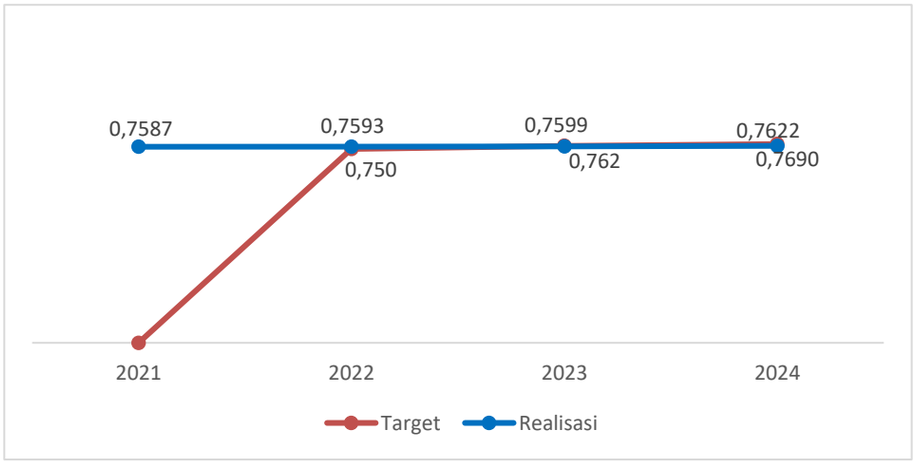

Gambar 2.38
Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data realisasi Indeks Pendidikan Kota Balikpapan dari tahun 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan kinerja yang konsisten meskipun dalam persentase yang relatif kecil. Pada tahun 2022, realisasi Indeks Pendidikan mengalami peningkatan sebesar **0,079%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan serupa juga terjadi pada tahun 2023, dengan persentase pertumbuhan yang sama, yaitu **0,079%**. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi Indeks Pendidikan menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, yaitu sebesar **0,303%** dibandingkan dengan tahun 2023. Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan Indeks Pendidikan dalam beberapa tahun terakhir mencapai **0,154%** per tahun. Hal ini

menunjukkan adanya tren positif dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan.

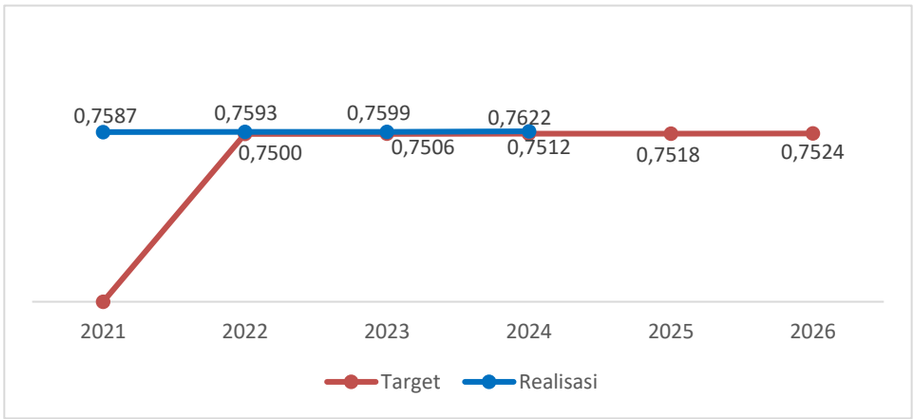

Gambar 2.39
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pendidikan Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, capaian realisasi Indeks Pendidikan hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan dan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, target Indeks Pendidikan ditetapkan sebesar 0,7512, sementara realisasi yang dicapai mencapai 0,7622, atau lebih tinggi dari proyeksi yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target Indeks Pendidikan untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 0,7518 pada 2025 dan 0,7524 pada 2026, capaian realisasi tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan untuk dua tahun ke depan. Dengan capaian realisasi 101,38% dari target 2025 dan 101,31% dari target 2026, tren peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi pendidikan yang diterapkan di Kota Balikpapan telah memberikan hasil yang positif.

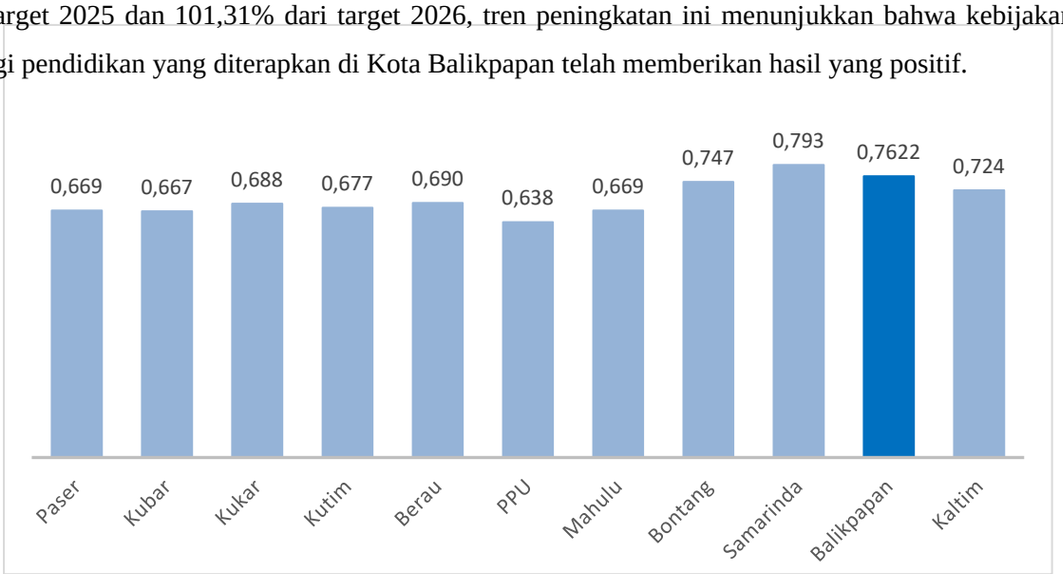

Gambar 2.40
Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Indeks Pendidikan tahun 2024, Kota Balikpapan mencatat capaian sebesar 0,7622, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 0,724, serta lebih unggul

dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya di wilayah tersebut. Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, Kota Samarinda menempati peringkat pertama dengan realisasi 0,793, diikuti oleh Balikpapan di peringkat kedua dengan 0,7622, dan Kota Bontang di posisi ketiga dengan 0,747. Sementara itu, kabupaten dengan indeks pendidikan lebih rendah di antaranya adalah Penajam Paser Utara (PPU) dengan 0,638, Kutai Barat dengan 0,667, dan Mahakam Ulu dengan 0,669.

Meskipun capaian Indeks Pendidikan Kota Balikpapan berada di atas rata-rata provinsi dan termasuk yang terbaik di Kalimantan Timur, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Ketimpangan distribusi satuan pendidikan di enam kecamatan menjadi salah satu kendala utama. Hingga saat ini, jumlah satuan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD, kesetaraan SD dan SMP, masih belum merata di seluruh wilayah. Ketidakmerataan ini berdampak pada keterbatasan akses pendidikan bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah yang memiliki jumlah satuan pendidikan lebih sedikit.

Selain itu, kapasitas daya tampung sekolah yang masih terbatas turut menjadi faktor penghambat peningkatan Indeks Pendidikan Kota Balikpapan. Jumlah satuan pendidikan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh peserta didik usia sekolah, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah di Balikpapan. Sehingga masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal, yang berdampak pada angka partisipasi sekolah dan pencapaian Indeks Pendidikan secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya yang berfokus pada **penguatan infrastruktur pendidikan, pemberian bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.** Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan unit sekolah baru (USB) di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi sekolah serta memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan kesempatan belajar yang setara.

Gambar 2.41
Pembangunan SMP Manggar Baru, Balikpapan Timur
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Adapun pembangunan unit sekolah baru (USB) yang dibangun terletak di Kecamatan Balikpapan Timur dengan daya tampung sebanyak 684 peserta didik SMP atau 18 ruang kelas. Pembangunan unit sekolah baru (USB) juga dilakukan di Kecamatan Balikpapan Tengah dengan kapasitas 24 ruang kelas atau daya tampung sebanyak 864 peserta didik SMP.

Gambar 2.42
Pembangunan SMP Balikpapan Tengah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Selain itu, di Kelurahan Sepinggan (Regency), pembangunan USB akan menampung 12 kelas atau 384 peserta didik SD serta 18 kelas atau 648 peserta didik SMP.

Gambar 2. 43
Pembangunan Sekolah SD-SMP Terpadu Regency Balikpapan Selatan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Sementara itu, di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, USB yang dibangun terdiri dari 12 kelas untuk SD dan 18 kelas untuk SMP.

Gambar 2.44
Pembangunan Sekolah SD-SMP Terpadu Graha Indah Balikpapan Utara
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Pemerintah Kota Balikpapan secara bertahap membangun **ruang kelas baru** untuk meningkatkan daya tampung sekolah, sehingga lebih banyak siswa dapat mengakses pendidikan formal secara tepat waktu. Pada tahun 2024 dilakukan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 12 RKB untuk SDN yang tersebar pada berbagai Kecamatan se Kota Balikpapan dan 1 RKB di SMPN 18 Balikpapan.

Gambar 2.45
Pembangunan Ruang Kelas
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Pemerintah Kota Balikpapan secara berkala juga melakukan pemeliharaan terhadap ruang kelas yang mengalami kerusakan serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan lainnya, seperti perpustakaan sekolah dan lapangan olahraga. Pada tahun ini, rehabilitasi ruang kelas dilakukan di 22 lokasi yang tersebar di Kota Balikpapan. Selain itu, pembangunan perpustakaan sekolah dilaksanakan di dua SD yang berbeda dengan total dua unit, serta satu unit di SMPN. Sementara itu, rehabilitasi lapangan olahraga dilakukan di satu SMPN yang berlokasi di Balikpapan.

Gambar 2.46
Rehabilitas Ruang Kelas dan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengadaan ini mencakup laptop dan perangkat digital lainnya yang dapat digunakan oleh guru dan siswa guna meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, terutama dalam menghadapi era digitalisasi pendidikan.

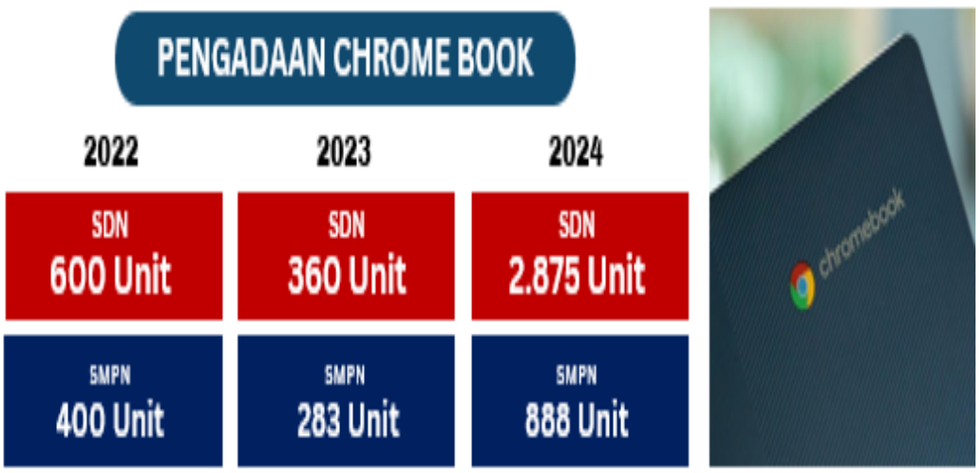

Gambar 2.47
Pengadaan Chrome Book
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Pemberian subsidi SPP bagi siswa sekolah SD dan SMP swasta/ sederajat juga dilakukan dengan maksud untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran subsidi yang diberikan adalah Rp 75.000 per siswa per bulan untuk SD swasta/ sederajat dan Rp 110.000 per siswa per bulan untuk SMP swasta/sederajat, yang disalurkan selama 12 bulan penuh. Pada tahun 2024, subsidi ini telah dialokasikan bagi 20.461 siswa SD swasta/ sederajat serta 10.300 siswa SMP swasta/ sederajat.

SUBSIDI SPP PESERTA DIDIK SEKOLAH SWASTA

	2022	2023	2024
SD Rp. 75.000/bulan	19.432 orang	19.777 orang	20.461 orang
SMP Rp. 110.000/bulan	16.816 orang	11.302 orang	10.300 orang

Gambar 2.48
Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa SD dan SMP/ Sederajat Swasta
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu guna mendukung akses pendidikan yang lebih merata. Besaran beasiswa yang diberikan adalah Rp 450.000 per orang per tahun untuk siswa SD dan Rp 750.000 per orang per tahun untuk siswa SMP. Pada tahun 2024, beasiswa ini telah dialokasikan bagi 280 siswa SD dan 400 siswa SMP. Selain beasiswa untuk siswa, Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan bantuan beasiswa kepada Tenaga Pendidik Non-PNS yang bertugas di sekolah swasta atau sederajat pada jenjang SD dan SMP. Beasiswa ini diberikan sebagai stimulus untuk mendorong para tenaga pendidik agar terus meningkatkan kompetensi profesional mereka. Besaran beasiswa yang diberikan adalah Rp 2.500.000 per orang per tahun. Pada tahun 2024, beasiswa ini telah dialokasikan bagi 38 tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 41 tenaga pendidik SD, dan 10 tenaga pendidik SMP.

Seiring dengan itu, guna meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak maka Pemerintah Kota Balikpapan dengan memberikan seragam sekolah kepada kelas 1 dan 7. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas 1 (SD) dan kelas 7 (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/ siswa berupa seragam batik, OSIS dan pramuka dimana untuk tahun 2024 telah dialokasikan untuk 36.900 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas 1 (SD) dan 13.100 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas 7 (SMP);

BEASISWA PESERTA DIDIK

	2022	2023	2024
SD	192	220	280
SMP	350	400	400
TOTAL	**542**	**620**	**680**

BEASISWA PENDIDIK/GURU

	2022	2023	2024
PAUD	0	40	38
SD	46	50	41
SMP	18	20	10
TOTAL	**64**	**110**	**89**

Gambar 2.49
Pemberian Beasiswa pada Siswa Keluarga Miskin dan Tenaga Pendidik
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan insentif tambahan penghasilan kepada ustaz dan ustazah sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjalankan tugas keagamaan dan pendidikan. Pada tahun 2024, insentif ini telah diberikan kepada 2.889 orang dengan besaran Rp 500.000 per orang.

INSENTIF USTAD/USTADZAH

	2022	2023	2024
JUMLAH	2.378 orang	2.645 orang	2.889 orang
BESARAN	320.000/orang	420.000/orang	500.000/orang

Gambar 2.50
Pemberian Insentif kepada Ustad/ Ustadzah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Kota Balikpapan optimis dapat **meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan**, sekaligus **mendorong peningkatan capaian Indeks Pendidikan pada tahun-tahun mendatang**. Melalui pembangunan infrastruktur, **pemberian bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran,** Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat, serta mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing di masa mendatang.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu kebutuhan dasar untuk menciptakan individu yang sehat, mandiri, cerdas, dan produktif serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kualitas kesehatan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Kesehatan, yang menjadi salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat. Indikator utama yang digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu rata-rata perkiraan jumlah tahun hidup seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan dihitung berdasarkan hasil sensus serta survei kependudukan.

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Gambar 2.51
Rumus Hitung Indeks Kesehatan

Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,22% per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Balikpapan adalah 75,20 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,87 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun (0,30%) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,19% per tahun). Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan tahun 2024 sebesar 75,87 tahun menunjukkan bahwa penduduk Balikpapan yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 75 tahun 10 bulan.

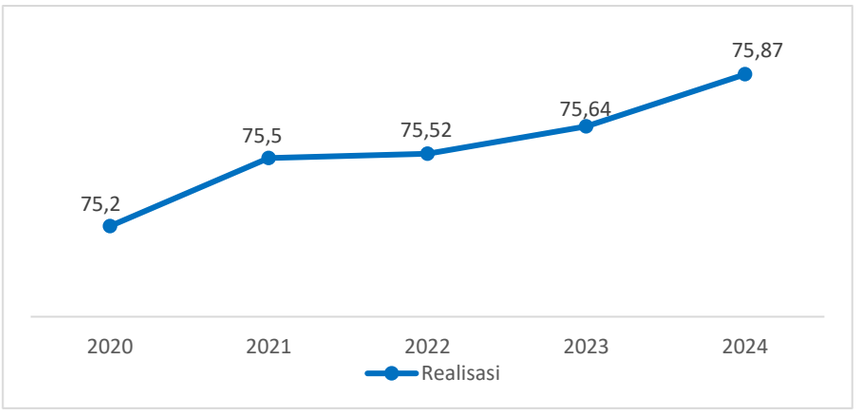

Gambar 2.52
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Balikpapan
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Berdasarkan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) yang menjadi salah satu indikator utama dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat, Indeks Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2024 tercatat sebesar 0,8595 poin. Capaian ini menunjukkan kinerja sebesar 101,57%, yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan.

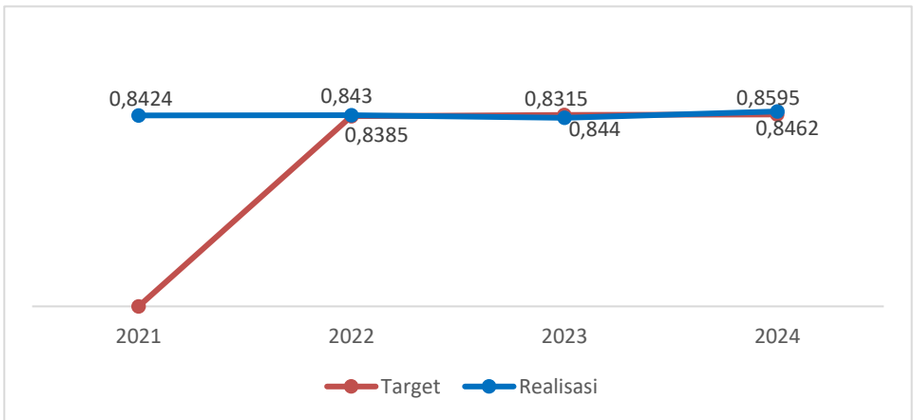

Gambar 2.53
Perkembangan Indeks Kesehatan Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Perkembangan Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan secara keseluruhan. Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Balikpapan dari tahun 2021 ke 2022, terdapat peningkatan sebesar **0,0006**, atau setara dengan **0,071%**. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan **0,0115** dibandingkan tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar **1,37%**. Meskipun demikian, pada tahun 2024, capaian indeks kesehatan masyarakat kembali meningkat secara signifikan sebesar **0,028** atau **3,37%** dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dihitung secara rata-rata, peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat dalam tiga tahun terakhir mencapai **0,69% per tahun**.

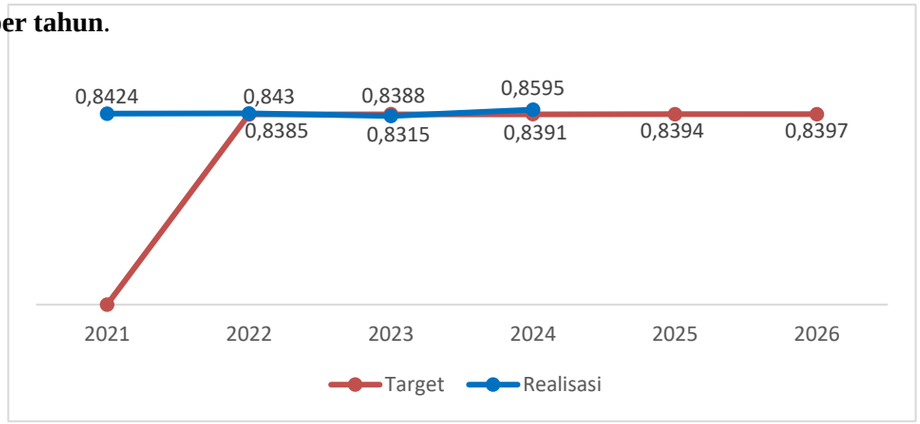

Gambar 2.54
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesehatan Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, capaian realisasi Indeks Kesehatan hingga tahun 2024 menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, target Indeks Kesehatan ditetapkan sebesar 0,8391, sementara realisasi yang dicapai mencapai 0,8595, atau jauh melampaui proyeksi yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target Indeks Kesehatan untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 0,8394 pada 2025 dan 0,8397 pada 2026, capaian realisasi tahun 2024 sudah melebihi target yang dirancang untuk dua tahun ke depan.

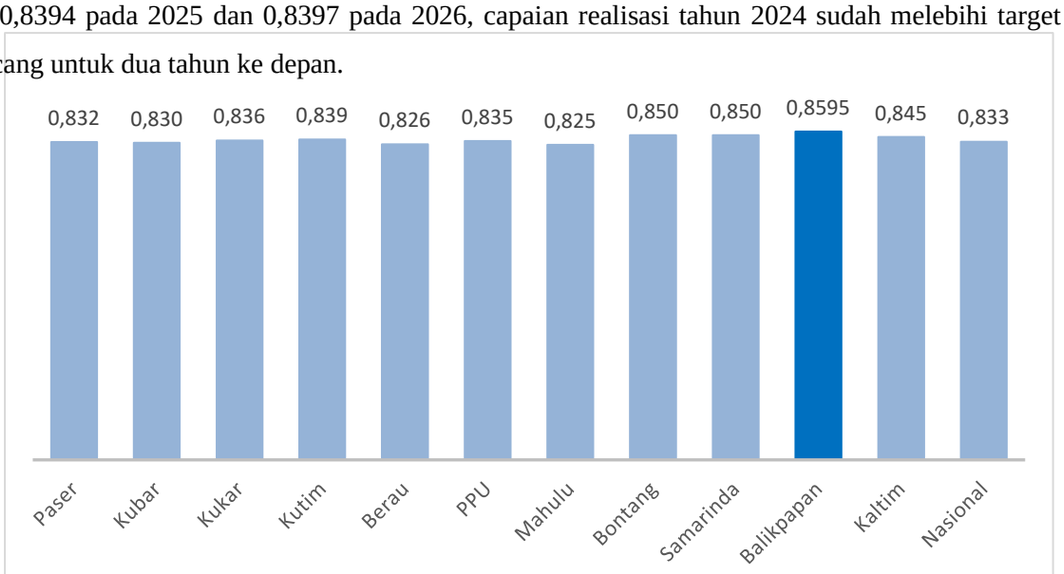

Gambar 2.55
Perbandingan Indeks Kesehatan Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Indeks Kesehatan tahun 2024, Kota Balikpapan mencatat angka tertinggi di Kalimantan Timur dengan capaian 0,8595. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 0,845 dan juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 0,833. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menempati peringkat pertama. Kota Samarinda dan Bontang memiliki realisasi yang sama, yaitu 0,850, berada di peringkat kedua setelah Balikpapan. Kabupaten Kutai Timur (0,839) dan Kutai Kartanegara (0,836) menyusul di posisi berikutnya. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Mahakam Ulu (0,825) dan Berau (0,826) mencatat indeks kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Tingginya Indeks Kesehatan Kota Balikpapan menunjukkan keberhasilan dalam sektor kesehatan dibandingkan wilayah lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program kesehatan yang telah diterapkan di Balikpapan, menjadikannya sebagai kota dengan kualitas kesehatan tertinggi di Kalimantan Timur pada tahun 2024.

Capaian Indeks Kesehatan ini selaras dengan variabel perhitungan Indeks Kesehatan itu sendiri, yaitu angka harapan hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka semakin tinggi pula Indeks Kesehatan yang dicapai. Peningkatan Indeks Kesehatan Kota Balikpapan merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup serta memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh.

Beberapa faktor utama dan upaya yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian Indeks Kesehatan Kota Balikpapan antara lain:

1. Kota Balikpapan telah melakukan transformasi sistem kesehatan dengan memberikan subsidi pembiayaan bagi masyarakat agar dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih merata. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya tinggi. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan pemberian subsidi iuran BPJS bagi PBI dan Peserta Kelas III Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar Rp. 37.800,- per jiwa per bulan. Pada tahun 2024 pemberian subsidi diberikan kepada 202.753 jiwa, naik sebesar 5.911 jiwa dari jumlah penerima subsidi tahun 2023 hanya ada diberikan kepada 196.842 jiwa.

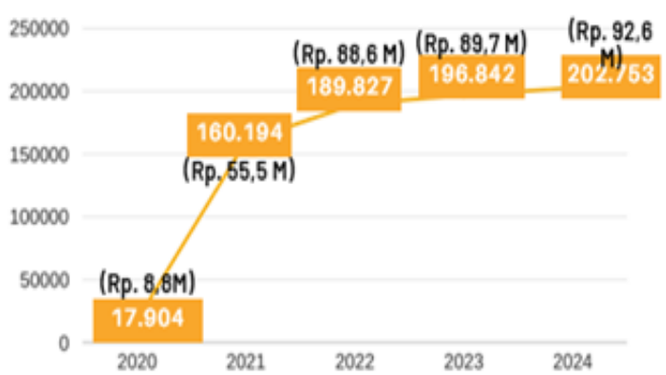

Gambar 2.56
Data Peserta Penerima Manfaat PBPU dan BP (Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Kota Balikpapan)
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

2. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan angka harapan hidup dengan menerapkan berbagai inovasi kesehatan di setiap tahap kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Inovasi ini mencakup upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular guna memastikan kualitas kesehatan masyarakat tetap terjaga. Inovasi kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan Kota Balikpapan diantaranya adalah:
   - Inovasi BAHIMAT (Balikpapan Hidup Manis Tanpa Gula) BAHIMAT adalah konsolidasi perencanaan lintas sektor untuk mencegah & mengendalikan diabetes;
   - SI-YANKES (Sistem Informasi Layanan Kesehatan) Kota Balikpapan adalah platform berbasis web yang mengelola dan menyediakan informasi layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, laboratorium, ambulans, dan layanan kesehatan lainnya. Sistem ini mempermudah akses masyarakat, tenaga kesehatan, dan pelaku usaha untuk memperoleh informasi lengkap terkait layanan kesehatan di Kota Balikpapan;
   - Inovasi TELETABIS (Teknologi Temukan dan Eliminasi Tuberkulosis) memiliki tujuan umum yaitu meningkatkan kualitas aksesibilitas layanan pemeriksaan Tuberkulosis (TBC) di Laboratorium Puskesmas Karang Joang untuk mendukung upaya pengendalian dan pencegahan TBC di Karang Joang;
   - Inovasi POLING.id (Pemantauan dan Konseling Gizi Terpadu Baduta Stunting dan Wasting) adalah Inovasi pada surveillance gizi dalam upaya pencegahan stunting dan wasting di masyarakat yang melibatkan lintas profesi dan lintas Sektor;
   - Inovasi AGEN PENTING (Anak Sekolah Generasi Peduli Pencegahan Stunting) adalah Pemberdayaan Anak Sekolah sebagai edukator dan promotor pencegahan stunting;
   - **Inovasi SERASI SAMA DIA** (Skrining Integrasi, Senam Bersama Usia Produktif dan Lanjut Usia) bertujuan untuk meningkatkan capaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** melalui skrining kesehatan usia produktif. Program ini berkolaborasi dengan **program lansia dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)** dengan mengadakan skrining dan senam bersama. Inovasi ini juga mendukung implementasi **program BAHIMAT (Balikpapan Hidup Manis Tanpa Gula)** dengan memanfaatkan hasil skrining untuk mendorong kesadaran hidup sehat dan pencegahan penyakit tidak menular.

Gambar 2.57
Berbagai Inovasi Kesehatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

3. Pemerintah Kota Balikpapan secara konsisten meningkatkan infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan dan modernisasi rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas kesehatan lainnya. Pengadaan alat medis yang lebih canggih dan peningkatan jumlah tenaga medis juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan;

Gambar 2.58
Upaya Peningkatan Infrastuktur Kesehatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah (Raperda SKD) menjadi salah satu upaya dalam memperkuat sistem kesehatan di Kota Balikpapan. Regulasi ini diharapkan mampu mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan serta dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di Kota Balikpapan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan yang setinggi-tingginya. Saat ini Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah sedang sinkronisasi dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023;

Gambar 2.59
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Sistem Kesehatan Daerah

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

5. Penguatan promosi kesehatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Program edukasi dan kampanye kesehatan yang aktif dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyuluhan kesehatan menjadi langkah strategis dalam mengurangi angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

Gambar 2.60
Program Edukasi dan Kampanye Kesehatan serta Pencegahan Stunting
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

6. Komitmen bersama dalam peningkatan mutu layanan kesehatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Komitmen ini diwujudkan melalui perbaikan sistem pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta penguatan koordinasi antara instansi terkait.

Berbagai upaya yang telah dilakukan, mulai dari inovasi di bidang kesehatan, peningkatan infrastruktur, penguatan regulasi, hingga subsidi layanan kesehatan, mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Langkah-langkah strategis tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Kesehatan yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal. Keberlanjutan dan penguatan upaya ini menjadi kunci utama dalam menjaga serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. IPLM bertujuan untuk melihat mengidentifikasi permasalahan yang menghambat perkembangan perpustakaan di Kota Balikpapan dan mengetahui kebutuhan informasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat serta mewujudkan perpustakaan menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga tercapai nilai tambah dalam hal informasi, ilmu pengetahuan dan jasa perpustakaan yang lain dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dihitung menggunakan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\sum_{i} \frac{UPLM_i}{AM} x\ 100$$

Gambar 2.61
Rumus Hitung Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan diketahui bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah 72,98 dan masuk pada kategori sedang atau memperoleh nilai sebesar 15,33 poin (angka setelah dikonversi) dengan capaian kinerja sebesar 104,14% atau memperoleh predikat “melebihi target”.

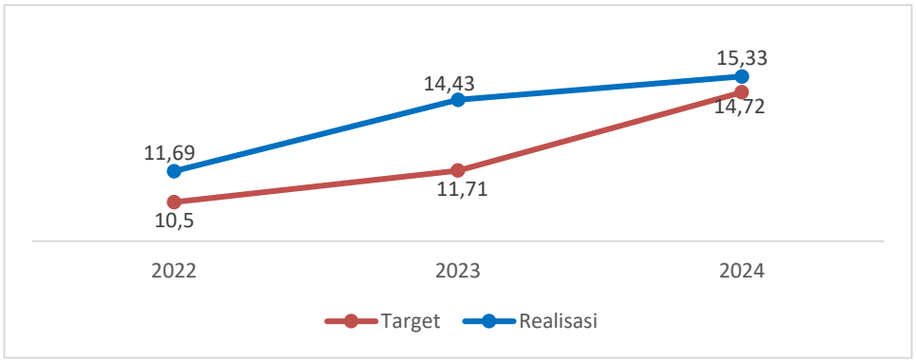

Gambar 2.62
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, capaian IPLM mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi IPLM tercatat sebesar **11,69**, lebih tinggi dari target **10,5**. Kemudian, pada tahun 2023, realisasi IPLM meningkat menjadi **14,43**, atau mengalami kenaikan sebesar **23,44%** dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi IPLM kembali meningkat menjadi **15,33**, yang berarti terdapat kenaikan **6,24%** dari tahun 2023. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, IPLM mengalami peningkatan sebesar **31,12%**. Rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode tersebut tercatat sebesar **14,84%**, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi di Kota Balikpapan berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

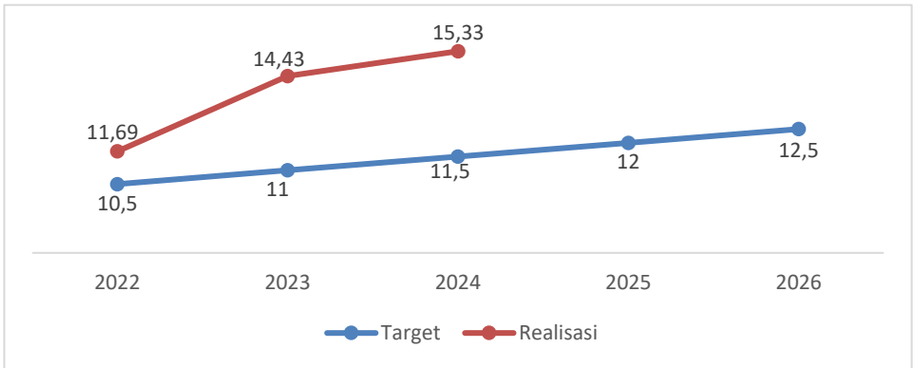

Gambar 2.63
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, target IPLM berhasil dilampaui dengan realisasi **lebih tinggi 1,19 poin**. Tren ini semakin meningkat pada tahun 2023 dengan realisasi lebih tinggi **3,43 poin** dari target yang ditetapkan. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi IPLM jauh melampaui target dengan selisih **3,83 poin**. Capaian ini bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2026. Dengan kata lain, pada tahun 2024, IPLM sudah melampaui target dua tahun ke depan. Hal ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan literasi masyarakat di Kota Balikpapan berkembang lebih cepat dari yang diproyeksikan dalam RPJMD.

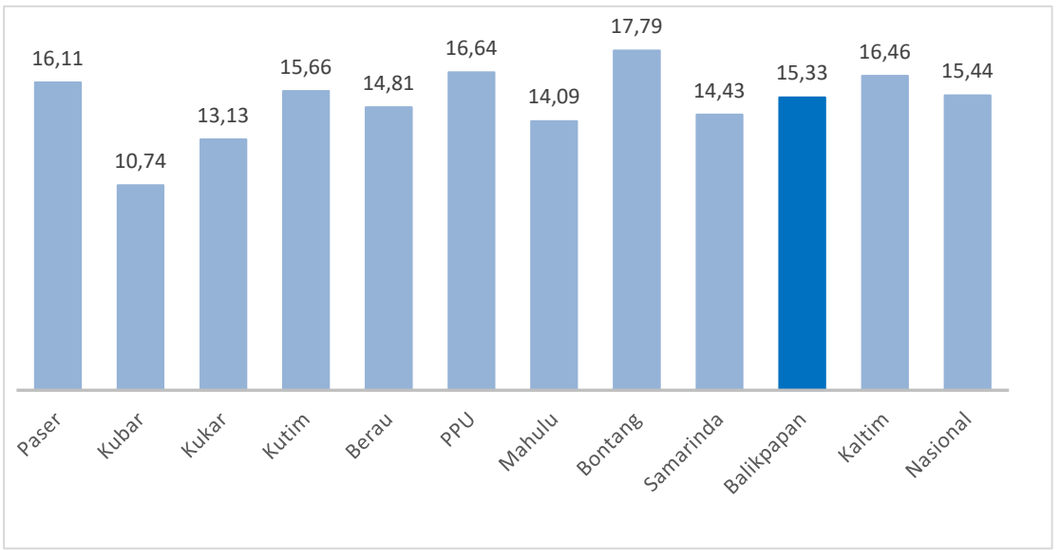

Gambar 2.64
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai **16,46**, serta sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar **15,44**. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menempati **peringkat ke-6 dari 10 kabupaten/kota** dalam provinsi. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain seperti Kutai Barat (**10,74**), Kutai Kartanegara (**13,13**), Mahakam Ulu (**14,09**), dan Samarinda (**14,43**). Namun, Kota Balikpapan masih lebih rendah dibandingkan Bontang (**17,79**), Penajam Paser Utara (**16,64**), Paser (**16,11**), Kutai Timur (**15,66**), dan Berau (**14,81**). Meskipun belum menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur, capaian ini menunjukkan bahwa literasi di Kota Balikpapan terus berkembang.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan tahun 2024 yang menunjukkan perkembangan positif, didukung oleh beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan literasi di masyarakat, diantaranya:

1. Kota Balikpapan telah membina sebanyak **335 perpustakaan** sesuai **Standar Nasional Perpustakaan (SNP),** yang mencakup **82,11% dari total perpustakaan** yang ada. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan di Kota Balikpapan telah memenuhi standar layanan, baik dalam aspek koleksi, fasilitas, tenaga perpustakaan, maupun program literasi yang dijalankan. Dengan semakin banyaknya perpustakaan yang dibina sesuai SNP, akses masyarakat terhadap sumber bacaan dan informasi yang berkualitas semakin meningkat. Selain itu, keberadaan perpustakaan yang memenuhi standar juga berperan dalam mendukung program literasi berbasis komunitas serta memperkuat infrastruktur literasi yang inklusif dan berkelanjutan;

2. Keterlibatan masyarakat Kota Balikpapan dalam sosialisasi perpustakaan sebanyak 35.149 orang atau 4,95% dari total populasi terlibat dalam berbagai kegiatan sosialisasi perpustakaan. Angka ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam program literasi, seperti seminar, pelatihan membaca, lokakarya literasi digital, serta berbagai kegiatan literasi berbasis komunitas. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan berperan penting dalam menumbuhkan budaya literasi yang lebih kuat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses terhadap informasi yang berkualitas;
3. Jumlah anggota perpustakaan mencapai **203.309 orang atau 28,63% dari total populasi** telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari masyarakat Kota Balikpapan telah memanfaatkan layanan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran, pengembangan keterampilan, serta peningkatan wawasan. Dengan jumlah anggota yang terus meningkat, perpustakaan semakin berperan sebagai pusat literasi yang inklusif dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, tenaga profesional, serta masyarakat umum.

Meskipun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu mendapatkan perhatian agar upaya peningkatan IPLM dapat berjalan lebih optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah perpustakaan yang saat ini hanya **sebanyak 408 unit**, sedangkan masih diperlukan tambahan **76 perpustakaan** agar standar layanan literasi dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, jumlah koleksi buku di seluruh perpustakaan Kota Balikpapan saat ini mencapai **503.472 eksemplar**, namun masih terdapat kekurangan **916.608 koleksi buku**, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan referensi bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.

Tantangan lain yang turut memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang kepustakawanan. Saat ini, jumlah pustakawan yang tersedia hanya **235 orang**, sementara masih dibutuhkan tambahan **50 pustakawan** untuk memastikan pelayanan perpustakaan dapat berjalan secara lebih efektif, profesional, dan inovatif. Selain infrastruktur dan tenaga perpustakaan, rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan literasi masyarakat. Data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari hanya **1.284 orang**, yang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Balikpapan menunjukkan persentase **0,18% per hari**, angka yang masih jauh dari ideal. Rendahnya tingkat kunjungan ini mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat serta pemanfaatan layanan perpustakaan masih perlu ditingkatkan melalui berbagai strategi yang lebih efektif.

Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya strategis guna memperkuat ekosistem literasi di masyarakat, diantaranya:

1. **Mendorong pembangunan perpustakaan di tingkat kelurahan serta perpustakaan khusus** guna memperluas akses literasi bagi masyarakat. Dengan adanya perpustakaan di tingkat kelurahan, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan bahan bacaan serta fasilitas literasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan wawasan;

2. **Meningkatkan koleksi bahan pustaka di perpustakaan daerah** melalui anggaran yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Balikpapan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk donasi buku. Upaya ini juga diperluas ke tingkat sekolah, dengan mendorong **perpustakaan sekolah untuk meningkatkan koleksi bahan pustaka** melalui pengadaan buku serta donasi dari siswa maupun masyarakat. Dengan peningkatan jumlah koleksi buku, diharapkan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, dapat lebih mudah mengakses sumber informasi yang berkualitas;
3. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Balikpapan terus **melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah** guna memastikan kebutuhan tenaga pustakawan dapat terpenuhi, baik di tingkat pendidikan dasar maupun di kelurahan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar lebih profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat;
4. Pemerintah Kota Balikpapan juga berfokus pada **peningkatan kualitas perpustakaan**, baik dari segi layanan, kegiatan, maupun sarana dan prasarana, agar lebih menarik bagi masyarakat. Berbagai program literasi, pelatihan, serta kegiatan berbasis komunitas terus didorong untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan serta fasilitas yang lebih modern dan nyaman, diharapkan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dapat meningkat secara signifikan.

Gambar 2.65
Layanan Perpustakaan Keliling
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan (2025)

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi masyarakat serta menjadikan perpustakaan sebagai bagian integral dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pemuda

Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan indeks yang menilai daya saing kepemudaan dan keolahragaan dari sisi prestasi pemuda non keolahragaan dan keolahragaan dari seluruh

pemuda dan atlet yang dibina. Hasil indeks ini adalah perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan rumus hitung sebagai berikut:

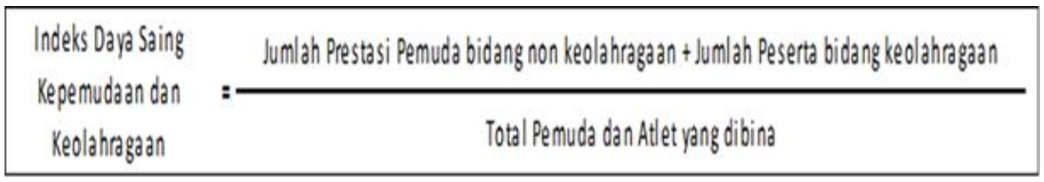

Gambar 2.66
Rumus Hitung Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Pada tahun 2024 diketahui bahwa Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,209 poin dengan capaian kinerja sebesar 254,88% atau berpredikat "melebihi target", jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.67
Perkembangan Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi kinerja ini menunjukkan tren positif setiap tahunnya, dengan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2024 dan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 136% per tahun, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada 2024 yang meningkat hingga 164,6% dibandingkan tahun 2023. Capaian kinerja ini selalu lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan, mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan di Kota Balikpapan.

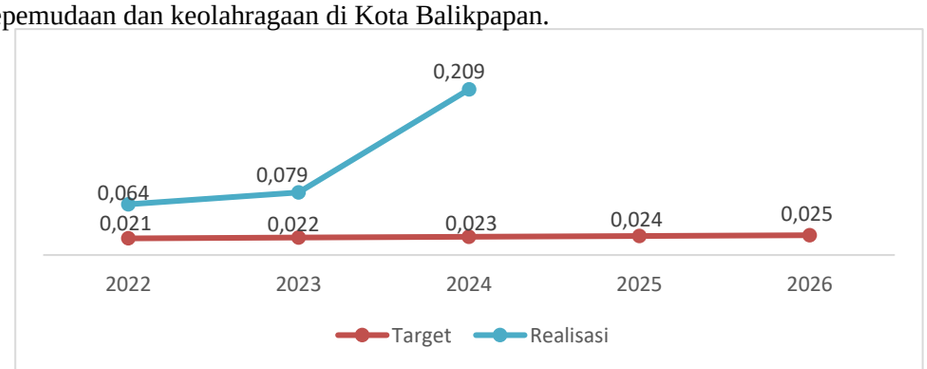

Gambar 2.68
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, capaian kinerja Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balikpapan tahun 2024 telah berada jauh diatas target atau hampir **910% lebih tinggi** dari target jangka menengah yang telah direncanakan, bahkan capaian ini juga telah melebihi target di tahun 2026.

Peningkatan yang signifikan ini seiring dengan bertambahnya jumlah pemuda dan atlet berprestasi pada tahun 2024, yang didukung oleh berbagai faktor strategis. Salah satunya adalah penyelenggaraan event-event olahraga dan kepemudaan berskala nasional maupun regional yang menjadi wadah pengembangan potensi. Dalam bidang keolahragaan, Kota Balikpapan juga turut berpartisipasi dalam ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), yang mendorong para atlet untuk meningkatkan kompetensi dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, dalam bidang kepemudaan, Kota Balikpapan berperan sebagai tuan rumah *Youth City Changers* (YCC), sebuah event nasional yang menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, serta jejaring di tingkat nasional. Selain itu, Kota Balikpapan juga menjadi tuan rumah Jambore Pemuda tingkat provinsi, yang semakin memperkuat posisi kota Balikpapan dalam mendukung pengembangan generasi muda. Sepanjang tahun 2024, berbagai prestasi yang diraih oleh pemuda dan atlet di berbagai kompetisi dan ajang kejuaraan turut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan.

1. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;

Gambar 2.69
Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB)
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

2. Menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota seperti kegiatan Turnamen bulu tangkis bertajuk Wali Kota Balikpapan *Open Cup* 2024 dan Kegiatan Balikpapan Multievent Olahraga Pelajar Tahap I Kota Balikpapan 2024;

Gambar 2.70
Kegiatan Turnamen bulu tangkis bertajuk Wali Kota Balikpapan Open Cup 2024 tanggal 1 hingga 5 Mei 2024 dan Kegiatan Balikpapan Multievent Olahraga Pelajar Tahap I Kota Balikpapan tanggal 24-28 Juli 2024
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

3. Mengikutsertakan atlet dalam kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional dengan dukungan dana partisipasi;

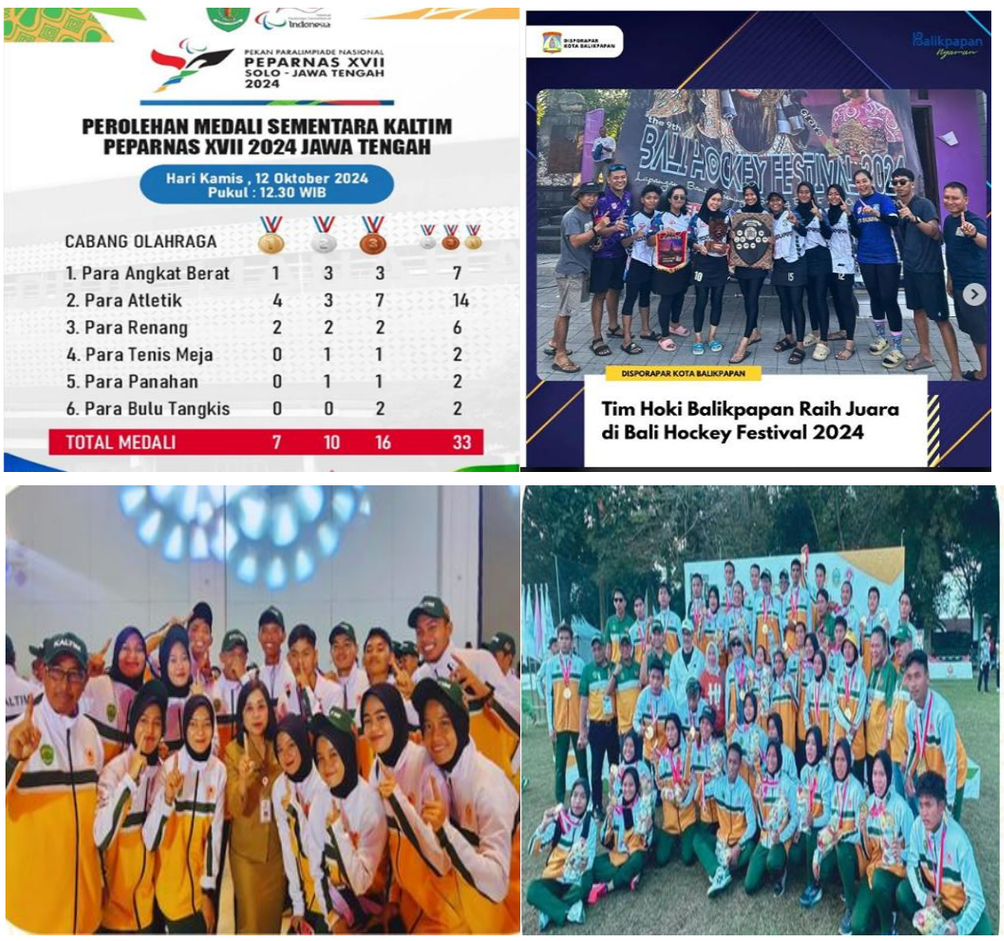

Gambar 2.71
Berbagai Kejuaran yang diikuti oleh Atlet Balikpapan
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

4. Memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi;

Gambar 2.72
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota untuk Atlet dan Pelatih Berprestasi
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

5. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Kegiatan Sosialisasi Pemasalan Olahraga Masyarakat, FORMAS, Haornas *Fest*, Pemilihan Duta Olahraga, Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di Balikpapan tenis stadium);

Gambar 2.73
Berbagai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, serta Peresmian Penggunaan Gedung Olahraga (GOR) Bulutangkis Balikpapan Tennis Stadium
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

6. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi seperti Pelatihan *Sport Medicine*, Kegiatan Pelatihan *Sport Biomechanics* (Pelatihan Fisik Dasar);

Gambar 2.74
Pelatihan *Sport Medicine* pada tanggal 22-24 April 2024 dan Kegiatan Pelatihan *Sport Biomechanics* (Pelatihan Fisik Dasar) pada tanggal 06-09 Mei 2024
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

7. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;

Gambar 2.75
Kegiatan *Youth City Changers* (YCC) yang dilaksanakan pada 1-2 Juni 2024 di Kota Balikpapan dan Kota Balikpapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Pemuda Daerah (JPD) Kalimantan Timur (Kaltim) tanggal 30 Mei - 3 Juni 2024
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

Gambar 2.76
Berbagai Program Pemberdayaan Pemuda
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

Gambar 2.77
Berbagai Program Pelatihan Bagi Pemuda
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga olahraga, komunitas kepemudaan, serta sektor swasta, diharapkan capaian positif dalam peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan di Kota Balikpapan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, penyelenggaraan event yang berkelanjutan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, akan memberikan ruang lebih luas bagi para pemuda dan atlet Kota Balikpapan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kompetensi, serta meraih prestasi yang lebih tinggi.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah

Kelestarian warisan budaya daerah merupakan aspek penting dalam menjaga identitas lokal dan memperkuat karakter masyarakat di tengah arus modernisasi. Sebagai kota yang terus berkembang, Balikpapan menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda, memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas budaya, serta masyarakat luas.

Untuk mengukur efektivitas upaya tersebut, digunakan **Indeks Warisan Budaya**, yang menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan warisan budaya di daerah. Indeks ini tidak hanya mencerminkan seberapa baik aset budaya terjaga, tetapi juga mengukur keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan tradisi serta kearifan lokal. Adapun rumus perhitungan **Indeks Warisan Budaya** adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Warisan Budaya} = \frac{\%\ \text{Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan} + \%\ \text{Penduduk 10 Tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai Pelaku}}{2} \times 100\%$$

Gambar 2.78
Rumus Hitung Indeks Warisan Budaya
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan Tahun 2024 memperoleh indeks sebesar 0,4956 poin dengan capaian sebesar 99,84% atau mendapat predikat “tidak tercapai”. Namun indeks tersebut belum dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 0,4964 poin, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

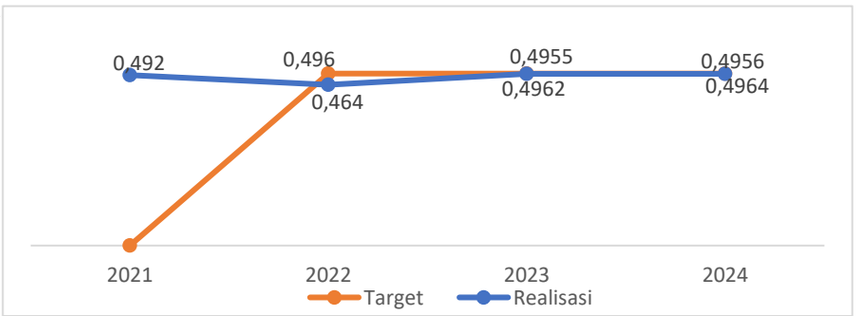

Gambar 2.79
Perkembangan Persentase Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DISDIK Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Perkembangan **Indeks Warisan Budaya** Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Berdasarkan data realisasi, indeks ini mengalami peningkatan dan penurunan dalam rentang nilai yang relatif kecil setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi Indeks Warisan Budaya tercatat sebesar **0,492**. Namun, pada tahun 2022, indeks ini mengalami penurunan menjadi **0,464**, atau mengalami penurunan sebesar **5,69%** dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, indeks ini kembali meningkat menjadi **0,4955**, mengalami kenaikan sebesar **6,80%** dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi Indeks Warisan Budaya mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,4956, atau meningkat sebesar 0,02% dibandingkan dengan tahun 2023. Apabila dilihat secara keseluruhan, rata-rata perubahan Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) tercatat sebesar **0,36% per tahun**.

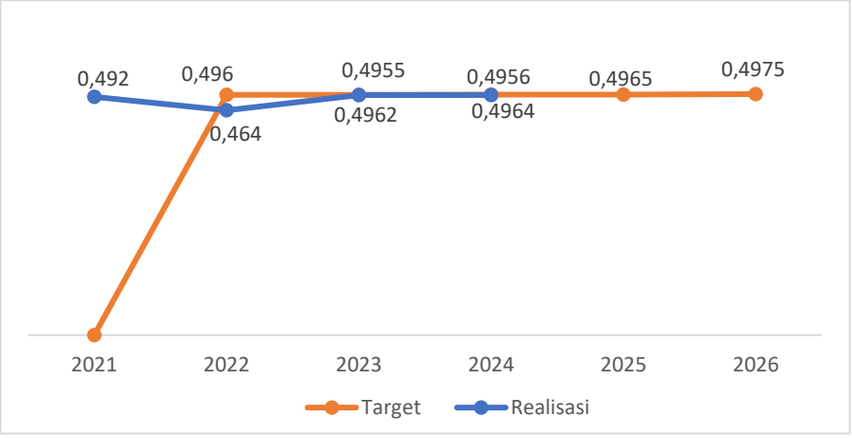

Gambar 2.80
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DISDIK Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, capaian realisasi Indeks Warisan Budaya pada tahun 2024 menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, target Indeks Warisan Budaya ditetapkan sebesar 0,4964, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 0,4956, atau lebih rendah sebesar 0,16% dari target yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 0,4965 pada tahun 2025 dan 0,4975 pada tahun 2026, maka capaian tahun 2024 masih sedikit di bawah proyeksi yang telah direncanakan. Namun, jika dilihat dari realisasi tahun sebelumnya (2023) yang mencapai 0,4955, maka terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,02% pada tahun 2024.

Belum tercapainya target Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan penetapan dan pelestarian warisan budaya di Kota Balikpapan. Salah satu kendala utama adalah tidak tercapainya seluruh nominasi cagar budaya dan sanggar seni yang ditetapkan sebagai warisan budaya resmi Kota Balikpapan. Beberapa situs budaya dan sanggar seni yang telah diajukan sebagai bagian dari warisan budaya masih belum memperoleh pengakuan atau legalisasi secara formal. Hal

ini menyebabkan jumlah warisan budaya yang tercatat secara resmi masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap perhitungan indeks yang ditetapkan.

Selain itu, terdapat sejumlah bangunan yang diduga sebagai cagar budaya di Kota Balikpapan, namun kepemilikannya masih berada di tangan masyarakat umum atau lembaga tertentu. Status kepemilikan ini menjadi tantangan tersendiri karena pengelolaan dan pelestariannya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah. Faktor lain yang turut menjadi penghambat adalah minimnya keterlibatan sejarawan lokal dalam menggali informasi mengenai sejarah Kota Balikpapan. Hingga saat ini, keterlibatan akademisi dan pakar sejarah dalam proses identifikasi dan validasi cagar budaya masih terbatas. Padahal, keberadaan sejarawan sangat penting dalam memberikan kajian ilmiah dan narasi historis yang dapat memperkuat argumentasi dalam proses penetapan warisan budaya. Tanpa adanya data sejarah yang komprehensif dan valid, pengajuan suatu situs atau objek budaya sebagai warisan budaya sering kali mengalami kendala administratif dan substansial.

Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian **Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan**, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis guna memperkuat pelestarian serta pengelolaan warisan budaya, antara lain:

a. M**embangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait**, termasuk pemilik aset budaya, lembaga masyarakat, dan instansi pemerintah guna memastikan bahwa **obyek-obyek yang diduga sebagai cagar budaya dapat dikelola dengan baik**. Melalui kerja sama ini, diharapkan aset budaya yang sebelumnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat atau lembaga tertentu dapat lebih terstruktur dalam sistem pelestarian warisan budaya daerah;
b. **Mendorong peran serta sanggar seni dalam pengelolaan lembaga seni yang ada di Kota Balikpapan.** Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan dengan melibatkan lebih banyak komunitas seni dalam berbagai kegiatan pelestarian budaya. Dengan adanya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah, sanggar seni dapat lebih aktif dalam mengembangkan kegiatan seni dan budaya yang berkelanjutan, serta memperluas jangkauan keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya;
c. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan edukasi budaya di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan juga menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis kompetisi, seperti **lomba karya tulis ilmiah, lomba bercerita, dan lomba duta budaya**. Lomba karya tulis ilmiah bertujuan untuk meningkatkan minat penelitian di bidang sejarah dan budaya, sekaligus menggali lebih banyak informasi mengenai sejarah Kota Balikpapan dari perspektif akademis. Sementara itu, lomba bercerita diadakan untuk mengenalkan dan menghidupkan kembali kisah-kisah sejarah dan budaya lokal agar tetap lestari di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda. Adapun lomba duta budaya merupakan ajang untuk melahirkan figur-figur yang dapat berperan sebagai **duta pelestarian budaya**, yang nantinya bertugas dalam mempromosikan nilai-nilai budaya daerah serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem pelestarian budaya dan memastikan bahwa **Indeks Warisan Budaya** dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Melalui kerja sama lintas sektor, keterlibatan aktif komunitas budaya, serta

penguatan kesadaran masyarakat, diharapkan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan warisan budaya Kota Balikpapan semakin lestari.

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) muncul sebagai indikator dalam mengkaji perbandingan pencapaian kesetaraan pembangunan manusia yang berwawasan gender dan merepresentasikan pembangunan gender secara berkelanjutan. Indikator ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1995 yang digunakan untuk memonitor peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan secara lintas bidang dan lintas daerah.

Data yang digunakan untuk penghitungan IPG berasal dari sumber yang sama dengan data yang digunakan untuk penghitungan IPM, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Gambar 2.81
Rumus Hitung Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan tahun 2024 masih mengacu pada angka tahun 2023, yaitu sebesar 90,80 poin, dengan capaian kinerja mencapai 99,90% dan predikat “tidak tercapai”.

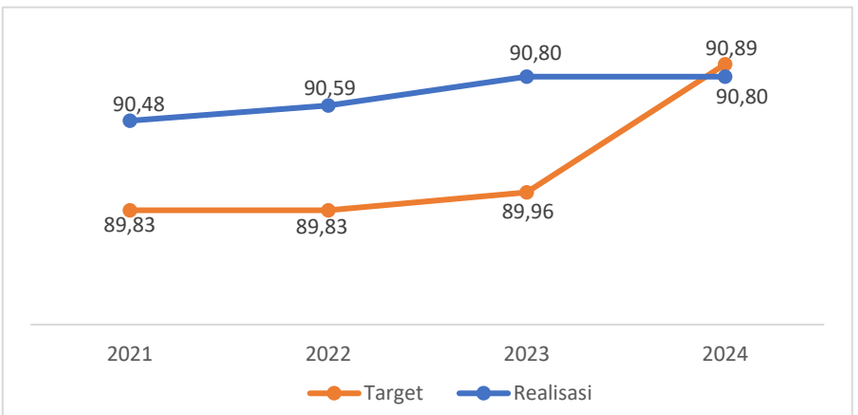

Gambar 2.82
Perkembangan Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Pada tahun 2024, target Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan ditetapkan sebesar 90,89. Berdasarkan realisasi capaian, angka IPG pada tahun ini masih berada pada angka yang sama dengan tahun 2023, yaitu 90,80, yang menunjukkan tidak adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, IPG mengalami peningkatan bertahap, di mana pada tahun 2021 realisasi IPG mencapai 90,48, kemudian meningkat menjadi 90,59 pada tahun 2022, dan naik kembali menjadi 90,80 pada tahun 2023. Secara rata-rata, IPG Kota Balikpapan mengalami kenaikan sebesar 0,12% per tahun dalam tiga tahun terakhir.

Namun, realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) hingga tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena indikator ini merupakan indikator perbaikan yang baru mulai digunakan sejak tahun 2022 dan tidak termuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

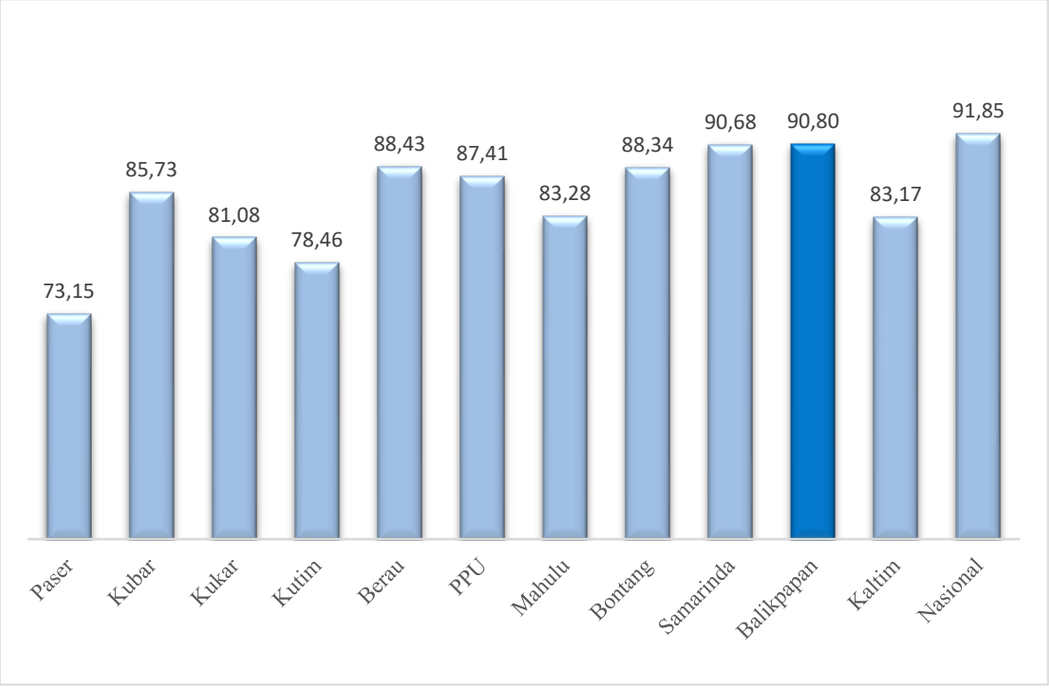

Gambar 2.83
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024 (Angka Sementara (2023)/ Belum Rilis)
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2025

Sementara itu, berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 (angka sementara 2023), Kota Balikpapan mencatatkan nilai 90,80, yang merupakan nilai tertinggi di Kalimantan Timur. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Kota Samarinda yang mencapai 90,68, serta jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 83,17. Keunggulan ini menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Balikpapan lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar wilayah lain di provinsi ini. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, Balikpapan juga unggul dari Berau (88,43), Bontang (88,34), dan Penajam Paser Utara (87,41), serta memiliki selisih yang lebih besar dibandingkan Kutai Barat (85,73), Kutai Kartanegara (81,08), Kutai Timur (78,46), Mahakam Ulu (83,28), dan Paser yang memiliki nilai terendah di Kalimantan Timur yaitu 73,15.

Meskipun Balikpapan menjadi kota dengan IPG tertinggi di Kalimantan Timur, apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 91,85, Balikpapan masih sedikit tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kesetaraan gender di kota Balikpapan agar dapat menyamai atau bahkan melampaui capaian nasional.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan yang tinggi tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang telah diterapkan secara konsisten. Salah satu faktor utama adalah dukungan regulasi dari Pemerintah Kota, di mana Kota Balikpapan telah memiliki Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Regulasi ini menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Selain itu, Pemerintah Kota juga terus mendorong penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana di setiap Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Selanjutnya, keberhasilan ini juga didukung oleh koordinasi dan konsolidasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam implementasi pengarusutamaan gender di berbagai instansi. Sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat menjadi kunci dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender. Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi juga berkontribusi terhadap pencapaian IPG yang lebih baik. Dengan semakin banyaknya perempuan yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi, peluang untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih merata semakin besar. Kombinasi dari berbagai faktor ini telah menjadikan Kota Balikpapan sebagai daerah dengan IPG tertinggi di Kalimantan Timur dan terus berupaya untuk mencapai tingkat yang lebih baik di masa mendatang.

Guna mempertahankan capaian kinerja tersebut, diperlukan upaya dan perencanaan ke depan agar pencapaian yang telah diraih dapat tetap terjaga di tahun-tahun mendatang. Beberapa upaya dan rencana ke depan untuk mempertahankan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan antara lain:

1. Mengusulkan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam bentuk Peraturan Daerah yang memuat seluruh proses perencanaan, kebijakan, program hingga kegiatan harus mempertimbangkan aspek pengarusutamaan gender. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan demi terciptanya kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
2. Penguatan peran Tim *Driver* (Penggerak PUG) dalam mensosialisasikan PPRG agar Perangkat Daerah memahami pentingnya penyusunan PPRG. Pertemuan rutin dengan stakeholder terkait yang masuk dalam tim Driver (Penggerak PUG) ini bertujuan untuk menguatkan komitmen, mengefektifkan fungsi serta mengawal percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Balikpapan, sehingga Perangkat Daerah sebagai tim driver lebih aktif menjadi motivator bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan PPRG;

Gambar 2.84
Pertemuan Rutin Tim *Driver* (Penggerak PUG) Kota Balikpapan
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2024)

3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan PPRG melalui pendampingan langsung ke Perangkat Daerah. Pendampingan ini berupa Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi para Perencana di masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan PPRG, sehingga masing-masing Perangkat Daerah semakin mumpuni dalam menyusun RKA yang responsif gender;

Gambar 2.85
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2024)

4. Meningkatkan kualitas SDM pengelola data gender;
5. Meningkatkan peran koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam pengarusutamaan gender;
6. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di bidang ekonomi melalui pelatihan kepada Perempuan Kepala Keluarga (memasak, membuat strap handphone) dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, taraf hidup, dan kemandirian perempuan;

Gambar 2.86
Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga di Bidang Ekonomi
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2024)

7. Pemberdayaan bagi Warga Binaan Perempuan di Rutan Kelas IIA Kota Balikpapan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan menjahit, agar dapat meningkatkan resiliensi pada warga binaan perempuan di Rutan Kelas IIA Balikpapan;

Gambar 2.87
Pelatihan Menjahit bagi Warga Binaan Perempuan di Rutan Kelas IIA Kota Balikpapan
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2024)

8. *Workshop* Pemberdayaan bagi organisasi Perempuan melalui peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan memberikan advokasi serta strategi kepada organisasi perempuan di kota Balikpapan untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen.

Gambar 2.88
Workshop Peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen kepada Organisasi Perempuan di Kota Balikpapan
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2024)

Dengan berbagai upaya strategis yang telah direncanakan, diharapkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang responsif gender, penguatan peran stakeholder, serta pemberdayaan perempuan di berbagai sektor menjadi kunci dalam mewujudkan kesetaraan gender yang lebih inklusif dan merata. Melalui kolaborasi yang solid antara

pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Kota Balikpapan dapat terus menjadi contoh dalam pembangunan yang berkeadilan gender, sehingga memberikan manfaat nyata bagi seluruh warganya.

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas

Dalam era perkembangan global yang terus berlangsung, peningkatan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kemajuan suatu negara atau wilayah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akses terhadap layanan dasar seperti transportasi, air bersih, energi, dan teknologi informasi dapat semakin optimal, sehingga mendorong efisiensi dalam berbagai sektor.

Untuk memastikan bahwa peningkatan infrastruktur berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan alat ukur yang objektif dan terstruktur. Dalam hal ini, terdapat dua indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, antara lain:

a) Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan alat yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan infrastruktur secara keseluruhan dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini berfokus pada berbagai aspek infrastruktur, termasuk jaringan jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan kualitas lingkungan, dengan mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, serta pemanfaatannya. Selain itu, indeks ini juga menilai tingkat efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur serta tingkat transparansi yang diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas.

Adapun rumus perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan analisis dalam menilai tingkat perkembangan infrastruktur adalah sebagai berikut:

$$IPI = \frac{\%\text{Infrastruktur Jalan dalam kondisi baik} + \%\text{Infrastruktur Drainase dalam kondisi berfungsi baik} + \%\text{Cakupan Infrastruktur Layanan Air Minum} + \%\text{Cakupan Infrastruktur Layanan Air Limbah} + \%\text{Penyediaan Infrastruktur Persampahan} + \%\text{Tingkat Pelayanan Jalan (level of service)}}{6}$$

Gambar 2.89
Rumus Hitung Indeks Pembangunan Infrastruktur
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Daerah, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 81,62 poin dengan capaian kinerja sebesar 103,16% atau “melebihi target”.

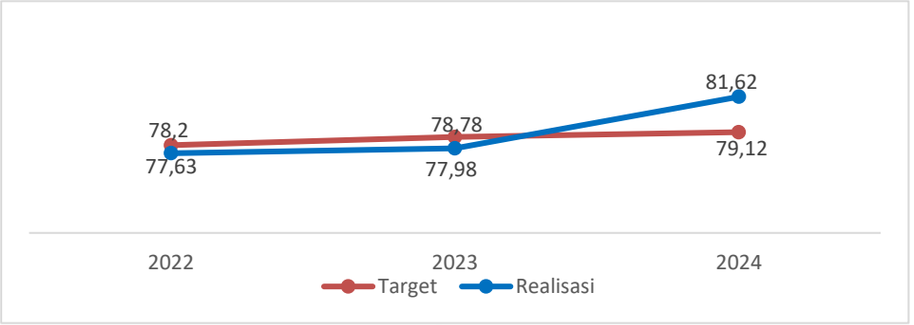

Gambar 2.90
Perkembangan Persentase Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data perkembangan Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan, realisasi kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi capaian mencapai 77,63, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 77,98. Pada tahun 2024, realisasi melonjak tajam menjadi 81,62, melampaui target yang ditetapkan sebesar 79,12. Apabila melihat tren dalam tiga tahun terakhir, realisasi kinerja dari tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin, yang menunjukkan peningkatan meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2024, capaian kinerja justru mengalami lonjakan signifikan sebesar 3,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya atau sekitar 4,67% lebih tinggi dari tahun 2023. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, realisasi kinerja melampaui target sebesar 2,5 poin atau sekitar 3,16% di atas target. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur mengalami akselerasi yang sangat baik pada tahun 2024 dibandingkan dengan tren pertumbuhan moderat di tahun-tahun sebelumnya.

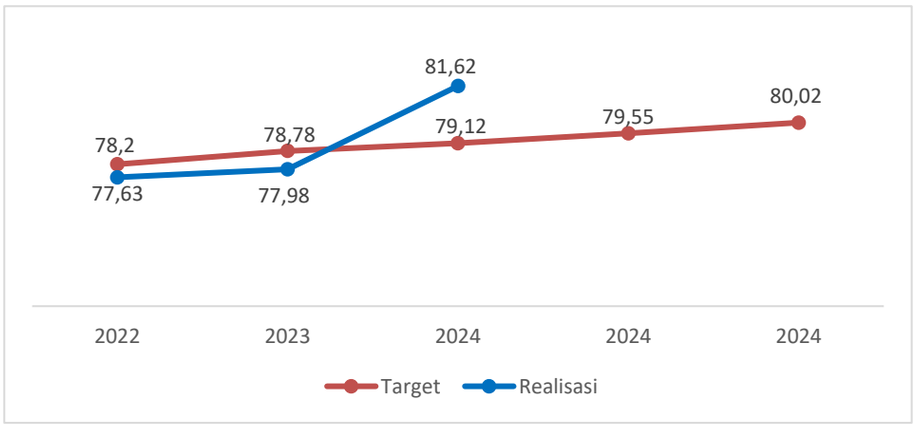

Gambar 2.91
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan hingga tahun 2024, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah. Pada tahun 2022, realisasi capaian mencapai 77,63, sedikit di bawah target sebesar 78,2. Tren serupa terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi sebesar 77,98 masih berada di bawah target 78,78. Namun, pada tahun 2024, realisasi justru mengalami lonjakan signifikan menjadi 81,62, melampaui target tahun tersebut yang ditetapkan sebesar 79,12. Dengan demikian, terdapat kelebihan

capaian sebesar 2,5 poin lebih tinggi atau sekitar 3,16% di atas target. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, realisasi tahun 2024 juga telah melampaui target pembangunan infrastruktur untuk tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 79,55. Artinya, capaian tahun ini lebih tinggi 2,07 poin dibandingkan target tahun depan. Bahkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 80,02, realisasi saat ini masih 1,6 poin lebih tinggi, atau 2% di atas target 2026.

Peningkatan signifikan dalam realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan pada tahun 2024 menunjukkan adanya berbagai faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian ini. Salah satu faktor utama adalah efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, didukung oleh perencanaan yang matang serta koordinasi antarinstansi yang semakin optimal. Peningkatan alokasi anggaran dan investasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, turut mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan memastikan penyelesaian tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan telah meningkatkan efisiensi serta kualitas hasil pekerjaan, sehingga proyek dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik. Stabilitas sosial dan ekonomi yang kondusif juga memberikan dampak positif dengan meminimalkan hambatan administratif serta memperlancar proses pembangunan. Kinerja sumber daya manusia yang lebih profesional serta adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat turut menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Adanya dukungan dari berbagai aspek membuat capaian pembangunan infrastruktur tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menjadi indikator positif bagi keberlanjutan pembangunan di Kota Balikpapan pada tahun-tahun mendatang.

Di samping faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara kolaborasi guna mendukung meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, antara lain:

1. Pada aspek infrastruktur layanan air minum, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian aspek ini antara lain:
    - Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan upaya peningkatan penyediaan air minum sehat dan merata antara lain:
        a. Melakukan proses perpanjangan penetapan lokasi seluas 72,01 Ha dan akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pembangunan Embung Aji Raden sebagai upaya mengatasi keterbatasan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum layak (rencana kapasitas 150 liter/ detik);
        b. Melakukan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU *Unsolicited* dan menyusun rencana jaringan distribusi tahun 2024. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan bendungan sepaku semoi (rencana kapasitas 1.000 liter/detik sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: CK 0502-Mn/ 949 tanggal 15 Oktober 2024);
        c. Melaksanakan penjaringan minat badan usaha pada tanggal 30 November dalam rangka desalinasi air laut (skema B to B);
        d. Menyusun kajian kelayakan tahun 2024 oleh BWS Kalimantan IV dalam rangka pemanfaatan sungai Mahakam;

e. Melakukan proses studi kelayakan oleh Arsari Enviro dalam rangka pemanfaatan rencana bendungan arsari;

Gambar 2.92
Pembangunan Reservoir SPAM Bukit Batuah
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

- Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan peningkatan layanan, sebagai berikut:

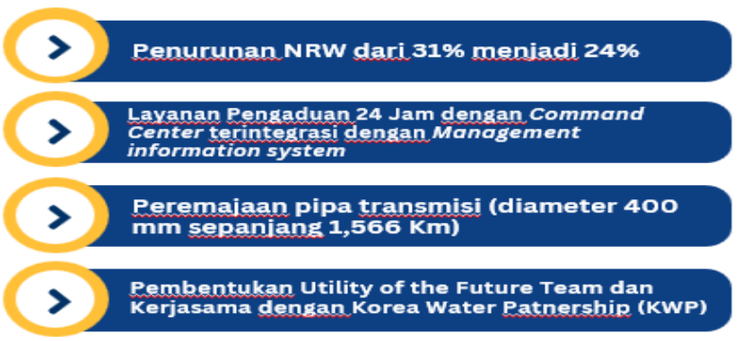

Gambar 2.93
Peningkatan Layanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

2. Pada aspek infrastruktur drainase, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian aspek ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan antara lain:
   - Melaksanakan pembangunan bendali ampal hulu dalam rangka pengendalian banjir Kota Balikpapan. Pada tahun 2023-2024, lahan untuk rencana pembangunan bendali ampal hulu telah dibebaskan sebesar 66.957 m^2 dan sisanya telah dilakukan proses konsinyasi.

WALI KOTA BALIKPAPAN

Gambar 2.94
Upaya Pengadaan Lahan Bendali Ampal Hulu
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

- Melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi drainase di 12 wilayah, meliputi drainase Batakan Besar, drainase Jl. Soekarno Hatta KM 17, drainase Jl. Ruhui Rahayu, drainase RT 32 Karang Joang, drainase RT 34 Karang Joang, drainase saluran primer Batakan Besar, drainase saluran primer Lamaru, drainase saluran primer Sepinggan, drainase saluran sekunder Balikpapan baru, drainase saluran sekunder Strat III Hulu, drainase saluran tersier Ampar Lestari, dan drainase JL. Tepo

Gambar 2.95
Upaya Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Drainase
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

3. Pada aspek kualitas lingkungan, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian aspek ini antara lain:
   - Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melaksanakan pengelolaan sampah antara lain:
     a. Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/ Kemasan Plastik Sekali Pakai;
     b. Menyusun *Less Waste Briefing* (Panduan Pengurangan Sampah);
     c. Melaksanakan optimalisasi bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga;
     d. Melaksanakan pembangunan TPST sebanyak dua unit yang berlokasi di Karang Joang dan Sepinggan;

Gambar 2.96
Pembangunan TPST dan Tempat Sampah Lainnya
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

e. Melaksanakan optimalisasi teknologi pengelolaan sampah di TPA Manggar dengan skema KPBU;

Gambar 2.97
Penyusunan Final *Business Case* KPBU TPAS Manggar
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

f. Melaksanakan yustisi pelanggaran pengelolaan sampah dengan sasaran penindakan membuang sampah di luar waktu yang ditentukan dan membuang sampah tidak pada TPS.

Gambar 2.98
Yustisi Pelanggaran Pengelolaan Sampah
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melaksanakan pengelolaan air limbah antara lain:
  a. Melaksanakan pembangunan SANIMAS sebanyak 6 unit;
  b. Melaksanakan penyiapan peningkatan kapasitas IPLT dengan dukungan Kementerian PUPR dan World Bank, termasuk pemenuhan persetujuan lingkungan;
  c. Melaksanakan perencanaan pembangunan IPAL Perkotaan di Sepinggan, Margasari, dan Somber dengan dukungan Kementerian PUPR dan KIAT.
- Perumda Tirta Manuntung Balikpapan memberikan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3).

Gambar 2.99
Pengelolaan Air Limbah
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

4. Pada aspek infrastruktur jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian indikator ini antara lain:
   - Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan.

Gambar 2.100
Pemeliharaan Rutin Jalan
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

   - Melaksanakan peningkatan konektivitas jalan di beberapa wilayah dengan target untuk pembangunan jalan sebesar 6,55 km, rekonstruksi jalan sebesar 25 km, dan rehabilitasi jalan sebesar 13 km. Adapun beberapa wilayah yang telah dilakukan peningkatan konektivitas jalan antara lain

jalan KPIK, Jl. Salok Lay, Jl. Argo Wisata Km 23, Jl. Batu Ratna, pemeliharaan Jl. MT haryono, Jl. Mukmin Faisal, Jembatan Taman Sepinggan, Jl. Alam Baru, Jembatan Wika RT 15, dan Jl. Taman Sari;

Gambar 2.101
Peningkatan Konektivitas Jalan
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

5. Pada aspek tingkat pelayanan jalan, pengelolaan dan penyediaan transportasi serta layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:
   - Melaksanakan pengadaan perlengkapan jalan meliputi pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, rambu lalin, jalur sepeda, cermin tikung, paku marka, marka jalan, papan nama jalan, dan zona selamat sekolah;

Gambar 2.102
Peningkatan Konektivitas Jalan
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

- Melaksanakan peningkatan pelayanan angkutan dan rekayasa lalu lintas;

PENYEDIAAN DAN PENERTIBAN AREA HALTE | UJI KIR ANGKOT

Dari data 2018 tercatat ada 1200 unit angkot. Hingga saat ini tercatat **461 unit angkot telah lulus uji KIR**. Setelah lulus Uji Kir, akan dilakukan **penerbitan Kartu Pengawasan Izin trayek berserta pendataan driver** untuk pembagian seragam dan ID Card pengemudi. Angkot yang tidak lulus, untuk kekurangan ringan diberi waktu maksimal 3 bulan untuk memenuhi segala kekurangannya. Angkot yang telah dinyatakan lulus Uji Kir dan laik jalan, saat ini **sedang disusun kajian untuk konektivitas rute baru untuk mendukung operasional bus** Balikpapan City Trans di koridor utama.

UJI COBA PENGAKTIFAN APIL SIMPANG GRAND CITY

Gambar 2.103
Pelayanan Angkutan Dan Rekayasa Lalu Lintas
Sumber: Bapedda Litbang Kota Balikpapan (2024)

b) Persentase Permukiman Layak Huni

Infrastruktur yang terpadu dan berkualitas merupakan rangkaian fasilitas dan sistem yang saling terkait serta terintegrasi secara optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Infrastruktur yang terpadu mencerminkan keterpaduan dan keterkaitan antara berbagai jenis infrastruktur, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan. Sementara itu, infrastruktur yang berkualitas ditandai dengan pemenuhan standar dan spesifikasi yang ditetapkan, memiliki kapasitas yang memadai, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Salah satu indikator meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas adalah persentase permukiman layak huni. Permukiman layak huni merupakan lingkungan tempat tinggal di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat bermukim serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Permukiman ini harus ditunjang oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku, sehingga mampu menjamin kesehatan, keamanan, serta kualitas hidup masyarakat. Adapun rumus hitung persentase permukiman layak huni adalah sebagai berikut:

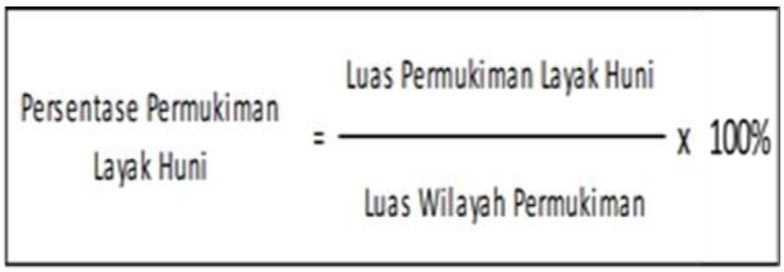

Gambar 2.104
Rumus Hitung Persentase Permukiman Layak Huni
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diketahui bahwa persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan tahun 2024 telah mencapai 99,85 % dari target kinerja 99,55% dengan tingkat capaian kinerja 100,30% dan mendapat predikat “melebihi target”.

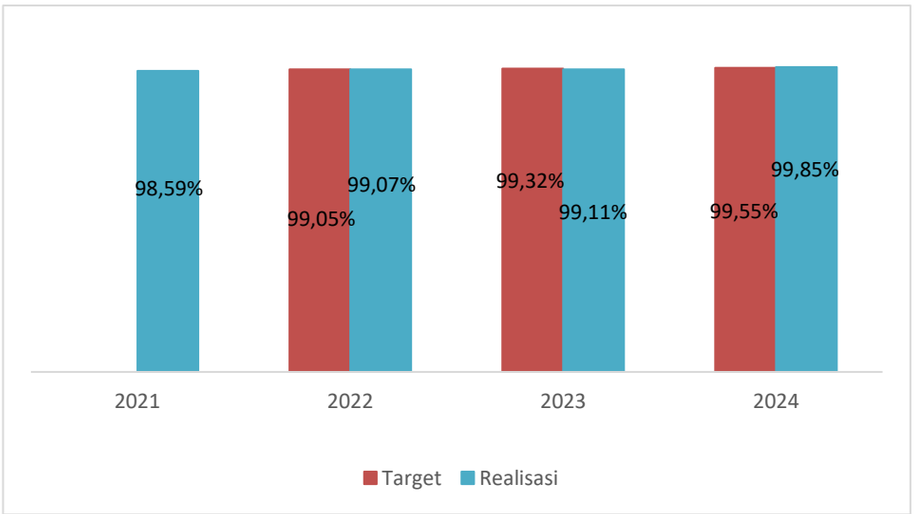

Gambar 2.105
Perkembangan Persentase Permukiman Layak Huni Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Perkembangan persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, realisasi capaian tercatat sebesar 98,59%, kemudian meningkat menjadi 99,07% pada tahun 2022, 99,11% pada tahun 2023, dan mencapai 99,85% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 0,74% dari tahun 2023 ke 2024. Secara keseluruhan, sejak tahun 2021 hingga 2024, Kota Balikpapan mengalami peningkatan kumulatif sebesar 1,26%, dengan rata-rata pertumbuhan 0,42% per tahun.

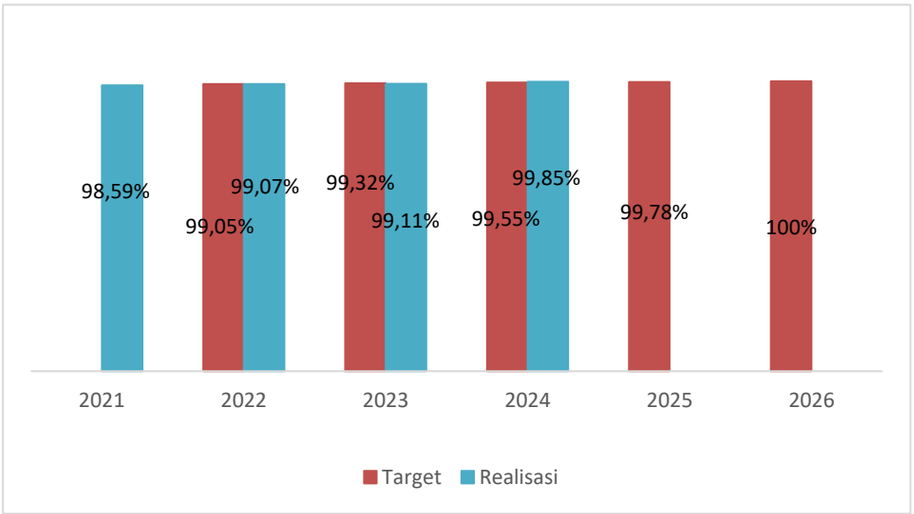

Gambar 2.106
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Permukiman Layak Huni Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, capaian realisasi persentase permukiman layak huni hingga tahun 2024 menunjukkan tren positif dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi persentase permukiman layak huni mencapai 100,30% dari target tahunan. Apabila dibandingkan dengan target tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi juga terus menunjukkan pencapaian yang positif. Pada tahun 2022, capaian realisasi sekitar 100,02% dari target dan tahun 2023 terealisasi sekitar 99,79% dari target yang telah ditetapkan. Meski terdapat sedikit deviasi pada tahun 2023, tren pertumbuhan secara keseluruhan tetap mengarah pada pencapaian target yang optimal. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target permukiman layak huni untuk tahun 2025 dan 2026, capaian tahun 2024 yang telah mencapai 99,85% menunjukkan bahwa Kota Balikpapan hampir mencapai kondisi permukiman layak huni secara penuh. Dengan asumsi tren peningkatan yang stabil, pencapaian target di tahun-tahun mendatang sangat memungkinkan untuk direalisasikan secara optimal.

Pencapaian kinerja persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan dalam meningkatkan kualitas hunian serta infrastruktur pendukungnya. Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan ini meliputi:

1. Program KOTA KITA (Kolaborasi dan Sinergi Penataan Permukiman Berkelanjutan)

   Program ini menjadi strategi utama dalam mengintegrasikan berbagai upaya penataan permukiman secara berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, program ini memastikan bahwa pengembangan permukiman tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi, sehingga tercipta lingkungan hunian yang lebih layak dan nyaman.
2. Kerja Sama dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait dalam Pengawasan Pengembangan Perumahan

   Sinergi antarperangkat daerah serta instansi terkait menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengembangan perumahan di Kota Balikpapan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang dan standar teknis yang berlaku. Pengawasan yang ketat terhadap pengembang perumahan turut mencegah

pembangunan permukiman yang tidak sesuai standar, sehingga kualitas hunian yang layak dapat terus terjaga.

3. Penyusunan *Baseline* Data Perumahan dan Data Rumah di Kawasan Rawan Bencana
   Keberadaan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi perumahan serta rumah yang berada di kawasan rawan bencana menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan data ini, Pemerintah Kota Balikpapan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, baik dalam peningkatan kualitas infrastruktur maupun dalam mitigasi resiko bencana.
4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Delapan Perumahan
   Penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Balikpapan menandakan bahwa kawasan perumahan tersebut telah memenuhi standar yang layak bagi hunian. Dengan adanya PSU yang telah diserahkan, Pemerintah Kota Balikpapan dapat memastikan ketersediaan fasilitas umum yang memadai, seperti jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas sosial, yang mendukung kenyamanan dan keamanan bagi warga.

Meskipun pencapaian persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu mendapatkan perhatian agar upaya peningkatan kualitas permukiman dapat berjalan lebih optimal. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Masih terdapat rumah masyarakat yang tidak layak huni, baik yang berada di dalam kawasan yang telah ditetapkan dalam SK Kumuh maupun di luar kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program peningkatan kualitas permukiman terus berjalan, masih ada masyarakat yang tinggal dalam kondisi hunian yang kurang layak, baik dari segi struktur bangunan, aksesibilitas, maupun ketersediaan infrastruktur dasar;
2. Masih terdapat kawasan kumuh, khususnya di wilayah kewenangan provinsi dan pusat yang menghambat percepatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh;
3. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni, baik dalam aspek kualitas bangunan maupun keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai. Beberapa kawasan perumahan dan permukiman masih menghadapi kendala dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau, dan akses air bersih. Kondisi ini berdampak pada kualitas hunian serta kesejahteraan masyarakat;
4. Data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang belum ter-update secara periodik Hal ini dapat menghambat upaya mitigasi bencana dan penanganan kawasan rawan resiko, karena pemerintah membutuhkan informasi yang mutakhir untuk menyusun strategi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan permukiman terhadap bencana;
5. Belum semua prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sehingga pemeliharaan serta peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut menjadi terbatas, karena belum masuk dalam kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka mengatasi berbagai faktor penghambat yang masih dihadapi dalam peningkatan kualitas permukiman layak huni, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai langkah strategis dan program yang terintegrasi. Upaya-upaya ini tidak hanya berfokus pada penanganan langsung terhadap kawasan permukiman yang belum layak huni, tetapi juga mencakup pencegahan, peningkatan koordinasi

antarinstansi, serta penguatan regulasi dan tata kelola perumahan. Beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan antara lain:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

   Pemerintah Kota Balikpapan secara aktif melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya penataan kawasan permukiman. Melalui program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, perbaikan dilakukan terhadap rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni dengan memberikan bantuan renovasi atau pembangunan kembali. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan memastikan setiap rumah memiliki struktur yang aman, aksesibilitas yang baik, serta fasilitas dasar yang memadai.
2. Penanganan dan Pemugaran Kawasan Kumuh serta Pencegahan Perkembangan Kawasan Kumuh Baru

   Selain melakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni, pemerintah juga menjalankan program pemugaran kawasan kumuh yang mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan akses air bersih. Tidak hanya itu, langkah pencegahan juga dilakukan untuk menghindari munculnya kawasan kumuh baru, baik melalui pengawasan tata ruang maupun pengendalian pertumbuhan perumahan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar program intervensi dalam menangani kawasan kumuh dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.
3. Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) dalam Pengawasan Pengembangan Perumahan

   Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait untuk memastikan bahwa pengembangan perumahan di Kota Balikpapan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup aspek perizinan, pengawasan, serta pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas permukiman yang layak.
4. Peningkatan Akurasi Data melalui *Updating* Periodik dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIM PKP)

   Pemerintah Kota Balikpapan melakukan *updating* data perumahan dan kawasan rawan bencana secara periodik, sehingga kondisi perumahan di setiap wilayah dapat dipetakan dengan lebih baik. Selain itu, pengembangan aplikasi SIM PKP (Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman) memungkinkan pemerintah Kota Balikpapan memiliki basis data yang lebih komprehensif, yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan berbasis data (data-*driven policy*).
5. Sosialisasi Kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) oleh Pengembang

   Pemerintah Kota Balikpapan secara aktif melakukan sosialisasi kepada pengembang mengenai kewajiban penyerahan PSU, sehingga proses serah terima dapat berjalan lebih lancar. Dengan adanya penyerahan ini, pemerintah dapat melakukan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perumahan, sehingga kualitas lingkungan permukiman dapat lebih terjamin dalam jangka panjang.

Gambar 2.107
Berbagai Kegiatan yang Mendukung Capaian Persentase Permukiman Layak Huni Kota Balikpapan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman layak huni dan memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan nyaman. Meskipun masih terdapat tantangan, langkah-langkah strategis yang diambil menunjukkan hasil positif dalam mendorong perbaikan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Berbagai strategi telah dikembangkan untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan dampak terhadap kehidupan manusia. Agar upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat diukur secara objektif dan terarah, diperlukan indikator yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan secara menyeluruh. Dalam hal ini, terdapat dua indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur pencapaian keberhasilan. IKLH memberikan gambaran mengenai kondisi kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengukuran kualitas air, udara, serta tutupan lahan, yang selanjutnya diperkuat dengan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan

hidup. Selain itu, IKLH berperan sebagai sumber informasi penting dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan hasil integrasi antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan *Environmental Performance Index* (EPI). Indikator ini berfungsi untuk menilai efektivitas program-program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Adapun metodologi evaluasi kualitas lingkungan hidup dalam IKLH terbagi menjadi empat komponen utama, yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air di sungai dan danau, (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara, (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang mengukur perubahan tutupan lahan, serta (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang menilai kondisi kualitas air laut. Dengan pendekatan evaluasi yang sistematis ini, IKLH dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan hidup dan menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

IKLH Kabupaten/ Kota	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Gambar 2.108
Rumus Hitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Pada tahun 2024, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 68,31 poin. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian mencapai 68,4 poin, dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 100,13%, sehingga memperoleh predikat “melebihi target”. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Balikpapan.

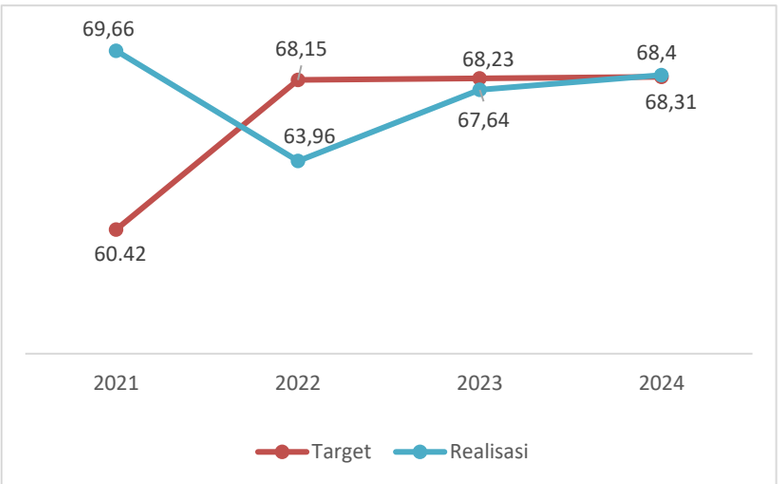

Gambar 2.109
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DLH Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat realisasi IKLH sebesar 69,66 poin, capaian tahun 2024 masih lebih rendah. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi IKLH hanya 63,96 poin, turun 8,2% dari tahun sebelumnya. Setelah itu, tren membaik dengan kenaikan 5,75% pada 2023 dan 1,12% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, dalam tiga tahun terakhir, IKLH mengalami sedikit penurunan 0,44% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan, tren IKLH masih belum sepenuhnya stabil.

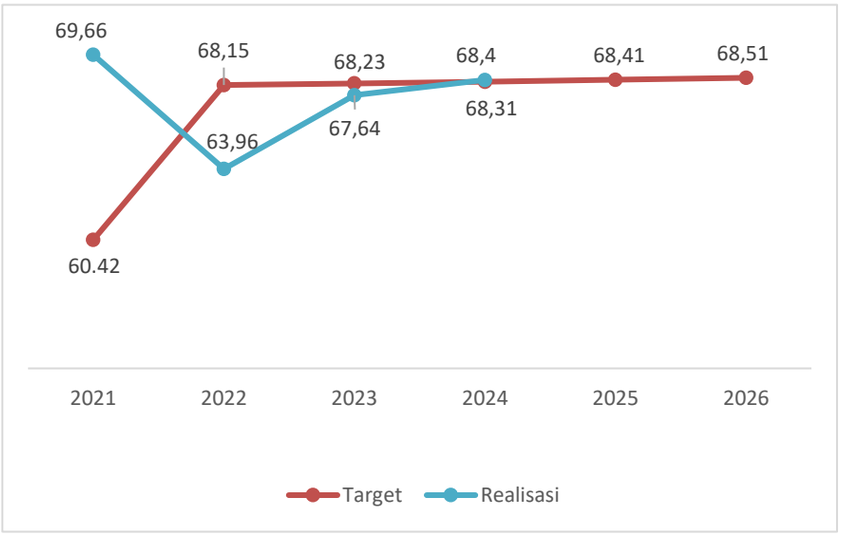

Gambar 2.110
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DLH Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hingga tahun 2024 menunjukkan dinamika yang beragam dibandingkan target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi IKLH Kota Balikpapan mencapai 68,4, atau 100,13% dari target yang ditetapkan sebesar 68,31. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan arah perencanaan jangka menengah. Apabila dibandingkan dengan target IKLH tahun 2025 (68,41) dan 2026 (68,51), realisasi tahun 2024 sudah mencapai 99,98% dari target 2025 dan 99,84% dari target 2026 atau dengan kata lain sudah mendekati target yang ditetapkan untuk kedua tahun tersebut. Namun, tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama penurunan tajam pada tahun 2022 dengan realisasi hanya 63,96 dari target 68,15, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga stabilitas dan peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

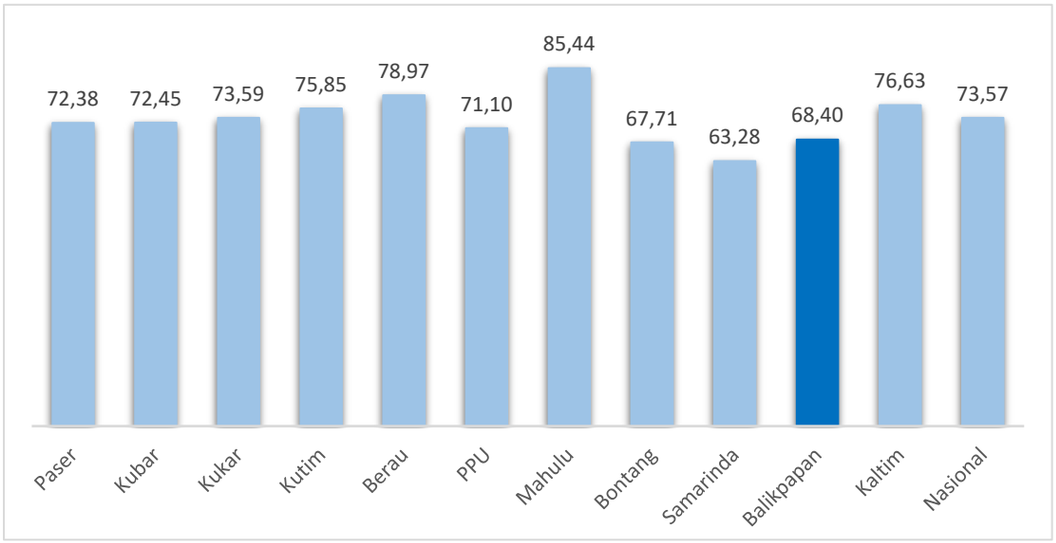

Gambar 2.111
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: DLH Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan masih berada di bawah sebagian besar daerah lainnya. Kota Balikpapan memiliki nilai IKLH yang lebih rendah 17,04 poin dibandingkan dengan Kabupaten Mahakam Ulu atau setara dengan selisih 24,94%, serta lebih rendah 10,57 poin dari Kabupaten Berau atau 15,45%. Dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara, IKLH Kota Balikpapan juga masih lebih rendah dengan selisih berkisar 3,70% hingga 11,37%. Namun, Kota Balikpapan memiliki IKLH yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bontang dengan selisih 0,69 poin atau 1,02% dan Kota Samarinda dengan selisih 5,12 poin atau 8,09%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 76,63 poin, IKLH Kota Balikpapan lebih rendah 8,23 poin atau setara dengan selisih 12,03%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 73,57 poin, IKLH Kota Balikpapan juga masih lebih rendah 5,17 poin atau 7,56%.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan tahun 2024 dipengaruhi oleh tiga indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Ketiga indikator ini menjadi komponen dalam perhitungan IKLH dan mencerminkan kondisi lingkungan secara keseluruhan. Adapun persentase capaian masing-masing indeks di Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan

Indikator	2024		Capaian
	Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,52	54,49	114,67%

Indikator	2024		Capaian
	Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,22	86,28	96,70%
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	59,20	90,62%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) mencatat pencapaian tertinggi dengan capaian 114,67% dari target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan kualitas air. Keberhasilan ini didukung oleh pemantauan kualitas air sungai di enam titik wajib pantau yang dilakukan melalui aplikasi IKLH KLHK serta pelaksanaan sampling yang dilakukan secara berkala dua kali per tahun pada musim kemarau dan penghujan. Selain itu, faktor alami seperti curah hujan juga turut berkontribusi dalam menjaga kualitas air sungai di Kota Balikpapan.

Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara (IKU) **hanya mencapai 96,70% dari target**, mengalami penurunan sebesar 5,9% dibandingkan tahun 2023. Salah satu penyebabnya adalah perubahan nilai IKU yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Desember 2024, yang menyesuaikan data dari Stasiun Pantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Selain itu, perbedaan metode perhitungan juga berpengaruh signifikan, di mana selama periode 2021-2024, perhitungan hanya menggunakan metode *passive sampler*, sementara mulai tahun 2025 akan dikombinasikan dengan data dari SPKUA. Perubahan metode ini menyebabkan capaian IKU tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, **Indeks Kualitas Lahan (IKL) mencatat capaian terendah**, yaitu **90,62% dari target yang ditetapkan**, meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, dari **48,91 menjadi 59,20**. Capaian yang masih di bawah target ini dipengaruhi oleh keterbatasan dalam penginputan data pada sistem IKLH, di mana pemerintah daerah hanya dapat memasukkan data terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya. Selain itu, dari 693 data RTH yang dilaporkan, sebanyak 5 data ditolak karena sudah masuk dalam kategori tutupan hutan yang ditetapkan KLHK. Hal serupa terjadi pada data tutupan vegetasi relevan lainnya, di mana dari 874 data yang dilaporkan, sebanyak 27 data ditolak karena telah masuk dalam kategori tutupan hutan yang di-plot oleh KLHK. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menginput data Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), karena kewenangan tersebut berada di tangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dalam aspek kualitas air yang melampaui target. Namun, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih di bawah target yang mengindikasikan adanya tantangan dalam sistem perhitungan, metode pemantauan, serta keterbatasan kebijakan dalam penginputan data. Untuk mengatasi serta meminimalisir hambatan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan capaian IKU dan IKL.

Dalam upaya meningkatkan capaian I Indeks Kualitas Udara (IKU), Pemerintah Kota Balikpapan telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara menggunakan metode *passive sampler* di empat titik lokasi perwakilan, yakni kawasan transportasi, permukiman, perkantoran, dan industri;
2. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala menggunakan tiga unit Alat Pantau Kualitas Udara (APKU) serta melakukan pemantauan tahunan dengan metode manual aktif (HVAS

dan Impinger) sesuai dengan titik pantau dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);

3. Melaksanakan uji emisi kendaraan sebagai bagian dari pengendalian emisi sumber bergerak dan pelaksanaan *traffic counting*, dengan target minimal 2.000 kendaraan setiap tahun dan disosialisasikan kepada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
4. Melaksanakan uji emisi cerobong (genset) untuk emisi sumber tidak bergerak di 28 usaha atau kegiatan.
5. Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penebangan Pohon, khususnya terkait kegiatan yang berdampak pada hilangnya tegakan pohon di jalur hijau jalan raya yang berfungsi menyerap emisi kendaraan bermotor yang berada pada jalur hijau jalan raya di Kota Balikpapan;
6. Melaksanakan program penanaman pohon di jalur hijau dan median jalan, sebagai kompensasi dari kegiatan usaha yang melakukan penebangan pohon.

Sementara itu, untuk meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL), berbagai langkah juga telah dilakukan, di antaranya:

1. Melakukan deliniasi tutupan lahan guna meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya. Peningkatan data yang terverifikasi dibandingkan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya

Kategori	Tahun	
	2023	2024
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	106 data (luas: 520,95 Ha)	688 data (luas: 254,43 Ha)
Tutupan Vegetasi Relevan lainnya	Belum melakukan deliniasi	847 data (luas: 8.299,37 Ha)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, diolah 2024

2. Melakukan konsultasi dengan Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) Kementerian KLHK guna membahas perubahan teknis perhitungan IKL yang akan diterapkan mulai tahun 2025, serta evaluasi Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH);
3. Mengembangkan rencana peningkatan nilai IKLH berbasis spasial dengan menentukan lokasi strategis serta mendorong kerja sama dengan perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Beberapa alternatif yang dapat dilakukan termasuk penanaman di kawasan industri yang melibatkan berbagai perusahaan, serta pembangunan *wetland* (lahan basah buatan) di sepanjang aliran sungai untuk mengurangi pencemaran badan air penerima.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Balikpapan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui strategi yang berbasis data, kolaborasi, dan kebijakan yang berkelanjutan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pencapaian IKU dan IKL, langkah-langkah strategis yang diterapkan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Keberlanjutan program serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan bagi Kota Balikpapan.

b) Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan

Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan mengukur sejauh mana penggunaan ruang telah selaras dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Indikator ini dihitung berdasarkan proporsi luas wilayah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dibandingkan dengan total luas wilayah yang diatur dalam RTRW. Semakin tinggi persentasenya, semakin menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang telah berjalan sesuai dengan perencanaan, mendukung pembangunan yang teratur, berkelanjutan, dan minim konflik tata ruang. Sebaliknya, jika persentasenya rendah, hal ini dapat menjadi indikasi adanya penyimpangan dari rencana tata ruang yang dapat berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan, ketidakteraturan pembangunan, serta potensi permasalahan infrastruktur dan sosial.

Adapun persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan dihitung berdasarkan perhitungan mandiri Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukan} = \frac{\text{Luas lahan sesuai pemanfaatan}}{\text{Luas keseluruhan lahan terbangun}} \times 100\%$$

Gambar 2.112
Rumus Hitung Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Peruntukkan
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan perhitungan mandiri Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan diketahui bahwa bahwa target persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan pada tahun 2024 sebesar 89,6% dan tercapai realisasi sebesar 96,85%, dengan capaian kinerja 108,09% atau mendapat predikat “melebihi target”. Secara luas wilayah, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan mencakup sekitar 9.659,64 Ha dari total 10.011,45 Ha lahan terbangun di Kota Balikpapan.

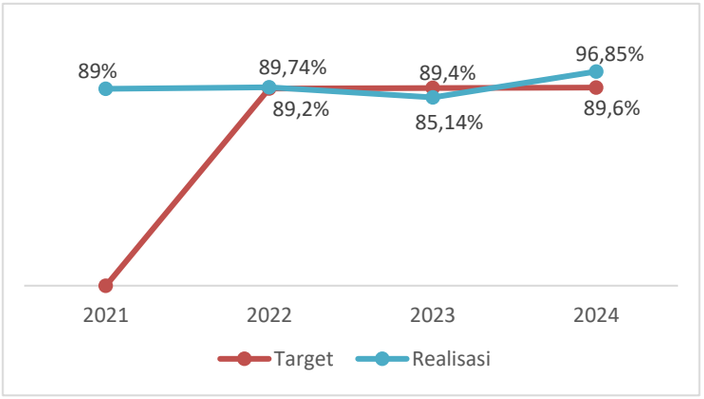

Gambar 2.113
Perkembangan Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Peruntukkan Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Merujuk pada data persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan di Kota Balikpapan dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan meskipun mengalami fluktuasi di beberapa tahun. Pada periode 2021 ke 2022, realisasi pemanfaatan ruang meningkat tipis sebesar 0,74%, menunjukkan bahwa penggunaan ruang masih sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, pada 2023, realisasi mengalami penurunan sebesar 4,6% dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi tata ruang atau peningkatan alih fungsi lahan yang belum sesuai dengan peruntukkannya. Tren ini kemudian berbalik positif pada 2024 dengan lonjakan signifikan sebesar 11,71%, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan tata ruang serta peningkatan kepatuhan terhadap RTRW. Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan realisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan dalam empat tahun terakhir mencapai 2,62% per tahun, mencerminkan upaya yang semakin baik dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan.

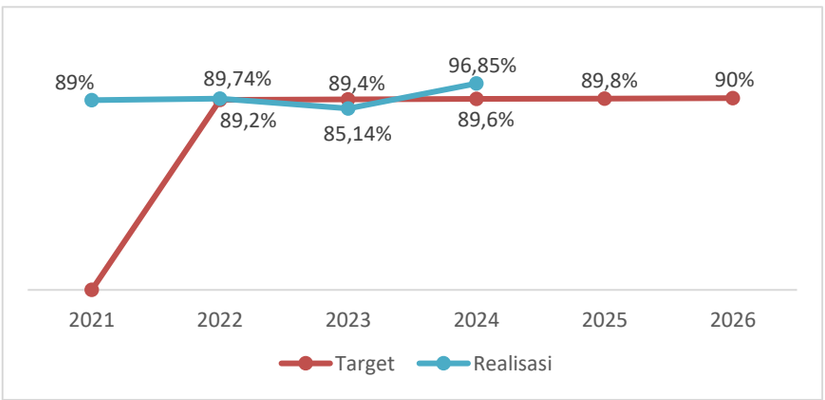

Gambar 2.114
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Peruntukkan Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DPPR Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, capaian realisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi pemanfaatan ruang mencapai 96,85%, lebih tinggi 7,25% dari target 89,6%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan. Capaian ini tidak hanya melampaui target tahun 2024, tetapi juga sudah lebih tinggi dari target tahun 2025 (89,8%) dan target tahun 2026 (90%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi lonjakan yang signifikan setelah penurunan realisasi pada 2023 yang hanya mencapai 85,14% dari target 89,4%. Tren peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan tata ruang, peningkatan kepatuhan terhadap RTRW, serta keberhasilan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan.

Keberhasilan Kota Balikpapan dalam melampaui target pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Balikpapan. Faktor pendukung ini berasal dari upaya internal yang terus diperkuat guna memastikan pemanfaatan ruang yang tertib, sesuai regulasi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Layanan Informasi Tata Ruang.
   Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan sosialisasi dan layanan informasi tata ruang berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021-2041 (RDTR Kota Balikpapan) yang secara signifikan turut mempengaruhi peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan tata ruang yang berlaku di Kota Balikpapan. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyediakan akses informasi tata ruang yang mudah dijangkau melalui https://onemaponedata.balikpapan.go.id. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait untuk mengakses informasi pemanfaatan ruang secara *real-time*, sehingga meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi pelanggaran.
2. Penyelenggaraan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
   Selama periode 2022-2024, Pemerintah Kota Balikpapan aktif melaksanakan PKKPR guna memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam RDTR Kota Balikpapan. Proses yang lebih terstruktur dan efisien ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan ruang sesuai dengan peruntukannya.
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan *Site Plan*.
   Melalui kebijakan perizinan Site Plan, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. Kebijakan ini mencegah munculnya kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, sehingga pengelolaan ruang lebih tertib dan terkendali.
4. Koordinasi Intensif dalam Forum Penataan Ruang (FPR).
   Pemerintah Kota Balikpapan secara rutin menyelenggarakan koordinasi melalui Forum Penataan Ruang Kota Balikpapan (FPR). Forum ini berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang serta memberikan rekomendasi strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
5. Pemberdayaan Masyarakat **melalui Kelompok Peduli Tata Ruang (POKMAS Petarung)**
   Sejak **2023**, Kota Balikpapan telah membentuk **Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang (POKMAS Petarung)** yang secara aktif melakukan **sosialisasi, edukasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang**. Kegiatan **pelatihan berkala** yang diberikan kepada kelompok ini turut berkontribusi dalam **meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat** dalam menjaga ketertiban tata ruang.
6. Fasilitasi dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Secara Berkelanjutan
   Kegiatan fasilitasi penertiban penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian ATR/BPN, DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, dan Perangkat Daerah Kota Balikpapan turut mendukung terwujudnya tertib pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan.

Di samping itu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan ruang yang lebih tertib dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024-2043.

Kebijakan ini menjadi landasan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dalam jangka panjang, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan kota dan pelestarian lingkungan.

Gambar 2.115
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024-2043
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga berupaya meningkatkan kualitas tata kota melalui berbagai program penataan bangunan dan ruang publik. Salah satu inisiatifnya adalah program Bapak Asuh Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tematik, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola serta mempercantik ruang terbuka hijau. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan dan estetika kota, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi dampak pemanasan global serta meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan kota. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan beberapa taman kota guna menyediakan ruang rekreasi yang lebih nyaman dan representatif bagi masyarakat, dengan menambahkan fasilitas pendukung seperti tempat duduk, pencahayaan, dan jalur pedestrian yang lebih baik.

Di sektor infrastruktur pejalan kaki, penataan trotoar di kawasan MT Haryono menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan kota yang lebih ramah terhadap pejalan kaki. Peningkatan kualitas jalur pedestrian ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi kesemrawutan lalu lintas, serta mendukung mobilitas yang lebih inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, di sektor ekonomi rakyat, pemerintah juga melakukan penataan Pasar Klandasan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertata dan nyaman. Upaya ini mencakup perbaikan infrastruktur, penataan ulang zona dagang, serta peningkatan fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan drainase, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pasar sebagai pusat ekonomi yang lebih kompetitif.

Gambar 2.116
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran strategis pada tahun berikutnya, Pemerintah Kota Balikpapan telah merumuskan berbagai program yang berfokus pada optimalisasi perencanaan dan pengelolaan tata ruang, antara lain:

1. Mengintegrasikan data dan mengembangkan aplikasi *One Map One Data* guna memperbarui data kesesuaian peruntukan setiap tahun. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam penataan ruang;
2. Menyusun Kajian Review Peraturan Wali Kota tentang Garis Sempadan guna menyesuaikan regulasi tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan mengenai revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan kota serta regulasi yang berlaku;
3. Melaksanakan lanjutan penilaian indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang guna memperoleh data yang lebih akurat mengenai luas lahan yang sesuai dengan peruntukan di Kota Balikpapan;
4. Melaksanakan penyusunan dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan;
5. Melaksanakan penyusunan Kajian *Redesign Coastal Development Area*, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir secara berkelanjutan;
6. Melaksanakan penyusunan Dokumen Teknis Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek dan Jangka Menengah sebagai pedoman dalam perencanaan tata ruang, baik dalam skala waktu yang lebih dekat maupun untuk menghadapi tantangan jangka panjang.

Dengan berbagai upaya strategis yang direncanakan, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan tata ruang guna mewujudkan kota yang lebih tertata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Implementasi program-program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota

Di tengah kompleksitas perkembangan perkotaan dan potensi resiko bencana yang semakin meningkat, penting bagi kita untuk fokus pada peningkatan kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota. Keberlanjutan dan keamanan lingkungan perkotaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mewajibkan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan tersebut. Untuk mengukur sasaran meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban Kota Balikpapan terdapat dua indikator kinerja yang digunakan antara lain:

a) Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana adalah nilai yang menunjukkan tingkat resiko bencana suatu daerah berdasarkan variabel ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Indeks ini mengukur tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap resiko bencana serta kemungkinan terjadinya bencana di wilayah tersebut. Dalam perhitungannya, Indeks Resiko Bencana mempertimbangkan berbagai faktor seperti geografi, topografi, jenis tanah, curah hujan, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, kepadatan penduduk, dan faktor manusia lainnya. Berdasarkan faktor-faktor ini, indeks menghasilkan skor resiko yang dapat membantu dalam menentukan prioritas tindakan mitigasi dan alokasi sumber daya.

Indeks ini berperan penting dalam membantu pemerintah dan masyarakat menentukan langkah-langkah mitigasi dan persiapan guna mengurangi resiko bencana. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi resiko bencana, berbagai pihak dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan efektif untuk meminimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi. Indeks Resiko Bencana dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Gambar 2.117
Rumus Hitung Indeks Resiko Bencana
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, indeks resiko bencana Kota Balikpapan pada Tahun 2024 memperoleh indeks sebesar 101,43 poin dengan capaian sebesar 101,52% dengan predikat “ melebihi target”.

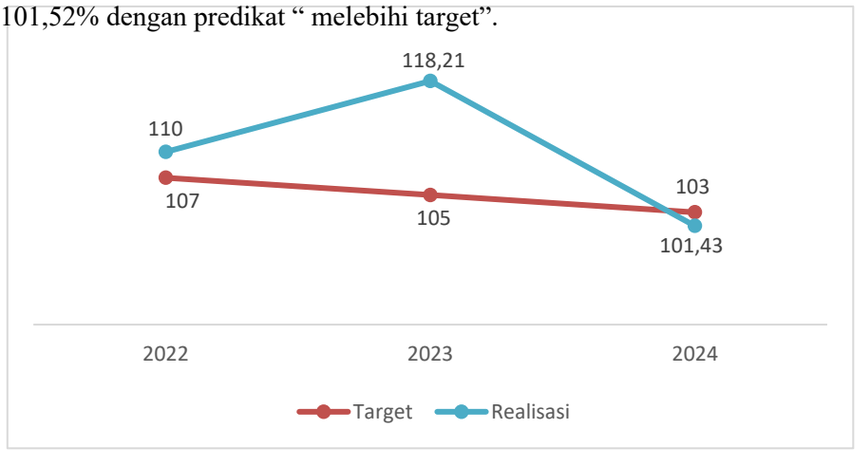

Gambar 2.118
Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Balikpapan
Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: BPBD Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Realisasi kinerja indeks resiko bencana Kota Balikpapan pada tahun 2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi capaian tercatat sebesar 110, kemudian mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2023 menjadi 118,21. Namun, pada tahun 2024, realisasi indeks resiko bencana justru menurun drastis menjadi 101,43, mengalami penurunan sebesar 16,78 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Apabila melihat tren dalam tiga tahun terakhir, realisasi kinerja pada tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,46%, yang mengindikasikan adanya peningkatan faktor resiko bencana. Namun, pada tahun 2024, capaian kinerja justru mengalami penurunan signifikan sebesar 14,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya mitigasi dan pengelolaan resiko bencana, di mana untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir, realisasi kinerja lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan.

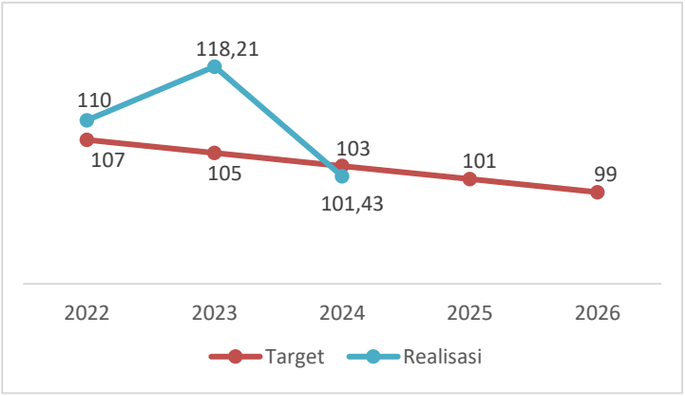

Gambar 2.119
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Resiko Bencana Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: BPBD Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data realisasi indeks resiko bencana Kota Balikpapan hingga tahun 2024, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah. Pada tahun 2022, realisasi indeks resiko bencana mencapai 110, lebih tinggi dari target sebesar 107. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi indeks meningkat menjadi 118,21, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 105. Namun, pada tahun 2024, realisasi mengalami penurunan signifikan menjadi 101,43, lebih rendah dibandingkan target tahun tersebut yang sebesar 103. Sehingga terdapat selisih 1,52 poin lebih rendah atau sekitar 1,48% di bawah target. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, terlihat bahwa tren indeks resiko bencana mengalami penurunan secara bertahap. Target pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 101, yang berarti jika capaian tetap berada di angka 101,43, maka realisasi sedikit lebih tinggi dari target, yaitu selisih 0,43 poin atau sekitar 0,43% di atas target. Sementara itu, target untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 99, yang jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, menunjukkan kesenjangan sebesar 2,43 poin lebih tinggi atau sekitar 2,45% di atas target.

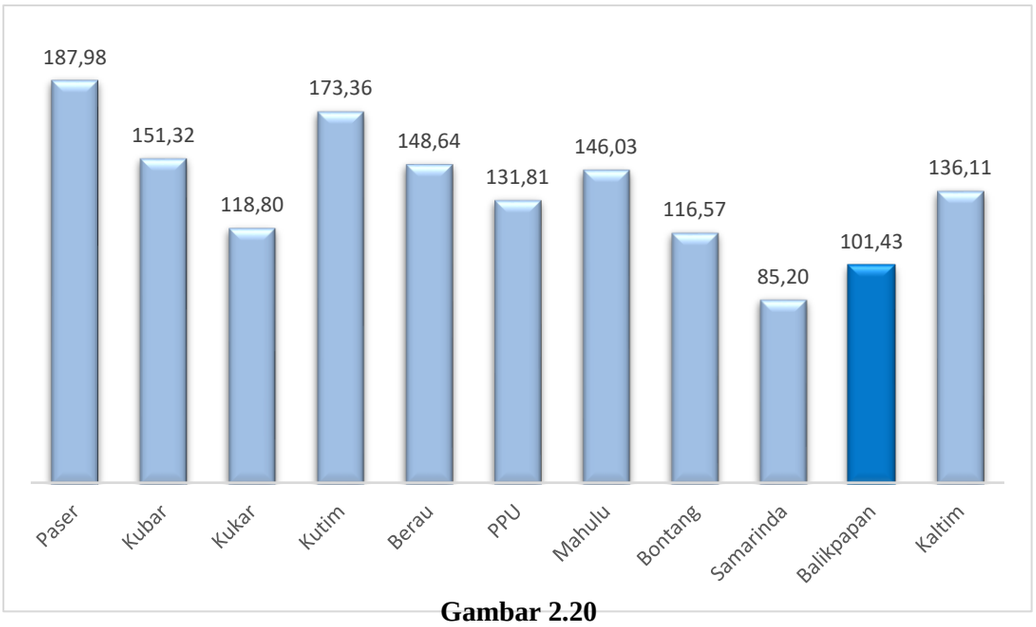

Gambar 2.20
Perbandingan Indeks Resiko Bencana Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: BPBD Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, Balikpapan merupakan salah satu daerah dengan tingkat resiko bencana yang relatif lebih rendah. Kota Samarinda mencatat realisasi IRB yang lebih rendah dari Balikpapan, yaitu 85,20, menjadikannya wilayah dengan tingkat resiko bencana paling rendah di Kalimantan Timur. Sementara itu, Kabupaten Paser memiliki indeks resiko bencana tertinggi di provinsi ini dengan nilai 187,98, diikuti oleh Kabupaten Kutai Timur (173,36) dan Kabupaten Kutai Barat (151,32). Apabila dibandingkan dengan rata-rata indeks resiko bencana Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 136,11, Kota Balikpapan berada jauh di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi bencana di Balikpapan cukup efektif dalam mengurangi potensi resiko bencana dibandingkan dengan sebagian besar wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

Keberhasilan Kota Balikpapan dalam capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan secara terencana dan kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan. Faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian ini antara lain:

1. Kota Balikpapan telah memenuhi dokumen dasar kebencanaan yang menjadi fondasi dalam penanggulangan bencana, termasuk Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), serta berbagai peraturan daerah terkait penanggulangan bencana;
2. Pemerintah Kota Balikpapan secara aktif mengadakan rapat terkait Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Resiko Bencana (IRB) yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. Rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dukung dari setiap perangkat daerah pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, sehingga terjadi sinergi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mitigasi resiko bencana;

Gambar 2.21
Kegiatan Rapat Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Dan Indeks Resiko Bencana (IRB) Yang Melibatkan Berbagai Perangkat Daerah
Sumber: BPBD Kota Balikpapan (2024)

3. Keberhasilan capaian IRB Kota Balikpapan juga didukung oleh kontribusi data dari berbagai perangkat daerah, seperti Bappeda-Litbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta seluruh kecamatan di Kota Balikpapan. Dukungan ini memastikan data yang digunakan dalam penilaian IRB dan IKD valid dan akurat;
4. Kota Balikpapan telah melaksanakan bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan memperbaiki kualitas data yang digunakan dalam pengukuran ketahanan daerah terhadap bencana;

Gambar 2.22
Kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Balikpapan
Sumber: BPBD Kota Balikpapan (2024)

5. Kota Balikpapan juga secara aktif melakukan asistensi dengan BNPB untuk memastikan pemenuhan data dukung dalam penyusunan IKD. Pendampingan dari BNPB memberikan arahan strategis kepada Kota Balikpapan dalam mengembangkan kebijakan mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan;
6. Adanya kolaborasi dan soliditas antara unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Pendekatan ini menciptakan keterlibatan aktif semua pihak dalam membangun ketahanan daerah, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mempercepat respons terhadap bencana yang terjadi.

Gambar 2.123
Kolaborasi Dalam Penanganan Bencana
Sumber: BPBD Kota Balikpapan (2024)

Untuk memastikan keberlanjutan capaian indeks resiko bencana dan menghindari potensi kegagalan, Pemerintah Kota Balikpapan telah dan sedang melakukan upaya tambahan berikut:

1. Kota Balikpapan secara rutin melaksanakan pelatihan bagi aparatur daerah, tim penanggulangan bencana, dan relawan agar lebih siap dalam menghadapi situasi darurat;
2. Program edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana telah diintensifkan melalui media sosial, pelatihan di sekolah, serta simulasi kebencanaan;
3. Pengalokasian anggaran yang memadai telah dilakukan untuk program mitigasi, respons, dan rehabilitasi pascabencana agar kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan semakin memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana dan meminimalisir resiko kegagalan dalam capaian indeks resiko bencana di tahun-tahun mendatang.

b) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menciptakan kondisi yang tenteram,

tertib, dan teratur. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman tersebut, digunakan indeks ketenteraman dan ketertiban sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah dalam memelihara keamanan dan stabilitas suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur perbandingan antarwilayah, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban. Selain itu, indeks ketenteraman dan ketertiban turut mencakup aspek keamanan dalam konteks pembangunan demokrasi dan politik di daerah. Indeks ini berperan dalam mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta dalam upaya pencegahan konflik sosial. Indeks ini menjadi instrumen penting dalam menghindari potensi perselisihan antarkelompok yang dapat berujung pada kekerasan, kerusuhan, dan ketidakstabilan sosial. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Ketentraman dan Ketertiban} = \frac{\text{Angka Pelanggaran Perda + Angka Konflik}}{2}$$

Gambar 2.124
Rumus Hitung Indeks Ketentraman dan Ketertiban
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Daerah, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 0,85 poin dengan capaian kinerja sebesar 99,13% atau ”tidak tercapai”.

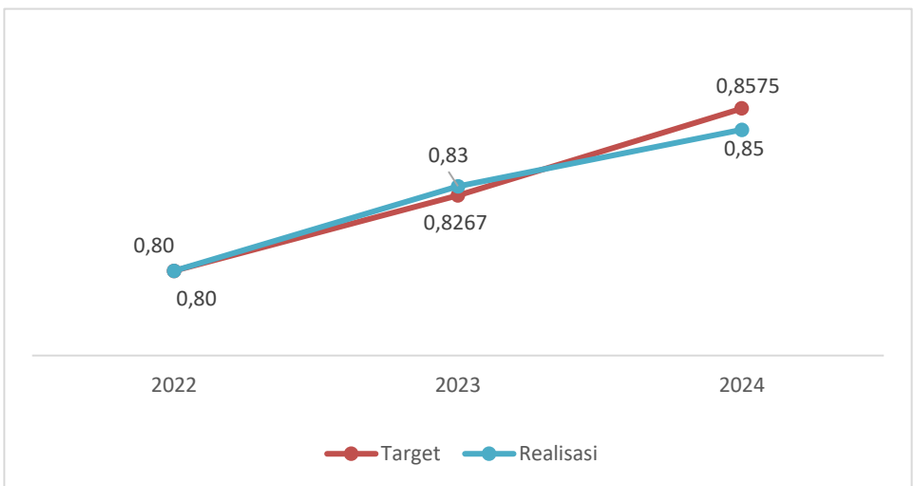

Gambar 2.125
Perkembangan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data perkembangan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Balikpapan dalam tiga tahun terakhir, realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, realisasi capaian indeks mencapai 0,80, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 0,83, atau mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 0,85, mengalami peningkatan 0,02 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Secara rata-rata, peningkatan realisasi indeks ketenteraman dan ketertiban dari tahun ke tahun mencapai 3,125%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Balikpapan, selaras dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Meskipun capaian kinerja tahun 2024 masih sedikit di bawah target sebesar 0,8575, selisihnya hanya sekitar 0,0075 poin.

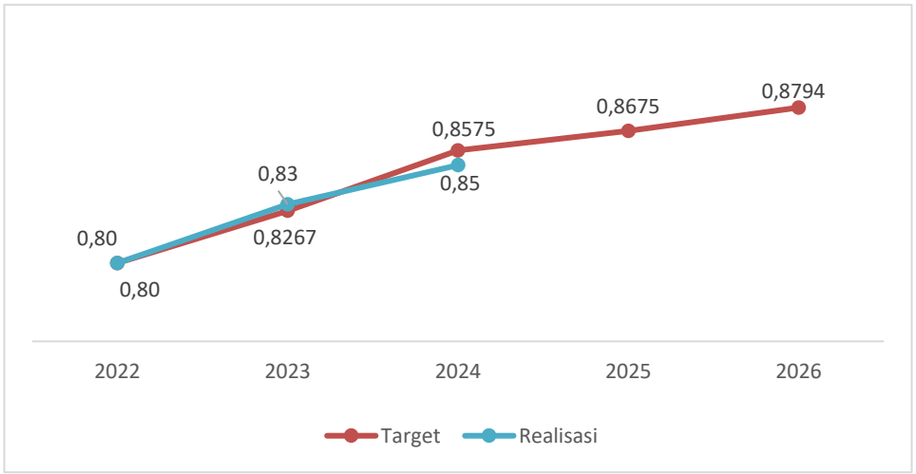

Gambar 2.126
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data perkembangan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Balikpapan hingga tahun 2024, realisasi kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil dan mendekati target yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah. Pada tahun 2022, realisasi indeks mencapai 0,80, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 0,83, sedikit melebihi target 0,8267. Pada tahun 2024, realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi 0,85, meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 0,8575, dengan selisih 0,0075 poin atau sekitar 0,87% di bawah target. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, yaitu 0,8675 untuk tahun 2025 dan 0,8794 untuk tahun 2026, maka terdapat tantangan untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian indeks ketenteraman dan ketertiban di Kota Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya menjaga dan meningkatkan ketenteraman serta ketertiban masyarakat sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Namun, berdasarkan evaluasi terhadap Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2024, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah (PERDA) dan peraturan kepala daerah (PERKADA). Berdasarkan hasil beberapa kali operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, seperti penertiban pasar Pandansari, operasional pom mini dan penjualan bensin eceran

yang tidak sesuai ketentuan, tempat hiburan malam (THM), serta arena permainan yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan jam operasional. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada masih perlu ditingkatkan guna mendukung terciptanya ketertiban umum.

Selain itu, dinamika sosial dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat turut memberikan tantangan tersendiri. Urbanisasi yang tinggi di Kota Balikpapan mendorong munculnya berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya kepadatan lalu lintas, bertambahnya jumlah permukiman tidak teratur, serta potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Fenomena ini memerlukan pengelolaan yang lebih strategis agar tidak berdampak pada stabilitas ketenteraman di tengah masyarakat.

Dari sisi penegakan hukum, keterbatasan jumlah personel dan sumber daya dalam pengawasan ketertiban juga menjadi tantangan bagi aparat Satpol PP dalam menindak pelanggaran secara menyeluruh. Masih diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar proses penertiban dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang masih terdampak oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok dan keterbatasan lapangan kerja turut berkontribusi terhadap keresahan sosial. Meningkatnya angka pengangguran dan tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi informal yang tidak sesuai dengan aturan, seperti berdagang di zona terlarang atau membuka usaha ilegal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah Kota Balikpapan juga mengidentifikasi bahwa proyek pembangunan infrastruktur skala besar yang sedang berjalan memiliki dampak terhadap ketertiban masyarakat, terutama dalam bentuk gangguan lalu lintas dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan mitigasi yang lebih matang agar proyek-proyek strategis ini tidak berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan langkah-langkah strategis guna mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat penegak hukum dalam melakukan patroli serta operasi penertiban terhadap berbagai pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah . Operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di zona terlarang, pom mini dan penjualan bensin eceran ilegal, serta tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional akan terus diintensifkan. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten bagi pelanggar ketertiban umum akan menjadi prioritas guna menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Selain upaya penegakan aturan, Pemerintah Kota Balikpapan juga berfokus pada penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai bentuk sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Sosialisasi mengenai Perda dan Perkada dilakukan melalui berbagai media, seperti spanduk, selebaran, media sosial, serta pengarahan langsung kepada kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Pemerintah juga menggandeng tokoh masyarakat, pemuka agama, serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan edukasi hukum kepada masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama.

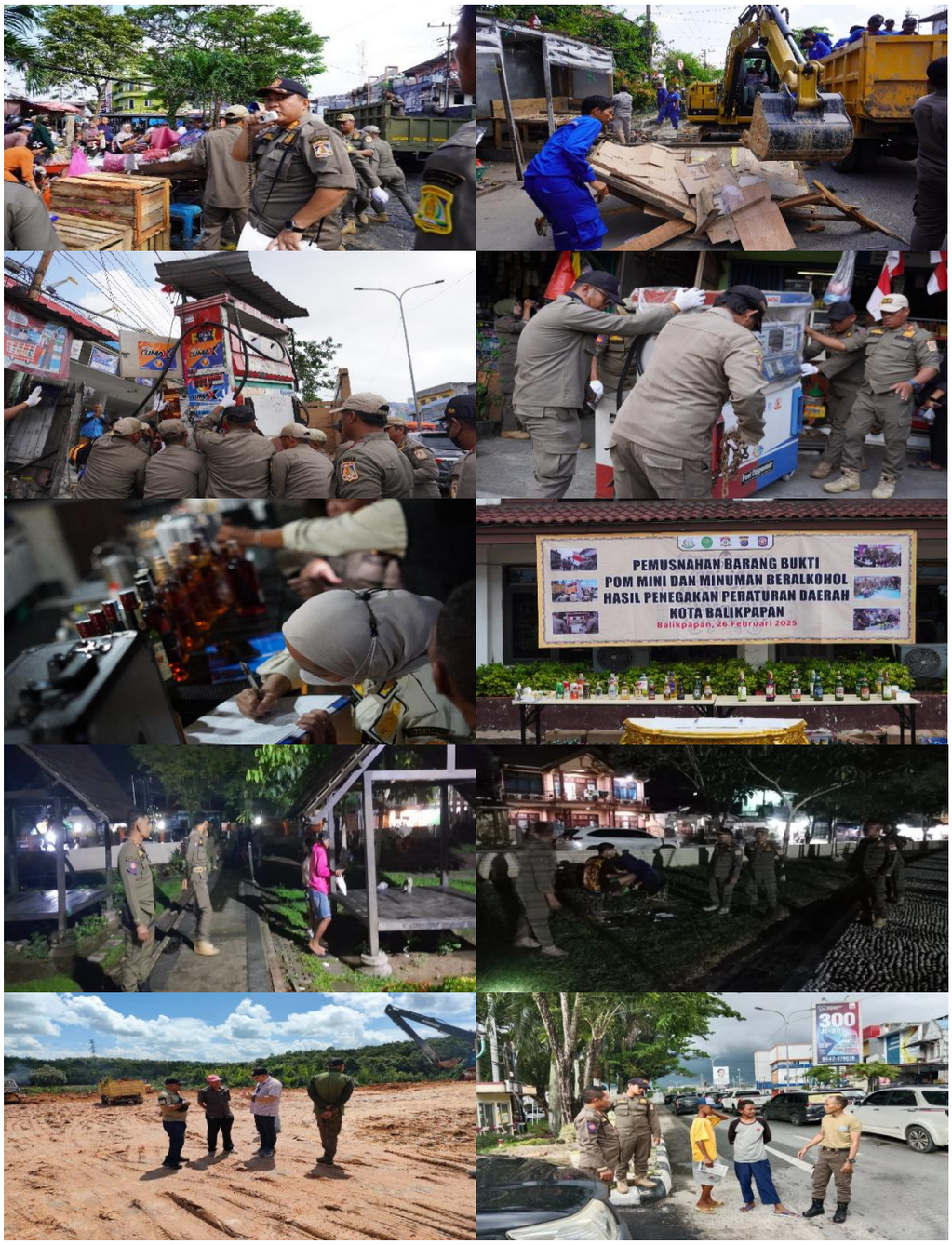

Gambar 2.127
Berbagai Operasi Penertiban Yustisi dan Non Yustisi
Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan (2024)

Di samping itu, optimalisasi koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ketenteraman dan ketertiban di Kota Balikpapan. Pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta lembaga swadaya masyarakat dalam mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang lebih responsif, mengintegrasikan data pelanggaran ketertiban, serta meningkatkan efektivitas operasi penertiban terpadu. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja membentuk Regu SC (*Service Center*) dan URC (Unit Reaksi Cepat) selama 24 jam yang dikhususkan untuk menangani adanya aduan masyarakat terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan. Regu tersebut mampu merespon secara cepat aduan dari masyarakat sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan efisien.

Gambar 2.128
***Hotline* Satpol PP Layanan Pengaduan per Kecamatan**
Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan (2024)

Selanjutnya, peningkatan kapasitas personel serta sarana dan prasarana pengawasan menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan. Pemerintah Kota Balikpapan berencana untuk menambah jumlah personel Satpol PP, meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengawasan, seperti bekerjasama sama dengan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar dapat mengakses (*mirroring*) CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Balikpapan guna memantau di titik-titik rawan pelanggaran, serta mengoptimalkan patroli keliling dan pos pantau di berbagai lokasi strategis.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban. Kesbangpol berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun politik. Melalui program pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta penguatan peran forum komunikasi, Kesbangpol aktif dalam membangun harmonisasi antarkelompok masyarakat guna mencegah terjadinya gesekan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Kesbangpol turut serta dalam mengoordinasikan berbagai upaya deradikalisasi serta pencegahan penyebaran paham yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keamanan di Kota Balikpapan.

Dengan langkah-langkah yang sistematis dan terukur ini, diharapkan Kota Balikpapan dapat terus berkembang menjadi kota yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan

Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro di daerah, disertai penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, merujuk pada situasi di mana usaha mikro mengalami perkembangan yang pesat dalam suatu

wilayah atau daerah tertentu. Fenomena ini diiringi oleh dampak positif, seperti peningkatan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran menurun, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan turut berkurang. Pertumbuhan usaha mikro yang berdampak positif terhadap pengangguran dan kemiskinan memerlukan kebijakan dan strategi yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Untuk mengukur sasaran meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan yaitu:

a) Persentase Pertumbuhan UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian lokal. Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mengacu pada peningkatan ukuran, produktivitas, keuntungan, dan kontribusi ekonomi dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan UMKM juga dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah dan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh UMKM serta kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi lokal, serta memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait di berbagai negara berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan berbagai kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM di masing-masing wilayah. Persentase Pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan UMKM} = \frac{\text{Jumlah UMKM Tahun n - Jumlah UMKM Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah UMKM Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Gambar 2.129
Rumus Hitung Persentase Pertumbuhan UMKM
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan dan hasil perhitungan mandiri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan mencapai realisasi sebesar 19,23% dengan capaian sebesar 95,15% atau dengan kata lain “tidak tercapai”.

Gambar 2.130
Perkembangan Persentase Pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan
Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Merujuk pada data pertumbuhan UMKM di Kota Balikpapan dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren positif meskipun disertai fluktuasi yang cukup signifikan. Pada periode 2021 ke 2022, realisasi pertumbuhan mengalami lonjakan luar biasa sebesar 859,42%, yang mencerminkan perkembangan pesat UMKM dalam satu tahun. Namun, pada 2023, realisasi pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 31,61% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih melampaui target yang telah ditetapkan. Tren penurunan ini berlanjut pada 2024, dengan realisasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yakni mengalami penurunan sebesar 4,85%. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan realisasi UMKM dalam empat tahun terakhir mencapai 18,02% per tahun, meskipun dalam dua tahun terakhir terlihat adanya perlambatan yang perlu menjadi perhatian guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor UMKM di Kota Balikpapan.

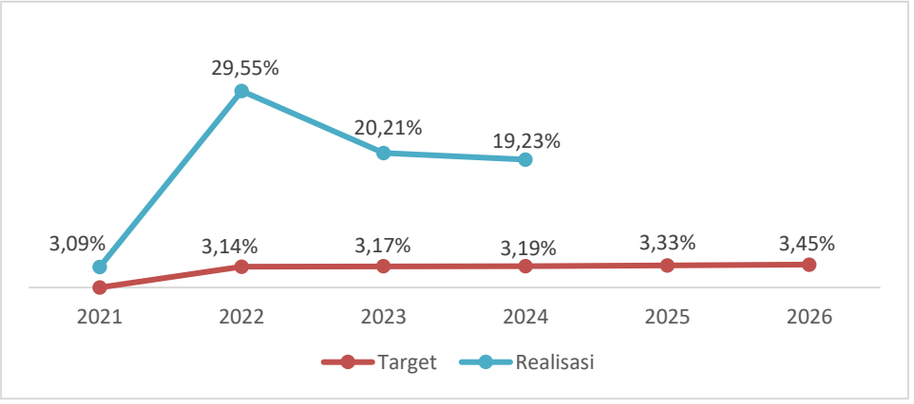

Gambar 2.131
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, capaian realisasi pertumbuhan UMKM pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, target pertumbuhan UMKM ditetapkan sebesar **3,19%**, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai **19,23%**, atau sekitar **6 kali lipat dari target yang telah ditetapkan**. Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan UMKM untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu **3,33% pada 2025** dan **3,45% pada 2026**, realisasi tahun 2024 juga masih jauh lebih tinggi dari proyeksi yang ditetapkan untuk dua tahun ke depan. Bahkan, capaian **19,23% pada 2024** telah melampaui akumulasi target pertumbuhan UMKM untuk tiga tahun ke depan (2024-2026). Selisih yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Balikpapan berkembang jauh lebih cepat dari yang diproyeksikan dalam RPJMD. Meskipun terjadi sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2023 (20,21%), angka realisasi tetap menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi pertumbuhan yang kuat.

Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian indikator kinerja pertumbuhan UMKM di Kota Balikpapan adalah masih banyaknya usaha mikro informal (ultra mikro) yang belum memiliki legalitas usaha. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan, partisipasi dalam program pemerintah, serta daya saing di pasar formal. Pelaku usaha

yang belum memiliki izin resmi sering kali mengalami kendala dalam mengakses modal dari perbankan maupun program pemberdayaan pemerintah. Akibatnya, pelaku usaha hanya mampu mengembangkan usaha dalam skala kecil dan sulit untuk berkembang lebih luas.

Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha turut menjadi kendala. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap proses perizinan rumit dan membutuhkan biaya besar, meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan berbasis digital melalui OSS (*Online Single Submission*). Meskipun Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya menyederhanakan regulasi, tantangan lain muncul dalam implementasi di lapangan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Kurangnya pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha juga menyebabkan banyak UMKM tetap berada dalam sektor informal. Tanpa izin usaha yang sah, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, lembaga pemerintah, atau pasar yang lebih luas, sehingga pertumbuhan usahanya menjadi stagnan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan berbagai strategi guna mendorong pelaku UMKM agar lebih siap bertransformasi menuju usaha yang legal dan berdaya saing. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan kompetensi usaha serta memberikan pelatihan peningkatan keterampilan SDM pelaku UMKM, sehingga tidak hanya memiliki usaha yang legal tetapi juga mampu bersaing dan mengembangkan bisnisnya secara profesional;

Gambar 2.132
Berbagai Pelatihan Peningkatan Keterampilan SDM Pelaku UMKM
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2024)

2. Melaksanakan promosi produk UMKM Balikpapan, baik melalui platform digital maupun event lokal, guna membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk;

Gambar 2.133
Optimalisasi Promosi Produk UMKM Balikpapan melalui Gerai Dekranasda dan UKM Center Balikpapan
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2024)

3. Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan serta memberikan bantuan teknis bagi pelaku usaha yang masih mengalami kendala dalam mengurus legalitasnya;

Gambar 2.134
Sosialisasi Kemudahan Perizinan bagi UMKM
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2024)

4. Melaksanakan kurasi bagi UMKM yang menjadi binaan dinas di seluruh kecamatan se-Kota Balikpapan, guna memastikan UMKM yang memiliki potensi tinggi mendapatkan dukungan optimal dalam pengembangan usahanya;

Gambar 2.135
Pendampingan dan Kurasi UMKM Binaan Balikpapan
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2024)

5. Mendukung Forum UMKM Kecamatan se-Kota Balikpapan dalam menghimpun kelompok UMKM di masing-masing wilayah, sehingga dapat saling berbagi pengalaman, membangun jaringan bisnis, serta mendapatkan pendampingan yang lebih efektif;

Gambar 2.136
Temu Kemitraan UMKM Kota Balikpapan
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2024)

6. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan dukungan UMKM di berbagai wilayah, sehingga UMKM dapat lebih aktif dalam ekosistem ekonomi lokal dan memperluas peluang usahanya.

Dengan adanya **pendekatan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan pelaku UMKM**, diharapkan hambatan dalam legalitas usaha dapat diminimalisir. Peningkatan kompetensi, akses pasar yang lebih luas, serta sinergi dengan berbagai pihak juga akan semakin memperkuat daya saing UMKM di Kota Balikpapan. Upaya ini bukan hanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan UMKM, tetapi juga mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian melalui produksi barang dan jasa. Salah satu fokus utama pembangunan adalah memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru yang seimbang dalam jumlah serta kualitas, sehingga dapat menyerap angkatan kerja

yang terus bertambah setiap tahunnya. Namun, jika pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, angka pengangguran akan meningkat dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Pembangunan ketenagakerjaan harus mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih produktif, mandiri, dan mampu menciptakan peluang kerja baru sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka pengangguran dapat ditekan.

Untuk mengukur tingkat pengangguran, digunakan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, yang membandingkan jumlah pencari kerja dengan total angkatan kerja. TPT tidak hanya mencerminkan keberhasilan program ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi acuan dalam merancang kebijakan penciptaan lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Gambar 2.137
Rumus Hitung Persentase Pertumbuhan UMKM
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan Tahun 2024 mencapai 6,22% dengan capaian sebesar 96,33% atau dengan kata lain “tidak tercapai”.

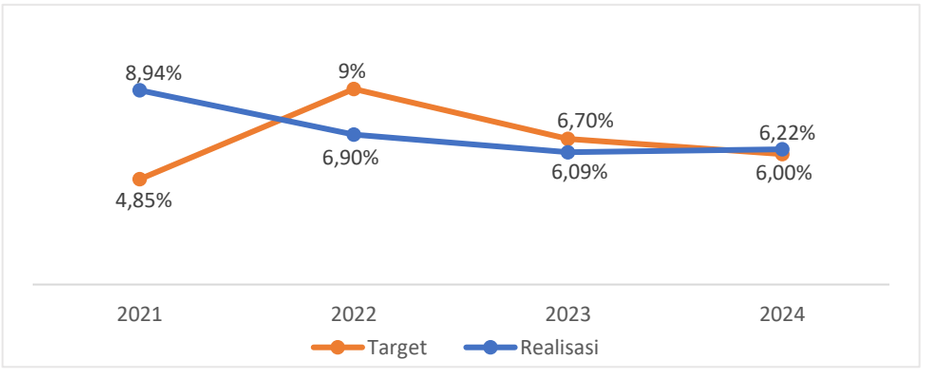

Gambar 2.138
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam beberapa tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan mengalami **tren penurunan yang signifikan**, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Pada tahun 2021, TPT berada di angka **8,94%**, kemudian turun drastis sebesar **22,82%** pada tahun 2022 menjadi **6,90%**. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan TPT menurun sebesar **11,74%** menjadi **6,09%**. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan sebesar **2,13%**, sehingga TPT mencapai **6,22%.** Secara keseluruhan, rata-rata penurunan TPT dalam periode 2021-

2024 adalah **10,81% per tahun**, yang mencerminkan dampak positif dari kebijakan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan. Namun, kenaikan kecil TPT pada tahun 2024 perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi tren peningkatan di tahun-tahun mendatang.

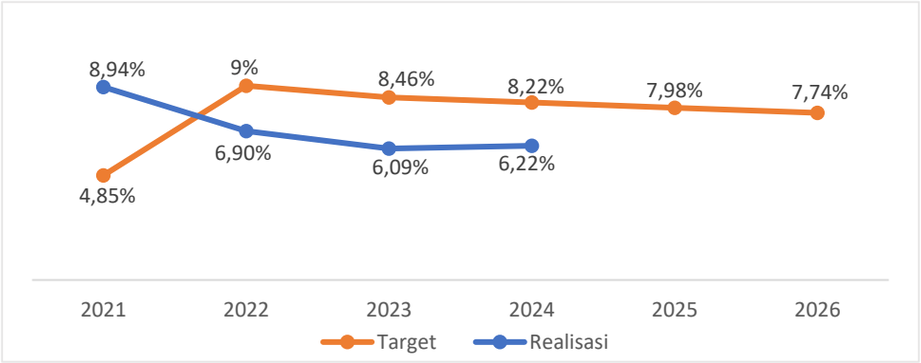

Gambar 2.139
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam **RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**, capaian realisasi TPT menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun **2024**, realisasi **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kota Balikpapan mencapai **6,22%**, lebih rendah dibandingkan target **8,22%** yang ditetapkan. Selisih **2%** ini menunjukkan capaian positif dalam pengurangan pengangguran. Jika dibandingkan dengan target tahun **2025 (7,98%)** dan **2026 (7,74%)**, realisasi tahun 2024 sudah lebih baik dan bahkan telah melampaui target yang ditetapkan untuk kedua tahun tersebut. Hal ini mencerminkan tren perbaikan ketenagakerjaan yang lebih cepat dari perencanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

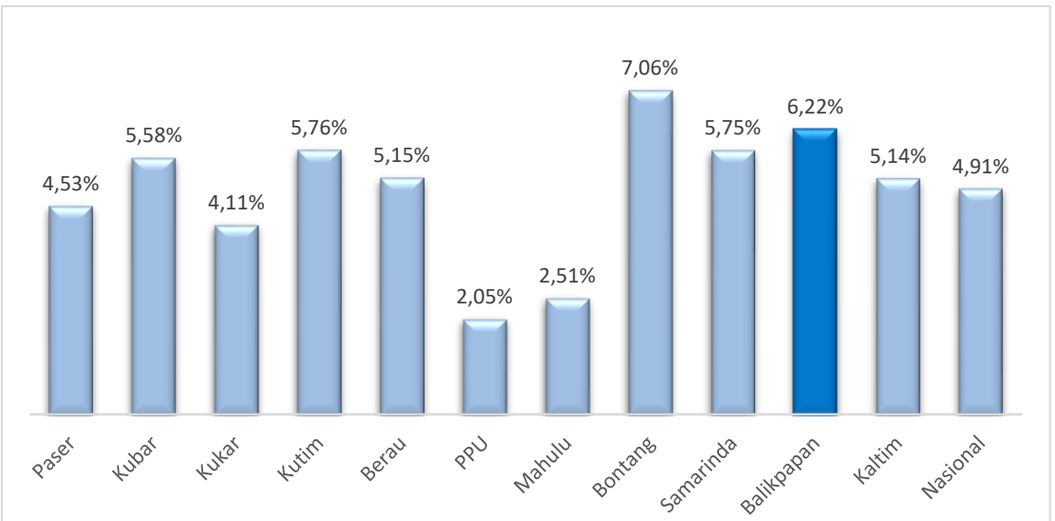

Gambar 2.140
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Sebagai salah satu kota terbesar dan pusat ekonomi di Kalimantan Timur, **Kota Balikpapan** memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi regional. Namun, pada tahun 2024, **Tingkat**

Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan tercatat sebesar 6,22%, yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata **Provinsi Kalimantan Timur (5,14%)** dan nasional (4,91%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Balikpapan merupakan kota dengan infrastruktur ekonomi yang berkembang pesat, tantangan dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup besar. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, **TPT Kota Balikpapan merupakan yang tertinggi kedua setelah Bontang (7,06%)**. Sementara itu, beberapa daerah dengan TPT lebih rendah dibanding Balikpapan adalah **Samarinda (5,75%), Kutai Timur (5,76%), Kutai Barat (5,58%), Berau (5,15%), Paser (4,53%), dan Kutai Kartanegara (4,11%)**. Kabupaten dengan tingkat pengangguran terendah adalah **Penajam Paser Utara (2,05%)** dan **Mahakam Ulu (2,51%)**, yang kemungkinan disebabkan oleh struktur ekonomi yang lebih berbasis sektor pertanian dan sumber daya alam, sehingga tingkat persaingan kerja lebih rendah dibanding kota-kota besar seperti Balikpapan dan Bontang.

Sebagai kota industri dan jasa, Balikpapan memiliki peran penting dalam perekonomian regional, terutama sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Kalimantan Timur. Namun, tingkat pengangguran di Kota Balikpapan masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah persaingan tenaga kerja yang semakin ketat akibat tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor migas dan perdagangan membuat fluktuasi di kedua sektor ini berdampak langsung pada ketersediaan lapangan kerja.

Beberapa faktor penghambat utama dalam pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan antara lain:

1. Kesenjangan antara Kebutuhan Pasar Kerja dan Keterampilan Pencari Kerja. Sebagian besar perusahaan di Balikpapan mensyaratkan tenaga kerja dengan pengalaman dan keahlian tertentu. Sementara itu, pencari kerja yang dilatih oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagian besar berasal dari lulusan baru (*fresh graduate*) yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang memadai. Salah satu solusi yang telah diterapkan adalah program pemagangan di perusahaan, namun masih terdapat peserta pelatihan yang enggan mengambil kesempatan tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja.
2. Terbatasnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, ketersediaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Balikpapan masih terbatas, sehingga tidak semua pencari kerja dapat mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) juga masih sedikit, menyebabkan tenaga kerja kesulitan memperoleh sertifikasi yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses rekrutmen di berbagai perusahaan.
3. Perselisihan Hubungan Industrial yang Belum Terselesaikan Secara Efektif. Dalam beberapa kasus, perselisihan antara pekerja dan perusahaan menjadi hambatan dalam hubungan ketenagakerjaan yang sehat. Ketidaksepakatan antara pekerja dan pengusaha sering kali sulit diselesaikan karena masing-masing pihak memiliki pendirian yang kuat. Selain itu, ada pula kendala di mana beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi hak pekerja sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berdampak pada ketidakstabilan tenaga kerja dan rendahnya kepercayaan pekerja terhadap industri.

Untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan mengambil berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) milik Kementerian serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Cepu. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan program pelatihan berbasis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor minyak, gas, dan konstruksi, sehingga tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja.

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah memperkuat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kota Balikpapan untuk memperluas akses informasi mengenai lowongan kerja dan program pemagangan. Dengan adanya komunikasi yang lebih terstruktur antara perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, pencari kerja dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini terkait peluang kerja yang tersedia. Pemerintah juga telah mendorong partisipasi aktif perusahaan dalam penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja agar pelatihan yang diberikan lebih selaras dengan permintaan industri.

Gambar 2.141
Kegiatan Pelatihan Kerja dan Pemagangan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, Pemerintah Kota Balikpapan terus mengupayakan penambahan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Upaya ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi pencari kerja dalam memperoleh keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh industri.

Gambar 2.142
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Bagi Perusahaan di Kota Balikpapan
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan (2024)

Selain itu, pemerintah juga telah mengedukasi perusahaan mengenai pentingnya menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan guna memastikan distribusi informasi yang lebih merata dan efektif.

- JMF I dilaksanakan tanggal 10-11 Juli 2024 dengan dana APBD, diikuti oleh 2.601 pencaker, 100 perusahaan, tersedia 1.781 lowongan pekerjaan dan berhasil menempatkan 315 pekerja.
- JMF II dilaksankan tanggal 11-12 Oktober 2024 bekerja sama dengan Pengelola Gedung BTC, diikuti oleh 1.103 pencaker, 34 perusahan, tersedia 969 lowongan kerja dan berhasil menyerap 129 pekerja.
- JMF III dilaksanakan tanggal 6-7 Desember 2024 bekerja sama dengan Disnakertrans Provinsi Kalimantan TImur, diikuti oleh 801 orang, 50 perusahaan, dengan 1.171 lowongan kerja, jumlah tenaga kerja terserap masih dalam proses.

Gambar 2.143
Penempatan Tenaga Kerja Melalui *Job Fair*
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Dalam aspek hubungan industrial, Pemerintah Kota Balikpapan telah meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial juga terus dilakukan agar proses mediasi dapat berlangsung lebih profesional

dan efisien. Selain itu, pemerintah secara aktif membangun kesadaran di kalangan pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Melalui berbagai langkah yang dilakukan, Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kondusif, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran secara signifikan.

c) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan terhadap keseluruhan penduduk Kota Balikpapan. Garis kemiskinan sendiri merupakan batas nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan. Untuk Tahun 2024, BPS menetapkan garis kemiskinan kota Balikpapan Rp 782.248,- perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan *baseline* untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

Dengan nilai garis kemiskinan Balikpapan pada tahun 2024 sebesar Rp 782.248,-/orang/bulan dapat diartikan jika satu keluarga memiliki empat orang Anggota Rumah Tangga, keluarga tersebut harus memiliki pendapatan minimal Rp. 3.128.992,- (4 orang x Rp. Rp 782.248,-) agar dikatakan tidak miskin. Saat pendapatannya dibawah angka tersebut artinya keempat anggota rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jika dilihat dari tabel di bawah, garis kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang juga dipengaruhi oleh inflasi.

Tabel 2.10 Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp)	Rupiah /Org/ Bln	657,521	680,499	743,084	782,248
Jumlah Penduduk miskin	Jiwa	18,530	15,830	14,990	14,530
Persentase Penduduk miskin (%) (Po)	%	2.89	2.45	2.31	2.23
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	0.50	0.17	0.25	0.13
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	0.15	0.02	0.04	0.01

Sumber: BPS Kota Balikpapan (2024)

Merujuk pada tabel, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan pada tahun 2024 turun menjadi 14.530 jiwa, berkurang 460 orang dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini menyebabkan persentase penduduk miskin Kota Balikpapan pada tahun 2024 menjadi 2,23%, turun sebesar 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Balikpapan mengalami perbaikan. P1 turun dari 0,25 di tahun 2023 menjadi 0,13 di tahun 2024, yang menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil. Artinya, pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan perbaikan, turun dari 0,04 di tahun 2023 menjadi 0,01 di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan semakin meratanya distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin, sehingga ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin berkurang.

Berdasarkan tolak ukur di atas dapat diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2024 mencapai 2,23% mengalami penurunan 0,08% dibanding Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2023. Dengan kata lain, Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan telah berhasil melampui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100%, dengan predikat “tercapai/ sesuai target”.

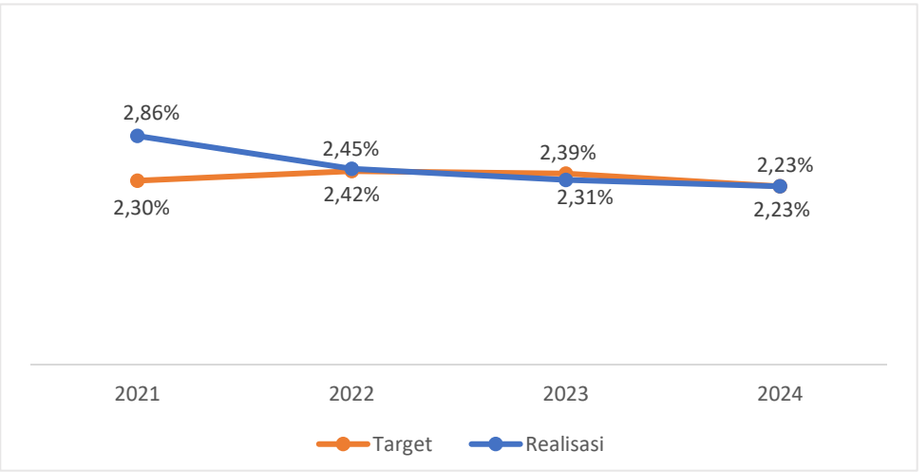

Gambar 2.144
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan
Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dengan penurunan yang konsisten. Jika dilihat dari rata-rata penurunan setiap tahunnya, tingkat kemiskinan menurun sebesar **0,41%** dari 2021 ke 2022 atau setara dengan **14,34%** dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan sebesar 0,14% menjadi 2,31%, atau turun sebesar **5,71%** dari tahun 2022. Pada tahun 2024, angka kemiskinan mengalami penurunan **0,08%**, dengan penurunan sebesar **3,46%** dibandingkan tahun 2023. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kemiskinan Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar **7,84% per tahun** selama periode 2021-2024.

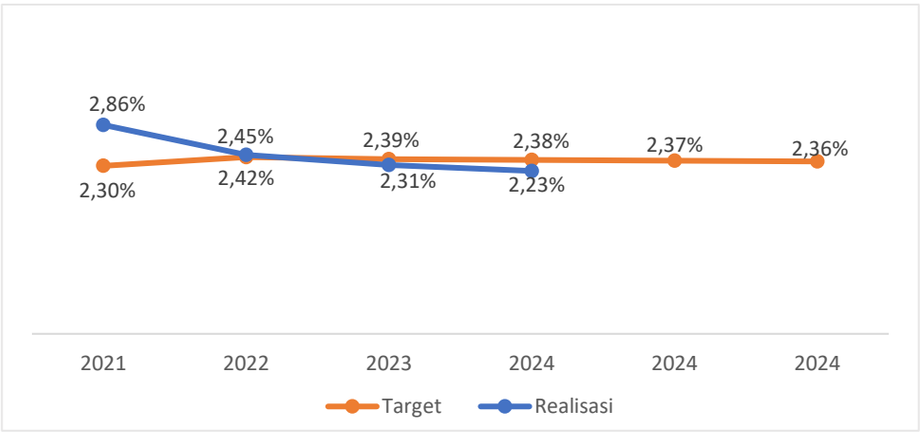

Gambar 2.145
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, capaian realisasi tingkat kemiskinan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 2,23%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 2,38%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (2,37%) dan 2026 (2,36%), realisasi tahun 2024 sudah lebih baik dan bahkan telah melampaui target yang ditetapkan untuk kedua tahun tersebut. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang berjalan lebih cepat dari perencanaan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

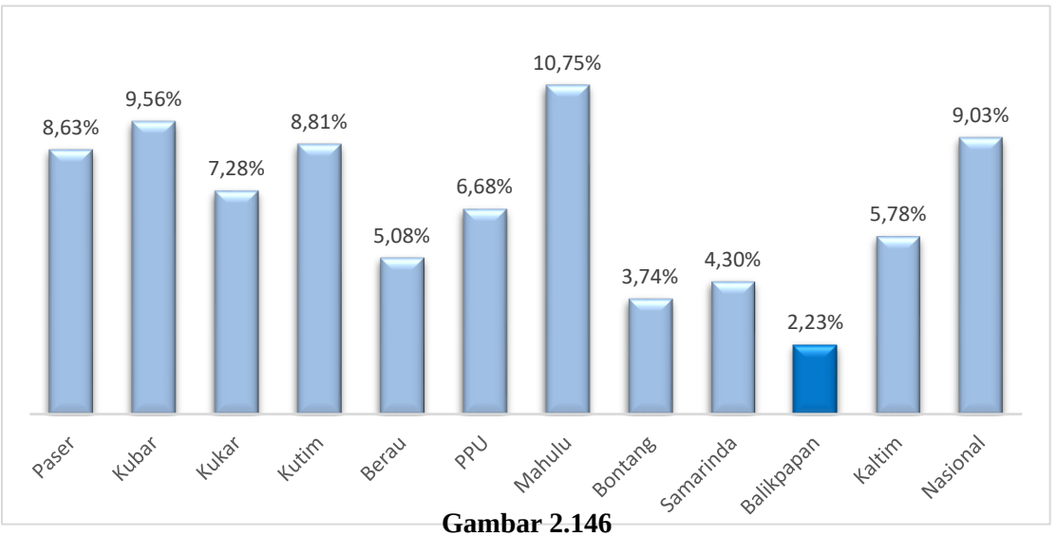

Gambar 2.146
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Tingkat kemiskinan Kota Balikpapan pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,23%, menjadikannya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Kalimantan Timur atau menempatkannya di peringkat pertama sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi tersebut. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi tersebut, Mahakam Ulu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 10,75%, sedangkan Bontang berada di urutan kedua terendah setelah Balikpapan dengan angka 3,74%. Rata-rata kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur memiliki tingkat kemiskinan di atas 5%,

yang menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 5,78%, Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,03%, Kota Balikpapan memiliki tingkat kemiskinan yang hampir empat kali lebih rendah. atau menduduki posisi pertama sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kota Balikpapan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian tersebut adalah:

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah Melalui Bantuan Sosial
   Pemerintah pusat dan daerah secara aktif memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ Sembako telah membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan pendidikan anak. Selain itu, ketika terjadi lonjakan inflasi yang dapat meningkatkan harga-harga kebutuhan dasar, pemerintah juga memberikan bantuan khusus guna menjaga daya beli masyarakat miskin dan mencegah mereka jatuh ke dalam kondisi yang lebih sulit. Konsistensi dan efektivitas penyaluran bansos ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penurunan angka kemiskinan;
2. Dukungan Daerah Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selain memberikan bantuan langsung, Pemerintah Kota Balikpapan juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini tidak hanya memberikan bimbingan sosial dan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga menyalurkan bantuan berupa alat usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kecil dan mikro. Dengan adanya dukungan ini, kelompok masyarakat rentan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mampu menciptakan sumber penghasilan mandiri;
3. Dukungan Perangkat Daerah Melalui Program Terpadu dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Balikpapan. Peran Perangkat Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Balikpapan juga menjadi faktor kunci dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Masing-masing perangkat daerah memiliki program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, seperti bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, pelatihan keterampilan kerja, serta akses permodalan bagi usaha mikro. Dengan adanya sinergi antarperangkat daerah, berbagai program yang berjalan dapat saling melengkapi dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat miskin.

Untuk mendukung pencapaian kinerja dalam menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan berbagai upaya dan solusi strategis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/ Bantuan Sembako untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat.

   Pemerintah Kota Balikpapan secara rutin menyalurkan bantuan sosial seperti PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako kepada keluarga miskin. Bantuan ini tidak hanya membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama saat terjadi inflasi. Dengan adanya program ini, beban ekonomi masyarakat rentan dapat dikurangi dan masyarakat memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi.
2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk Meningkatkan Kemandirian.

   Selain bantuan sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi. Program ini mencakup bimbingan sosial dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan motivasi serta pemahaman masyarakat dalam mengelola usaha kecil dan mikro. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan peralatan usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha yang ingin dikelola oleh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong keluarga miskin agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga mampu mengembangkan usaha sendiri yang berkelanjutan, sehingga secara bertahap dapat keluar dari kategori keluarga miskin.
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial Melalui Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Bantuan Ekonomi.

   Pemerintah Kota Balikpapan juga memastikan bahwa perlindungan sosial bagi masyarakat miskin berjalan secara optimal melalui pengelolaan data fakir miskin yang akurat dan komprehensif. Data ini digunakan sebagai dasar dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran, sehingga tidak ada keluarga miskin yang terlewat dari program yang tersedia. Selain itu, program ini juga mencakup fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi kelompok masyarakat rentan agar mereka memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik.

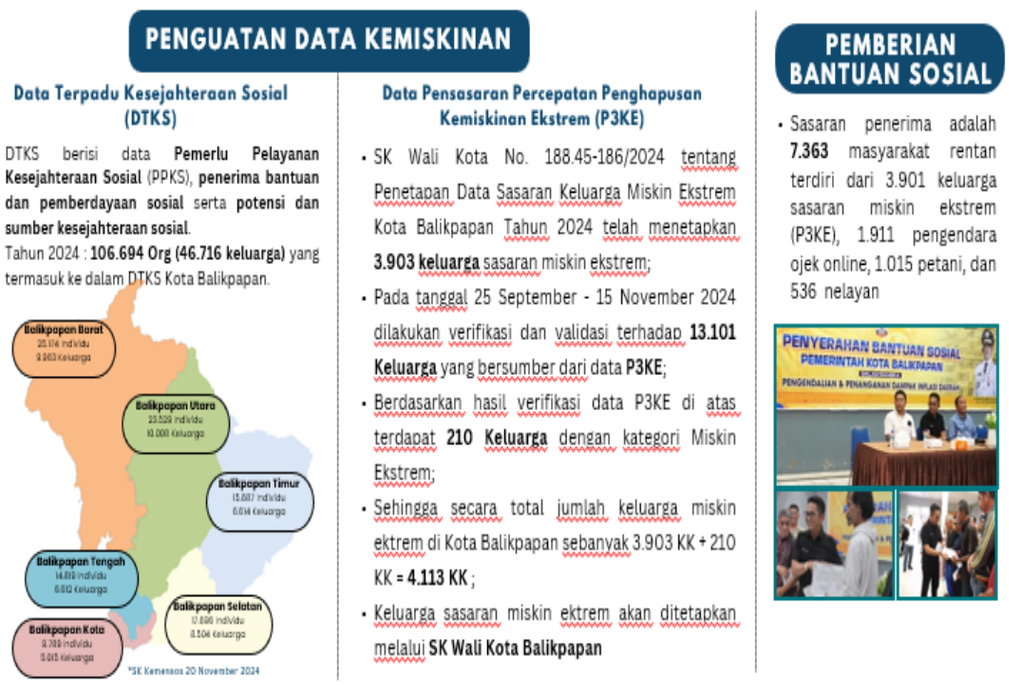

Gambar 2.147
Kegiatan yang Mendukung Penurunan Tingkat Kemiskinan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2025)

Secara keseluruhan, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk **bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan dan jaminan sosial** telah berkontribusi besar dalam mendukung pencapaian kinerja pengentasan kemiskinan. Dengan strategi yang terus diperkuat dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi, diharapkan tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan dapat terus menurun secara signifikan dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi adalah ukuran pencapaian investasi yang mencerminkan aktivitas penempatan modal, baik dalam bentuk uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam suatu proyek, lembaga, atau pihak tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia investasi, nilai realisasi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu investasi.

Jika nilai realisasi investasi bernilai positif, berarti investasi tersebut menghasilkan keuntungan bagi investor. Sebaliknya, jika bernilai negatif, maka investasi mengalami kerugian. Selain itu, nilai realisasi investasi juga digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program investasi pemerintah serta memberikan gambaran mengenai pengelolaan aset dan pemanfaatan dana publik. Informasi ini berperan penting dalam membantu pemerintah mengambil keputusan investasi yang lebih strategis di masa depan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penyesuaian target kinerja terhadap nilai realisasi investasi daerah menjadi Rp 20.080.000.000.000,-. Nilai tersebut tidak didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya (2023), melainkan berdasarkan rumus penetapan target realisasi investasi dan berdasarkan stocknett dari Kementerian Investasi/ BKPM RI sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.16.6/439/DPMPTSP-III tanggal 13 Maret 2024 perihal Target Realisasi Investasi untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tabel 2.11 Target Realisasi Investasi Seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	Kabupaten/Kota	Target Realisasi Investasi 2024 (Rp)
1	SAMARINDA	4.500.000.000.000
2	BALIKPAPAN	20.080.000.000.000
3	KUTAI KARTANEGARA	15.510.000.000.000
4	BONTANG	2.000.000.000.000
5	KUTAI TIMUR	12.231.000.000.000
6	PENAJAM PASER UTARA	2.552.000.000.000
7	PASER	5.530.000.000.000
8	KUTAI BARAT	6.745.000.000.000
9	BERAU	5.672.000.000.000
10	MAHAKAM ULU	1.200.000.000.000
TOTAL		**76.020.000.000.000**

Sumber: Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.16.6/439/DPMPTSP-III tanggal 13 Maret 2024

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), nilai realisasi investasi Kota Balikpapan pada tahun 2024 mencapai Rp 25.705.569.857.505,- dengan capaian realisasi sebesar 128,01%, sehingga memperoleh predikat "melebihi target". Realisasi investasi ini terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 21.301.959.479.512,- atau 82,87%, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 4.403.610.377.993,- atau 17,13%.

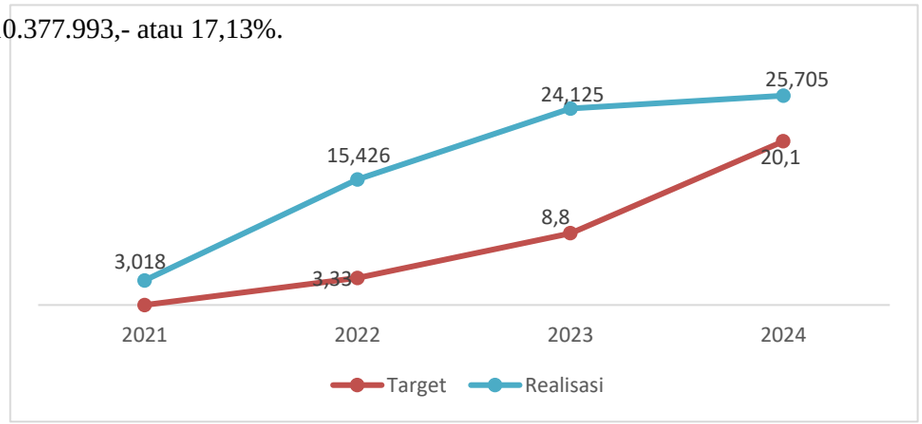

Gambar 2.148
Perkembangan Nilai Realisasi Investasi
(dalam Triliun Rupiah) Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, nilai realisasi investasi mencapai 3,018 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami lonjakan tajam menjadi 15,426 triliun rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 411,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi investasi meningkat menjadi 24,125 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 56,39% dari tahun 2022. Pada tahun 2024, realisasi investasi kembali mengalami kenaikan menjadi 25,705 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan realisasi investasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 158,02% per tahun. Meskipun laju pertumbuhan investasi cenderung melambat dalam dua tahun terakhir, tren ini mengindikasikan adanya stabilisasi setelah lonjakan tajam pada periode awal pertumbuhan.

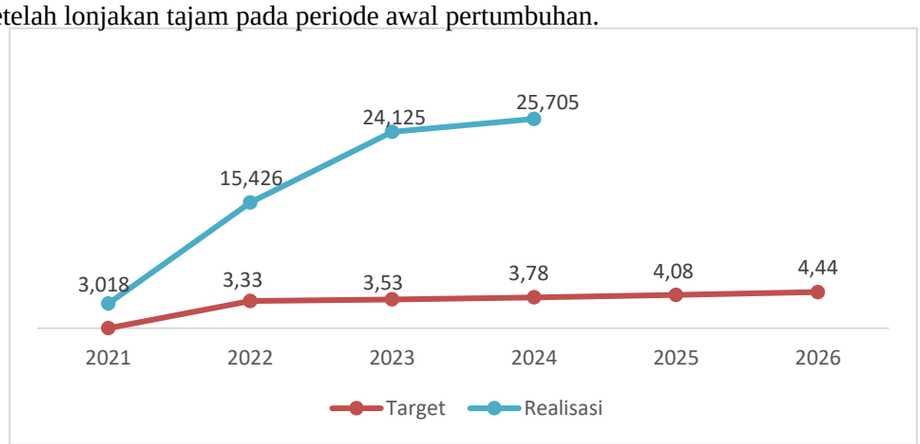

Gambar 2.149
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Realisasi Investasi
(dalam Triliun Rupiah) Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, capaian realisasi investasi Kota Balikpapan pada tahun 2024 telah berada jauh di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi investasi telah mencapai Rp 25,705 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 3,78 triliun. Selisih yang signifikan yaitu Rp 21,93 triliun, mencerminkan pertumbuhan investasi yang sangat pesat di Kota Balikpapan. Capaian ini tidak hanya melebihi target tahun 2024, tetapi juga telah melampaui target investasi yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2026, masing-masing sebesar Rp 4,08 triliun dan Rp 4,44 triliun.

Tabel 2.12 Peringkat Realisasi Investasi Seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Tahun 2024 Berdasarkan Status modal PMA dan PMDN

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi Tahun 2024 (Dalam Rp.)		Grand Total	Peringkat
	PMA	PMDN		
Kota Balikpapan	**4.403.610.377.993**	**21.301.959.479.512**	**25.705.569.857.505**	**1**
Kabupaten Kutai Kartanegara	8.069.017.988.494	8.346.870.226.939	16.415.888.215.433	2
Kabupaten Kutai Timur	4.283.091.585.438	5.169.652.677.436	9.452.744.262.874	3
Kabupaten Kutai Barat	828.554.923.693	6.857.564.151.305	7.686.119.074.998	4
Kabupaten Penajam Paser Utara	811.634.357.488	2.893.563.511.589	3.705.197.869.077	5
Kabupaten Berau	956.777.089.362	2.632.703.352.454	3.589.480.441.816	6
Kota Samarinda	135.773.048.813	3.049.090.107.114	3.184.863.155.927	7
Kabupaten Paser	1.126.229.425.447	1.995.529.723.281	3.121.759.148.728	8
Kota Bontang	139.275.000.000	2.549.914.790.019	2.689.189.790.019	9
Kabupaten Mahakam Hulu	502.153.002.769	282.071.263.084	784.224.265.853	10
Grand Total	**21.256.116.799.497**	**55.078.919.282.733**	**76.335.036.082.230**	

Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2025)

Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2024 di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan berhasil mencatatkan capaian investasi tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/ kota lainnya. Total realisasi investasi Kota Balikpapan mencapai Rp 25,705 triliun, menjadikannya peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi investasi Kota Balikpapan didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 21,30 triliun, yang merupakan nilai tertinggi di antara semua daerah. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Balikpapan mencapai Rp 4,40 triliun, menempatkannya di peringkat kedua untuk kategori PMA.

Secara keseluruhan, realisasi investasi Kota Balikpapan memberikan kontribusi sebesar **33,12%** dari total investasi di Kalimantan Timur yang mencapai **Rp 76,335 triliun**. Capaian ini menegaskan posisi Kota Balikpapan sebagai pusat investasi utama di Kalimantan Timur, menunjukkan iklim investasi yang kuat serta peran strategis kota ini dalam pertumbuhan ekonomi regional. Dengan tren pertumbuhan yang positif, Kota Balikpapan berpotensi semakin memperkuat daya saingnya sebagai destinasi utama bagi investasi di masa mendatang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian kinerja ini antara lain:

1. Makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya. Tahun 2024 ini kontribusi capaian realisasi investasi terbesar dari proyek Non PSN yaitu Rp 20,692 triliun atau 80 % dari total realisasi investasi di akhir tahun 2024;
2. Terlaksananya kegiatan LKPM *Hunter* berupa kegiatan mengejar realisasi investasi langsung di lapangan yang ditujukan kepada Pelaku Usaha yang sedang dalam tahap persiapan/ pembangunan/ berkonstruksi guna mendapatkan nilai realisasi investasi dengan modal tetap yang angkanya signifikan dan bisa mendongkrak pencapaian target nilai realisasi investasi, dengan melakukan pembinaan mengenai kewajiban LKPM secara langsung di lokasi kegiatan usaha kepada petugas yang ditunjuk oleh Direksi/ penanggung jawab perusahaan yang kompeten untuk menangani penyampaian LKPM Pelaku Usaha;
3. Meningkatnya kepatuhan teknis dan administratif pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan adanya kegiatan pengawasan/ inspeksi lapangan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan selaku Koordinator Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Perangkat Daerah Teknis Pengampu Izin di Kota Balikpapan terhadap kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan;
4. Terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dengan adanya kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sehingga kegiatan investasi dapat berjalan dengan lancar;
5. Terlaksananya promosi investasi penanaman modal yang dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan pameran penanaman modal maupun dengan mengikuti kegiatan seminar bisnis, forum, *one on one meeting* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat mempromosikan potensi usaha yang ada di Kota Balikpapan;
6. Makin mudahnya pengurusan perizinan berusaha melalui laman https://oss.go.id/ sehingga mendukung proses kemudahan berinvestasi di Kota Balikpapan.

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan juga melakukan beberapa upaya untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pelaku Usaha akan kewajiban penyampaian nilai realisasi investasi melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan diadakannya kegiatan pembinaan kepada Pelaku Usaha Kota Balikpapan berupa kegiatan Bimtek Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Mengapresiasi Pelaku Usaha Kota Balikpapan yang telah menyampaikan LKPM dengan nilai terbesar di tahun 2023 (5 PMA & 5 PMDN) dengan memberikan penghargaan pada kegiatan Balikpapan *Investment Award* 2024;
3. Melakukan kolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan perizinan dan non perizinan dalam bentuk rapat-rapat teknis dengan Perangkat Daerah teknis serta visitasi dan monitoring ke lapangan baik secara rutin (terjadwal) maupun yang bersifat insidentil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan berbagai program strategis untuk meningkatkan nilai realisasi investasi daerah. Dua program utama yang mendukung upaya ini adalah Program Promosi Penanaman Modal dengan Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota serta Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Promosi Penanaman Modal dengan Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan promosi baik yang dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan pameran potensi investasi daerah maupun melalui kegiatan Rencana Kerja RIRU Bank Indonesia terkait proyek investasi Kabupaten/ Kota yang akan dibantu dalam peningkatannya menjadi *Pre-Feasibility Study* melalui program PIKAT BI serta pendampingan kunjungan beberapa asosisasi dan organisasi Luar Negeri (*Brunei-China One Belt Road Association, German Business Delegatetion of Energy Infrastructure Storage and Smart Connectivity, Japan International Cooperation Agency* (JICA)) serta kegiatan *One on One Meeting* antara calon investor dengan Pemerintah (B2G) pada kegiatan *Kaltim Paradise of The East – The Jorney of Mahakam Investment* Forum 2024 di Kota Samarinda.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu melalui kegiatan :

1. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal langsung ke lapangan. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka DPMPTSP Kota Balikpapan selaku Koordinator Pengawasan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan pengawasan/ inspeksi lapangan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah Teknis selaku Pengampu Izin yang ada di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan kepada 25 perusahaan dengan total 44 kegiatan usaha;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Bimbingan Teknis diselenggarakan dalam 3 *batch* dengan menghadirkan narasumber diantaranya Kementerian Investasi dan Hilirasasi/ BKPM, Kementerian Hukum Dan Ham RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI serta *Balikpapan Investment Awards*;

Gambar 2.150
Kegiatan *Balikpapan Investment Awards* dan Bimbingan Teknis
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2025)

3. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal langsung ke lapangan. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka DPMPTSP Kota Balikpapan selaku Koordinator Pengawasan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan pengawasan/ inspeksi lapangan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah Teknis selaku Pengampu Izin yang ada di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan kepada 25 perusahaan dengan total 44 kegiatan usaha;
4. Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang telah dilaksanakan fasilitasi kepada 19 perusahaan dengan total 66 kegiatan usaha;

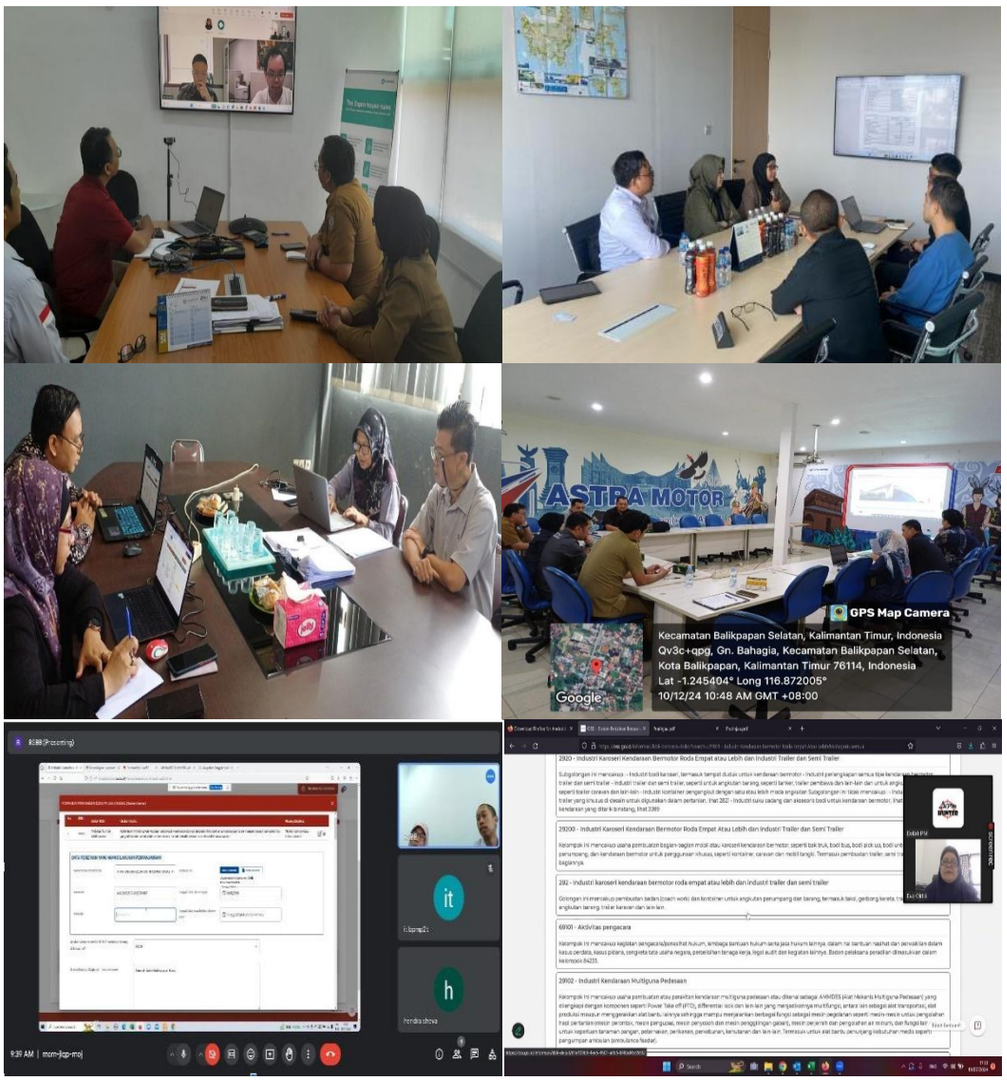

Gambar 2.151
Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2025)

5. Melaksanakan Pendampingan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik secara *online* (dapat menghubungi *helpdesk* LKPM ataupun dapat melakukan pendampingan melalui zoom) serta dapat pula dilakukan secara *offline* (Perusahaan yang akan melaporkan kegiatan penanaman modalnya dapat langsung datang ke kantor DPMPTSP Kota Balikpapan;
6. Pelaksanaan Inovasi LKPM Hunter berupa aksi perburuan nilai realisasi investasi melalui LKPM Hunter dengan menggunakan beberapa strategi. Fokus perburuan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai investasi yang besar dan menengah sesuai PP No. 7 Tahun 2021, dengan modal lebih besar dari 10 M untuk kategori besar, 5M - 10 M untuk kategori menengah, perusahaan perusahaan yang masih dalam tahapan konstruksi, dan perusahaan-perusahaan yang baru saja menyelesaikan tahapan konstruksinya juga menjadi sasaran perburuan dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investasi di Kota Balikpapan.

Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan merujuk pada upaya untuk memperkuat kemampuan suatu negara dalam memproduksi dan menyediakan pangan yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari peningkatan ketahanan pangan adalah mengurangi tingkat kelaparan dan malnutrisi serta memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketahanan pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang disusun berdasarkan keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan guna memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Penyusunan PPH mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, kondisi ekonomi, budaya, serta agama. Selain itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai metode penilaian kualitas pola makan. Skor ini dapat digunakan untuk memantau pola konsumsi pangan serta memberikan rekomendasi perbaikan menuju pola makan yang lebih sehat. Pemerintah juga dapat memanfaatkan Skor PPH dalam perumusan program dan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan gizi.

Secara keseluruhan, total Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang dikenal sebagai indikator kualitas konsumsi pangan, dihitung berdasarkan jumlah skor dari sembilan kelompok pangan, mulai dari kelompok padi-padian hingga kelompok pangan lainnya.

Berdasarkan Data Susenas yang diolah oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan diketahui bahwa pada tahun 2024, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) memiliki realisasi sebesar 87,35 poin dengan capaian realisasi sebesar 98,15% dengan predikat “tidak tercapai”.

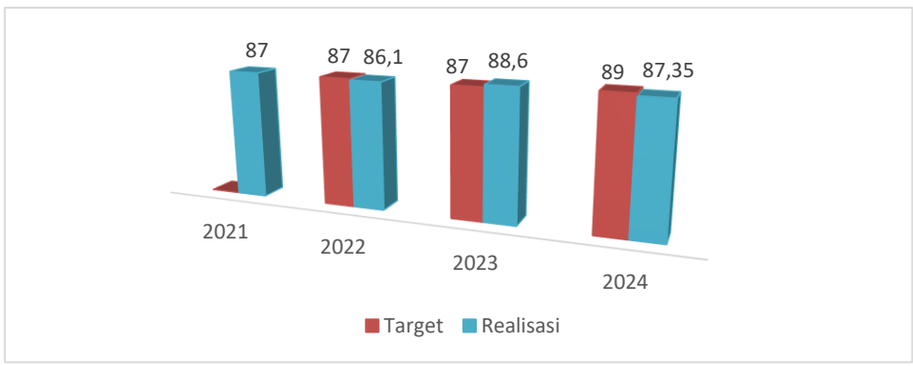

Gambar 2.152
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DPPP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Jika dianalisis dari segi pertumbuhan tahunan, terjadi sedikit penurunan sebesar 1,03% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diikuti oleh peningkatan sebesar 2,91% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, kembali terjadi penurunan sebesar 1,41% dibandingkan dengan tahun 2023. Secara rata-rata, perubahan skor PPH per tahun mencapai 0,16%, yang menunjukkan bahwa perkembangan skor PPH cenderung stabil dengan kenaikan yang tidak terlalu signifikan.

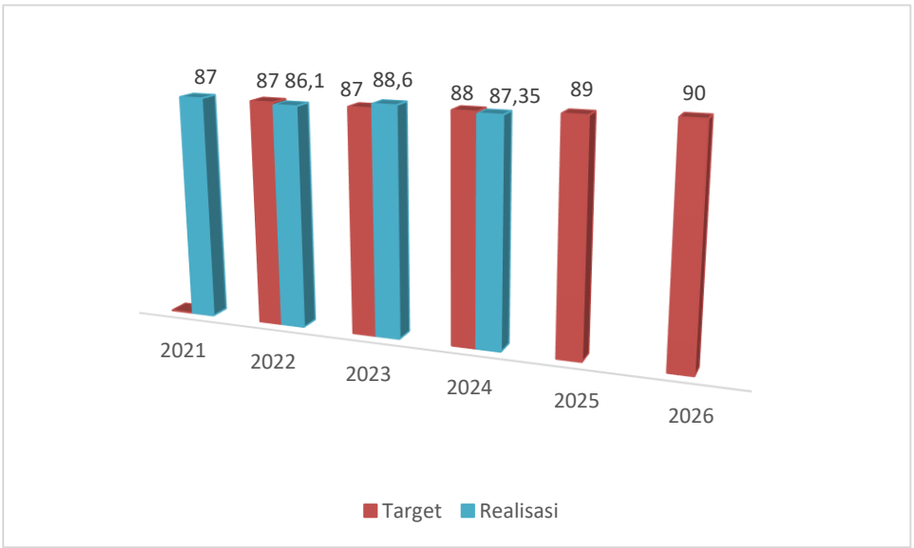

Gambar 2.153
Perbandingan Target dan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DPPP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu 87,35 dari target 88, dengan selisih sebesar **0,74%.** Tren ini menunjukkan adanya deviasi yang perlu diantisipasi agar target tahun 2025 dan 2026 dapat tercapai. Jika tidak ada peningkatan signifikan, terdapat resiko realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ke depan tidak sesuai dengan pencapaian target sesuai perencanaan jangka menengah.

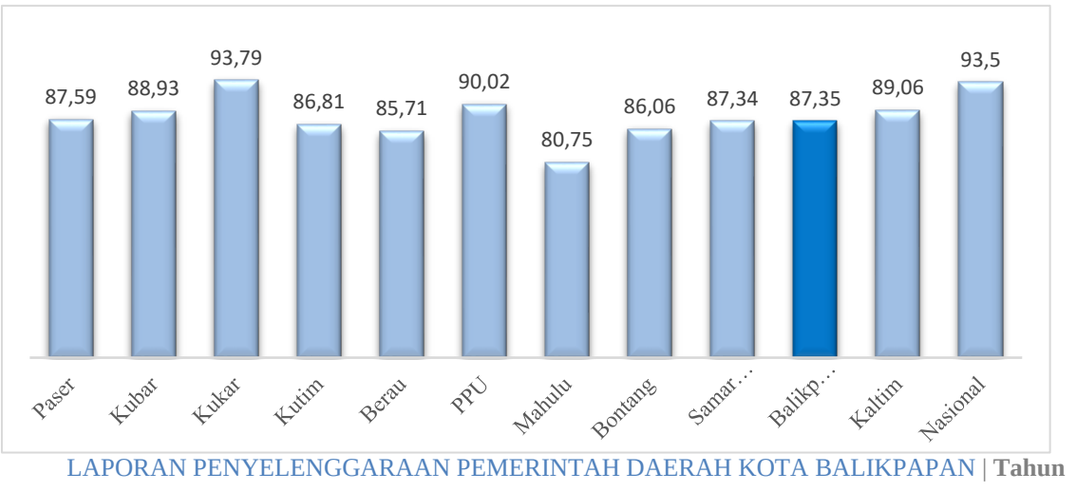

Gambar 2.154
Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kota Balikpapan dengan Kab/ Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2024
Sumber: DPPP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan pada tahun 2024 tercatat sebesar 87,35, yang menempatkannya di posisi menengah dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 89,06, realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih 1,92%. Dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan Berau (85,71), Mahulu (80,75), dan Bontang (86,06), tetapi masih lebih rendah dibandingkan Kukar (93,79), PPU (90,02), dan Kubar (88,93). Jika dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai 93,5, Kota Balikpapan masih memiliki gap sebesar 6,59%, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam pola konsumsi pangan agar lebih mendekati standar nasional.

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 yang belum mencapai target dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan pengolahan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diambil pada Maret 2024, terdapat beberapa hambatan utama yang menyebabkan ketidaktercapaian indikator kinerja ini.

Salah satu faktor utama adalah kenaikan harga berbagai komoditas yang menyebabkan inflasi, di mana pada Maret 2024 inflasi ***year-on-year*** **(y-on-y)** tercatat sebesar **2,95%,** yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi ini paling tinggi terjadi pada subkelompok makanan, yang secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Akibatnya, banyak rumah tangga yang mengalami penurunan kualitas konsumsi pangan, baik dari segi kuantitas maupun keragaman pangan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya capaian Skor PPH.

Selain itu, peningkatan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024** juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target PPH. Tingginya angka pengangguran mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat menurun, yang menyebabkan mereka lebih memilih pangan dengan harga yang lebih murah, meskipun dari sisi kualitas gizi kurang optimal. Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi akibat faktor ekonomi ini semakin memperburuk kondisi konsumsi pangan masyarakat, sehingga mempengaruhi capaian Skor PPH secara keseluruhan.

Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Balikpapan, pemerintah daerah telah menerapkan sejumlah strategi yang berfokus pada peningkatan akses, ketersediaan, serta keamanan pangan bagi masyarakat. Berbagai upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan kenaikan harga pangan.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Edukasi ini mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal yang lebih terjangkau dan memiliki nilai gizi tinggi, seperti umbi-umbian, sayuran, dan sumber protein nabati maupun hewani yang tersedia di sekitar mereka.

Gambar 2.155
Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Konsep B2SA
Sumber: DPPP Kota Balikpapan (2024)

Selain edukasi, pemerintah juga mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah kenaikan inflasi. Cadangan ini berperan sebagai *buffer stock* yang dapat didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak fluktuasi harga dan keterbatasan daya beli.

Gambar 2.156
Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
Sumber: DPPP Kota Balikpapan (2024)

Dari sisi keamanan pangan, pemerintah melaksanakan pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan menggunakan *Rapid Test Kit* dan jasa laboratorium terakreditasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat bebas dari zat berbahaya dan tetap memenuhi standar kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Gambar 2.157
Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengujian Mutu Pangan
Sumber: DPPP Kota Balikpapan (2024)

Selain itu, melalui Gerakan Selamatkan Pangan, pemerintah melakukan sosialisasi Stop Boros Pangan, Gerakan Pangan Murah, serta Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*/FSVA). Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan pangan dan memastikan distribusi pangan lebih merata di masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas.

Gambar 2.158
Gerakan Selamatkan Pangan dan Rapat Penyusunan FSVA
Sumber: DPPP Kota Balikpapan (2024)

Sebagai langkah diversifikasi, pemerintah juga mendorong substitusi pangan dengan alternatif lain, seperti singkong dan umbi-umbian, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan pokok yang mengalami fluktuasi harga tinggi, seperti beras dan gandum. Dengan pemanfaatan sumber pangan lokal ini, masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan gizi mereka tanpa harus bergantung pada bahan pangan yang lebih mahal dan terbatas ketersediaannya.

Secara keseluruhan, berbagai upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kota Balikpapan, mengurangi dampak inflasi terhadap konsumsi pangan masyarakat, serta mendukung pencapaian target Skor PPH yang lebih optimal di masa mendatang.

Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional

Kunjungan wisata adalah banyaknya jumlah kunjungan wisata yang dilakukan. Kunjungan wisatawan bisa dilakukan secara domestik atau internasional, tergantung dari asal negara wisatawan tersebut. Kunjungan wisatawan membawa dampak ekonomi yang besar bagi suatu destinasi wisata, karena turut berkontribusi pada penghasilan pendapatan dan lapangan kerja di sektor pariwisata**.**

Untuk mengukur kunjungan wisata yang dilakukan maka dapat dilihat dari angka kunjungan wisata. Angka kunjungan wisatawan adalah jumlah orang yang mengunjungi suatu destinasi wisata dalam periode waktu tertentu. Angka ini biasanya dihitung dalam skala harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Angka Kunjungan Wisatawan menjadi indikator penting dalam industri pariwisata karena dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu destinasi wisata dalam menarik pengunjung dan memberikan kontribusi ekonomi bagi wilayah tersebut. Selain itu, data angka kunjungan wisatawan dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan dan perencanaan pariwisata di suatu daerah.

Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	=	Total jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri + Total jumlah kunjungan wisatwan asing dalam satu tahun

Gambar 2.159
Rumus Hitung Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Merujuk pada perhitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa angka kunjungan wisata di Kota Balikpapan tahun 2024 adalah 2,67 juta orang atau dengan kata lain tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2,70 juta orang, sehingga hanya memiliki hanya capaian kinerja sebesar 98,89%.

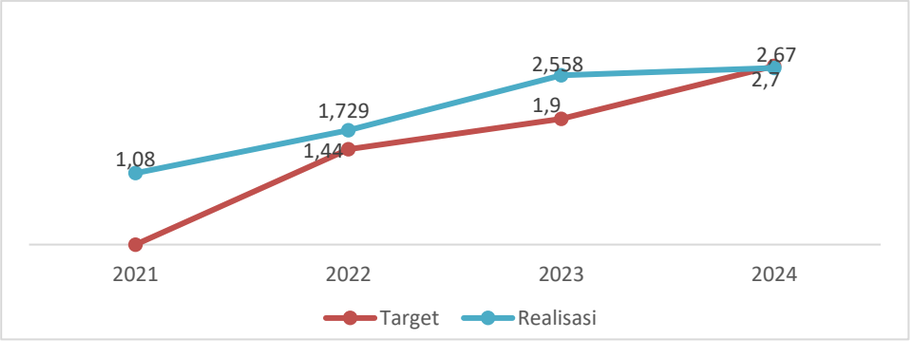

Gambar 2.160
Perkembangan Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang) Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data perkembangan angka kunjungan wisatawan Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebesar 1,08 juta orang, kemudian meningkat menjadi 1,729 juta orang pada tahun 2022. Tren pertumbuhan berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan mencapai 2,558 juta orang, hingga akhirnya pada tahun 2024 mencapai 2,67 juta orang. Jika dihitung rata-rata, persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan per tahun adalah 37,47%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2021–2022 dan 2022–2023. Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan menunjukkan perlambatan dengan peningkatan hanya 4,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan angka kunjungan wisatawan di Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan yang positif, menunjukkan peningkatan daya tarik kota sebagai destinasi wisata yang semakin berkembang.

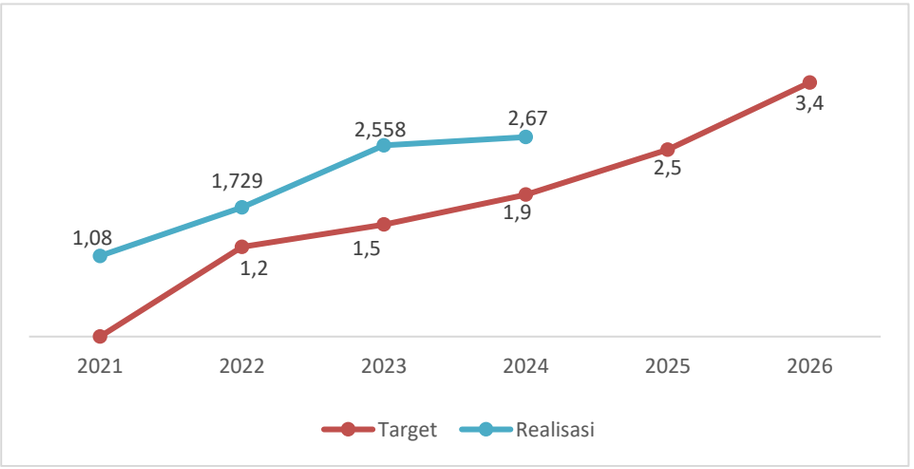

Gambar 2.161
Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang) Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, capaian realisasi Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang) Kota Balikpapan tahun 2024 telah berada diatas target sebesar 770.000 ribu orang, bahkan capaian ini juga telah melebihi target di tahun 2025.

Meskipun menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan kunjungan wisatawan mengalami perlambatan di tahun 2024. Faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian target tersebut antara lain:

1. Kota Balikpapan masih menghadapi kendala dalam penyediaan fasilitas pariwisata yang nyaman dan lengkap bagi wisatawan. Beberapa destinasi wisata masih minim fasilitas dasar seperti toilet bersih, tempat istirahat, pusat informasi wisata, hingga area parkir yang memadai. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan fasilitas ini membuat Kota Balikpapan kurang kompetitif dibanding destinasi wisata lain yang sudah lebih maju dalam penyediaan layanan bagi pengunjung;
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Balikpapan dalam pengembangan pariwisata. Banyak masyarakat yang belum aktif berkontribusi dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan wisata. Selain itu, potensi ekonomi kreatif berbasis wisata belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat lokal, sehingga perkembangan pariwisata masih bergantung pada inisiatif pemerintah tanpa adanya dukungan penuh dari warga;
3. Pengelolaan pariwisata di Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pariwisata. Kurangnya program pelatihan yang berkelanjutan bagi pelaku wisata, mulai dari pengelola destinasi, pemandu wisata, hingga pelaku usaha di sektor ini, menyebabkan kualitas layanan belum optimal;
4. Keterbatasan akses ke beberapa destinasi wisata;
5. Pariwisata di Kota Balikpapan masih didominasi oleh wisata alam dan bisnis, sementara variasi atraksi wisata yang unik dan inovatif masih kurang berkembang. Minimnya pengembangan produk wisata baru menyebabkan wisatawan memiliki pilihan yang terbatas, sehingga mereka cenderung mencari destinasi lain yang menawarkan pengalaman lebih beragam. Selain itu, kualitas fasilitas yang ada di beberapa objek wisata masih belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan, yang dapat mengurangi kepuasan mereka dan menurunkan peluang kunjungan ulang.

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan serta Perangkat Daerah terkait guna meningkatkan angka kunjungan wisata, antara lain:

1. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata melalui Program Daya Tarik Pengembangan Destinasi;
2. Penyusunan Kajian BLUD Kawasan Wisata Pantai Manggar dan Kajian Model Bisnis Pariwisata Kota Balikpapan;

Gambar 2.162
Penyusunan Kajian BLUD Kawasan Wisata Pantai Manggar dan Penyusunan Kajian *Grand Design* & Model Bisnis Pariwisata Kota Balikpapan
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

3. Melaksanakan berbagai pengembangan SDM pariwisata seperti pelatihan pelayanan prima pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan tata kelola kelembagaan destinasi wisata Kota Balikpapan, dll;

Gambar 2.163
Berbagai Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata dengan melaksanakan LOMBA BAKAT WISATA di Pantai Manggar Segara Sari;

Gambar 2.164
Lomba Bakat Wisata di Pantai Manggar Segara Sari
tanggal 12-20 Oktober 2024
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

5. Meningkatkan citra pariwisata Kota Balikpapan melalui Penyelenggaraan Dukungan Event dan Branding Pariwisata Kota Balikpapan;

Gambar 2.165
Berbagai Kegiatan Pemasaran dan Event Pariwisata
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

6. Pelaksanaa kegiatan *Table Top* untuk promosi pariwisata Kota Balikpapan dan merupakan salah satu langkah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Balikpapan.

Apabila berbagai tantangan yang berhasil diatasi, sektor pariwisata Kota Balikpapan akan semakin berkembang dan menjadi destinasi yang lebih menarik bagi wisatawan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pelaku industri pariwisata menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem wisata yang lebih kompetitif, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Dengan terus menjaga komitmen dalam inovasi dan kolaborasi, Kota Balikpapan berpotensi menjadi salah satu tujuan wisata unggulan yang tidak hanya memberikan pengalaman berkesan bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif adalah dua hal yang saling terkait dalam industri kreatif. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor industri kreatif, seperti seni, desain, film, musik, penerbitan, dan sebagainya. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif seperti seniman, desainer, musisi, penulis, dan sebagainya.

Kedua hal tersebut saling mempengaruhi dalam industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi kreatif sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi dari pelaku ekonomi kreatif dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan menarik perhatian konsumen. Sebaliknya, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif juga sangat tergantung pada kondisi industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan. Pertumbuhan

pelaku ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan, seperti peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi.

Untuk mengetahui persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan dilakukan dengan perhitungan mandiri oleh Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif} = \frac{\text{Pelaku ekonomi kreatif tahun n - Pelaku ekonomi kreatif tahun (n-1)}}{\text{Pelaku ekonomi kreatif tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Gambar 2.166
Rumus Hitung Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan di atas diketahui bahwa pelaku ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai 618 orang dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 446 orang. Dengan kata lain pada tahun 2024 pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Balikpapan telah bertambah sebanyak 172 orang, sehingga diperoleh persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif mencapai 38,57% dengan capaian kinerja sebesar 109,57% dengan predikat “tercapai/ sesuai target”.

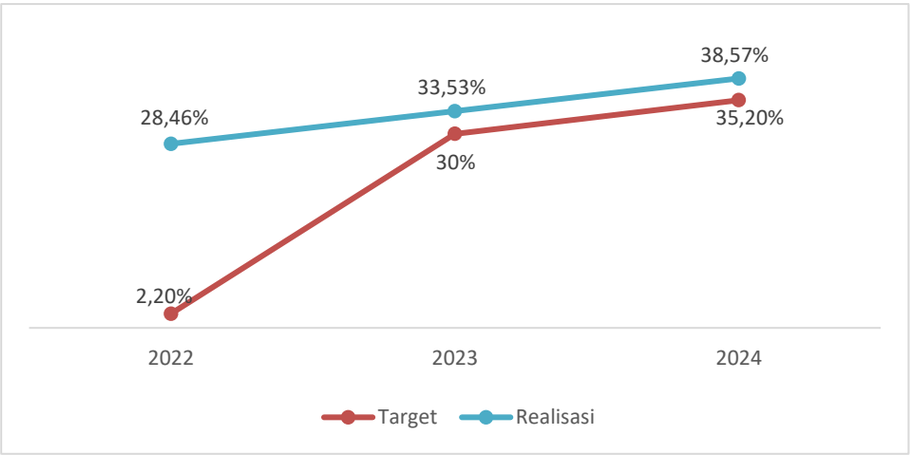

Gambar 2.167
Perkembangan Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Dari data yang disajikan mengenai perkembangan persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan dalam tiga tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jika dianalisis secara rata-rata, peningkatan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif dengan selisih pertumbuhan sebesar 5,07% dari tahun 2022 ke 2023, dan sebesar 5,04% dari tahun 2023 ke 2024. Dengan kata lain, pertumbuhan realisasi pelaku ekonomi kreatif meningkat sebesar 17,81% pada 2023 dan 15,03% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan yang stabil dan konsisten.

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, capaian realisasi pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Kota Balikpapan pada tahun 2024 telah jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 38,57%, atau melebihi target tahun tersebut yang hanya sebesar 2,66%. Bahkan, capaian ini juga telah jauh melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2026, yang masing-masing sebesar 2,93% dan 3,22%.

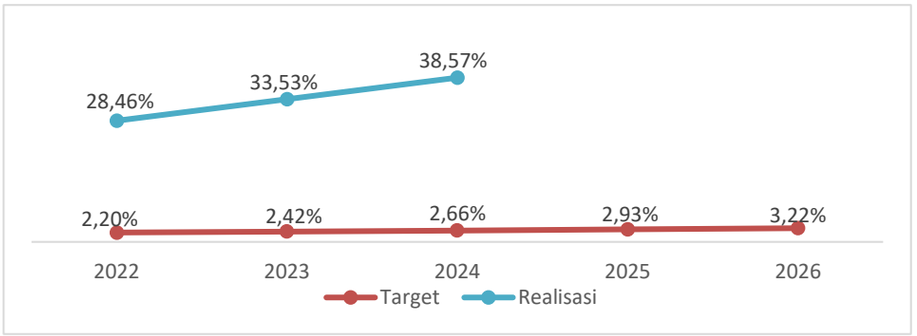

Gambar 2.168
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Keberhasilan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian yang jauh melampaui target. Tren capaian yang secara konsisten meningkat sejak tahun 2022 menunjukkan efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh pemerintah kota dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif. Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah peningkatan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif, baik melalui platform digital, event promosi, maupun kolaborasi dengan sektor swasta yang membuka peluang lebih luas bagi produk dan jasa kreatif untuk berkembang. Selain itu, meningkatnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif akan pentingnya mengikuti sertifikasi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini.

Gambar 2.169
Pekan Ekonomi Kreatif dan Penguatan Ekonomi Kreatif Berbagai Sub Sektor
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2024)

Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program strategis untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif. Dua program utama yang mendukung upaya ini adalah Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui program-program ini, pemerintah mendorong pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha kreatif, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berbagai upaya konkret telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan, antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Sosialisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kota Balikpapan;
3. Pelatihan *Liaison Officer* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif;
4. Fasilitasi sertifikasi profesi hotelier, sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata, serta sertifikasi profesi barista, bartender, *waiter-waitress* restoran, rumah makan, dan kafe;
5. Workshop tata kelola manajemen hotel non-bintang, pelatihan *Master of Ceremony* (MC), serta Sertifikasi Kompetensi *Master Of Ceremony*.

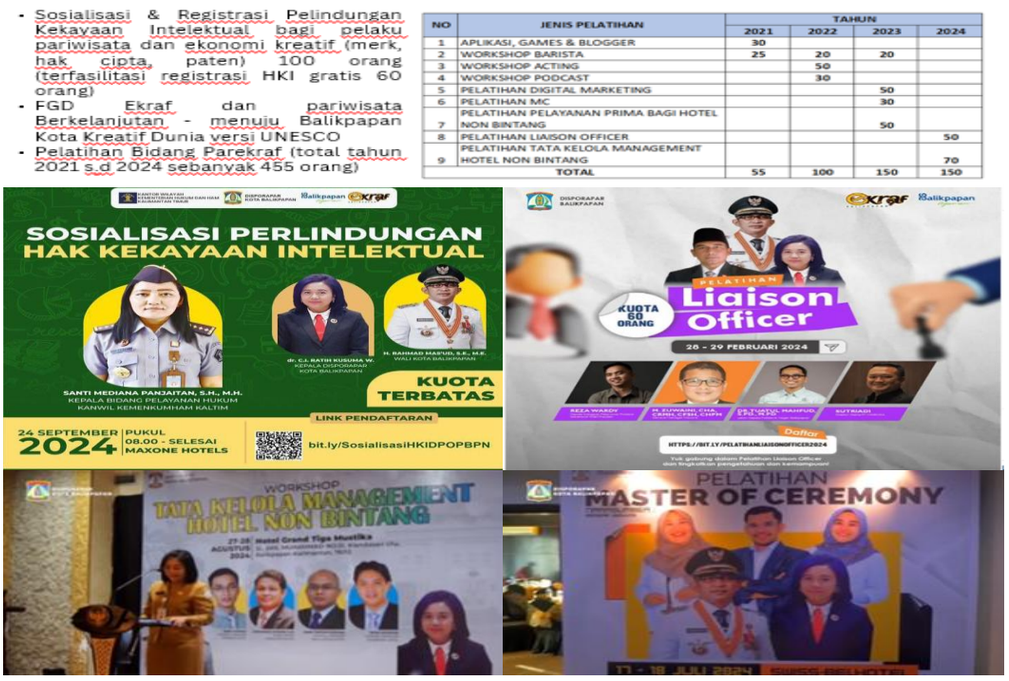

Gambar 2.170
Berbagai Program Strategis untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2024)

Sebagai salah satu dari 21 daerah yang ditetapkan sebagai Kota Kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) sejak tahun 2021, Kota Balikpapan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pengakuan ini semakin mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas kreatif, dan dunia usaha, untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan berbagai faktor pendukung tersebut, pertumbuhan pelaku ekonomi

kreatif di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, melampaui target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 18 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan sektor unggulan daerah merujuk pada perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar serta keunggulan komparatif di suatu wilayah. Setiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda, tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor lainnya. Pertumbuhan sektor ini berperan penting dalam mendorong ekonomi berkelanjutan karena dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu sektor unggulan yang menonjol di Kota Balikpapan adalah sektor perdagangan. Pertumbuhan sektor unggulan dan sektor perdagangan saling berhubungan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mengukur perkembangan sektor perdagangan, dapat digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan. PDRB ini mencerminkan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.

Sektor perdagangan sendiri mencakup berbagai aktivitas, seperti perdagangan grosir, eceran, serta perdagangan otomotif. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang tinggi menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, PDRB sektor perdagangan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan sektor ini.

Untuk menghitung nilai PDRB sektor perdagangan, diperlukan data mengenai nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga ekonomi, dan organisasi perdagangan. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

Gambar 2.171
Rumus Hitung Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Sumber: Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-190/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-143/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan diketahui persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2024 terealisasi sebesar 9,77%, dengan capaian kinerja sebesar 168,45% atau mendapat predikat “melebihi target”.

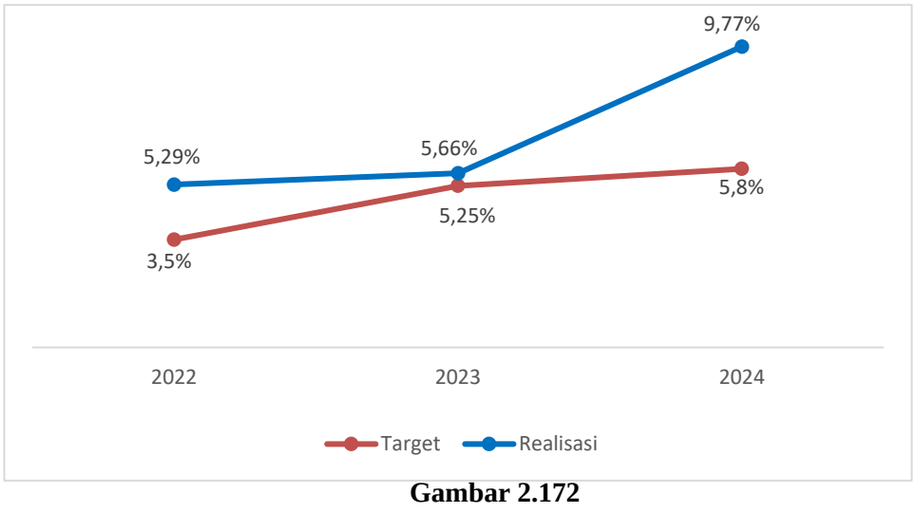

Gambar 2.172
Perkembangan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kota Balikpapan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Berdasarkan data perkembangan persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kota Balikpapan dari tahun 2022 hingga 2024, realisasi pertumbuhan selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, target pertumbuhan ditetapkan sebesar 3,5%, sedangkan realisasinya mencapai 5,29%, mengalami kenaikan sebesar 1,79%. Pada tahun 2023, target pertumbuhan meningkat menjadi 5,25%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 5,66% atau mengalami kenaikan lebih kecil sebesar 0,41%. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan, di mana target yang ditetapkan sebesar 5,8% berhasil terlampaui dengan realisasi pertumbuhan mencapai 9,77% atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 3,97%.

Tren kenaikan realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dari tahun ke tahun menunjukkan pola pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2022 ke 2023, pertumbuhan hanya meningkat sebesar 0,37%, tetapi pada tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan yang jauh lebih besar mencapai 4,11%. Secara rata-rata, pertumbuhan tahunan dalam periode 2022–2024 mencapai 6,91%, dengan kenaikan rata-rata sebesar 2,24% per tahun.

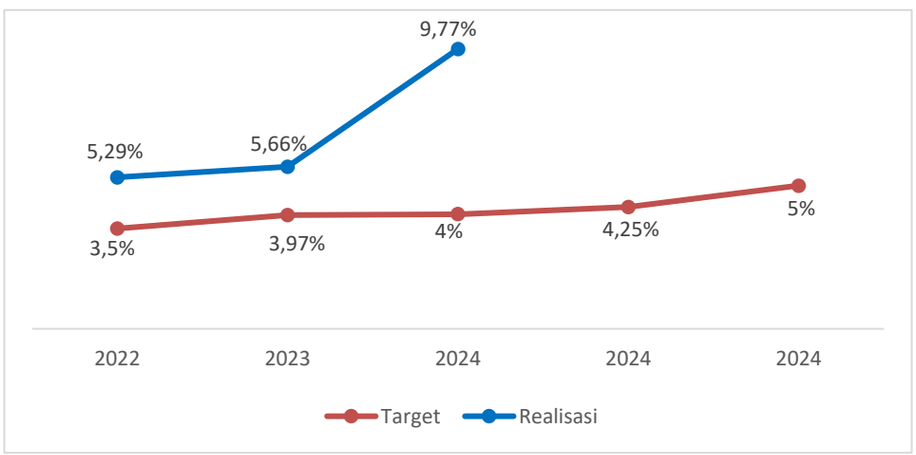

Gambar 2.173
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kota Balikpapan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi (2025)

Apabila dibandingkan dengan target dalam kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, capaian realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kota Balikpapan pada tahun 2024 telah jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 9,77%, atau melebihi target tahun tersebut yang hanya sebesar 4%. Kenaikan ini mencapai 5,77%, atau lebih dari dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Bahkan, capaian realisasi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2024 telah mencapai **229,18% dari target tahun 2025** dan **195,4% dari target tahun 2026**, yang menunjukkan bahwa pencapaian ini jauh melampaui proyeksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Lonjakan signifikan dalam pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kota Balikpapan pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan ekonomi disektor perdagangan yang cukup baik. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain pemulihan ekonomi pascapandemi, meningkatnya investasi di sektor perdagangan, serta kebijakan pemerintah yang semakin progresif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemulihan ekonomi pascapandemi telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan daya beli, yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Para pelaku usaha yang sebelumnya terdampak mulai bangkit dan memperluas skala bisnisnya, sehingga menciptakan peningkatan transaksi perdagangan yang signifikan. Selain itu, meningkatnya arus investasi di sektor perdagangan juga menjadi faktor penting dalam mendorong lonjakan pertumbuhan. Kemudahan perizinan usaha, insentif bagi investor, serta pengembangan infrastruktur telah mendukung ekspansi usaha ritel, perdagangan besar, dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Balikpapan juga menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pemantauan stok dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting) untuk menjaga keseimbangan pasokan serta daya beli masyarakat. Program Pasar Murah yang rutin diadakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) juga berperan dalam menekan lonjakan harga bahan pokok, sehingga masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, pelaksanaan Operasi Pasar di beberapa lokasi dengan dukungan subsidi ongkos angkut dari pemerintah kepada BULOG turut menjaga stabilitas harga dan meningkatkan aksesibilitas bahan pokok bagi masyarakat.

Gambar 2.174
Strategi Pemerintah Kota Balikpapan dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok: Pemantauan Stok, Pasar Murah,
dan Operasi Pasar
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2024)

Selain menjaga kestabilan harga dan pasokan, Pemerintah Kota Balikpapan juga menginisiasi *business matching* dan kerja sama antar daerah dengan Kabupaten Malang serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Inisiatif ini bertujuan untuk membuka jalur distribusi alternatif yang lebih efisien, sehingga pasokan barang kebutuhan pokok di Kota Balikpapan dapat lebih terjamin dan stabil. Langkah ini tidak hanya memperkuat rantai pasok lokal, tetapi juga menciptakan peluang investasi baru di sektor perdagangan.

Pembangunan infrastruktur perdagangan turut menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Pemerintah Kota Balikpapan secara bertahap melaksanakan Pembangunan Blok C Pasar Klandasan serta revitalisasi Blok Kuliner Pasar Klandasan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pasar sebagai pusat perdagangan lokal, dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pedagang serta konsumen. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, aktivitas perdagangan menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.175
Penguatan Infrastruktur Perdagangan sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pembangunan Blok C Pasar Klandasan serta
revitalisasi Blok Kuliner Pasar Klandasan
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2024)

Selain fokus pada perdagangan dalam negeri, Pemerintah Kota Balikpapan juga aktif dalam mendorong produk unggulan daerah ke pasar internasional. Keikutsertaan dalam *Trade Expo Indonesia* (TEI) 2024 memungkinkan pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan bisnisnya, melakukan studi tiru, serta menjalin kolaborasi dengan pasar global. Program lain yang turut mendukung pemasaran produk lokal adalah partisipasi dalam berbagai pameran tingkat nasional, seperti Yogyakarta *Investment, Trade, and Tourism Expo 2024* serta Indonesia *City Expo 2024 (ICE 2024)*. Melalui berbagai pameran ini, pelaku usaha Kota Balikpapan mendapatkan peluang untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB daerah.

Gambar 2.176
Ekspansi Produk Unggulan Balikpapan ke Pasar Global: Keikutsertaan dalam *Trade Expo Indonesia* dan Pameran Nasional (Yogyakarta *Investment, Trade, and Tourism Expo 2024* serta Indonesia *City Expo 2024)*
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2024)

Perkembangan digitalisasi perdagangan juga turut mempercepat pertumbuhan sektor ini. Peningkatan adopsi teknologi dalam transaksi bisnis, maraknya penggunaan *marketplace* digital, serta semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan strategi pemasaran berbasis digital telah membuka peluang yang lebih luas bagi perdagangan lokal untuk menjangkau pasar yang lebih besar.

Dengan berbagai upaya strategis yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Balikpapan terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap peningkatan PDRB, tetapi juga memperkuat daya saing pelaku usaha lokal serta kesejahteraan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat terus ditingkatkan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang semakin progresif.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Balikpapan telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif dimana penentuan sasaran strategis telah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah direncanakan secara terperinci untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis. Pada tahun 2024, jumlah keseluruhan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis mencapai 179 program sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.13 Jumlah Program per IKU Sasaran Strategis Kota Balikpapan Tahun 2024 yang Mendukung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	JUMLAH PROGRAM
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	7
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	3
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	2
		Indeks SPBE	5
		Maturitas SPIP	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	3
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	30
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	4
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	5
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	4
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	4
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	12
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	12
		Persentase Permukiman Layak Huni	6
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	10
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	6
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	3
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	8
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat	Persentase Pertumbuhan UMKM	10
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5

	Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	5
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	11
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	2
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7
Jumlah			**179**

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2024

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran strategis kedepannya maka diperlukan strategi yang melibatkan perencanaan sistemik melalui penerapan alat ukur yang dapat mengukur semua aspek, sehingga dapat mendorong interaksi antar berbagai bidang. Selain itu, kunci keberhasilan dalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan, sehingga program yang kompleks dan ekstensif dapat berjalan secara seimbang dan selaras. Apabila langkah-langkah ini dapat dilaksanakan, maka visi misi yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat dapat tercapai.

Adapun berbagai program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	98.43%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100	100	100%	Sekretariat Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100	100	100%	Sekretariat Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	76.54	95.68%	Sekretariat Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	20.35	20.34	99.95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Prioritas I)	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.60	83.08	97.06%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100.39%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, PAPBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100	100	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100	100	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77.5	77.5	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	88.31%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	1062.03	885.114	83.34%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	89.53	106.58%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Indeks SPBE	104.21%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	90	100	111.11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80	80	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80	100	125.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;	90	92	102.22%	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	85	85	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87	87.08	100.09%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Maturitas SPIP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	87.33	91.9	105.23%	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	75	75	100%	Inspektorat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	81.44	94.70%	Inspektorat
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	89.47%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	88.91	84.21	94.71%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	60	60	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									Sumber Daya Manusia
					Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	98.17	48	48.89%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	2.65	1.34	50.57%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	24.64	22.13	89.81%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	83.74	102.12%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	101.34%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	91.45	99.81	109.14%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Atas Layanan Pemerintahan			Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.55	97.43	100.91%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100	100	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87.00	87.82	100.94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	76	100	131.58%	Sekretariat DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	86.97	117.53%	Sekretariat DPRD
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Pemberdayaan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat	100	14	14.00%	Kecamatan Balikpapan Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Masyarakat Desa dan Kelurahan	dalam membangun kelurahan				
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71.5	70	97.90%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	19.5%	14	7179.49%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80.22	75.98	94.71%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Penyelenggaraan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10.40	24.76	238.08%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.21	79.62	100.52%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.55	17.01	102.78%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.6	79.8	100.25%	Kecamatan Balikpapan Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangunkelurahan	17	17.11	100.65%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81.85	82.88	101.26%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	23.37	23.37	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86.63	86.63	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	69	97.53	141.35%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	99.12%	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.13	107.45	123.32%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	92.45	81.86	88.55%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	88.89			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87.18	87.07	99.87%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Daerah Kabupaten/Kota					
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	101.57%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.05	84.58	101%	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	86	100	116%	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	100	100	100%	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	86	100	116.28%	Dinas Kesehatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84.10	75.92	90%	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya Kualitas	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	104.14%	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	6	7	117%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Literasi Masyarakat			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola	80	79	99%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	75	76	101%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase perizinan penggunaan arsip	100	0	0%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	95.45	119.31%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	254.88%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Mandiri	2.5	2.28	91.20%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	100%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	26.2	15.11	57.67%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	88.79	118.39%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Daerah Kabupaten/Kota					
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	99.84%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	55.10	90.33	163.94%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	34.82	44	126%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	46.66	66.67	143%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	97.05	96.77	99.71%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100.84%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase OPD yang telah menyusun anggaran yang Responsif Gender (jumlah OPD yg telah menyusun PPRG/jumlah seluruh OPD x100%)	97.06	91.8	94.58%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan (Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	8.36 per 100.000 Penduduk Perempuan	46.53	-350.52%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
					dibagi Jumlah Perempuan dikali 100.000)				
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Ketersediaan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat Kecamatan	100	100	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah (jumlah OPD memiliki data terpilah dibagi Jumlah OPD dikali 100)	36.11	38.24	105.90%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	80	80	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganannya dibagi jumlah klien yang	68	96.36	141.71%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
					ditangani UPTD PPA kalikan 100)				
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	100	100	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	86,000,000,000	85,377,255,459	99.28%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	66	80	121.21%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	13.10	12.2	93.13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan (Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan dibagi jumlah keluarga versi DALLAP BKKBN dikalikan 100)	15.8	8.54	54.05%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83	81.75	98.49%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	103.16%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	64.71	67.65	104.54%	Dinas Pekerjaan Umum
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	97.25	96.76	99.50%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	98.80	99.7	100.91%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Sistem dan	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	98.00	98	100%	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Pengelolaan Persampahan Regional					
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	89.12	92.64	104%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki ijin	93.90	93.59	99.67%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100.00	100	100%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53.85	54.2	100.65%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.95	100	116%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penyelenggara An Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	89	66	74.16%	Dinas Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	66	4	6.06%	Dinas Perhubungan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	78	100%	Dinas Perhubungan
		Persentase Permukiman Layak Huni	99.79%	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	28	0	0%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	25.42	21.67	102.91%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	5.21	3.07	58.93%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0.08			Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	76.78	95.98%	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	82	82	100%	Dinas Sosial
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100.13%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	89	89	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10.63	10.63	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	68.4	68.40%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	65.79	65.79	100%	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Beracun (Limbah B3)					
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	32.93	32.93	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	100	81.28	81%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78.16	78.16	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	108.09%	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	27	42.86	159%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.21	0.25	119%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	39	40	103%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	72.65	80.21	110%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	90	88	98%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	84.32	103%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	101.52%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	90	90	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	90	90	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	84.98	114.84%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	99.13%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	13	12.5	96%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	95	120%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	100	80	80.00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100	100	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporan pada	85	100	117.65%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Organisasi Kemasyarakatan	Pemerintah Kota Balikpapan				
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	92	100	109%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Monitoring Potensi Konflik	88	100	114%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	80.2	95%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	95.15%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	6.28	5.44	86.62%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	21.97	16.74	76.19%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Tingkat Kemiskinan			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	53.57	53.57	100%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi sehat	7.53	6.28	83.40%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	84.98	81.94	96.42%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	5.28	8.48	160.61%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	8.26	11.27	136.44%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13.89	14.41	103.74%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	61.54	30.57	49.68%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	83.02	96.53%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	96.33%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	3.3	3.07	93%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari Kerja Yang Mendapat Palatihan yang Tersalur	55	75	136%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	23.6	36.99	157%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	69	54.9	80%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.5	92.16	107.79%	Dinas Ketenagakerjaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Tingkat Kemiskinan	100%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan	90	80.56	89.51%	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial PMKS yang terpenuhi	80	85	106.25%	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	87.80	55.07	62.72%	Dinas Sosial
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100.00	91.68	91.68%	Dinas Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	94	94	100%	Dinas Sosial
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	128.1%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	5	0	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	90	95	106%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100	100	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	86	93.88	109.16%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	94.32	117.90%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	98.15%	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya	0.081	0.12	148%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Ketahanan Pangan Masyarakat	cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	89	100	112%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4400	4107.4	93.35%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	304	164.473	54.10%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	50	63.38	126.76%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85	85	100%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	25	25	100%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75	148.88	198.51%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73	77.54	106.22%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50	50	100%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	98.89%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4	3.8	95.00%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	21	4.37	20.81%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	111.77%	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	24	29.49	123%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	12	33.33	278%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	168.45%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	65	41	63.08%	Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Unggulan Daerah			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	87	80	92%	Dinas Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	5.4	4.7	114.89%	Dinas Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih non migas	1550	4144.901	267.41%	Dinas Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya	70	100	142.86%	Dinas Perdagangan
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	73	75.7	103.70%	Dinas Perdagangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	75.62	94.53%	Dinas Perdagangan

Sumber: Bagian Organisasi dan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah tahun 2025

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pada tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Balikpapan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan sebesar Rp 4,545,984,209,715.36,-. Adapun alokasi anggaran belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut

Tabel 2.15
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	ALOKASI (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	474,613,370,154	10.44%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	24,114,241,807	0.53%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	385,136,436,121	8.47%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1,036,013,737,444	22.79%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	672,927,686,848	14.80%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	14,173,181,377	0.31%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	50,533,196,355	1.11%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	6,471,990,000	0.14%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	38,462,234,005	0.85%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	1,274,819,046,508	28.04%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	229,498,504,248	5.05%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	154,377,240,278	3.40%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	58,699,085,076	1.29%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	16,501,892,697	0.36%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	28,567,651,100	0.63%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	16,726,422,421	0.37%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	2,832,427,600	0.06%

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	ALOKASI (%)
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	61,515,865,676	1.35%
Total Belanja		**4,545,984,209,715.36**	100%

Sumber: BKAD Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, sektor dengan alokasi terbesar adalah Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas sebesar 28,04%, diikuti oleh Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dengan 22,79%, serta Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yang mendapat 14,80% dari total anggaran. Sementara itu, sektor dengan alokasi terkecil adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebesar 0,06%, diikuti oleh Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah sebesar 0,14%, serta Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat yang hanya memperoleh 0,31% dari total anggaran.

Adapun realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2024 mencapai Rp 3,758,195,656,201,- atau sebesar 82.67% dari total anggaran belanja yang dialokasikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	474,613,370,154	404,411,905,622	85.21%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	24,114,241,807	21,337,040,724	88.48%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	385,136,436,121	332,428,145,010	86.31%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1,036,013,737,444	821,045,158,768	79.25%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	672,927,686,848	390,113,372,271	57.97%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	14,173,181,377	12,600,350,866	88.90%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	50,533,196,355	46,284,566,721	91.59%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	6,471,990,000	6,306,861,238	97.45%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	38,462,234,005	34,923,358,198	90.80%

10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	1,274,819,046,508	1,174,772,242,771	92.15%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	229,498,504,248	205,666,835,657	89.62%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	154,377,240,278	137,631,746,474	89.15%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	58,699,085,076	53,317,974,852	91%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	16,501,892,697	14,547,221,901	88.15%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	28,567,651,100	26,263,094,735	91.93%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	16,726,422,421	15,549,771,647	92.97%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	2,832,427,600	2,670,171,927	94.27%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	61,515,865,676	58,325,836,819	94.81%
Total Belanja		**4,545,984,209,715.36**	**3,758,195,656,201**	**82.67%**

Sumber: BKAD Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi tahun 2025

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada berbagai sasaran strategis mencapai 82,67% dari total anggaran sebesar Rp 4,54 triliun, dengan total realisasi sebesar Rp 3,76 triliun. Tingkat pencapaian ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. Sedangkan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i.

Berdasarkan rumus di atas diketahui bahwa dari 27 indikator kinerja terdapat 16 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih sehingga dapat dikatakan efisiensi. Sementara itu, 11 indikator kinerja lainnya memiliki capaian di bawah 100% sehingga tidak dapat diakui efisiensi. Adapun indikator kinerja yang memiliki efisiensi paling tinggi adalah Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar 64,06%, diikuti dengan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar 43,71%, dan Indeks Kesehatan sebesar 42,92%. Sementara itu, Indeks Ketentraman dan Ketertiban memiliki efisiensi relatif kecil sebesar 7,56%. Namun, efisiensi tersebut tidak hanya efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja tetapi juga karena efisiensi yang disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.

Oleh karena itu, efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Balikpapan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70.16	69.06	98.43%	221,161,895,430	184,932,806,019	83.62%	15.05%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	81.75	82.068	100.39%	122,325,166,463	109,482,020,496	89.50%	10.85%	Efisien
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30.46%	26.90%	88.31%	63,687,040,252	52,149,064,377	81.88%	7.28%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
		Indeks SPBE	Poin	3.8	3.96	104.21%	46,766,332,000	40,187,701,050	85.93%	17.54%	Efisien
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	20,672,936,009	17,660,313,680	85%	15%	Efisien
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.76	0.68*	89.47%	24,114,241,807	21,337,040,724	88.48%	1.11%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83.81	84.93	101.34%	385,136,436,121	332,428,145,010	86.31%	14.82%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7690	0.7622	99.12%	1,036,013,737,444	821,045,158,768	79.25%	20.04%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8462	0.8595	101.57%	672,927,686,848	390,113,372,271	57.97%	42.92%	Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	14.72	15.33	104.14%	14,173,181,377	12,600,350,866	88.90%	14.63%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.082	0.209	254.88%	50,533,196,355	46,284,566,721	91.59%	64.06%	Efisien
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4964	0.4956	99.84%	6,471,990,000	6,306,861,238	97.45%	2.39%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.89%	90.80*	99.90%	38,462,234,005	34,923,358,198	90.80%	9.11%	Tidak diakui efiseiensi karena capaian tidak tercapai
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	79.12	81.62	103.16%	1,228,655,029,058	1,136,738,871,276	92.52%	10.31%	Efisien
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99.55%	99.85%	100.30%	46,164,017,450	38,033,371,495	82.39%	17.86%	Efisien
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.31	68.4	100.13%	186,379,894,448	172,514,468,263	92.56%	7.56%	Efisien
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.6%	96.85%	108.09%	43,118,609,800	33,152,367,394	76.89%	28.87%	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	103	101.43	101.52%	49,913,520,000	46,838,311,654	93.84%	7.57%	Efisien
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8575	0.85	99.13%	104,463,720,278	90,793,434,820	86.91%	12.32%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	20.21%	19.23%	95.15%	25,848,510,879	23,844,614,098	92.25%	3.05%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6%	6.22%	96.33%	12,049,285,409	10,699,657,763	88.80%	7.82%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
		Tingkat Kemiskinan	%	2.23%	2.23%	100%	20,801,288,788	18,773,702,991	90%	9.75%	Efisien
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	20.1	25.705	128.01%	16,501,892,697	14,547,221,901	88.15%	31.14%	Efisien
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89	87.35	98.15%	28,567,651,100	26,263,094,735	91.93%	6.33%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2.70	2.67	98.89%	16,726,422,421	15,549,771,647	92.97%	5.99%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	35.20%	38.57%	109.57%	2,832,427,600	2,670,171,927	94.27%	13.97%	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.8%	9.77%	168.45%	61,515,865,676	58,325,836,819	94.81%	43.71%	Efisien

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis
Sumber : Bagian Organisasi dan BKAD Kota Balikpapan, diolah 2025

2.3.2 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 69 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Prestasi dan Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
1	Panji Keberhasilan Bid. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
2	Panji Keberhasilan Bid. Kepariwisataan Dan Ekraf Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
3	Panji Keberhasilan Bid. Apresiasi Bunda PAUD	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
4	Panji Keberhasilan Bid. Kesehatan Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
5	Panji Keberhasilan Bid. Pembangunan Ketenagakerjaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
6	Panji Keberhasilan Bid. Kepemudaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
7	Panji Keberhasilan Bid. Keolahragaan.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
8	Panji Keberhasilan Bid. Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
9	Panji Keberhasilan Bid. Penyelenggaraan Air Minum.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
10	Panji Keberhasilan Bid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
11	Panji Keberhasilan Bid. Daya Saing Daerah.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
12	Panji Keberhasilan Bid. Penyelenggaraan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
13	Panji Keberhasilan Bid. Pembangunan IPTEK dan Inovasi.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
14	Panji Keberhasilan Bid. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kategori Kota.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
15	Panji Keberhasilan Bid. Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kota.	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
16	Panji Keberhasilan Bid. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
17	Panji Keberhasilan Bid. Pemberdayaan Masy Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
18	Terbaik Kedua Bidang Hukum dan HAM	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
19	Terbaik Kedua Bidang Sektor Perdagangan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
20	Terbaik Kedua Bidang Sektor Koperasi dan UKM	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
21	Terbaik Kedua Bidang Perhubungan Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
22	Terbaik Kedua Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
23	Terbaik Kedua Bidang Lingkungan Hidup	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
24	Terbaik Kedua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
25	Terbaik Kedua Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
26	Terbaik Kedua Bidang Ketertiban Umum, Ketetraman Masyarakat & Perlindungan Masyarakat Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
27	Terbaik Kedua Bidang Sektor Industri	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
28	Terbaik Ketiga Bidang Informatika	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
29	Terbaik Ketiga Bidang Hilirisasi Peternakan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
30	Terbaik Ketiga Bidang Sektor Dekranasda	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
31	Terbaik Ketiga Bidang Pendidikan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
32	Terbaik Ketiga Bidang Kebudayaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
33	Terbaik Ketiga Bidang Perpustakaan & Peningkatan Literasi Masyarakat	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
34	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelangaraan Pelayanan Publik	Nasional	Ombudsman RI	SEKDA
35	Adipura Kencana Tahun 2023	Nasional	KEMENTRIAN KLHK	Wali Kota
36	Peringkat 10 (Sepuluh) dalam Ajang JDIH Award Tahun 2024	Provinsi	pemerintah provinsi kaltim	Wali Kota
37	Penghargaan MURI Atas Pencapaian Luar Biasa Para Siswa dan Guru Di Kota Balikpapan dalam Menciptakan Buku Antologi Terbanyak di Indonesia.	Nasional	Museum Rekor Inonesia	Staf Ahli SDM
38	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Nasional	BPK Perwakilan Kaltim	Wali Kota
39	Manggala Karya Kencana	Nasional	BKKBN	Ketua TP PKK
40	Pembina Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Nasional	Kementerian LHK	Wali Kota
41	ASKOMPSI Digital *Leadership Government Award* 2024	Nasional	ASKOMPSI	SEKDA
42	Penghargaan Kepala Daerah yang Mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Nasional	Kementerian LHK	Wali Kota
43	Penghargaan *Universal Health Coverage* Kategori Utama	Nasional	BPJS	Wali Kota
44	Wahana Tata Nugraha Tahun 2024 Kategori Kota Besar	Nasional	Kementerian Perhubungan	Kepala Dishub

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
45	Penghargaan Atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2023	Nasional	Komisi ASN	SEKDA
46	Penghargaan untuk Posyandu Nusa Indah Kategori Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2024	Nasional	Kementerian Kesehatan	Kepala DKK
47	*Green Leadership* Nirwasita Tantra Tahun 2023	Nasional	Kementerian LHK	Wali Kota
48	Puskesmas Margomulyo Juara 3 Nasional Puskesmas Berkomitmen dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN	Nasional	Kementerian Kesehatan	Kepala Puskesmas Margomulyo
49	Kota Terbaik dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024	Nasional	Menteri Koordinator Perekonomian	Wali Kota
50	Wali Kota Berjasa di Bidang Pendidikan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Wali Kota
51	Adiwiyata Mandiri dan Nasional untuk 25 Sekolah di Balikpapan	Nasional	Kementerian LHK dan Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Kepala DLH dan Kepala Disdikbud
52	Adiwiyata Mandiri Kategori Terbaik untuk SDN 019 Balikpapan Barat	Nasional	Kementerian LHK dan Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Kepala DLH dan Kepala Disdikbud
53	Peringkat III Lembaga Terbina Kategori Pemerintah	Provinsi	Kantor Bahasa Provinsi Kaltim	Pjs. Wali Kota
54	Penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik	Nasional	Kementerian PAN-RB	Pjs. Wali Kota
55	Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim	TP PKK
56	Piagam Apresiasi Kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk Komitmen Pengolahan Susut dan Sisa Pangan	Nasional	BAPPENAS	Staf Ahli Bidang Ekbang
57	Penghargaan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Nasional	ADINKES	Pjs. Wali Kota

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
58	Inovasi Layanan Digital Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Nasional	Perpustakaan Nasional RI	Disputakar
59	Koperasi Modern Tahun 2024	Provinsi	Pemprov Kaltim	Koperasi Beriman
60	Tenaga Kesehatan Teladan	Provinsi	Pemprov Kaltim	7 Nakes dari 7 Puskesmas di Kota Balikpapan
61	Kabupaten/Kota Peduli HAM	Nasional	Kementerian HAM	
62	Terbaik Ketiga Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Asisten Ekbangkesra
63	Peringkat 3 Jasa Konstruksi	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Dinas PU
64	Indeks Pangan Terbaik dan Partisipasi Aktif Penyusunan Peta FSVA	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Ka DP3AKB
65	*Finalis One Planet City Challenge*	Internasional	WWF	Ka DLH
66	Juara Umum Porprov Korpri Ke III Provinsi Kaltim Tahun 2024	Provinsi	KORPRI Provinsi Kaltim	Wakil Ketua Bapor KORPRI Balikpapan
67	Opini "Kualitas Tertinggi"/Zona Hijau	Nasional	Ombudsman RI	Wali Kota
68	Peringkat Pertama Inovasi Simpananku Kopi Kategori Kabupaten/Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPMPTSP
69	Daerah Pelopor Kategori Maju	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2025

Adapun beberapa dokumentasi Kegiatan Penerimaan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai berikut ini:

Tabel 2.19
Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN		NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1		1	Panji Keberhasilan bid. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Balikpapan meraih penghargaan sebagai kota terbaik pertama dengan jumlah panji keberhasilan pembangunan terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 17 Panji Keberhasilan. Penghargaan Panji diberikan oleh Pemprov Kaltim sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota atas peningkatan kinerja, pencapaian prestasi, serta pelaksanaan program pembangunan dan pemerintahan. Panji keberhasilan pembangunan diserahkan dalam rangkaian Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Kalimantan Timur. Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, secara langsung menyerahkan bendera panji keberhasilan kepada bupati/wali kota perwakilan tiap daerah. *Sumber: https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pembangunan/kembali-jadi-kota-peraih-panji-keberhasilan-tertinggi-rahmad-masud-ini-untuk-masyarakat*
		2	Panji Keberhasilan bid. Kepariwisataan dan ekraf kategori kota	
		3	Panji Keberhasilan bid. Apresiasi Bunda PAUD.	
		4	Panji Keberhasilan bid. Kesehatan kategori Kota.	
		5	Panji Keberhasilan bid. Pembangunan ketenagakerjaan, dst	
2			Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan Zona Hijau Opini Kualitas Tertinggi dengan nilai 95,57 Kategori A dari Ombudsman RI terkait Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi pelaksana layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
			pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan publik. Penghargaan ini menempatkan Kota Balikpapan sebagai Kota dengan skor Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tertinggi di Kalimantan Timur. *Sumber: unggahan akun instagram @bag.organisasi.balikpapan*
3		Adipura Kencana Tahun 2023	Kota Balikpapan kembali meraih Piala Adipura Kencana Tahun 2023 yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI. Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud, SE,ME menerima langsung Piala supremasi tertinggi di bidang kebersihan tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma'ruf Amin dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. *Sumber: https://dlh.balikpapan.go.id/berita/5378/kota-balikpapan-kembali-meraih-penghargaan-adipura*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
4		Peringkat 10 (sepuluh) dalam ajang JDIH Award Tahun 2024	Pemerintah Kota Balikpapan meraih peringkat 10 (sepuluh) dalam ajang JDIH Award Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023, Pengelola JDIH Kota Balikpapan meraih peringkat 10 untuk Pengelolaan JDIH Tingkat Kota, Kategori Eka Acalapati dengan perolehan nilai 91. *Sumber: https://jdih.balikpapan.go.id/v2/detail-berita/319*
5		Penghargaan MURI atas pencapaian luar biasa para siswa dan guru di Kota Balikpapan dalam menciptakan buku antologi terbanyak di Indonesia.	Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mencatat Kota Balikpapan sebagai pemecahan rekor atas hasil karya sekolah buku antologi terbanyak di Indonesia. Festival literasi Balikpapan tahun 2023 yang ketiga kali digelar, salah satu rangkaian acaranya memecahkan rekor muri. Dari hasil program festival literasi itu sendiri menghasilkan pencapaian karya prestasi dari siswa dan guru, dengan membuat buku antologi yang berisi cerpen, puisi dan lain sebagainya yang dirangkum menjadi satu dan dibukukan sehingga menghasilkan 581 buku antologi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Marketing MURI, Awan Rahargo kepada Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Balikpapan, Adamin Siregar, mewakili Wali Kota

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
			Balikpapan H Rahmad Mas'ud, pada Puncak Festival Literasi Balikpapan Tahun 2023, di Gedung Kesenian Balikpapan, pada hari Kamis, 18 April 2024. *Sumber: https://ibukotakini.com/read/luar-biasa-disdikbud-balikpapan-pecahkan-rekor-muri*
6		Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023	Pemerintah Kota Balikpapan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Opini BPK tersebut diberikan berdasarkan pada kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Balikpapan telah berhasil meraih opini WTP sejak tahun 2013 secara berturut-turut sampai tahun 2024. *Sumber: https://web.balikpapan.go.id/berita/read/9571*
7		MANGGALA KARYA KENCANA	Pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2024, Ketua Tim Penggerak PKK Balikpapan, Hj. Nurlena Rahmad Mas'ud, menerima penghargaan Anugerah Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kerja keras Nurlena Rahmad Mas'ud dalam membangun keluarga yang berkualitas di Kota Balikpapan. Nurlena Rahmad Mas'ud menerima penghargaan langsung dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti S. *Sumber:*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
			https://web.balikpapan.go.id/berita/read/9643
8		Pembina program kampung iklim (PROKLIM)	Dalam Upaya Pencegahan Perubahan Iklim melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pemerintah Kota Balikpapan telah meraih 3 (tiga) Kategori Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tiga Kategori tersebut meliputi:1. Pemerintah Kota Balikpapan menerima Apresiasi sebagai Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) 2. Kelurahan Muara Rapak menerima Penghargaan Proklim Lestari3. Penghargaan Proklim Pratama diberikan kepada 10 Lokasi Proklim: 1. Proklim PRATAMA Gunung Bahagia (terdiri dari: RT 35, RT 36, RT 37, RT 38, RT 39) 2. Proklim SUMBER REJO I (terdiri dari: RT 40, RT 11, RT 32, RT 57, RT 10, RT 31) 3. Proklim KOMPAK Gunung Sari Ulu (terdiri dari: RT 29, RT 30, RT 38, RT 40, RT 41) 4. Proklim MARI BERDASI Mekar Sari (terdiri dari: RT 11, RT 21, RT 17, RT 22, RT 27) 5. Proklim KARAMUNTING Telaga Sari (terdiri dari: RT 45, RT 38, RT 24, RT 36, RT 37) 6. Proklim BERIMAN Prapatan (terdiri dari: RT 27, RT 32, RT 33, RT 34, RT 35) 7. Proklim Gurinda Berseri (terdiri dari: RT 38, RT 52, RT 53, RT 40, RT 54) 8. Proklim Karang Rejo Lestari (terdiri dari: RT 70, RT 78, RT 79, RT 80, RT 81) 9. Proklim Seraya Mandiri I Sepinggan Raya (terdiri dari: RT 14. RT 28, RT 23, RT 13) 10. Proklim Seraya Mandiri II Sepinggan Raya (terdiri dari: RT 23, RT 12, RT 27, RT 11, RT 05, RT 22, RT 13). *Sumber: https://dlh.balikpapan.go.id/berita/5426/pemerintah-kota-balikpapan-berhasil-meraih-3-tiga*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
9		ASKOMPSI DIGITAL LEADERSHIP GOVERNMENT AWARD 2024	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan masuk nominasi tiga besar Sekretaris Daerah kategori Kota. Penghargaan ini adalah bentuk dari apresiasi kepada Sekretaris Daerah yang berkinerja digital, dengan menerapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Penilaian berdasarkan personil Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan transformasi digital yang ada di Kota Balikpapan serta selaku koordinator SPBE. Penilaian tersebut terutama dalam pelayanan publik yang bersifat digital, diantaranya ada aplikasi Disdukcapil, sistem perizinan berbasis online, pelayanan Disnaker, Puskesmas, maupun yang sedang berjalan saat ini seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online serta aplikasi e-Manuntung. *Sumber: https://web.balikpapan.go.id/berita/read/9642*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
10		PENGHARGAAN KEPALA DAERAH YANG MENDUKUNG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH	Wali Kota Balikpapan, Bapak Rahmad Mas'ud, SE, M.E, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah yang mendukung dan peduli terhadap budaya lingkungan hidup di sekolah. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk komitmen dalam menanamkan kesadaran lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan Kepala Daerah yang mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata) dengan capaian luar biasa, yaitu 80,1% sekolah di Kota Balikpapan telah mencapai status Sekolah Adiwiyata pada berbagai tingkatan. Pencapaian ini diwujudkan melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. *Sumber: https://dlh.balikpapan.go.id/berita/5428/pemerintah-kota-balikpapan-meraih-penghargaan-kepa*
11		PENGHARGAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* KATEGORI UTAMA	Pemerintah Kota Balikpapan berhasil memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 dalam kategori utama. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk atas komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. *Sumber: https://www.inibalikpapan.com/peduli-*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
			kesehatan-pemkot-balikpapan-raih-uhc-2024-kategori-utama/
12	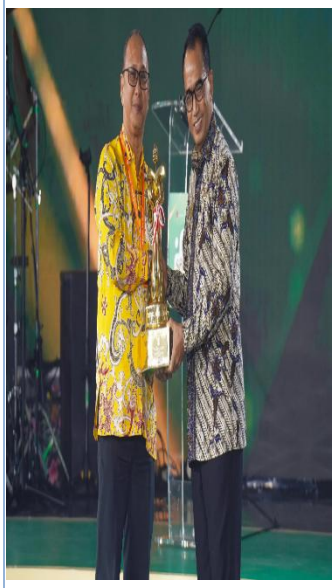	WAHANA TATA NUGRAHA TAHUN 2024 KATEGORI KOTA BESAR	Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024, kepada sejumlah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang telah menunjukkan dedikasi dan keberhasilan dalam pengelolaan sistem transportasi yang baik, aman, tertib, dan berkelanjutan.Wali Kota Balikpapan, Adwar Skendar Putra mewakili Wali Kota Balikpapan menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 untuk kategori Kota Besar. S*umber:* *https://www.balpos.com/metropolis/1795076060/pemkot-balikpapan-raih-penghargaan-wahana-tata-nugraha-wtn-2024-untuk-kategori-kota-besar*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
13		PENGHARGAAN UNTUK POSYANDU NUSA INDAH KATEGORI POSYANDU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024	Kota Balikpapan meraih penghargaan dengan Kategori Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan dari Kementerian Kesehatan pada Jambore Kader Tingkat Nasional Tahun 2024 yang diraih oleh Posyandu Nusa Indah RT 44 Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Sumber: https://www.instagram.com/dinkes_balikpapan/p/C__-BaUzUXj/?img_index=2*
14		GREEN LEADERSHIP NIRWASITA TANTRA TAHUN 2023	Wali Kota Balikpapan meraih *Green Leadership* Nirwasita Tantra Tahun 2023. Penghargaan Nirwasita Tantra merupakan bentuk apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada para Kepala Daerah yang memiliki kebijakan dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD Balikpapan juga mendapat penghargaan sebagai unsur pimpinan dalam kategori sedang. *Sumber: unggahan akun instagram @dlhbalikpapan, 18 September 2024*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
15		PUSKESMAS MARGOMULYO JUARA 3 NASIONAL PUSKESMAS BERKOMITMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN	Puskesmas Margomulyo berhasil meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional sebagai fasilitas kesehatan berkomitmen dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2024. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Puskesmas Margomulyo, dr. Dekrita Ria Hanani, dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 19 September. *sumber:* - *https://www.instagram.com/dinkes_balikpapan/p/DAF6CwjSNlp/* - *https://www.balpos.com/kecamatan/1795114389/puskesmas-margomulyo-raih-juara-3-fasilitas-kesehatan-berkomitmen-tingkat-nasional-2024*
16		Kota Terbaik dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024	Balikpapan dianugerahi penghargaan sebagai Kota Terbaik dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024.Pengakuan ini diberikan karena Balikpapan dinilai sukses mengimplementasikan digitalisasi layanan secara efektif sepanjang tahun 2024.*sumber: https://swarakaltim.com/2024/09/24/walikota-menerima-penghargaan-kota-terbaik-dalam-tim-percepatan-dan-perluasan-digitalisasi-daerah-tp2dd-2024/*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
17		WALI KOTA BERJASA DI BIDANG PENDIDIKAN	Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E., berhasil meraih penghargaan sebagai Wali Kota berjasa di bidang pendidikan dalam ajang Kaltim Education Awards (KEA) 2024. Kaltim Education Awards 2024 merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur yang telah berkontribusi dalam pengembangan pendidikan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi muda.*Sumber: https://disdikbudbalikpapan.id/wali-kota-balikpapan-h-rahmad-masud-terima-penghargaan-di-ajang-kaltim-education-awards-2024#:~:text=Balikpapan%2C%2023%20September%202024%20%E2%80%93%20Wali,Education%20Awards%20(KEA)%202024*
18		ADIWIYATA MANDIRI DAN NASIONAL UNTUK 25 SEKOLAH DI BALIKPAPAN	Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penghargaan Adiwiyata yang diterima terbagi ke dalam dua kategori, yakni Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri. Dari total 25 sekolah di Balikpapan yang berhasil meraih penghargaan ini, 13 sekolah masuk ke kategori Adiwiyata Nasional, sementara 12 sekolah lainnya masuk ke kategori Adiwiyata Mandiri. Balikpapan juga dinyatakan sebagai kota dengan jumlah sekolah Adiwiyata terbanyak di Kalimantan Timur. *Sumber: https://dlh.balikpapan.go.id/berita/543*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
			5/penyerahan-penghargaan-adiwiyata-mandiri-dan-adiwi
19		Peringkat III Lembaga Terbina Kategori Pemerintah	Kota Balikpapan menerima 2 penghargaan dari Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan “Apresiasi Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2022-2024 Wilayah Kota Balikpapan.” 2 Kategori penghargaan yang diperoleh yakni, Kategori Lembaga Terbina (Sekretariat Daerah) serta Kategori Lembaga Pemerintah Daerah yang Mengutamakan Bahasa Negara dalam Laman (Website) resmi. *Sumber: unggahan akun instagram @bag.organisasi.balikpapan*
20		Penghargaan penyelenggara inovasi pelayanan publik terbaik	Pemerintah Kota Balikpapan meraih penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam acara Gebyar Pelayanan Prima. Penghargaan diterima oleh Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir yang turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, Kepala Bappeda Litbang, Murni dan Kepala DPMPTSP, Hasbullah Helmi. *Sumber: unggahan akun instagram @bag.organisasi.balikpapan*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
21	 	JUARA UMUM LOMBA MASAK SERBA IKAN	TP PKK Kota Balikpapan berhasil meraih Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kampanye gerakan memasyarakatan makan ikan (Gemarikan).Pada kegiatan ini TP PKK Kota Balikpapan berhasil memenangkan 2 dari 3 kategori yang dilombakan, yaitu menu balita dan kudapan.*Sumber: https://www.instagram.com/pemkot_balikpapan/p/DA5gtcfhpym/?img_index=1*
22		Piagam Apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk Komitmen Pengolahan Susut dan Sisa Pangan	Kota Balikpapan menerima Sertifikat Apresiasi atas komitmen dalam pengelolaan susut dan sisa pangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada acara Launching Buku "Teladan Bijak Kelola Susut dan Sisa Pangan " dan Apresiasi Pemerintah Daerah dalam Komitmen Penyelamatan Pangan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Bappenas kepada Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung upaya pengelolaan sisa pangan dengan terbitnya Surat Edaran Wali Kota Balikpapan nomor 526/0449/DP3 tentang Gerakan Selamatkan Pangan. *Sumber: https://www.instagram.com/dp3_balikpapan/p/DBh2wCXzm2A/?img_index=1*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
23		PENGHARGAAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)	Kota Balikpapan meraih Penghargaan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir, S.T.,M.Si. menerima langsung penghargaan tersebut dalam kegiatan Pentaloka Nasional Adinkes Tahun 2024. *Sumber: https://www.instagram.com/dinkes_balikpapan/p/DCAvnf2TOgK/?img_index=1*
24		Inovasi Layanan Digital Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan meraih penghargaan sebagai Inovasi Layanan Digital Terbaik 2024 di tingkat nasional. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Pertemuan Pembelajaran Sebaya Tingkat Nasional (Peer Learning Meeting Nasional 2024). Kegiatan ini diadakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). Penghargaan diterima oleh Pustakawan Terampil Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Darto Pramono. *Sumber: https://www.balpos.com/pemkot-balikpapan/1795292140/disputakar-kota-balikpapan-terima-penghargaan-inovasi-layanan-digital-terbaik-2024*
25		Koperasi Modern Tahun 2024	Koperasi KORPRI Beriman meraih penghargaan Koperasi Modern dan UMKM Digital dalam kegiatan festival hari koperasi dan UMKM Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.Prestasi ini menjadi bukti komitmen dan inovasi dalam mendukung perkembangan ekonomi

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
			digital.*Sumber: https://www.instagram.com/dkumkmp_bpn/reel/DCJQJqzPuQb/*
26		Tenaga Kesehatan Teladan	1. Tenaga Kesehatan Teladan Dokter Gigi Puskesmas Tingkat Provinsi - drg. A. Irnawati (Puskesmas Margasari) 2. Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Keformasian Puskesmas Tingkat Provinsi - apt. Endah Ayu Prawitasari, S.Farm (Puskesmas Sepinggan) 3. Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik Puskesmas Tingkat Provinsi - Maria Ulfa, Amd.Kes (Puskesmas Karang Joang) 4. Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Bidan Puskesmas Tingkat Provinsi - Marisa Umami, A.Md.Keb (Puskesmas Muara Rapak) 5. Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Promotor Kesehatan Puskesmas Tingkat Provinsi - Cahyaningtias Perwitasari H, S.K.M (Puskesmas Margo Mulyo) 6. Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Gizi Puskesmas Tingkat Provinsi - Rahas Swastiratu.O, A.Md.Gz (Puskesmas Margo Mulyo) 7. Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Sanitasi Lingkungan Puskesmas Tingkat Provinsi - Dea Andreani, A.Md. Kes (Puskesmas Batu Ampar) *Sumber: https://www.instagram.com/dinkes_balikpapan/p/DCT2312zy9S/?img_index=1*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
27		Kabupaten/Kota Peduli HAM	Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan Piagam Penghargaan kepada Kota Balikpapan yang telah Mendapatkan Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023. *Sumber: https://www.instagram.com/p/DD8V-PxPL7n/?img_index=1*
28		Terbaik Ketiga Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah Kota Balikpapan meraih peringkat ketiga dalam upaya penurunan stunting.
29		Indeks Pangan Terbaik dan Partisipasi Aktif Penyusunan Peta FSVA	Balikpapan sukses menerima penghargaan sebagai kota dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terbaik di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Tahun 2024, berkat capaian IKP sebesar 91,23 dan keterlibatan aktif dalam penyusunan peta Food Security Vulnerability Atlas (FSVA). Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil penilaian tahunan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pangan TPH Provinsi Kalimantan Timur. *Sumber: https://www.instagram.com/dp3_balikpapan/p/DDMVHMrP6tx/?img_index=1*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
30		Finalis *One Planet City Challenge*	Balikpapan resmi menjadi *National Finalist* dalam ajang *One Planet City Challenge* (OPCC) 2024. Sebuah pengakuan atas komitmen dan upaya kota kita menuju keberlanjutan, inovasi, dan masa depan yang lebih hijau. Kepala DLH Kota Balikpapan, Bp. Sudirman Djayaleksana, mewakili Wali Kota Balikpapan Bp. Rahmad Mas'ud, menerima penghargaan untuk Kota Balikpapan dalam agenda *One Planet City Challenge* (OPCC) 2024 ini oleh *World Wide Foundation* (WWF). *Sumber: https://www.instagram.com/dlhbalikpapan/p/DDM0Oy0vCx8/?img_index=3*
31		Juara Umum PORPROV KORPRI KE III Provinsi Kaltim Tahun 2024	Balikpapan sukses meraih gelar juara umum pada Porprov III Korpri 2024 dengan perolehan 10 medali emas, 10 medali perak, dan 7 medali perunggu. Cabang olahraga (cabor) yang berhasil meraih medali emas antara lain satu dari catur, satu dari senam, tiga dari pickleball, dua dari tenis meja, dua dari bulutangkis, dan satu dari voli putra. *Sumber: https://www.balpos.com/balikpapan/1795401186/balikpapan-juara-umum-porprov-iii-korpri-2024-fokus-pengembangan-atlet-muda#:~:text=%22Alhamdulillah%20enam%20kali%20turnamen%20Porprov,8%2F12%2F2024).*
32		Peringkat Pertama Inovasi SIMPANANKU KOPI Kategori Kabupaten/Kota	Inovasi Simpananku Kopi berhasil meraih Juara 1 Kategori PKP pada kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan. *Sumber: https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp/p/CwpLpD6PKmg/?img_index=2*

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
33			Disdikbud Balikpapan terpilih sebagai Daerah Pelopor Kategori Maju oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kesuksesan Kota Balikpapan dalam menerapkan transformasi digital untuk pembelajaran yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan, yang secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. *Sumber: https://disdikbudbalikpapan.id/disdikbud-balikpapan-raih-penghargaan-daerah-pelopor-kategori-maju-dari-kemdikbudristek*

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2024

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian tugas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pada Tahun Anggaran 2024, **Pemerintah Kota Balikpapan tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hasil dari Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai berikut:

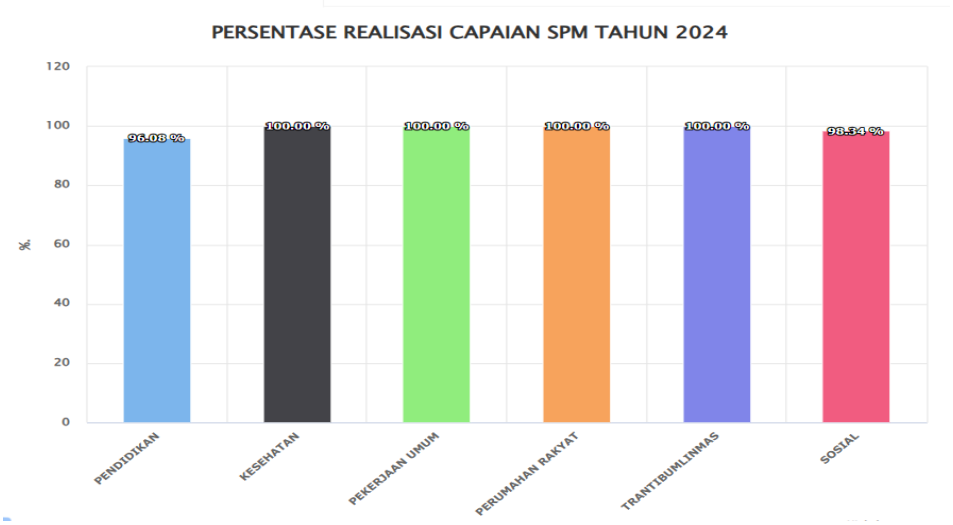

Sumber data: *screenshoot* aplikasi E-SPM (*https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home*)

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Pendidikan terdiri atas:

1. Pendidikan Usia Dini
2. Pendidikan Usia Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar	100%

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
	dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

4.1.3 Realisasi

Realisasi dalam pelaksanaan SPM pada urusan Pendidikan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Pelaksanaan SPM urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					96.08 %
1	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**					97.28 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Yang Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**77.39 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	14.856	14.371	-485	96.74 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						**19.89 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Mutu Yang Harus Dilayani**	**Mutu Yang Terlayani**	**Mutu Yang Belum Terlayani**	99.44 %
1	Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
2	Angka partisipasi murni	%	41,17	47,68	-6,51	100%
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	72,03	69,12	2,91	95.96 %
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	82,92	82,06	-0,86	98.96 %
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2,63	6	-3,37	100%
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100%
7	Indeks distribusi guru	%	0,4	0,8	-0,64	100%
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	13,51	61,15	-47,64	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
9	Proporsi PTK penggerak*	%	1,23	4,76	-3,53	100%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada urusan pendidikan di Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BALIKPAPAN	4,216,527,031,827
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	951,971,066,212
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	951,971,066,212
	APBD	951,971,066,212
	A. APBD MURNI	725,934,197,212
	B. APBD DAU	16,267,964,000
	C. APBD DAK FISIK	18,022,500,000
	D. APBD DAK NON FISIK	191,746,405,000

Tabel 4.4 Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				481,350,995,753	446,452,824,165	92.75 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				481,350,995,753	446,452,824,165	92.75 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629			183,961,523,710	178,650,397,387	97.11 %
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	274,513,700	5,046,060	1.84 %
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	50,000,000	47,117,100	94.23 %
		3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	333,238,000	309,834,902	92.98 %
		4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,500,000,000	1,483,747,384	98.92 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	600,000,000	589,896,592	98.32 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	600,000,000	589,381,012	98.23 %
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	600,000,000	592,666,113	98.78 %
		8	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,000,000,000	989,487,215	98.95 %
		9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1,000,000,000	991,984,468	99.20 %
		10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	149,999,700	130,995,200	87.33 %
		11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	15,658,000,000	15,444,853,826	98.64 %
		12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,517,700,200	1,395,607,749	91.96 %
		13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	7,830,000,000	7,685,655,829	98.16 %
		14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,229,055,900	1,067,667,569	86.87 %
		15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	96,128,289,400	93,539,669,939	97.31 %
		16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	500,000,000	500,000,000	100.00 %
		17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	794,231,600	725,460,878	91.34 %
		18	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	166,999,790	140,616,600	84.20 %
		19	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	11,699,999,300	11,605,611,505	99.19 %
		20	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	5,010,996,000	3,974,600,344	79.32 %
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4,581,465,620	4,282,598,393	93.48 %
		22	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	29,186,672,500	29,042,825,880	99.51 %
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,550,362,000	3,515,072,829	99.01 %
	JUMLAH INDIKATOR				**183,961,523,710**	**178,650,397,387**	**97.11 %**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647**			**219,367,260,743**	**196,517,975,016**	**89.58 %**
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	66,300,000,000	60,064,159,227	90.59 %
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1,010,244,784	1,001,267,098	99.11 %
		3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1,200,000,000	967,365,274	80.61 %
		4	Pembangunan Laboratorium	Ruang	3,859,790,488	2,983,451,703	77.30 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	6,441,736,786	6,073,460,716	94.28 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2,498,010,860	2,257,824,629	90.38 %
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	215,895,474	214,095,969	99.17 %
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1,049,795,122	849,955,969	80.96 %
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2,601,538,034	2,579,178,806	99.14 %
		10	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2,200,000,000	2,123,440,169	96.52 %
		11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	300,000,000	270,750,000	90.25 %
		12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,600,000,000	1,353,436,568	84.59 %
		13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	9,044,750,000	6,026,526,915	66.63 %
		14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,000,000,000	743,446,453	74.34 %
		15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	63,245,686,743	55,011,967,229	86.98 %
		16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	300,000,000	286,559,945	95.52 %
		17	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	389,860,000	195,864,000	50.24 %
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	34,637,360,000	34,567,527,923	99.80 %
		19	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	10,000,000,000	7,886,594,185	78.87 %
		20	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	11,300,000,000	10,890,775,324	96.38 %
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Ruang	172,592,452	170,326,914	98.69 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Guru/Kepala Sekolah/TU				
	JUMLAH INDIKATOR				**219,367,260,743**	**196,517,975,016**	**89.58 %**
	3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412**			**44,692,949,500**	**39,707,237,835**	**88.84 %**
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	406,937,000	353,865,731	86.96 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	180,000,000	177,065,926	98.37 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	448,617,500	441,499,964	98.41 %
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	2,675,000,000	2,658,451,802	99.38 %
		5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	11,447,500,000	11,239,422,218	98.18 %
		6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	247,555,000	247,000,000	99.78 %
		7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	16,502,600,000	12,880,184,724	78.05 %
		8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	2,324,800,000	2,097,917,338	90.24 %
		9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	10,219,940,000	9,384,967,132	91.83 %
		10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	110,000,000	98,967,250	89.97 %
	JUMLAH INDIKATOR				**44,692,949,500**	**39,707,237,835**	**88.84 %**
	4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444**			**33,329,261,800**	**31,577,213,927**	**94.74 %**
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	1,303,655,000	1,138,622,628	87.34 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	17,536,400,000	16,350,940,017	93.24 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	760,220,000	472,968,822	62.21 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	3,664,350,000	3,664,350,000	100.00 %
		5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	100,000,000	91,565,200	91.57 %
		6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	100,000,000	97,825,750	97.83 %
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	7,162,000,000	7,133,221,420	99.60 %
		8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	300,000,000	299,100,000	99.70 %
		9	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,740,000,000	1,674,809,823	96.25 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	662,636,800	653,810,267	98.67 %
	JUMLAH INDIKATOR				**33,329,261,800**	**31,577,213,927**	**94.74 %**
	JUMLAH PROGRAM				**481,350,995,753**	**446,452,824,165**	**92.75 %**

4.1.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2024 pada urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Personil SPM Urusan Pendidikan

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1. Kepala Dinas	1
2. Sekretaris	1
3. Kepala Bidang	3
4. Kepala Seksi	0
5. Kepala Sub Bagian	1
6. Kepala UPT	0
7. Kepala TU	0
8. Ketua Tim Kerja	11
9. Pengawas	30

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
10. Penilik	1
11. Administrator/Fungsional/Staff	39
12. JOLP	0
13. Guru	6314
14. Jasa Keamanan	3
15. Jasa Kebersihan	4
16. Naban	25

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut permasalahan dan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada SPM urusan Pendidikan.

Tabel 4.6 Permasalahand dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Data anak usia sekolah yang tidak bersekolah tidak terdata di Sekolah Formal maupun NonForma; 2. Data yang tersedia bersifat anomali; 3. Nomenklattur sub kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan permendikbud ttg SPM; 4. Mindset Bidang, kepsek dan guru terhadap inklusivitas terbatas pada anak2 inklusif saja 5. Faktor kekurangan guru dan tendik juga membuat kinerja tak maksimal; 6. Sarpras yang tak lengkap juga membuat keamanan dan inklusivitas kurang baik; 7. Faktor tak adanya kepsek definitif membuat kondusivitas sekolah tak	1. Pendataan yang Lebih Komprehensif yaitu Libatkan semua pihak: tidak hanya Dinas pendidikan tetapi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, RT/RW, dan puskesmas dalam proses pendataan; 2. Sosialisasi dan Edukasi dengan Pentingnya pendidikan: Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak; 3. Kemudahan akses pendidikan: Informasikan tentang berbagai jalur pendidikan yang tersedia, baik formal maupun non-formal, serta bantuan yang tersedia; 4. Kerja Sama dan Koordinasi yaitu dengan Kerjasama dan koordinasi antara dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya; 5. Identifikasi Peran dan Tanggung Jawab dala sektor tersebut dengan bertanggung jawab atas pendidikan agama Islam, termasuk madrasah dan pondok pesantren. Mereka memiliki data terkait siswa dan lembaga pendidikan Islam; 6. Koordinasi dan Komunikasi dengan Membangun tim koordinasi: Bentuk tim yang melibatkan perwakilan dari DRKA, Kanwil Kemenag, dan instansi terkait

PERMASALAHAN	SOLUSI
menjamin iklim keamanan.	lainnya. Tim ini akan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengumpulan data 7. Menetapkan mekanisme komunikasi: Buat saluran komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, seperti pertemuan rutin,Surel, atau platform daring.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan tahun 2024 di Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Target Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN	TARGET
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

4.2.3 Realisasi

Realisasi SPM bidang urusan kesehatan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut. Seluruh indikator telah mencapai target 100%.

Tabel 4. 8 Realisasi SPM Bidang urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				**100.00 %**
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**			**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10904	10926	-22	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	8723	8723	0	100.00 %
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1962720	1962720	0	100.00 %
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	10904	10926	-22	100.00 %
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1636	2746	-1110	100.00 %
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10904	10926	-22	100.00 %
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	727	727	0	100.00 %
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	342	558	-216	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
14	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	739	739	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selma periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10904	10926	-22	100.00 %
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10409	10441	**-32**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	100.00 %
1	Formulir partograf	Formulir	10409	10441	-32	100.00 %
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10409	10926	-517	100.00 %
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	10409	10926	-517	100.00 %
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	342	558	-216	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	739	739	0	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9913	10315	**-402**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	9913	10315	-402	100.00 %
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	9913	10315	-402	100.00 %
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	9913	10315	-402	100.00 %
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	9913	10315	-402	100.00 %
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	29739	30945	-1206	100.00 %
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10904	10926	-22	100.00 %
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	143	143	0	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	739	739	0	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	27	27	0	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
14	Kader Kesehatan	Orang	7500	7500	0	100.00 %
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	48775	51614	-2839	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	48775	51614	-2839	100.00 %
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	48775	51614	-2839	100.00 %
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	48775	51614	-2839	100.00 %
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4999	4999	0	100.00 %
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	33145	33145	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	9913	9913	0	100.00 %
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	9913	9913	0	100.00 %
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	10038	10038	0	100.00 %
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin	10038	10038	0	100.00 %
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	10038	10038	0	100.00 %
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	9884	9884	0	100.00 %
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	9884	9884	0	100.00 %
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	19965	59795	-39830	100.00 %
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	27	27	0	100.00 %
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	72	72	0	100.00 %
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	143	143	0	100.00 %
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	739	739	0	100.00 %
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
20	Guru PAUD	Orang	0	0	0	100.00 %
21	Kader Kesehatan	Orang	7500	7500	0	100.00 %
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	84246	101088	-16842	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku **(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)**	Buku	84246	101088	-16842	100.00 %
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)**	Buku	84246	101088	-16842	100.00 %
3	Kuesioner skrining kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)**	Dokumen	84246	101088	-16842	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)**	Formulir	84246	101088	-16842	100.00 %
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)**	Formulir	84246	101088	-16842	100.00 %
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah **(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)**	Tablet	2140840	2140840	0	100.00 %
7	Alat Pemeriksaan Hb **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)**	Alat	100	100	0	100.00 %
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	4580	4580	0	100.00 %
9	Media promosi kesehatan(Media khusus remaja sehat)	Paket	54	54	0	100.00 %
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	27979	29439	-1460	100.00 %
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	54	146	-92	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	414	414	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	7500	7500	0	100.00 %
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	313962	313965	-3	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100.00 %
2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	81	81	0	100.00 %
3	Alat : Tensimeter	Unit	135	135	0	100.00 %
4	Alat : Glukometer	Unit	54	54	0	100.00 %
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	100	100	0	100.00 %
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	313962	313965	-3	100.00 %
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	27	27	0	100.00 %
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	5000	5000	0	100.00 %
9	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	27	27	0	100.00 %
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	313962	313965	-3	100.00 %
11	Alat Pelayanan KB	Unit	135	135	0	100.00 %
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	108	108	0	100.00 %
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	12793	12793	0	100.00 %
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7500	7500	0	100.00 %
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	40450	41011	-561	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	27	28	-1	100.00 %
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	54	54	0	100.00 %
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	27	28	-1	100.00 %
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	40450	41011	-561	100.00 %
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	27	27	0	100.00 %
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	40450	41011	-561	100.00 %
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7500	7500	0	100.00 %
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	64603	64605	-2	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) **(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)**	Paket	27	27	**0**	**100.00 %**
2	Obat Hipertensi	Paket	64603	64605	**-2**	**100.00 %**
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	135	135	**0**	**100.00 %**
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	27	27	**0**	**100.00 %**
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(peningkatan pengetahuan masyarakat)**	Paket	54	54	**0**	**100.00 %**
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	**-81**	**100.00 %**
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	**-3**	**100.00 %**
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	**-18**	**100.00 %**
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	**-1**	**100.00 %**
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	27	27	**0**	**100.00 %**
11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	54	69	**-15**	**100.00 %**
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	**-1**	**100.00 %**
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17552	20253	**-2701**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	17552	20253	-2701	100.00 %
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	81	81	0	100.00 %
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	17552	20253	-2701	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	108	108	0	100.00 %
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	81	81	0	100.00 %
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27	33	-6	100.00 %
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	718	773	**-55**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)bentuk fisik atau elektronik)	Buku	27	27	0	100.00 %
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	718	773	-55	100.00 %
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	27	54	-27	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	27	27	0	100.00 %
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	54	54	0	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	108	126	-18	100.00 %
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	27	27	0	100.00 %
9	Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15184	18032	**-2848**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1500	1500	0	100.00 %
2	Reagen Zn TB	Kit	89	89	0	100.00 %
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	15184	15184	0	100.00 %
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	15184	15184	0	100.00 %
5	Katrid tes cepat molekuler	Test	15184	15184	0	100.00 %
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	2060	2060	0	100.00 %
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	10	10	0	100.00 %
8	Tuberkulin	Vial	200	200	0	100.00 %
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	117	117	0	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30	33	-3	100.00 %
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	30	30	0	100.00 %
15	Kader Kesehatan	Orang	34	34	0	100.00 %
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19275	22835	-3560	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5	5	0	100.00 %
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	14125	14125	0	100.00 %
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	19275	19275	0	100.00 %
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	1381	1381	0	100.00 %
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	35	132	-97	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	35	35	0	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	18	18	0	100.00 %

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM tahun 2024 Bidang Urusan Kesehatan Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BALIKPAPAN	4,216,527,031,827
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	611,690,996,133
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	8,883,536,726
	APBD	8,883,536,726
	A. APBD MURNI	4,825,000,000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	4,058,536,726

Tabel 4.10 Rincian Relasiasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				**8,883,536,726**	**8,122,468,399**	**91.43 %**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**8,883,536,726**	**8,122,468,399**	**91.43 %**
	1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**8,883,536,726**	**8,122,468,399**	**91.43 %**
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,024,594,000	901,973,924	88.03 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	719,942,000	600,588,260	83.42 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	564,111,210	476,344,890	84.44 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	400,000,000	383,630,000	95.91 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	760,500,000	707,111,750	92.98 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	625,000,000	563,090,730	90.09 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	400,000,000	354,322,100	88.58 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	250,000,000	218,241,700	87.30 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1,535,062,816	1,444,184,195	94.08 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	250,000,000	239,759,750	95.90 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,836,976,700	1,757,723,050	95.69 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	517,350,000	475,498,050	91.91 %
	JUMLAH INDIKATOR				**8,883,536,726**	**8,122,468,399**	**91.43 %**
	JUMLAH PROGRAM				**8,883,536,726**	**8,122,468,399**	**91.43 %**

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2024 pada bidang urusan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.11 Dukungan Personil SPM Urusan Kesehatan

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
Struktural	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3
Kepala Sub Bagian	2
Ketua Tim Kerja	7
Kepala Uptd	3
Kepala Sub Bagian Tu	29
Fungsional Tertentu	
Dokter	74
Dokter Gigi	40
Perawat	152
Perawat Gigi	27
Apoteker	28
Asisten Apoteker	41
Bidan	136

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
Nutrisionis	30
Sanitarian/ Kesling	20
Promkes	31
Perekam Medis	12
Tenaga Teknis Dan Jaringan	27
Adminkes	22
Entomologi	1
Epidemiologi	4
Pranata Labkes	44
Fisioterapi	6
Pranata SDM	1
Administrasi	43

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

SPM bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator, seluruh indikator telah tercapai 100% target yang ditentukan. Tingginya angka capaian ini tak lepas dari berbagai upaya dan strategi yang disusun untuk mencapai target setinggi- tingginya dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Tabel 4.12 Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih terdapat kendala pada aplikasi penginputan (saat ini masih terdapat 2 aplikasi input data yaitu SIPTM dan ASIK); 2. SDM / tenaga penginputan kurang, penanggungjawab program juga sebagai petugas skrining, petugas pelayanan di Poli/BP, memegang program kegiatan, dll; 3. Keterbatasan pengiriman jumlah Logistik BMHP IMS; dan 4. Produk import perlu waktu untuk persetujuan pengadaan non TKDN hingga tingkat kota; 5. Tidak semua ibu hamil periksa ke puskesmas dan faskes mitra puskesmas belum semua melaporkan hasil pelayanan ANC ke puskesmas; 6. Jumlah Baduta yang melakukan imunisasi lanjutan mengalami penurunan karena orangtua sudah enggan membawa anak imunisasi setelah anak berusia 9 bulan;	1. Sosialisasi PMK No.6 Tahun 2024 tentang SPM Kesehatan; 2. Membuat Tim Kerja sebagai penanggung jawab di Puskesmas sehingga tidak hanya 1 orang yang bertanggung jawab; Refreshing terhadap petugas mengenai alur dan tatacara penginputan aplikasi SIHA. 3. Melakukan usulan penambahan pengadaan logistik BMHP IMS; 4. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan terkait pengadaan non TKDN; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala ke puskesmas dan faskes mitra puskesmas; siswa dan lembaga pendidikan Islam; 6. Melakukan koordinasi dengan RS ataupun praktek dokter Spesialis Anak untuk meningkatkan pelaporan;

PERMASALAHAN	SOLUSI
7. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan skrining SPM.	7. Meningkatkan upaya promotif terkait pentingnya skrining pemeriksaan kesehatan;

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan pekerjaan umum terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.13 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100%

4.3.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1684	1684	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
	JARINGAN PERPIPAAN					
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	350	350	0	100.00 %
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	350	350	0	100.00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	71	71	0	100.00 %
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	71	71	0	100.00 %
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1600	1600	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	400	400	0	100.00 %
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	400	400	0	100.00 %
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum dibagi menjadi 2 (dua) program yaitu program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diampu oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, dan program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah (SPAL). Alokasi anggaran tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. 15 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BALIKPAPAN	4,216,527,031,827
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	1,054,587,254,712

NO	PENDANAAN	PAGU
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	14,980,691,100
	APBD	14,980,691,100
	A. APBD MURNI	14,980,691,100

Tabel 4.16 Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Pekerjaan Umum

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN			**14,980,691,100**	**13,150,127,428**	**87.78 %**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**8,457,689,000**	**7,912,210,271**	**93.55 %**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			**8,457,689,000**	**7,912,210,271**	**93.55 %**
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	742,027,000	724,201,500	97.60 %
	2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	7,715,662,000	7,188,008,771	93.16 %
	JUMLAH INDIKATOR			**8,457,689,000**	**7,912,210,271**	**93.55 %**
	JUMLAH PROGRAM			**8,457,689,000**	**7,912,210,271**	**93.55 %**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**6,523,002,100**	**5,237,917,157**	**80.30 %**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			**6,523,002,100**	**5,237,917,157**	**80.30 %**
	1	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	100,000,000	94,284,500	94.28 %

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	4,112,500,600	3,141,538,219	76.39 %
	3	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	845,445,000	647,192,041	76.55 %
	4	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	415,940,000	322,089,000	77.44 %
	5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1,049,116,500	1,032,813,397	98.45 %
	JUMLAH INDIKATOR			**6,523,002,100**	**5,237,917,157**	**80.30 %**
	JUMLAH PROGRAM			**6,523,002,100**	**5,237,917,157**	**80.30 %**

4.3.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2024 pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	STRATA 3	-
2	STRATA 2	1
3	STRATA 1/ DIPLOMA IV	7
4	DIPLOMA III	-
5	DIPLOMA II	-

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
6	DIPLOMA I	-
7	SMA/MA/SMK	3
8	SMP/MTS	-
9	SD/MI	-

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM tahun 2024 pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Penambahan Jumlah penduduk di Kota Balikpapan akibat Pembangunan Kilat dan Pembangunan IKN sangat masip dan menjadi permasalahan klasik Kota Besar dalam Pengumpulan Data Jumlah Penduduk berdasarkan Rumah Tangga; 2. Menghitung Jumlah Rumah Tangga dengan dasar Jumlah Kartu Keluarga dari Disdukcapil Kota Balikpapan tidak dapat menggambarkan kondisi Rumah Tangga yang sesungguhnya, karena masih ada 1 Rumah Tangga dihuni lebih dari 1 Kartu Keluarga, bahkan ada yang dalam 1 Rumah Tangga memilki 4 sampai 5 Kartu Kelurga; 3. Pelanggan Air Minum yang tidak dapat diakses oleh PTMB (PDAM) untuk Data BNBA, karena ada saja Pelanggan yang memilki 2/lebih Rumah, sebagai contoh Pak Andi memilki Rumah di Kecamatan A Kelurahan A.2 dan di Kecamatan C Kelurahan C.1, sehingga data yang terdaftar di PTMB adalah Pak Andi memililki SR 2 di Kecamatan A Kelurahan A.2 (Rumah yang terdaftar di PTMB), sehingga Data BNBA Rumah Pak Andi di Kecamatan C Kelurahan C.1 tidak terdaftar; 4. Penganggaran perlu adanya dukungan dari APBN dan sumber-sumber Pendanaan Lainnyanya; 5. Keterbatasan Air Baku sehingga tidak tersedia Idle Capacity di Kota Balikpapan yang diakibatkan Kemarau Panjang, sehingga debit Air di Waduk Manggar dan Waduk Teritip sebagai Sumber Utama Air Bersih juga ikut turun, selain itu Ijin pengambilan Air Baku juga harus sesuai dengan ijin dari BWS	1. Mencari Sumber Air Baku dan/atau Air Bersih lainnya 2. Perlu melakukan survey kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Balikpapan 3. Perlu melakukan survey kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, baik pertambahan karena pernikahan, pertambahan pendatang baru, dan lain sebagainya. PTMB segera melakukan verifikasi ulang terhadap pelanggan sesuai dengan data eksisting dilapangan 4. Pengajuan melalui Dana DAK, KPBU, Bankeu, dan Sumber Dana lainnya, Penggunaan Dana dibawah Pagu Dana akibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa sudah menjadi ketentuan Pemerintah; 5. Perlu Teknologi baru terutama dalam pengelolaan Air Limbah, Perlu pendekatan dari berbagai sektor dan lapisan Masyarakat yang mendukung terlaksananya kegiatan Standar Pelayan Minimal dan Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2024 pada urusan perumahan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100 %
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	100 %
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100 %
	Subsidi Uang Sewa	100 %
	Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %

4.4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100 %	100 %

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 %	100 %
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100 %	100 %
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	100 %	100 %
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100 %	100 %
	Subsidi Uang Sewa	100 %	100 %
	Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %	100 %

Pelaksanaan Urusan SPM Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2024:

a. Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-360/2024 Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara, serta pergerakan tanah/longsor di Rukun Tetangga 26 kelurahan Gunung Sari Ulu, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Mekar Sari, Rukun Tetangga 14 Kelurahan Sumber Rejo, Rukun Tetangga 02 dan Rukun Tetangga 13 Kelurahan Karang Rejo, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Rukun Tetangga 01 dan Rukun Tetangga 06 Kelurahan Telaga Sari, Rukun Tetangga 09 dan Rukun Tetangga 14 Kelurahan Prapatan, Rukun Tetangga 39 Kelurahan Sepinggan, Rukun Tetangga 31 Kelurahan Muara Rapak, Rukun Tetangga 03 Kelurahan Gunung Samarinda, dan Rukun Tetangga 44 Kelurahan Graha Indah.
b. Pelaksanaan Kegiatan Updating Verifikasi data penerimaan rumah korban bencana alam Tahun 2024 oleh perangkat daerah Pengampu SPM Perumahan.
c. Hingga Akhir pelaksanaan Tahun Anggaran, dari hasil tahapan proses pelaksanaan SPM perumahan Tahun 2024 belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025
d. Untuk pelaksanaan SPM Perumahan dikarenakan Program Pemerintah, Pemerintah Kota Balikpapan belum melaksanakan lebih lanjut dikarenakan belum adanya Program yang berpotensi untuk dilaksanakannya Relokasi. Sesuai

dengan Aplikasi SPM terkait dengan jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat tidak terdapat kejadian bencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Bencana oleh Walikota/Gubernur, sehingga untuk tahun 2024 capaian SPM nya menjadi 100% pada jenis layanan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada urusan perumahan rakyat di Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BALIKPAPAN	4,216,527,031,827
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	45,659,017,450
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,813,820,000
	APBD	1,813,820,000
	A. APBD MURNI	1,813,820,000

Tabel 4.22 Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				**1,813,820,000**	**488,172,776**	**26.91 %**
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**1,578,820,000**	**388,161,297**	**24.59 %**
	1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340**			**225,000,000**	**197,175,476**	**87.63 %**
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	**0%**
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	**0%**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	**0%**
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	75,000,000	60,906,930	**81.21 %**
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	**0%**
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	**0%**
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	**0%**
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	**0%**
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	88,418,236	**88.42 %**
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	50,000,000	47,850,310	**95.70 %**
	JUMLAH INDIKATOR				**225,000,000**	**197,175,476**	**87.63 %**
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			**1,353,820,000**	**190,985,821**	**14.11 %**
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1,000,000,000	63,192,311	**6.32 %**
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	**0%**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	**0%**
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	**0%**
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	**0%**
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	**0%**
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	100,000,000	21,447,600	**21.45 %**
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	**0%**
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	253,820,000	106,345,910	**41.90 %**
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	**0%**
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	**0%**
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	**0%**
	JUMLAH INDIKATOR				**1,353,820,000**	**190,985,821**	**14.11 %**
	JUMLAH PROGRAM				**1,578,820,000**	**388,161,297**	**24.59 %**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**						
		1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		**100,000,000**	**96,761,479**	**96.76 %**
		2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		**75,000,000**	**0**	**0%**
		3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		**60,000,000**	**3,250,000**	**5.42 %**

4.4.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2024 pada urusan perumahan rakyat di Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	3
Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0
Penata Penyehatan Lingkungan Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	2
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
Staf	2
Total	**12**

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM tahun 2024 pada urusan perumahan rakyat sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Permasalahan dan Solusi SPM Perumahan Rakyat

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Belum sinkronisasi data kawasan rawan bencana antar Disperkim dan BPBD; 2. Belum ada lanjutan terkait hasil pendataan lahan-lahan potensial untuk relokasi korban bencana dan program pemerintah kota; 3. Belum terdapat perwali yang mengatur tentang besaran nilai untuk bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat; 4. Terdapat anggaran sisa dikarenakan belum ada penanganan untuk penerima bantuan; 5. Belum ada acuan besaran nilai untuk bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat; 6. Kurangnya koordinasi antar opd pengampu kegiatan SPM; 7. Hingga akhir pelaksanaan tahun anggaran, dari hasil tahapan proses pelaksanaan spm perumahan tahun 2024 belum diterbitkan sk penetapan penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada tahun anggaran 2025; 8. Dikarenakan program pemerintah, pemerintah kota balikpapan belum melaksanakan lebih lanjut dikarenakan belum adanya program yang berpotensi untuk dilaksanakannya relokasi; 9. Belum dilaksanakan penanaganan pemberian bantuan rehabilitasi rumah kepada korban bencana dikarenakan belum terdapat sk penetapan penerima bantuan. 10. Belum dilaksanakan relokasi rumahan di lokasi rawan bencana	1. Membuat review data identifikasi kawasan rawan bencana dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota; 2. Membuat feasibility study untuk penentuan lahan untuk relokasi korban bencana; 3. Membuat perwali dan sop terkait penanganan pemberian bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumahan akibat bencana; 4. Analsisi efisiensi anggaran; 5. Membuat acuan besaran nilai untuk bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat; 6. Meningkatkan koordinasi antar opd pengampu SPM; 7. SK penetapan penerima bantuan akan dikerjakan di tahun 2025; 8. Melakukan kegitan fs untuk dilaksanakan relokasi; 9. Dilaksanakan penanganan pemberian bantuan rehabilitasi rumah kepada korban bencana dikarenakan belum terdapat sk penetapan penerima bantuan di tahun 2025; dan 10. Membuat feasibility study untuk penentuan lahan untuk relokasi korban bencana

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP	100%
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	100%
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	100%
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100%
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100%
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100%
		Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sarana prasarana penanggulangan bencana	100%

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET
	Terhadap Bencana	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2894	2894	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	58	58	0	100.00 %
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	6	6	0	100.00 %
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	155	155	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00 %
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100500	100500	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	100.00 %
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	70000	70000	0	100.00 %
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	23500	23500	0	100.00 %
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	150	150	0	100.00 %
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Total Yang	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	300	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	20	20	**0**	**100.00 %**
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	300	300	**0**	**100.00 %**
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	
			Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
		Orang	1700	1700	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	2	2	0	100.00 %
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1700	1700	0	100.00 %
3	Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	0	100.00 %
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	1	1	0	100.00 %
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	12	12	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	250	250	0	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	50	50	0	100,00%
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	12	12	0	100.00 %
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	332	332	0	100.00 %
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	250	250	0	100.00 %
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	50	50	0	100.00 %
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	15	15	**0**	**100.00 %**

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.27 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BALIKPAPAN	4,216,527,031,827
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	142,702,787,603
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	30,010,690,600
	APBD	30,010,690,600
	A. APBD MURNI	30,010,690,600

Tabel 4.28 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				**21,807,170,900**	**20,740,465,112**	**95.11 %**
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				**10,067,170,900**	**9,584,086,682**	**95.20 %**
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8,929,552,800	8,471,863,558	94.87 %
		1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	3,101,859,400	3,076,902,448	99.20 %
		2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	261,949,000	244,540,088	93.35 %
		3	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	698,664,000	640,283,328	91.64 %
		4	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	4,867,080,400	4,510,137,694	92.67 %
	JUMLAH INDIKATOR				8,929,552,800	8,471,863,558	94.87 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			1,112,040,500	1,086,757,224	97.73 %
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	163,397,800	160,469,700	98.21 %
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	267,345,300	261,421,700	97.78 %
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	681,297,400	664,865,824	97.59 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,112,040,500	1,086,757,224	97.73 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			25,577,600	25,465,900	99.56 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	25,577,600	25,465,900	99.56 %
	JUMLAH INDIKATOR				25,577,600	25,465,900	99.56 %
	JUMLAH PROGRAM				10,067,170,900	9,584,086,682	95.20 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,915,000,000	1,872,751,138	97.79 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			100,000,000	95,422,220	95.42 %
		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	100,000,000	95,422,220	95.42 %
	JUMLAH INDIKATOR				100,000,000	95,422,220	95.42 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			650,000,000	629,543,200	96.85 %
		1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	178,000,000	174,213,200	97.87 %
		2	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	200,000,000	186,591,000	93.30 %
		3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	272,000,000	268,739,000	98.80 %
	JUMLAH INDIKATOR				650,000,000	629,543,200	96.85 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			300,000,000	296,914,900	98.97 %
		1	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	100,000,000	98,724,900	98.72 %
		2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	200,000,000	198,190,000	99.10 %
	JUMLAH INDIKATOR				300,000,000	296,914,900	98.97 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			865,000,000	850,870,818	98.37 %
		1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	865,000,000	850,870,818	98.37 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				865,000,000	850,870,818	98.37 %
	JUMLAH PROGRAM				1,915,000,000	1,872,751,138	97.79 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				9,825,000,000	9,283,627,292	94.49 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			6,966,130,000	6,541,860,622	93.91 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,000,000,000	4,591,625,722	91.83 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	566,130,000	565,364,900	99.86 %
		3	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	200,000,000	200,000,000	100.00 %
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1,200,000,000	1,184,870,000	98.74 %
	JUMLAH INDIKATOR				6,966,130,000	6,541,860,622	93.91 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			450,000,000	443,261,500	98.50 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	200,000,000	196,959,000	98.48 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	250,000,000	246,302,500	98.52 %
	JUMLAH INDIKATOR				450,000,000	443,261,500	98.50 %
	10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			1,400,000,000	1,296,482,130	92.61 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	300,000,000	287,647,300	95.88 %
		2	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	1,100,000,000	1,008,834,830	91.71 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				1,400,000,000	1,296,482,130	92.61 %
	11	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			1,008,870,000	1,002,023,040	99.32 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	83,870,000	82,853,040	98.79 %
		2	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	925,000,000	919,170,000	99.37 %
	JUMLAH INDIKATOR				**1,008,870,000**	**1,002,023,040**	**99.32 %**
	JUMLAH PROGRAM				**9,825,000,000**	**9,283,627,292**	**94.49**

4.5.5 Dukungan Personil

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2024 sejumlah pegawai 272 yang terdiri dari 125 Pegawai Negeri Sipil, Non PNS 15 Orang.

Tabel 4.29 Dukungan Personil Bidang Sub Urusan Trantibum

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1. Kepala Dinas	1
2. Sekretaris	1
3. Kepala Bidang	3
4. Kepala Seksi	5
5. Kepala Sub Bagian	2
6. PNS (Non JFT)	20
7. PNS (JFT)	125
8. NON PNS	115
Total	**272**

Untuk pencapaian SPM, BPBD Kota Balikpapan didukung oleh personil

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.30 Dukungan Personil BPBD

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1. Kepala Dinas	1
2. Sekretaris	1
3. Kepala Bidang	3
4. Kepala Seksi	6
5. Kepala Sub Bagian	3
6. Kepala UPTD	6
7. Kepala Sub Bagian TU UPTD	6
8. Staf	132
9. Pejabat Fungsional	0
10. Naban	135
Total	**293**

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya memenuhi target SPM di tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.31 Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih kurang minatnya warga untuk datang ke tempat pelatihan dan simulasi kebencanaan; 2. Kegiatan dan pencegahan dan kesiapsiagaan yang non anggaran tidak ikut dilaporkan padahal ini mampu mendongkrak jumlah kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan; 3. Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan kapasitas dan kualitas personil lapangan; dan 4. Respon time dalam penanganan kebakaran harus selalu ditingkatkan	1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat, 2. Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat; 3. Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah; dan 4. Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan

4.5 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2024 pada urusan sosial sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%

4.6.3 Realisasi

Realisasi dalam pelaksanaan SPM tahun 2024 pada urusan sosial di Pemerintah Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4. 33 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					98.34 %
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	185	185	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	80	80	0	100.00 %
2	Penyediaan permakanan	Orang	185	185	0	100.00 %
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	3	3	0	100.00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	3	3	0	100.00 %
5	Penyediaan alat bantu	Orang	50	50	0	100.00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100.00 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	185	185	0	100.00 %
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	30	30	0	100.00 %
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100.00 %
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	80	80	0	100.00 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	5	5	0	100.00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	280	280	**0**	**100.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	40	40	**0**	**100.00 %**
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
3	Penyediaan permakanan	Orang	280	280	**0**	**100.00 %**
4	Penyediaan sandang	Orang	3	3	**0**	**100.00 %**
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3	3	**0**	**100.00 %**
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	280	280	**0**	**100.00 %**
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	20	20	**0**	**100.00 %**
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	**0**	**100.00 %**
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
12	Layanan rujukan(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	110	110	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	**0**	**100.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	**0**	**100.00 %**
3	Penyediaan permakanan	Orang	110	110	**0**	**100.00 %**
4	Penyediaan sandang	Orang	14	14	**0**	**100.00 %**
5	Penyediaan alat bantu	Orang	16	16	**0**	**100.00 %**
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	14	14	**0**	**100.00 %**
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	110	110	**0**	**100.00 %**
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	20	20	**0**	**100.00 %**
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	**0**	**100.00 %**
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar **(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)**	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga**(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)**	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	**0**	**100.00 %**
13	Layanan rujukan **(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)**	Orang	5	5	**0**	**100.00 %**
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25	25	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	25	25	0	100.00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100.00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	5	0	100.00 %
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5	5	0	100.00 %
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	0	100.00 %
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	3	3	0	100.00 %
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					91.68 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	**74.30 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6119	5683	**436**	**92.87 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**17.38 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	86.90 %
1	Penyediaan permakanan	Orang	6119	5683	436	92.87 %
2	Penyediaan sandang	Orang	407	355	52	87.22 %
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	57	31	26	54.39 %
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	50	0	100.00 %
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	7	7	0	100.0

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada bidang urusan sosial sebagai berikut:

Tabel 4. 34 Alokasi Anggaran SOM Urusan Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BALIKPAPAN	4,216,527,031,827
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	18,828,237,687
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,545,852,590
	APBD	2,545,852,590
	A. APBD MURNI	2,545,852,590

Tabel 4.35 Rincian Anggaran dan Rralisasi SPM urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				**2,545,852,590**	**2,072,957,229**	**81.42 %**
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**2,545,852,590**	**2,072,957,229**	**81.42 %**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**2,103,737,266**	**1,667,771,229**	**79.28 %**
		1	Penyediaan permakanan	Orang	1,578,495,900	1,177,580,600	74.60 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	54,998,566	50,844,400	92.45 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	350,242,800	337,167,171	96.27 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20,000,000	12,485,500	62.43 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	80,000,000	73,077,858	91.35 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	20,000,000	16,615,700	83.08 %
	JUMLAH INDIKATOR				**2,103,737,266**	**1,667,771,229**	**79.28 %**
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153**			**442,115,324**	**405,186,000**	**91.65 %**
		1	Penyediaan makanan	Orang	187,425,000	155,790,000	83.12 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	149,691,000	147,691,000	98.66 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	54,999,700	53,345,000	96.99 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	24,999,624	23,800,000	95.20 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	25,000,000	24,560,000	98.24 %
	JUMLAH INDIKATOR				**442,115,324**	**405,186,000**	**91.65 %**
	JUMLAH PROGRAM				**2,545,852,590**	**2,072,957,229**	**81.42**

4.6.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2024 pada bidang urusan sosial sebagai berikut:

Tabel 4. 36 Dukungan Personil SPM Urusan Sosial

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3
Kepala Sub Bagian	2
Staf	8
Pejabat Fungsional	14
Naban	6
Total	**35**

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya memenuhi target SPM di tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 37 Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Belum tersedianya aplikasi pengolah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Data bersifat insidentil/perkiraan dari trend tahun-tahun sebelumnya sehingga kesulitan untuk menyusun rencana kebutuhan 3. Beberapa standar teknis yang diatur dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 4. Penyusunan rencana kebutuhan terbatas pada alokasi anggaran dan penyediaan sub kegiatan (beberapa sub kegiatan terkait SPM tidak dialokasikan dalam DPA karena belum ada tertuang dalam renja), sehingga alokasi anggaran tidak sesuai dengan nomenklatur (misalnya alokasi penyediaan perbekalan kesehatan dialokasikan ke sub kegiatan alokasi penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, idealnya dialokasikan khusus di sub kegiatan penyediaan perbekalan kesehatan) 5. Kewenangan Kabupaten/Kota hanya mendirikan rumah singgah yang memiliki standar pelayanan maksimal selama 7 (tujuh) hari sedangkan dalam pelaksanaannya ada beberapa PPKS tinggal bertahun-tahun di Rumah Singgah karena PPKS tidak dapat direunifikasi ke keluarga/dirujuk ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan SPM masih belum maksimal, seperti petugas rumah singgah, pekerja sosial, psikolog	1. Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam mengembangkan aplikasi pengelola data PPKS 2. Melakukan pendataan secara berkala melalui mitra Dinas Sosial dan pekerja sosial 3. Menyesuaikan standar yang ada dengan kebutuhan, beberapa komponen biaya dalam Standar Teknis Pelayanan Dasar tidak dianggarkan dikarenakan tidak sesuai kebutuhan 4. Menyusun renja pada tahun berikutnya sesuai nomenklatur 5. PPKS yang mendapatkan pelayanan selama bertahun-tahun di Rumah Singgah ditetapkan sebagai target penerapan SPM dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi maupun Kemensos sebagai tempat layanan rujukan 6. Mengadvokasi kebutuhan penambahan SDM (analisis beban kerja) ke stakeholder, dan melakukan penambahan sumber daya manusia khususnya caregiver di Rumah Singgah

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dalam rangka wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang akan dipublikasikan secara luas melalui *website* Pemerintah Kota Balikpapan, selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan menginputan Sistem Informasi Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) Tahun 2024 Kota Balikpapan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Terima kasih.

Balikpapan Kota Beriman (Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela (Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Doa).

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-176/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-115/2024 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH, RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan personel tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-115/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-115/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-115/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-176/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-115/2024 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH, RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH, RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PEMBINA:		
1.	Wali Kota Balikpapan	Penanggung Jawab 1
2.	Wakil Wali Kota Balikpapan	Penanggung Jawab 2
B. TIM PENYUSUN KOTA:		
1	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan	Ketua
2	Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Wakil Ketua I
3	Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan	Wakil Ketua II
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Sekretaris
5	Kepala BKAD Kota Balikpapan	Anggota
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
7	Unsur Analis Kebijakan dan Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
C. TIM PENYUSUN PERANGKAT DAERAH:		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Disdikbud Kota Balikpapan	Anggota
2	Kepala Dinkes Kota Balikpapan	Anggota
3	Kepala DPU Kota Balikpapan	Anggota
4	Kepala Disperkim Kota Balikpapan	Anggota
5	Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan	Anggota
6	Kepala Satpol PP Kota Balikpapan	Anggota
7	Kepala Dinsos Kota Balikpapan	Anggota
8	Kepala Disnaker Kota Balikpapan	Anggota
9	Kepala DP3AKB Kota Balikpapan	Anggota
10	Kepala DPPR Kota Balikpapan	Anggota
11	Kepala DLH Kota Balikpapan	Anggota
12	Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan	Anggota
13	Kepala Dishub Kota Balikpapan	Anggota
14	Kepala Diskominfo Kota Balikpapan	Anggota

15	Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan	Anggota
16	Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan	Anggota
17	Kepala Dispustakar Kota Balikpapan	Anggota
18	Kepala DPOP Kota Balikpapan	Anggota
19	Kepala DP3 Kota Balikpapan	Anggota
20	Kepala Disdag Kota Balikpapan	Anggota
21	Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan	Anggota
22	Kepala BKPSDM Kota Balikpapan	Anggota
23	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
24	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
25	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
26	Kepala Bagian Kerja sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
27	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
D. TIM REVIU:		
NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektorat Kota Balikpapan	Verifikator

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Balikpapan Kota Beriman
(Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)
Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela (Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Doa)

TAHUN 2024